

Peraturan Daerah
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

tentang

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD)**

KABUPATEN SERUYAN



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan**
Kabupaten Seruyan

2025
2045



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan daerah selanjutnya disingkat perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan adalah badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional untuk periode selama tahun 2025-2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi Kalimantan Tengah untuk periode selama tahun 2025-2045.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Seruyan untuk periode selama tahun 2025-2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.
15. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rencana umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Arah Kebijakan RPJPD adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi.
18. Sasaran Pokok RPJPD adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
20. Permasalahan pembangunan dalam RPJPD adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu strategis dalam RPJPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJPD adalah menjabarkan dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD, yaitu:
 - a. menetapkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2045 mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, integralitas dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional;
 - d. menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada pemilihan kepala daerah.
- (3) RPJPD menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) RPJPD diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi.

BAB II RPJPD

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu dimulai pada Tahun 2025 dan berakhir Tahun 2045.

Pasal 4

- (1) Visi yang diusung dalam pembangunan daerah 2025-2045 adalah "Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

- (2) Berdasarkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi pembangunan daerah 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:
- a. mewujudkan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas intra dan antar wilayah;
 - b. meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar;
 - c. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas;
 - d. mewujudkan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, serta terwujudnya supremasi hukum;
 - f. meningkatkan daya saing dan ketahanan daerah;
 - g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Pasal 5

RPJPD memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah, RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Pasal 6

- (1) Sistematika Penyusunan RPJPD disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	: PENUTUP

- (2) Sistematika penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

- (1) Target indikator yang terdapat dalam RPJPD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target indikator yang terjadi pada setiap periode tahun pelaksanaan RPJPD disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RPJMD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RPJPD setiap lima tahun pada periode masa jabatan Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJPD dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan dan/atau perubahan RPJMD.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian sasaran menengah tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, penetapan perubahan RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

- (1) Masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 dimulai Tahun 2025.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

**BAB VI
PENUTUP****Pasal 13**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,



DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 69

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ...09..., ...52.../ 2024**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu, di samping itu pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensi yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, spasial, serta berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/ kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 11 Ayat (2) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan 2025-2045 ini dapat terselesaikan. Penyusunan RPJPD ini merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini memiliki maksud yaitu untuk melakukan kegiatan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif serta sistematis yang dimulai dari menganalisis gambaran umum kondisi daerah, menganalisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana publik, identifikasi isu dan permasalahan daerah, perumusan visi dan misi Kabupaten Seruyan 2025-2045, hingga penentuan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penjabat Bupati Kabupaten Seruyan Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan beserta seluruh staf yang ada atas kesempatan, kepercayaan, dan kerjasama yang baik dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, beserta masyarakat Kabupaten Seruyan yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai kerangka dasar dan acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan. Besar harapan kami adanya kritik dan saran yang dapat membuat dokumen ini menjadi lebih baik kedepannya.

Kuala Pembuang, Agustus 2024

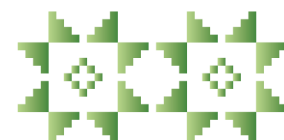
Tim Penyusun





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	9
1.5. Sistematika Penyusunan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	14
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	14
2.1.1. Geografi	14
2.1.2. Demografi.....	57
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	66
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	66
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	75
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	86
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	86
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	95
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	106
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	109
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	117
2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.....	117
2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	143
2.4.3. Layanan Urusan Pilihan	168
2.4.4. Penunjang Urusan.....	176
2.4.5. Indeks Pelayanan Publik	186
2.4.6. Indeks Inovasi Daerah.....	187
2.4.7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	188
2.5. Refleksi Pembangunan.....	188
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan	188
2.5.2. Evaluasi Misi	190
2.5.3. Evaluasi Per Periode RPJMD.....	194
2.5.4. Faktor Pendorong dan Penghambat.....	210



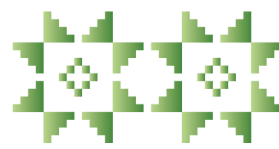
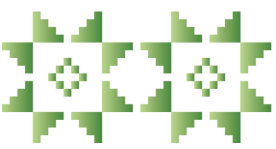


2.5.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	212
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	214
2.6.1. Kependudukan	215
2.6.2. Kebutuhan Infrastruktur Dasar Wilayah.....	224
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	229
2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis ...	229
2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RJPN 2025-2045	241
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	248
3.1. Permasalahan Umum Pembangunan Daerah.....	248
3.2. Isu Strategis.....	275
3.2.1. Isu Strategis Internasional	275
3.2.2. Isu Nasional	279
3.2.3. Isu Regional Provinsi Kalimantan Tengah.....	283
3.2.4. Isu Regional Kabupaten Seruyan	285
3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Seruyan	290
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	296
4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045	296
4.1.1. Telaah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	296
4.1.2. Telaah Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045	298
4.1.3. Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045	299
4.2. Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045	304
4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	306
4.3.1. Telaah Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	306
4.3.2. Telaah Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah 307	
4.3.3. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045	308
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	316
5.1. Arah Kebijakan	316
5.2. Sasaran Pokok	324
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah.....	324
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi	326
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan	331
BAB VI PENUTUP	364
6.1. Kaidah Pelaksanaan	364
6.2. Kaidah Pembiayaan Pembangunan.....	365





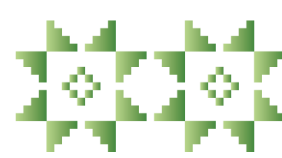
6.3.	Skema Pemantauan, Peninjauan Kembali, dan Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045.....	366
------	---	-----





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan	15
Tabel 2.2. Rencana Peruntukan Lahan Kabupaten Seruyan	23
Tabel 2.3. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Seruyan	25
Tabel 2.4. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Seruyan	29
Tabel 2.5. Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2023	29
Tabel 2.6. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	30
Tabel 2.7. Hasil Komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2023	31
Tabel 2.8. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan yang Sudah Beroperasi Tahun 2023	32
Tabel 2.9. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan yang Belum Beroperasi Tahun 2023	33
Tabel 2.10. Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Seruyan Tahun 2023	33
Tabel 2.11. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO dan PKO) Non-Kebun di Kabupaten Seruyan Tahun 2023	34
Tabel 2.12. Rekapitulasi Perkembangan Kebun Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Tahun 2023	34
Tabel 2.13. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 2021-2023	36
Tabel 2.14. Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Air Payau (Tambak)	37
Tabel 2.15. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2023	38
Tabel 2.16. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2023	38
Tabel 2.17. Produksi Pengolahan Hasil perikanan Tahun 2023	40
Tabel 2.18. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	45
Tabel 2.19. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	46
Tabel 2.20. Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan	46
Tabel 2.21. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022	49
Tabel 2.22. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	50
Tabel 2.23. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	52
Tabel 2.24. Perubahan Kategori, Indeks, dan Ranking Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023	53
Tabel 2.25. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2023	58





Tabel 2.26. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020.....	59
Tabel 2.27. Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2023	60
Tabel 2.28. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020.....	60
Tabel 2.29. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023	62
Tabel 2.30. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020	62
Tabel 2.31. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seruyan Tahun 2023	63
Tabel 2.32. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> per Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022*	64
Tabel 2.33. Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022, dan 2023	87
Tabel 2.34. Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2023, dan 2023	88
Tabel 2.35. Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022, dan 2023	90
Tabel 2.36. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan.....	111
Tabel 2.37. Partisipasi Perempuan dalam DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	111
Tabel 2.38. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	113
Tabel 2.39. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	113
Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 ..	125
Tabel 2.41. Status Gizi Balita di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	128
Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023...	131
Tabel 2.43. Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	134
Tabel 2.44. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2023	135
Tabel 2.45. Ketersediaan dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2023.....	135
Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	135
Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	138
Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	140





Tabel 2.49. Jumlah LKSA dan PMKS di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	142
Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	142
Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	144
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	146
Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	147
Tabel 2.54. Usulan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH Kabupaten Seruyan Tahun 2024	149
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 .	149
Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	150
Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	153
Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	154
Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	155
Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	157
Tabel 2.61. Sebaran Wilayah <i>Blankspot</i> di Kabupaten Seruyan	158
Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	159
Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	160
Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	162
Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	163
Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	164
Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023..	164
Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	165
Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	166
Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023....	167
Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 ...	168
Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	170
Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 ..	171





Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	171
Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	172
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	172
Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	174
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	175
Tabel 2.79. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	176
Tabel 2.80. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	177
Tabel 2.81. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	180
Tabel 2.82. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 ...	181
Tabel 2.83. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	182
Tabel 2.84. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	184
Tabel 2.85. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	185
Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	186
Tabel 2.87. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2022	187
Tabel 2.88. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023	188
Tabel 2.89. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025	189
Tabel 2.90. Capaian Indikator Sasaran Pokok 1.1	190
Tabel 2.91. Capaian Sasaran Pokok 2.1	191
Tabel 2.92. Capaian Indikator Sasaran Pokok 3.1	192
Tabel 2.93. Nilai Komponen Penyusun Indeks Aksesibilitas	192
Tabel 2.94. Capaian Indikator Sasaran Pokok 4.1	192
Tabel 2.95. Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021-2022	193
Tabel 2.96. Capaian Indikator Sasaran Pokok 5.1	194
Tabel 2.97. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025	197





Tabel 2.98. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Ketercapaian Sasaran RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025	210
Tabel 2.99. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	215
Tabel 2.100. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 .	217
Tabel 2.101. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	218
Tabel 2.102. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.....	219
Tabel 2.103. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2045	221
Tabel 2.104. Proyeksi Kebutuhan Jumlah Rumah di Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	224
Tabel 2.105. Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah Tahun 2025-2045	225
Tabel 2.106. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045	225
Tabel 2.107. Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045.....	226
Tabel 2.108. Proyeksi Timbunan Sampah Tahun 2025-2045	226
Tabel 2.109. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan Tahun 2025-2045	227
Tabel 2.110. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045	228
Tabel 2.111. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045	229
Tabel 2.112. Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	230
Tabel 2.113. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah Kabupaten Seruyan.....	231
Tabel 2.114. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Seruyan	234
Tabel 2.115. Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan.....	239
Tabel 2.116. Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan.....	241
Tabel 2.117. Arah Kebijakan Transformasi Sosial di Wilayah Kalimantan	242
Tabel 2.118. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi di Wilayah Kalimantan	243
Tabel 2.119. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola di Wilayah Kalimantan	244
Tabel 2.120. Landasan Transformasi di Wilayah Kalimantan	245
Tabel 2.121. Landasan Transformasi di Wilayah Kalimantan	246
Tabel 3.1. Isu Strategis Nasional	280
Tabel 3.2. Daftar Panjang (<i>Long List</i>) Penjaringan Isu Pembangunan di Kabupaten Seruyan	288
Tabel 3.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Seruyan	290
Tabel 4.1. Sasaran Visi Daerah Kabupaten Seruyan.....	304
Tabel 4.2. Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045	305





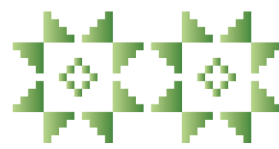
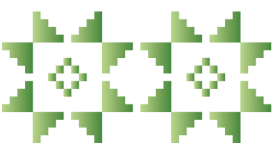
Tabel 4.3. Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.....	314
Tabel 5.1. Arah Kebijakan	322
Tabel 5.2. Pentahapan Implementasi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045	324
Tabel 5.3. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.....	325
Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Seruyan	326
Tabel 5.5. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Seruyan	332
Tabel 5.6. Periodisasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Seruyan	336
Tabel 5.7. Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.....	358
Tabel 6.1. Skema Pelaksanaan Pemantauan, Peninjauan Kembali, dan Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045	367





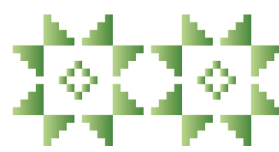
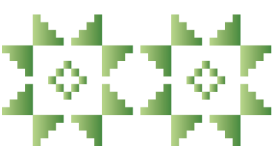
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran.....	7
Gambar 1.2. Kaitan antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah.....	8
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Seruyan	17
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Seruyan.....	20
Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Seruyan	22
Gambar 2.4. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2022 ...	44
Gambar 2.5. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2023 ...	45
Gambar 2.6. Sebaran Pusat Kegiatan dan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan	48
Gambar 2.7. Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Energi (IKE) Nasional Tahun 2014-2023.....	54
Gambar 2.8. Perkembangan Nilai PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (Juta Rupiah) Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023	55
Gambar 2.9. Produksi dan Distribusi Air Minum oleh Perusahaan Air Minum (m ³) di Kabupaten Seruyan	57
Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2010	65
Gambar 2.11. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2020	65
Gambar 2.12. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023	66
Gambar 2.13. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2023	67
Gambar 2.14. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023	69
Gambar 2.15. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pertani (NTP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023	70
Gambar 2.16. Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2023	72
Gambar 2.17. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2023	73
Gambar 2.18. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023	75
Gambar 2.19. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023	76
Gambar 2.20. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022.....	77
Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023.....	78





Gambar 2.22. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	79
Gambar 2.23. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023	81
Gambar 2.24. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023	82
Gambar 2.25. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	83
Gambar 2.26. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2022.....	84
Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	85
Gambar 2.28. Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	86
Gambar 2.29. Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023.....	89
Gambar 2.30. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Seruyan	91
Gambar 2.31. Grafik Nilai Pilar dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2021	93
Gambar 2.32. Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	94
Gambar 2.33. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	95
Gambar 2.34. Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023.....	96
Gambar 2.35. Grafik Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	97
Gambar 2.36. Grafik Indeks Literasi/Numerasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023.....	98
Gambar 2.37. Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023.....	99
Gambar 2.38. Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023.....	100
Gambar 2.39. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	101
Gambar 2.40. Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022.....	102
Gambar 2.41. Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023.....	103
Gambar 2.42. Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	104



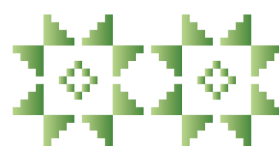
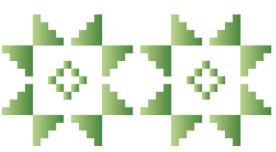


Gambar 2.43. Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2023	105
Gambar 2.44. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	105
Gambar 2.45. Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	106
Gambar 2.46. Grafik Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	107
Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Berakses Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	108
Gambar 2.48. Grafik Rasio Elektrifikasi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	109
Gambar 2.49. Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023	110
Gambar 2.50. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2019-2023	112
Gambar 2.51. Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	114
Gambar 2.52. Grafik Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023.....	116
Gambar 2.53. Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	117
Gambar 2.54. Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2023.....	118
Gambar 2.55. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	120
Gambar 2.56. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	121
Gambar 2.57. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	122
Gambar 2.58. Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	123
Gambar 2.59. Grafik Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	124
Gambar 2.60. Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	125
Gambar 2.61. Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	127
Gambar 2.62. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.....	129
Gambar 2.63. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	130
Gambar 2.64. Grafik Perkembangan Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	138





Gambar 2.65. Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	145
Gambar 2.66. Grafik Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2018-2023.....	169
Gambar 2.67. Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045.....	216
Gambar 2.68. Grafik Perkembangan Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045.....	217
Gambar 2.69. Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Seruyan.....	218
Gambar 2.70. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun).....	222
Gambar 2.71. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ...	223
Gambar 2.72. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah	231
Gambar 2.73. Pembagian Zona dan Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ..	233
Gambar 2.74. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seruyan	238
Gambar 2.75. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan	240
Gambar 3.1. Isu-Isu Strategis Internasional.....	279
Gambar 4.1. Kerangka Implementasi Transformasi RPJPN 2025-2045	298
Gambar 4.2. Proses <i>Cascading</i> dan Konsideran-Konsideran Visi Kabupaten Seruyan.....	299
Gambar 4.3. Ilustrasi Posisi Strategis Kabupaten Seruyan.....	301
Gambar 4.4. Gambaran Pengintegrasian Visi Daerah ke dalam Visi Provinsi dan Nasional	304
Gambar 4.5. Delapan Agenda Pembangunan Jangka Panjang Nasional	307
Gambar 4.6. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045	314





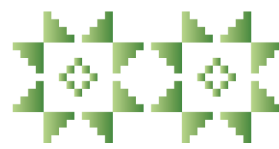
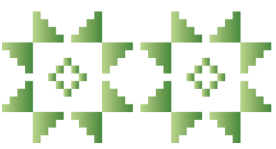
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia dalam UUD 1945 diantaranya mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warga negaranya. Upaya tersebut telah dilakukan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola pemerintahan secara penuh sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Dalam operasionalnya pembangunan daerah harus sejalan dengan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun



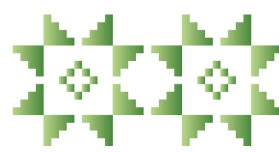
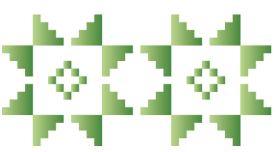


berdasarkan atas analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi hal yang urgen mengingat akan segera berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode sebelumnya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, diinstruksikan bahwa Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas dan menyusun RPJPD Kabupaten/Kota yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota yang berlaku, yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran yang diusung dalam pembangunan jangka panjang nasional adalah Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan pada tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang tentunya akan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai dengan peran dan wewenangnya dengan melalui pemanfaatan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Selain kontribusi dari berbagai pihak, paradigma baru pembangunan juga dipandang perlu untuk mencapai sasaran tersebut yakni melalui transformasi secara menyeluruh. Transformasi menyeluruh tersebut mencakup Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Transformasi menyeluruh tersebut ditopang oleh Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi Transformasi.

Transformasi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Tahun 2025-2045 merujuk pada perubahan struktural dan kultural yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi sosial mencakup berbagai aspek penting yakni pembangunan SDM, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Transformasi sosial ini





diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

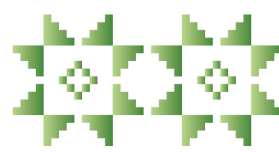
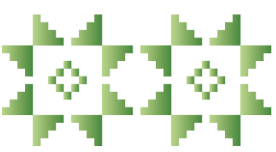
Transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Tahun 2025-2045 merujuk pada perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Transformasi ini mencakup beberapa aspek penting seperti diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan sektor industri dan manufaktur, pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi dan akses pembiayaan, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, serta kemandirian ekonomi. Melalui Transformasi ekonomi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju status negara maju dengan ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing pada tahun 2045.

Transformasi Tata Kelola dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Tahun 2025-2045 mengacu pada perubahan dan perbaikan dalam sistem pemerintahan, manajemen publik, dan pengelolaan negara untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini melibatkan berbagai aspek penting meliputi peningkatan efektivitas pemerintahan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, reformasi birokrasi, pengembangan kapasitas aparatur negara, *E-Government*, penguatan sistem hukum dan penegakkan hukum, desentralisasi dan penguatan pemerintahan daerah, peningkatan partisipasi publik, serta penguatan kerjasama dan diplomasi.

Melihat pentingnya kontribusi pembangunan daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan agenda pembangunan berupa transformasi yang cukup kompleks. Serta sehubungan dengan akan berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 maka perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun ke depan di Kabupaten Seruyan.

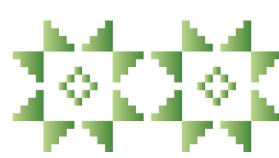
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini adalah:



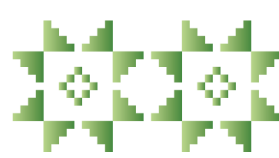


- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



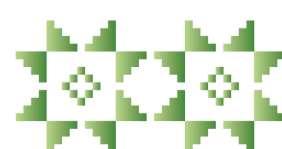


- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor





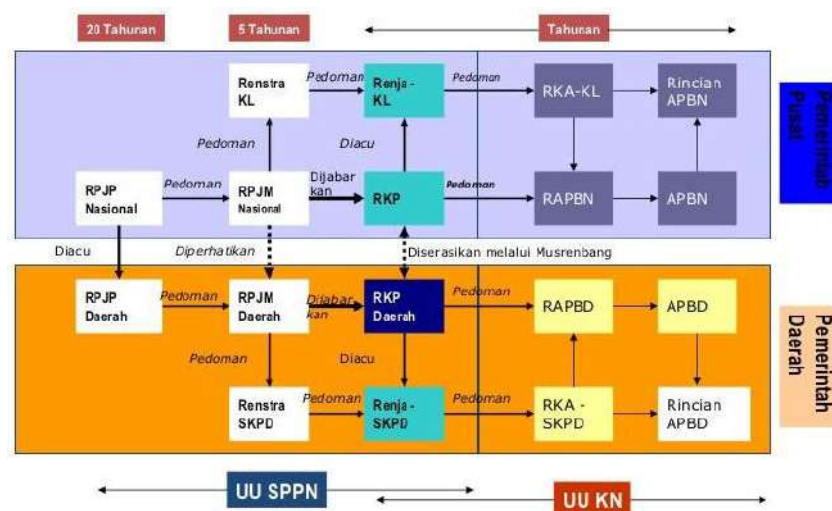
- 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 103);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan yang secara substansi dan sistematis saling terkait dan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya, dokumen-dokumen tersebut terikat secara hierarkis, fungsi (tema dan sektor), serta jangka dan waktu pelaksanaannya. Penjelasan dan justifikasi mengenai keterkaitan antar dokumen dapat dicermati atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.



Gambar 1.1. Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran

Sumber: <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>

Sebagai turunannya, penjelasan dan kaitan teknis dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan dalam kaitannya secara hierarkis atau hubungan secara vertikal dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan dengan dokumen rencana pembangunan dalam jangka panjang di tingkat nasional dan tingkat provinsi. RPJPD Kabupaten Seruyan harus selaras dengan muatan mulai dari visi-misi hingga arahan pembangunan yang dirancang dalam dokumen-dokumen tersebut.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur kaitan antara RPJPD dengan RPJMD sesuai dengan Gambar 1.2. Secara jangka waktu, RPJPD akan diacu oleh dokumen rencana pembangunan dalam jangka waktu menengah atau RPJMD yang berlaku atau diacu selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan pimpinan daerah yakni bupati atau wakil bupati terpilih. Sesuai dengan waktu pelaksanaannya, RPJPD Kabupaten Seruyan mengacu rencana pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Dengan kata lain, fungsi RPJMD adalah penerjemahan tujuan serta visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih dan juga berisi sasaran pokok RPJPD periode yang sama.



Gambar 1.2. Kaitan antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah



Secara horizontal, dokumen RPJPD sebagai gambaran umum atau abstraksi pembangunan harus terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan secara sektoral seperti dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri, atau pertanian yang umumnya berbentuk rencana induk atau *masterplan*. Selain itu, RPJPD juga menjadi haluan dalam dokumen perencanaan ruang seperti dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan dan rencana strategis (renstra) serta dokumen rencana penganggaran sesuai bagan pada Gambar 1.1. Selain itu, untuk menentukan rencana pembangunan yang kontekstual, RPJPD Kabupaten Seruyan juga perlu mempertimbangkan masukan dan arah pembangunan dari RPJPD kabupaten lain yang ada di sekitarnya.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun yang dimaksud untuk memberikan arahan serta menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta dalam menjalankan roda pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kabupaten Seruyan disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 bertujuan sebagai berikut.

1. Menetapkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2045 mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seruyan;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, integralitas dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan; dan
3. Sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.





1.5. Sistematika Penyusunan

Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika yang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan penyusunan RPJPD, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait, termasuk pedoman pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Berisi tentang hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dan RTRW Kabupaten Seruyan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJPD bagi Kabupaten Seruyan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis berupa gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

- a. Aspek geografi menjelaskan posisi dan peran strategis Kabupaten Seruyan, potensi sumberdaya alam, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.





- b. Aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi atau kependudukan Kabupaten Seruyan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kesejahteraan ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
- b. Kesejahteraan sosial budaya menjelaskan karakteristik masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

- a. Daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah di Kabupaten Seruyan yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan
- b. Daya saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian dan pembangunan Kabupaten Seruyan.
- c. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di Kabupaten Seruyan.
- d. Daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di Kabupaten Seruyan dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

1. Kependudukan

- a. Proyeksi Jumlah Total Penduduk
- b. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- c. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
- d. Proyeksi Kepadatan Penduduk
- e. Proyeksi Usia Produktif





- f. Proyeksi Anak Usia Sekolah
- g. Proyeksi Angka Ketergantungan
- h. Proyeksi Bonus Demografi
- 2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar
 - a. Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman
 - b. Proyeksi Air
 - c. Proyeksi Energi/Listrik
 - d. Proyeksi Persampahan
 - e. Proyeksi Infrastruktur Kesehatan
 - f. Proyeksi Infrastruktur Pendidikan
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis serta arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana berdasarkan RPJPN 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

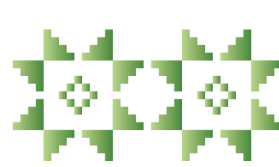
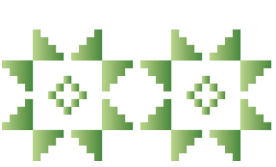
Bab ini memuat penjelasan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis khususnya yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan sebagai dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu terdiri dari subbab sebagai berikut:

- 3.1 Permasalahan Umum Pembangunan Daerah
- 3.2 Isu-Isu Strategis Daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini berisi tentang perumusan Visi dan Misi yang akan diwujudkan oleh Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan mempertimbangkan hasil telaah visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah, yang disajikan dalam sub bab sebagai berikut:

- 4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045
- 4.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045
- 4.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045





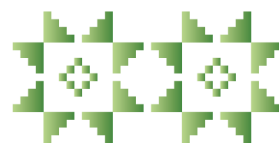
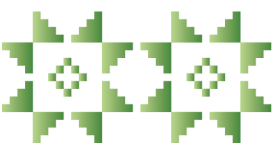
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang turunan pertama dari visi-misi yang berupa arah kebijakan yang dibuat dalam bentuk pentahapan pembangunan selama 5 tahun atau yang juga dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Serta menjabarkan pencapaian visi dan misi menjadi sasaran-sasaran pokok. Oleh karena itu terdiri dari subbab sebagai berikut:

5.1 Arah Kebijakan

5.2 Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

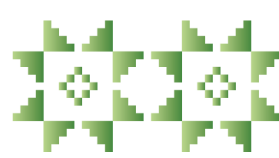
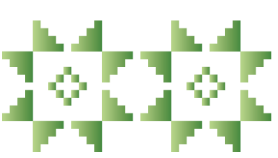
2.1.1. Geografi

1. Peran Strategis Daerah

Strategi daerah mengacu pada rencana dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Peran strategis daerah sangat penting dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Dilihat dari Peta Regional Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan terletak di tengah-tengah wilayah provinsi ini sehingga hal ini menjadikan Kabupaten Seruyan memiliki posisi geostrategis. Posisi Kabupaten Seruyan langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif Pelabuhan Laut Segintung dan Bandar Udara Perintis Kapten Mulyono Kuala Pembuang yang dimiliki Kabupaten Seruyan akan menarik perekonomian di kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Seruyan.

Di samping keberadaan Pelabuhan dan Bandara, rencana pembangunan Jalan Poros Seruyan yang membentang dari ujung selatan ke ujung utara Kabupaten Seruyan menjadi potensi besar untuk pengembangan wilayah Kabupaten Seruyan dan meningkatkan potensi posisi geostrategis. Jalan Poros Seruyan akan menjadi jalan alternatif menuju Kalimantan Barat yang akan memangkas waktu perjalanan menuju Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan melalui Jalan Trans Kalimantan saat ini. Hal tersebut yang kemudian akan meningkatkan lalu lintas di Kabupaten Seruyan sehingga aksesibilitas dan konektivitas juga akan meningkat yang berdampak pada perkembangan Kabupaten Seruyan.





2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Lokasi, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Seruyan adalah salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pusat pemerintahan berada di Kuala Pembuang (Kecamatan Seruyan Hilir). Wilayah ini terletak pada 0°47' - 3° 32' Lintang Selatan dan 111°19' - 112°51' Bujur Timur dengan luas 15.211,62 km² atau ± 9,90% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
Sebelah Timur	: Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur
Sebelah Selatan	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara administrasi, Kabupaten Seruyan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seruyan yakni 100 desa/kelurahan, yang terbagi ke dalam 97 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan Seruyan Hilir memiliki 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kuala Pembuang I dan kelurahan Kuala Pembuang II, sementara Kecamatan Seruyan Tengah memiliki 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Rantau Pulut.

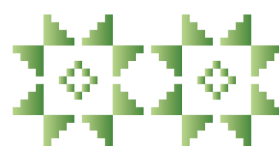
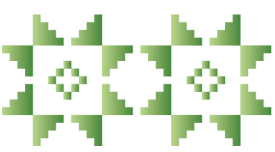
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Proporsi (%)
1	Seruyan Hilir	10	4.230,10	27,81
2	Seruyan Hilir Timur	6	1.323,41	8,70
3	Danau Sembuluh	8	1.442,06	9,48
4	Seruyan Raya	5	806,22	5,30
5	Hanau	7	509,59	3,35
6	Danau Seluluk	6	543,05	3,57
7	Seruyan Tengah	20	1.245,83	8,19
8	Batu Ampar	9	620,63	4,08
9	Seruyan Hulu	20	3.024,07	19,88
10	Suling Tambun	9	1.376,65	9,05
Kabupaten Seruyan		100	15.211,62	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039



Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Seruyan Hilir dengan luas wilayah 4.230,10 km² atau 27,81% dari total luas Kabupaten Seruyan. Sementara itu, kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Hanau, yakni seluas 509,59 km² atau 3.35% dari total luas Kabupaten Seruyan.







b. Topografi

Topografi Kabupaten Seruyan secara garis besar dikelompokkan menjadi 6 (enam) satuan, yaitu:

i. Daerah Dataran Pantai

Wilayah ini merupakan dataran rendah yang terbentuk dari hasil endapan pantai. Umumnya didominasi oleh tanah-tanah dengan tekstur kasar.

ii. Daerah Dataran Aluvial

Wilayah ini merupakan dataran rendah yang terbentuk dari hasil endapan sungai. Wilayah ini umumnya terdapat di tepi sungai dan atau danau kecil. Dataran ini mempunyai tanah dengan tekstur sedang sampai halus.

iii. Daerah Rawa

Merupakan rawa belakang tanggul (*levee*) yang terbentuk dari endapan bahan mineral atau pun juga bahan organik. Pengaruh air sangat dominan sepanjang tahun. Pada wilayah ini, akibat adanya endapan bahan organik, sering dijumpai tanah gambut.

iv. Daerah Pegunungan/Perbukitan

Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi berupa bentang alam perbukitan yang dicirikan oleh adanya bukit-bukit atau singkapan-singkapan. Wilayah pegunungan/perbukitan umumnya dijumpai pada daerah bagian utara Kabupaten Seruyan.

v. Delta/Pulau

Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

vi. Daerah Perairan

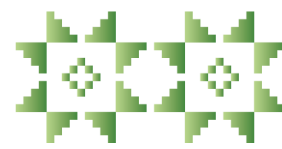
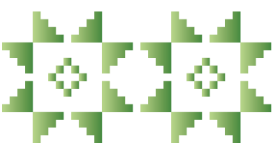
Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam.

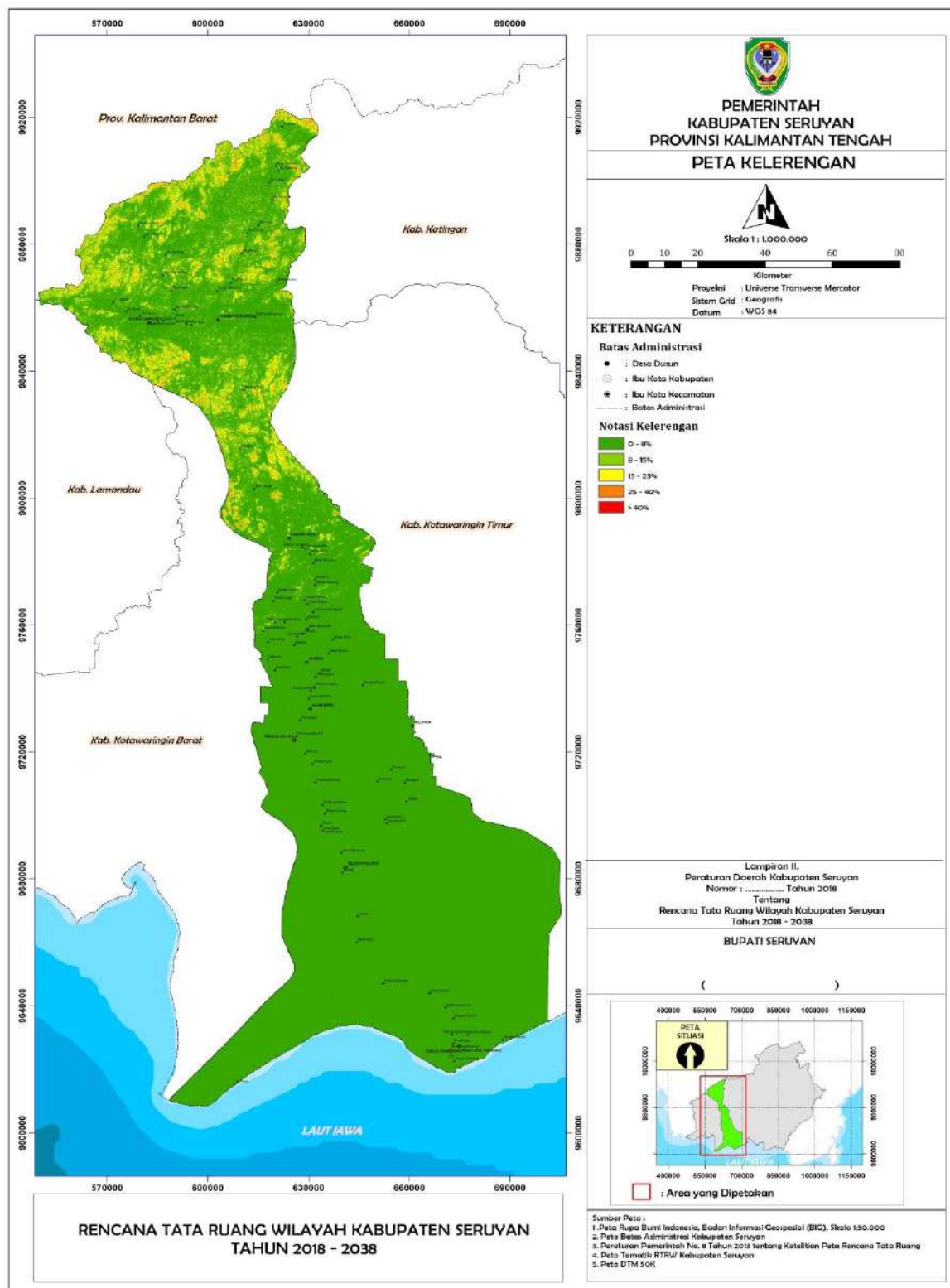
Kabupaten Seruyan memiliki topografi bervariasi membujur secara vertikal dari selatan ke utara. Dilihat dari topografinya, lahan di Wilayah Kabupaten Seruyan memiliki kemiringan lereng datar hingga berbukit, yaitu dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% - >60%. Berdasarkan kemiringan lereng, lahan di Kabupaten Seruyan dapat dikategorikan dalam beberapa kategori sebagai berikut: lahan dengan topografi datar (kelas lereng <2%), berombak (2 – 8%) hingga bergelombang (kelas lereng 9 – 15%), umumnya terdapat di bagian selatan Wilayah Kabupaten Seruyan dan wilayah yang dekat pinggir sungai. Lahan dengan topografi berbukit kecil (kelas





lereng 16 - 25%) umumnya dijumpai di bagian tengah Kabupaten Seruyan, sedangkan lahan dengan topografi berbukit (kelas lereng >40%) pada umumnya dijumpai di bagian utara wilayah Kabupaten Seruyan, yaitu merupakan daerah limitasi untuk pengembangan.





Gambar 2.2. Peta Kelereng Kabupaten Seruyan

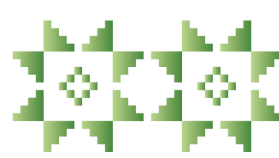
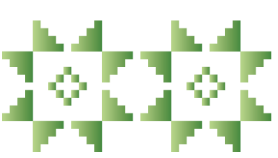
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

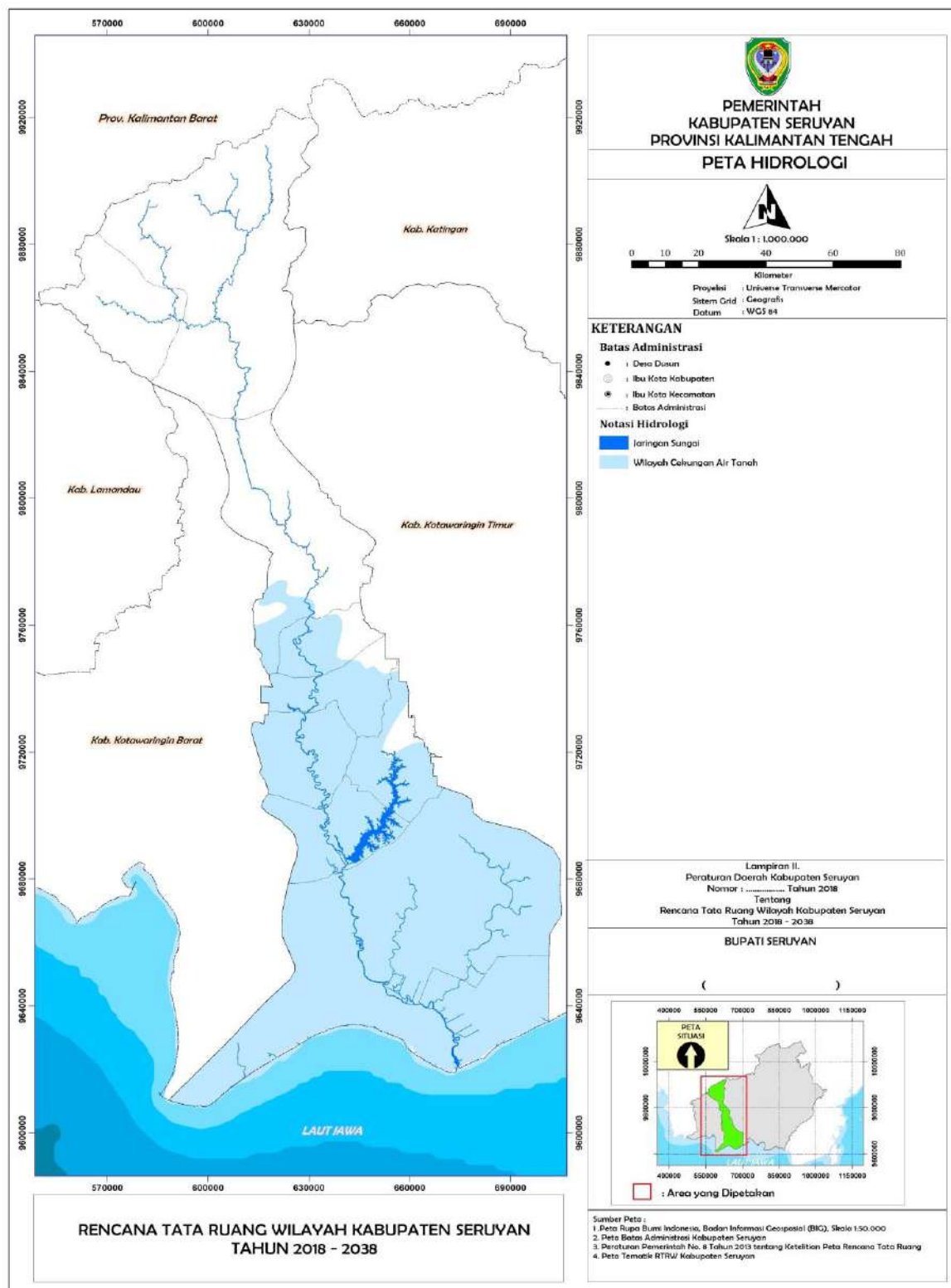


c. Hidrologi

Pola aliran sungai di Kabupaten Seruyan sebagian besar berpola dendritik dengan salah satu ciri utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Sungai Seruyan memiliki 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala Besar, Manjul, Salau, Pukun dan Kale. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi-cuci-kakus (MCK), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran seperti di Kecamatan Seruyan Hilir.

Sistem jaringan sumber daya air salah satunya terdiri atas sumber air yang meliputi danau yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu Danau Sembuluh, Danau Bayuku, Danau Rangsang, Danau Segintung, Danau Tanjung Baru, Danau Baung, Danau Laki Bini, Danau Tengkorak, Danau Hantasan Samut, Danau Sari, Danau Kumis, Danau Bogam, Danau Rasau Bangkuk, Danau Empat Belas, Danau Tongkang, Danau Gajah Mina, Danau A'as, Danau Seluluk, Danau Panjang, Danau Pinggir Padang, Danau Burung, Danau Bakung, Danau Marma, Danau Kepala Buaya, Danau Batakan, Danau Pondok Paikat, Danau Tampudau, Danau Jajangkit, Danau Mukat, Danau Bangaluan, Danau Kumpai Panjang, Danau Silip, Danau Simpang Pipih, Danau Belanti, Danau Baru, Danau Parang Batang, Danau Gelanggang, Danau Jahitan, dan Danau Papundak.





Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Seruyan
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039



d. **Klimatologi**

Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A yaitu Sangat Basah. Hal itu tergambar dari hasil perhitungan jumlah bulan-bulan kering dan bulan-bulan basah setiap tahun kemudian dirata-ratakan, yang hasil nilainya yaitu sebesar 0,124 ($Q = 0,124$). Menurut RePPPProT Curah Hujan di Kabupaten Seruyan cukup tinggi dengan curah hujan tahunan terendah 2.300 mm/tahun dan tertinggi mencapai 4.300 mm/tahun. Jumlah bulan basah terendah berkisar dari 0-5 bulan dalam setahun dan jumlah bulan basah tertinggi berkisar antara 6-11 bulan. Sedangkan jumlah bulan kering terendah yaitu 0-1 bulan dalam setahun dan jumlah bulan kering tertinggi berkisar 5-6 bulan dalam setahun. Rata-rata suhu di Kabupaten Seruyan yaitu 20°C - 32°C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75 persen.

e. **Penggunaan Lahan**

Kabupaten Seruyan memiliki luas wilayah sebesar 15.211,62 km². Secara administratif Kabupaten Seruyan terbagi menjadi 10 kecamatan. Kondisi fisiografi wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari perbukitan hingga pesisir pantai sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Kawasan hutan dan perkebunan secara umum menjadi yang paling dominan untuk menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi di Kabupaten Seruyan. Kegiatan perkebunan masih dominan sehingga kawasan ini menjadi cukup dominan di antara kawasan lain. Selain itu Kabupaten Seruyan juga memiliki kawasan taman nasional yang cukup luas.

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, rencana peruntukan lahan Kabupaten Seruyan meliputi:

Tabel 2.2. Rencana Peruntukan Lahan Kabupaten Seruyan

Renca Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Danau	8.440,02
Kawasan Budidaya Lainnya	17.800,10
Kawasan Hutan Lindung	30.909,60
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	414.131,65
Kawasan Hutan Produksi Tetap	357.508,28
Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	251.787,99
Kawasan Industri	787,85
Kawasan Pariwisata	407,28
Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	9,63
Kawasan Perikanan Budidaya	3.865,25
Kawasan Perkebunan	237.856,03
Kawasan Permukiman Perdesaan	5.252,21
Kawasan Permukiman Perkotaan	949,29
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	50,66



Renca Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Pertambangan Mineral Logam	3.699,54
Kawasan Ruang Terbuka Hijau	106,45
Kawasan Sekitar Danau/Waduk	3.280,99
Kawasan Tanaman Pangan	14.447,49
Kawasan Transmigrasi	4.393,19
Kawasan Transportasi	33,89
Sempadan Pantai	1.261,85
Sempadan Sungai	20.132,05
Sungai	8.053,76
Taman Nasional	135.995,96

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

f. Wilayah Rawan Bencana

Pembahasan wilayah rawan bencana di Kabupaten Seruyan meliputi:

i. Potensi Bencana

Untuk wilayah Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Seruyan, potensi rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, bencana banjir dan kebakaran hutan, lahan dan gambut. Berdasarkan karakteristik penyebab bencana, dapat diidentifikasi kawasan rawan bencana tersebut sebagai berikut:

- **Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Pada bagian utara dan tengah Kabupaten Seruyan tersebar di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, dan Kecamatan Hanau, berupa potensi bencana longsor lereng dan longsor tebing sungai yang pada umumnya sudah dihuni sebagai kawasan permukiman (terbangun).

- **Kawasan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Gambut**

Bencana kebakaran hutan, lahan, dan gambut kerap terjadi di Kabupaten Seruyan, terdapat sejumlah titik kebakaran hutan, lahan, dan gambut yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran) dan lokasi spotnya tersebar pada kawasan bergambut yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Seruyan Tengah. Oleh karena itu, usaha pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan gambut perlu diwaspadai.



- **Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir berupa banjir genangan dan banjir bandang (*flash flood*). Potensi banjir bandang hanya dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, khususnya daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Seruyan. Sedangkan banjir genangan berpotensi terjadi di semua wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Seruyan Hulu.

- **Kawasan Gelombang Pasang dan Abrasi**

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Seruyan. Sedangkan kawasan rawan abrasi berpotensi terjadi pada garis pantai di pesisir pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Seruyan terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur khususnya sekitar pesisir pantai.

Tabel 2.3. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Seruyan

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi/Kecamatan	Luas (ha)/ Panjang (km)
I.	Longsor		
1.	Zona A	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	195.231,50 ha
2.	Zona B		44.157,03 ha
3.	Zona C		341.912,77 ha
II.	A. Banjir		
	Bandang	Seruyan Hulu	172.472,37 ha
	B. Genangan/Luapan		
	1. Pasang Surut A1	Seruyan Hilir	120.952,09 ha
	2. Genangan A2	Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah	27.885,90 ha

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

ii. Tingkat Ancaman

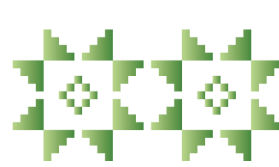
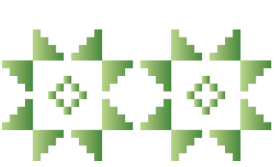
- Kabupaten Seruyan memiliki indeks ancaman bencana banjir tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga memiliki tingkat ancaman bencana banjir TINGGI.
- Indeks ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga tingkat ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut adalah TINGGI.
- Indeks ancaman kebakaran tinggi dan penduduk terpapar sedang sehingga tingkat ancaman bahaya kebakaran gedung dan rumah adalah TINGGI.



- Indeks ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) tinggi dan penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) adalah TINGGI.
- Indeks ancaman kekeringan tinggi dan indeks penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bahaya kekeringan adalah TINGGI.
- Indeks ancaman bahaya tanah longsor rendah dan indeks penduduk terpapar rendah, sehingga tingkat bahaya ancaman tanah longsor adalah RENDAH.
- Indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi, penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahaya bencananya SEDANG.
- Indeks ancaman wabah penyakit rendah dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya RENDAH.
- Indeks ancaman konflik sosial tinggi, dan penduduk terpapar redah sehingga tingkat bahanya SEDANG.

iii. Tingkat Kerentanan

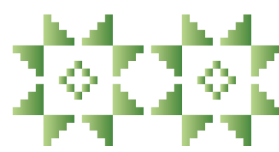
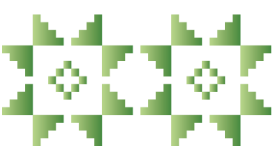
- Pengkajian risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan hutan dan lahan serta kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut adalah:
 - 1) 107.123 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas disekitar wilayah pesisir degan penduduk terpapar sebesar 3.180 jiwa.
 - 2) 25.356 ha lingkungan akan rusak.
 - 3) 716 milyar rupiah kerugian ekonomi daerah.
- Pengkajian risiko bencana kebakaran hutan, lahan, dan gambut di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan lahan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tersebut adalah:
 - 1) 151.065 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas wilayah Kabupaten Seruyan.
 - 2) 8,056 ha lingkungan akan rusak.
 - 3) 14 milyar rupiah kerugian ekonomi.
- Pengkajian risiko bencana kebakaran gedung dan rumah di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan





gedung/rumah, dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:

- 1) 196 jiwa penduduk terkena dampak.
 - 2) 49 unit rumah rusak berat.
 - 3) Kerugian daerah rendah.
- Pengkajian risiko bencana cuaca buruk (ekstrem) di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan ringan terhadap gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
 - 1) 2.536 jiwa penduduk terkena dampak.
 - 2) Kerugian daerah rendah.
 - Pengkajian risiko bencana kekeringan di Wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitarnya, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kekeringan adalah:
 - 1) 12.455 jiwa penduduk terkena dampak.
 - 2) 492 ha kerusakan lingkungan.
 - 3) 376 milyar rupiah kerugian daerah.
 - Pengkajian risiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil, baik terhadap penduduk karena jauh dari permukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor adalah:
 - 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) 4.009 ha kerusakan lingkungan.
 - 3) 175 juta rupiah kerugian daerah.
 - Pengkajian risiko bencana kegagalan teknologi di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil baik terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kegagalan teknologi adalah:
 - 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Sungai Seruyan dan Danau Sembuluh.
 - 3) Penduduk disekitar pabrik
 - Pengkajian risiko bencana wabah penyakit di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar terhadap penduduk, terkait munculnya





Pandemi Covid-19 sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 kasus, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang dan meninggal sejumlah 4 orang, termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana wabah penyakit adalah:

- 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.
- Pengkajian risiko bencana konflik sosial di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar baik terhadap penduduk, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana konflik sosial adalah:
 - 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Lahan yang kena konflik.
 - 3) Penduduk/pemilik lahan.

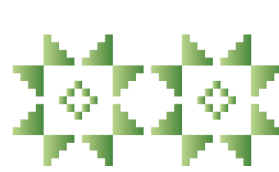
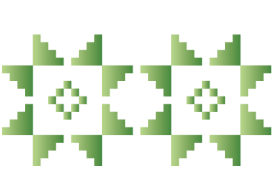
iv. Tingkat Kapasitas

Berdasarkan capaian-capaian penanggulangan bencana selama ini, indeks ketahanan daerah berada pada level 2, yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

v. Tingkat Risiko Bencana

Berdasarkan analisis terhadap indeks tingkat ancaman, indeks kerugian, indeks penduduk terpapar dan indeks kapasitas, dapat diperoleh tingkat risikonya tinggi:

- Bencana banjir tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kekeringan tingkat risikonya tinggi.
- Bencana cuaca buruk tingkat risikonya sedang.
- Bencana kebakaran gedung dan rumah tingkat risikonya rendah.
- Bencana tanah longsor tingkat risikonya rendah.
- Bencana konflik sosial tingkat risikonya tinggi.





- Bencana wabah penyakit tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kegagalan teknologi tingkat risikonya rendah.
- Bencana prioritas yang terdapat di Kabupaten Seruyan adalah banjir, kebakaran hutan, lahan, dan gambut, kekeringan, serta konflik sosial.

3. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Seruyan memiliki berbagai potensi daerah yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Potensi sumber daya Kabupaten Seruyan meliputi:

a. Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan Tahun 2023 terdiri dari lahan sawah 6.534 ha dan bukan lahan sawah 227.682,31 ha, dengan komoditas pertanian yang dibudidayakan cukup beragam. Berikut merupakan rincian dari luas lahan dan komoditas pertanian di Kabupaten Seruyan:

Tabel 2.4. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Seruyan

No	Jenis Lahan	Luas (ha)
A	Lahan Sawah	6.534
1	Tadah Hujan	5.062
2	Rawa Pasang Surut	675
3	Rawa Lebak	797
B	Lahan Pertanian Bukan Sawah	227.682,31
1	Tegal/Kebun	33.729,58
2	Ladang/Huma	2.893,10
3	Perkebunan	52.047,63
4	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	7.381,21
5	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	1.213,08
6	Hutan Negara	650,35
7	Sementara Tidak Diusahakan	129.126,67
8	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	640,69
Luas Sawah dan Lahan Pertanian Bukan Sawah		234.216,31

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2023

Tabel 2.5. Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	4.024,00	15.830,35
2	Padi lahan kering/ladang	1.774,00	4.533,10
3	Jagung	29,50	65,97
4	Kacang tanah	3,30	3,64
5	Ubi kayu	30,50	519,7



No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
6	Ubi Jalar	30,00	329,91
Jumlah		5.891,30	21.282,66

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2023

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebesar 234.216,31 ha. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebesar 23,58% dari total lahan pertanian di Kabupaten Seruyan merupakan lahan pertanian yang diberi perlindungan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas perencanaan lahan pertanian yang dilindungi di Kabupaten Seruyan seluas 55.227,28 ha yang terbagi menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 27.613,64 ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 17.372,95 ha, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 10.240,69 ha. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan disetiap kecamatan di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Perencanaan Lahan Pertanian	Luas (Ha)
I	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	27.613,64
II	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	17.372,95
1	Kecamatan Seruyan Hilir	2.980,45
2	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2.901,32
3	Kecamatan Danau Sembuluh	568,16
4	Kecamatan Seruyan Raya	2.177,63
5	Kecamatan Hanau	796,56
6	Kecamatan Danau Seluluk	2.229,62
7	Kecamatan Batu Ampar	537,60
8	Kecamatan Seruyan Tengah	4.491,95
9	Kecamatan Seruyan Hulu	606,27
10	Kecamatan Suling Tambun	83,39
III	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	10.240,69
Jumlah		55.227,28

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2023

b. Perkebunan

Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan. Komoditas perkebunan terbesar di Kabupaten Seruyan adalah kelapa sawit. Pada tahun 2023, luas areal kelapa sawit mengalami penurunan menjadi 690.117,36 ha dengan luas kelapa sawit perkebunan rakyat sebesar 29.890,88 ha dan luas kelapa sawit PBS sebesar 660.226,48 ha. Luas panen



kelapa sawit perkebunan rakyat sebesar 24.557,13 ha dengan jumlah produksi 25.476,435 ton dan luas panen kelapa sawit PBS sebesar 454.001,61 ha dengan jumlah produksi sebesar 1.241.167 ton. Selain kelapa sawit, komoditas lainnya yang ada di Kabupaten Seruyan antara lain karet, kelapa dalam, kopi robusta, jambu mete, aren, lada. Berikut merupakan rincian luas dan komoditas perkebunan di Kabupaten Seruyan:

Tabel 2.7. Hasil Komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
1	Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	29.890,88	24.557,13	25.476,435	1,037
2	Kelapa sawit PBS	660.226,48	454.001,61	1.241.167	2,733
3	Karet	13.579	7.673,4	15.045,97	1,960
4	Kelapa dalam	1.553	1.150,75	5.486	4,767
5	Kopi Robusta	41,2	11	30,9	2,809
6	Jambu mete	285	5,25	7	1,333
7	Aren	75	242,5	28	0,115
8	Lada	15,1	25,5	6,37	0,249
	Jumlah	705.665,55	487.667,14	1.287.247,675	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Sebagai komoditas perkebunan paling besar di Kabupaten Seruyan, kelapa sawit menjadi potensi dan daya tarik tersendiri bagi wilayah ini. Berdasarkan jenis kebunnya, kelapa sawit ditanam pada perkebunan rakyat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang mengajukan izin perkebunan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan wilayah operasionalnya, Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Seruyan dibedakan menjadi 2 yakni operasional dalam Kabupaten Seruyan dan Lintas Kabupaten. Perkebunan Besar Swasta juga dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu yang sudah beroperasi dan yang akan/belum beroperasi. Sedangkan perkebunan kelapa sawit rakyat tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Seruyan. Akan tetapi luas perkebunan rakyat antara satu kecamatan dengan kecamatan lain di Kabupaten Seruyan bervariasi. Selain perkebunan sawit, terdapat pula pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO dan PKO) di Kabupaten Seruyan. Berikut merupakan informasi terkait Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit dan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Seruyan.



Tabel 2.8. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan yang Sudah Beroperasi Tahun 2023

No	Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Kapasitas CPO (Ton/Jam)	Kapasitas PKO (Ton/Jam)	Lokasi
Dalam Kabupaten						
1	PT. Aditunggal Mahajaya	5.363,00	4.494,87	80,00	-	8
2	PT. Bangun Jaya Alam Permai (eks PT. Mitra Unggul Tama Perkasa)	9.139,00	6.361,22	60,00	-	8
3	PT. Binasawit Abadipratama	20.129,00	20.129,00	80,00	12,50	5,7,8
4	PT. Binasawit Abadipratama (Eks. PT. Agro Mandiri Perdana)	16.889,00	15.781,34	80,00	-	3,4
5	PT. Ciptatani Kumai Sejahtera	7.860,00	7.275,21	30,00	-	7,8
6	PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	20.088,00	15.021,74	120,00	-	1,3
7	PT. Hamparan Masawit Bangun Persada	4.615,00	4.323,99	120,00	-	4
8	PT. Indotruba Timur	1.254,00	1.252,00	-	-	8
9	PT. Kerry Sawit Indonesia	19.010,00	16.858,58	90,00	-	1,3,4
10	PT. Mega Ika Khansa	5.965,00	2.536,94	-	-	1,3
11	PT. Menthobi Sawit Jaya	728,00	724,78	-	-	4
12	PT. Mitrakarya Agroindo	23.001,00	16.539,08	80,00	-	5,7,8
13	PT. Musirawas Citraharpindo	12.147,00	11.252,61	90,00	-	4,5,6
14	PT. Rim Capital	3.903,00	2.607,51	-	-	5,6
15	PT. Rimba Harapan Sakti	13.788,00	7.803,12	45,00	-	1,3
16	PT. Salonok Ladang Mas	13.232,00	12.388,30	60,00	-	1,3,4
17	PT. Sarana Titian Permata	19.956,00	17.617,41	105,00	-	1,3
18	PT. Sawitmas Nugraha Perdana	11.209,00	9.591,50	30,00	-	3,4,6
19	PT. Sumur Pandanwangi (Hanau)	5.462,00	4.570,46	-	-	5,6
20	PT. Sumur Pandanwangi (Khartika Bhakti)	7.368,00	606,94	-	-	2
21	PT. Tapian Nadenggan (Eks. PT. Lestari Unggul Jaya)	17.052,00	15.238,75	80,00	7,50	5,6,7,8
22	PT. Telaga Sari Persada	2.514,00	507,60	-	-	8
23	PT. Wanasawit Subur Lestari II (Eks. PT. KUCC)	13.961,00	12.234,32	-	-	6
Jumlah Dalam Kabupaten		235.623,00	205.717,27	1.150,00	20,00	
Lintas Kabupaten						
24	PT. Agro Indomas	24.658,00	22.544,88	120,00	-	3,4
25	PT. Agrokarya Prima Lestari	6.237,00	5.353,06	-	-	8
26	PT. Buana Artha Sejahtera	6.329,00	6.135,19	-	-	4,5
27	PT. Dwi Mitra Adhiusaha	652,00	626,75	-	-	1
28	PT. Indotruba Tengah	3.605,00	2.796,04	45,00	-	6
29	PT. Karya Makmur Sejahtera	5.299,00	2.181,26	-	-	8
30	PT. Kridatama Lancar	3.110,00	2.781,80	60,00	-	8
31	PT. Mustika Sembuluh	6.516,00	6.377,95	120,00	-	1,4
32	PT. Sapta Karya Damai	211,82	210,34	-	-	1



No	Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Kapasitas CPO (Ton/Jam)	Kapasitas PKO (Ton/Jam)	Lokasi
33	PT. Tapian Nadenggan (eks. PT. Mitra Tama Abadi Makmur)	3.588,00	3.492,14	80,00	-	5
34	PT. Teguh Sempurna	4.627,00	4.456,17	60,00	7,50	5,7,8
35	PT. Wanasawit Subur Lestari	6.350,00	6.107,25	120,00	-	4
Jumlah Lintas Kabupaten		71.182,82	63.062,83	605,00	7,50	
Jumlah Keseluruhan		306.805,82	268.780,10	1.755,00	27,50	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Keterangan Lokasi Kecamatan : Seruyan Hilir (1), Seruyan Hilir Timur (2), Danau Sembuluh (3), Seruyan Raya (4), Danau Seluluk (5), Hanau (6), Batu Ampar (7), Seruyan Tengah (8), Seruyan Hulu (9), Suling Tambun (10).

Tabel 2.9. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan yang Belum Beroperasi Tahun 2023

No	Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Tanam (ha)	Lokasi
1	PT. Ahmad Saleh Perkasa	10.705,00	0,00	5
2	PT. Andalan Sentosa Abadi	17.169,00	0,00	8
3	PT. Millenium Resources	19.057,00	0,00	9
4	PT. Rimba Sawit Utama Planindo	15.000,00	0,00	1
5	PT. Seruyan Sawit Lestari	6.772,00	0,00	8,9
6	PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa	17.000,00	0,00	1
Jumlah		85.703,00	0,00	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Keterangan Lokasi Kecamatan : Seruyan Hilir (1), Seruyan Hilir Timur (2), Danau Sembuluh (3), Seruyan Raya (4), Danau Seluluk (5), Hanau (6), Batu Ampar (7), Seruyan Tengah (8), Seruyan Hulu (9), Suling Tambun (10).

Tabel 2.10. Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Kecamatan	Petani Perkebunan Rakyat (Orang)	Luas Perkebunan Rakyat (Ha)	Luas Perkebunan Plasma (Ha)	Jumlah Luas Perkebunan (Ha)
1	Seruyan Hilir	115	321,50	3.953,95	4.275,45
2	Seruyan Hilir Timur	793	1.154,25	3.007,85	4.162,10
3	Danau Sembuluh	844	9.876,38	845,65	10.722,03
4	Seruyan Raya	271	1.283,00	6.075,18	7.358,18
5	Danau Seluluk	1.114	3.338,00	934,00	4.272,00
6	Hanau	3.340	2.116,25	2.472,16	4.588,41
7	Batu Ampar	2.150	2.063,00	0,00	2.063,00
8	Seruyan Tengah	1.154	9.793,00	8.455,53	18.248,53
9	Seruyan Hulu	52	71,50	0,00	71,50
10	Sulung Tambun	6	6,00	0,00	6,00
Jumlah		9.839	30.022,88	25.744,32	55.767,20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan



Tabel 2.11. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (CPO dan PKO) Non-Kebun di Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Pabrik	Olahan	Kapasitas (Ton/Jam)	Lokasi
1	PT. Agrindo Sawit Mandiri	CPO	30,0	Danau Seluluk
2	PT. Hanau Panen Raya Sejahtera	CPO	60,0	Danau Seluluk
		PKO	2,5	Danau Seluluk
3	PT. Permata Timur	CPO	60,0	Seruyan Raya
4	PT. Surya Inti Palmoil	CPO	45,0	Hanau

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Dengan hadirnya Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan telah menjadi pilar penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Seruyan. Namun dibalik kontribusinya, kehadiran PBS di Kabupaten Seruyan juga menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Untuk menjembatani hubungan antara perusahaan besar dan masyarakat sekitar, program kebun plasma muncul sebagai solusi. Kebun plasma merupakan bagian dari pola kemitraan antara perusahaan inti (perkebunan besar swasta) dan petani lokal, yang disebut dengan pola inti-plasma. Dalam pola ini, perusahaan inti menyediakan lahan, modal, teknologi, dan dukungan teknis, sementara petani plasma bertanggung jawab atas pengelolaan kebun mereka dengan bimbingan perusahaan. Berikut merupakan data perkembangan kebun plasma di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Perkembangan Kebun Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Perusahaan	Koperasi/Lokasi	Luas (Ha)
1	PT. Ciptatani Kumal Sejahtera	KUD Berkat Abadi/Suka Makmur	1.160,00
		KUD Usaha Bersama/ Bumi Jaya	1.250,00
		KUD Sawit Jaya/Suka Maju	1.050,00
		KUD Sawit Bangkit/Suko Rejo	1.600,00
2	PT. Aditunggal Mahajaya	Koperasi Sawit Mitra Seruyan - Ayawan - Sukamandang - Tangga Batu - Teluk Bayur - Batu Menangis - Sandul - Durian Kait	1.405,20
3	PT. Mitrakarya Agrindo	Koperasi Sawit Karya Abadi - Wanatirta - Suka Mulya - Sebabi	1.646,29





No	Perusahaan	Koperasi/Lokasi	Luas (Ha)
4	PT. Musirawas Citra Harpindo	Koperasi Citra Hanau - Pembuang Hulu I - Pembuang Hulu II - Derangga	972,16
		Koperasi Citra Asam Baru - Asam Baru	934
5	PT. Sumur Pandanwangi (Kartika) (Seruyan Hilir Timur)	Koperasi Bengkiral Jaya Makmur - Halimaung Jaya - Mekar Indah	3.007,85
		- Sungai Bakau - Kartika Bhakti - Bangun Jaya	
6	PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	Koperasi Usaha Mandiri - Telaga Pulang - Baung - Jahitan - Muara Dua	3.088,95
7	PT. Kerry Sawit Indonesia	Koperasi Karya Bersama/Tanjung Rangsas	865,00
		KSU Danau Sejahtera/Sembuluh I	1.242,25
		Koperasi Sejahtera Bersama/ Sembuluh II	932,69
		Koperasi Tabiku Makmur/ Tabiku	514,46
8	PT. Salonok Ladang Mas	Koperasi Danau Alam Subur - Tabiku - Sembuluh I - Sembuluh II	1.120,96
		Koperasi Berkah Batu Baung/ Baung	Dalam Proses
		Koperasi Telaga Pulang Emas/ Telaga Pulang	Dalam Proses
9	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Koperasi Mitra Alam Sawit/ Ringin Agung	351,00
		Koperasi Mugi Bina Bersama/ Mugi Penyuhu	Dalam Proses
		Koperasi Batu Batuah Sejahtera/ Tumban Bai	Dalam Proses
		Koperasi Ayawan Dayak Bersatu/ Ayawan	Dalam Proses
		Koperasi Durian Tunggal Jaya Abadi/Durian Tunggal	Dalam Proses
		Koperasi Berkat Bersatu Sejahtera/ Kelurahan Rantau Pulut	Dalam Proses
10	PT. Agro Indomas	Koperasi Maju Jaya Terawan/ Terawan	314,00
		Koperasi Berkat Maju Jaya Bersama/ Lanpasa	334,00
11	PT. Rim Capital	Koperasi Benua Raya/ Benua Usang	164,00
		Koperasi Unggul Jaya Sejahtera/ Paren	150,00
		Koperasi Tagani Makmur/ Sembuluh II	100,00
12	PT. Menthobi Sawit Jaya	Koperasi Mitra Harapan Itah/ Tanjung Hara	124,00
		Koperasi Bina Harapan Sejahtera/ Tanjung Paring	124,00



No	Perusahaan	Koperasi/Lokasi	Luas (Ha)
13	PT. Rimba Harapan Sakti	Koperasi Makmur Sejahtera/ Pematang Limau	186,00
14	PT. Dwi Mitra Adhiusaha	Koperasi Pelangi Tanggul Harapan/ Tanggul Harapan	118,00
15	PT. Sumur Pandanwangi (Hanau)	Koperasi Berat Hapakat - Paring Raya - Bahaur/Dusun Manggana	1.500
16	PT. Mega Ika Khansa	Koperasi Tanjung Berkah Sekumpul/ Tanjung Rangsang	Dalam Proses
17	PT. Telagasari Persada	Koperasi Bina Warga Bersatu/ Tumbang Bai, Durian Tunggal, Bukit Buluh, dan Mugi Penyuhu	Dalam Proses
18	PT. Mustika Sembuluh	Koperasi Bita Maju Bersama/ Pematang Limau	Dalam Proses
		KSU Sepan Raya/ Bangkal	Dalam Proses
19	PT. Tapian Nadenggan	Koperasi Pelangi Danau Seluluk/ Kecamatan Batu Ampar	Dalam Proses
20	PT. Wanasawit Subur Lestari	Koperasi Hanau Lestari Sejahtera/ Bahaur, Paring Raya, Parang Batang, Tanjung Hanau	Dalam Proses
21	PT. Sawitmas Nugraha Perdana	Koperasi Pelangi Sawit Sejahtera/ Kecamatan Hanau	Dalam Proses
22	PT. Hamparan Masawit Bangun Persada	Koperasi Produsen Maju Bersama Bangkal/ Kecamatan Seruyan Raya	Fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat Pola Bagi Hasil

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

c. Perikanan

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 mencapai 19.177,44 ton dengan kontribusi terbesar pada jenis usaha tambak yang mencapai 11.540,98 ton. Secara lebih lengkap, perkembangan produksi perikanan budidaya menurut jenis usaha tahun 2021-2023 di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 2021-2023

No	Jenis Usaha	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
I	Budidaya Air Payau			
1	Tambak	9.544,37	10.498,87	11.540,98
II	Budidaya Air Tawar			
1	Kolam	3.080,97	3.376,34	3.697,92



No	Jenis Usaha	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
2	Karamba	3.099,08	3.433,79	3.774,72
3	Jaring Apung Tawar (JAT)	114,65	131,99	144,69
4	Jaring Tancap Tawar (JTT)	10,23	17,42	19,13
Jumlah		15.849,30	17.458,41	19.177,44

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Perikanan perairan payau (tambak) di Kabupaten Seruyan menjadi potensi perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Seruyan terutama di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur yang bagian selatannya berbatasan dengan Laut Jawa mempunyai panjang garis pantai $\pm$ 130 Km. Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, terutama budidaya air payau. Budidaya air payau sangat didukung pemerintah dengan mengeluarkan berbagai program yang bertumpu pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertambakan. Salah satu komoditas yang paling banyak dihasilkan adalah ikan bandeng dan sebagian kecil jenis ikan lainnya seperti belanak dan udang sayur.

Potensi untuk budidaya tambak di Kabupaten Seruyan diperkirakan sebesar $\pm$ 10.000 Ha dengan lahan tambak yang sudah dimanfaatkan/operasional sejak tahun 2021 – 2023 sebesar $\pm$ 1.760 Ha atau berkisar 17,60%. Lahan tambak yang operasional/aktif hanya berada di Kecamatan Seruyan Hilir tepatnya berada di Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II dan Desa Sungai Undang. Masih terbuka luas lahan untuk pengembangan usaha budidaya air payau seluas 8,240 Ha.

Tabel 2.14. Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Air Payau (Tambak)

No	Kecamatan	Lahan Budidaya Air Payau			
		Potensi (Ha)	Yang sudah Dimanfaatkan (Ha)	Tk. Pemanfaatan (%)	Pengembangan (Ha)
1	Seruyan Hilir	7.123	1.760	17,6	5.363
2	Seruyan Hilir Timur	2.877	-	-	2.877
Jumlah		10.000	1.760	17,6	8.240

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 mencapai 21.374,12 ton yang terdiri dari perairan laut sebesar 11.730,09 ton dan perairan umum sebesar 9.644,03 ton. Secara lebih lengkap, perkembangan produksi perikanan



tangkap menurut jenis usaha tahun 2021-2023 di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2023

No	Jenis Perairan	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
I	Perairan Laut	12.021,55	11.927,71	11.730,09
II	Perairan Umum	9.574,85	9.638,95	9.644,03
Jumlah		21.596,40	21.566,66	21.374,12

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Produksi perikanan berdasarkan jenis komoditas di Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 mencapai 40.549,64 ton dengan kontribusi terbesar pada perikanan budidaya yang mencapai 19.175,45 ton. Adapun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
I	Perikanan Budidaya			
1	Ikan Mas	28,41	31,25	32,37
2	Ikan Nila	1.727,22	1.900,17	2.090,87
3	Ikan Patin	3.921,21	4.337,29	4.746,06
4	Ikan Lele	47,25	52	57,27
5	Ikan Betutu	9,47	10,42	11,46
6	Ikan Jelawat	502	552,22	612,44
7	Ikan Belida	18,89	20,8	22,91
8	Ikan Gabus	50,33	55,39	61,09
9	Ikan Bandeng	6.587,81	7.246,61	7.937,89
10	Ikan Belanak	847,62	932,41	1.027,15
11	Udang Api-API	2.098,45	2.308,31	2.563,25
12	Udang Windu	10,49	11,54	12,69
Jumlah I		15.849,15	17.458,41	19.175,45
II	Perikanan Tangkap di PUD			
1	Ikan Jambal/Patin	858,43	834,05	881,91
2	Ikan Gabus	1.045,44	1.126,94	1.130,49
3	Ikan Toman	1.060,31	1.104,15	1.142,98
4	Ikan Tambakan	291,09	237,12	190,05
5	Ikan Lele	287,11	-	285,43
6	Ikan Gurame	391,54	313,3	266,26
7	Ikan Baung	821,97	823,14	906,85
8	Ikan Jelawat	390,92	359,01	350,94
9	Ikan Salab	211,74	495,43	433,61
10	Ikan Lais	719,42	549,1	715,97
11	Ikan Sepat Rawa	214,89	227,01	216,81
12	Ikan Sepat Siam	-	172,79	-
13	Ikan Belida	149,36	120,83	109,82
14	Ikan Betok	269,36	270,13	291,7
15	Udang Lainnya	134,37	-	-



No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023
16	Ikan Tawes	-	235,27	-
17	Ikan Betutu	-	127,37	45,49
18	Udang Galah	269,52	425,63	416,86
19	Ikan Lainnya	2.459,38	2.172,68	2.258,88
Jumlah II		9.574,85	9.593,95	9.644,05
III	Perikanan Tangkap di Perairan Laut			
1	Ikan Kerapu	-	-	-
2	Ikan Kakap Merah	341,07	260,79	382,85
3	Ikan Kakap Putih	401,73	316,11	392,97
4	Ikan Kurisi	-	-	-
5	Ikan Gulamah	-	472,68	-
6	Ikan Cucut	320,96	314,41	253,75
7	Ikan Pari	183,24	188,52	169,65
8	Ikan Bawal Hitam	209,07	176,88	168,43
9	Ikan Bawal Putih	230,74	206,7	223,37
10	Ikan Alu-alu/Pacul	149,32	223,87	282,49
11	Ikan Layang	-	70,27	-
12	Ikan Selar	168,42	136,97	132,98
13	Ikan Lainnya	2.142,92	1.157,19	1.946,30
14	Ikan Kuwe	-	-	-
15	Tetengkek	-	61,97	-
16	Binatang Berkulit Keras Lainnya	73,38	-	69,09
17	Ikan Belanak	373,68	370,35	376,75
18	Ikan Kuro/Senangin	544,08	476,82	518,48
19	Ikan Julung-julung	-	23,92	-
20	Ikan Teri	-	-	-
21	Ikan Lemuru	-	-	-
22	Ikan Golok-Golok	-	265,79	-
23	Ikan Terubuk	84,77	0,01	-
24	Ikan Kembung	206,99	179,8	337,84
25	Ikan Tenggiri Papan	-	188,59	-
26	Ikan Tenggiri	328,08	212,6	464,72
27	Ikan Tongkol	267,06	376,45	602,45
28	Ikan Sebelah	140,02	146,27	73,79
29	Ikan Peperek	-	65,04	-
30	Ikan Manyung	62,52	736,06	788,09
31	Ikan Talang-Talang	440,67	450,95	500,71
32	Ikan Banyar	276,97	213,4	-
33	Ikan Selanget	232,73	193,34	163,44
34	Rajungan	34,55	25,23	10,65
35	Kepiting	43,05	229,01	182,1
36	Udang Windu	1.103,99	978,41	962,2
37	Udang Putih	526,89	405,21	554,66
38	Udang Dogol	428,38	412,1	402,88
39	Udang Lainnya	1.224,74	1.106,19	1.028,93
40	Cumi-cumi	1.481,54	1.235,70	740,57
41	Sotong	-	50,11	-
Jumlah III		12.021,56	11.927,71	11.730,14
Total		37.445,56	38.980,07	40.549,64

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Potensi pada sektor perikanan tidak hanya pada produksi hasil perikanannya, namun juga pada produksi pengolahan hasil perikanan. Pada tahun 2023, jumlah



produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.648,57 ton. Beberapa produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Seruyan antara lain udang ebi, ikan kering, kerupuk ikan pipih/belida, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk ikan gabus, terasi, dan olahan ikan lainnya.

Tabel 2.17. Produksi Pengolahan Hasil perikanan Tahun 2023

No	Jenis Produk Olahan	Jumlah (Ton)
1	Udang Ebi	241,63
2	Ikan Kering	1.289,95
3	Kerupuk Ikan Pipih/Belida	75,98
4	Kerupuk Ikan Tenggiri	56,59
5	Kerupuk Ikan Gabus	234,46
6	Terasi	171,16
7	Ikan Olahan Lainnya (bakso, abon, empek-empek, udang di-es, udang beku, dll)	2.578,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

d. Peternakan

Pada tahun 2023, populasi ternak di Kabupaten Seruyan sebanyak 127.868 ekor ternak. Dimana ternak sapi sebanyak 8.511 ekor, ternak kerbau 62 ekor, ternak kambing 4.637 ekor, dan ternak babi sebanyak 3.991 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 94.471 ekor, dan itik 7.464 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.

e. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat potensial secara ekonomi. Pertambangan yang telah berproduksi di Kabupaten Seruyan adalah bahan galian zircon disusul dengan bahan galian biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian



utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan. Minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, serta nikel dan kaolin di sebelah utara Kabupaten Seruyan.

f. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Seruyan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara terpadu yang meliputi:

i. Wisata Alam

- Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Seruyan Hilir yang dikenal dengan keindahan alam, flora, dan faunanya, yang mana salah satu fauna yang ada di wilayah tersebut adalah orang utan.
- Kawasan wisata Pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir (Kelurahan Kuala Pembuang) dan wisata Sungai Bakau yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir Timur (Desa Sungai Bakau).
- Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu.
- Arum Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
- Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki ± 160 riam.
- Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh.

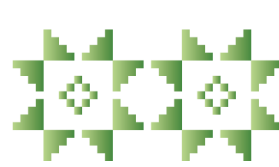
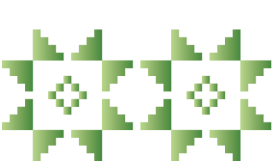
ii. Wisata Budaya

Pesta Tiwah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

iii. Wisata Sejarah

Wisata ini yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Seruyan antara lain:

- Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.





- Sepundu (patung) timbal bagi arwah orang yang sudah meninggal dari Suku Dayak yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

4. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung lahan pertanian menjadi salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana produktivitas lahan pertanian dalam mencukupi atau mendukung kebutuhan fisik minimum.

Perhitungan daya dukung lahan pertanian (DDLDP) di Kabupaten Seruyan dihitung menggunakan data luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan produksi lahan rata-rata per hektar (Muta'ali, 2015). Formulasi daya dukung lahan pertanian dapat menjadi pendekatan tingkat swasembada pangan wilayah. Apabila nilai DDLDP > 1, maka daerah mampu berswasembada pangan, nilai DDLDP <1 tidak mampu swasembada, dan jika DDLDP = 1, maka daya dukung lahan pertanian optimal.

Daya dukung lahan pertanian, dihitung dengan nilai kebutuhan fisik minimum sebesar 265 kilogram beras per orang per tahun (Kunu, 2020). Luas lahan panen di Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebesar 3.739,5 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 155.072. Produksi lahan rata-rata per Ha di Kabupaten Seruyan berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 3.563,87 kg per Ha. Daya dukung lahan pertanian dihitung berdasarkan formulasi berikut.

$$DDLDP = \frac{\text{Luas Panen} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{KFM} / \text{Produksi Rata – Rata Lahan Per Ha}}$$

Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Seruyan menghasilkan nilai sebesar 0,44. Nilai ini menunjukkan bahwa daerah tidak mampu berswasembada pangan karena jumlah penduduk melampaui batas optimal. Kondisi ini disebabkan oleh nilai daya dukung lahan pertanian yang kurang dari 1.





5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dimana untuk nilai IKL menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan IKLH harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Air

- i. Mewakili sumber pencemar
- ii. Pada outlet daerah aliran sungai utama
- iii. Pada titik intake pengolahan air minum
- iv. Pada danau, wakduk atau situ
- v. Pada aliran Badan Air kawasan hlu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

b. Indeks Kuliatas Udara

- i. Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat
- ii. Daerah atau kawasan industri
- iii. Permukiman padat penduduk
- iv. Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi

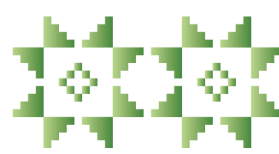
c. Indeks Kualitas Tutup Lahan

- i. Kawasan hutan
- ii. Area penggunaan lain

d. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

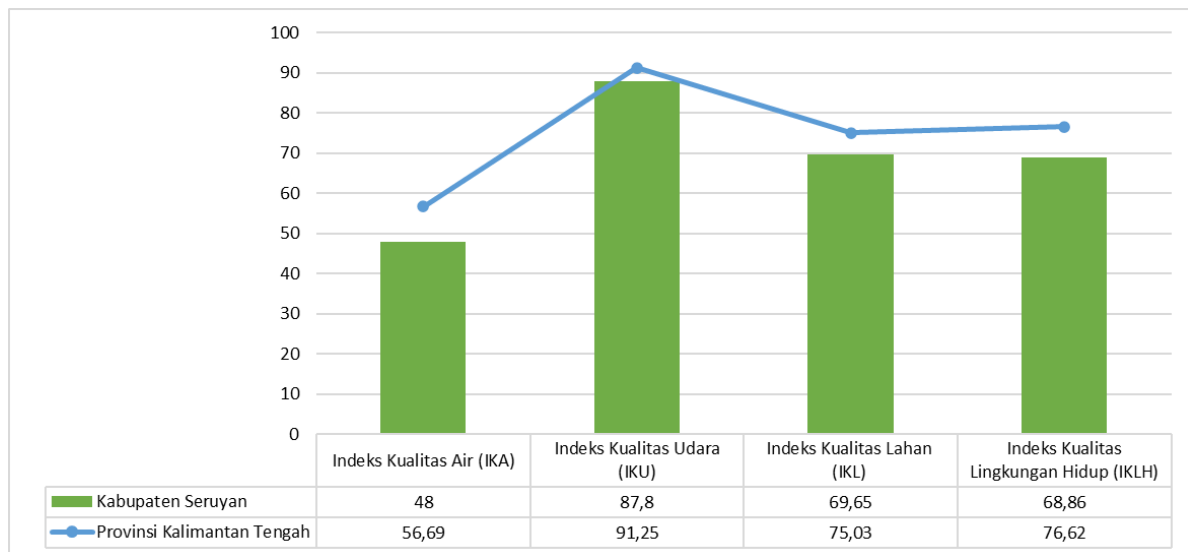
- i. Ekosistem gambut dengan fungsi lindung
- ii. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya

Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022, Kabupaten Seruyan memiliki nilai IKLH sebesar 68,86 yang tergolong dalam kategori sedang. Nilai tersebut berada di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Tengah yang bernilai 76,62. Kabupaten Seruyan berada di peringkat 13 dari 14 kabupaten/kota di



Provinsi Kalimantan Tengah, serta peringkat 184 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

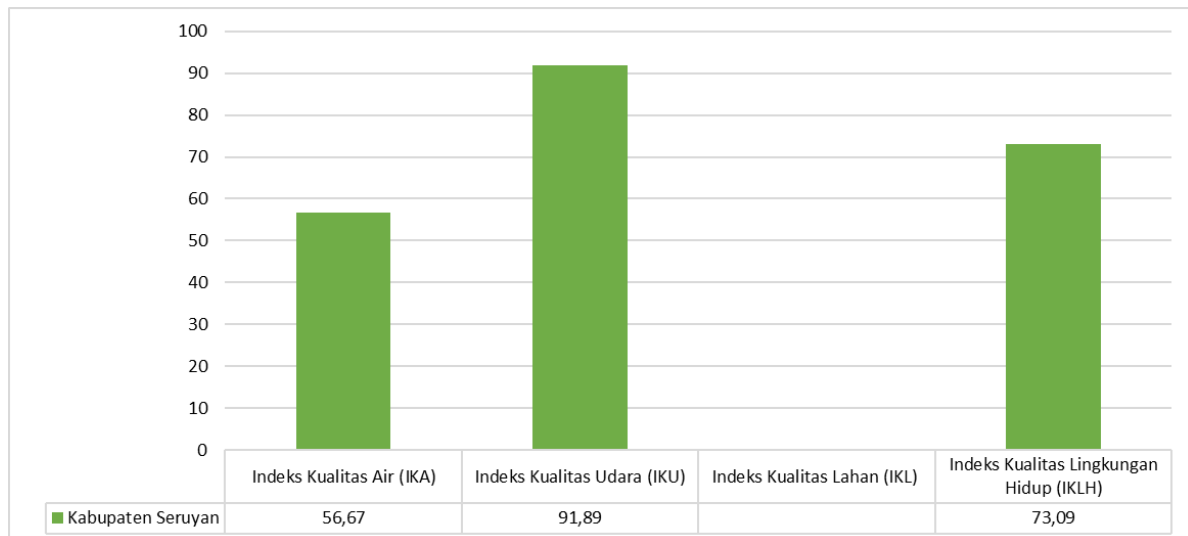
Pemantauan IKLH terdiri atas 6 titik pantau air dan 4 titik pantau udara. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sudah termasuk dalam kategori baik, namun yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih tergolong kurang yaitu 48. Salah satu titik pantau IKA berada di Sungai Seruyan yang mempunyai panjang 350 km dan beberapa anak sungai, sehingga membutuhkan perencanaan perlindungan yang bijak.



Gambar 2.4. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2022

Sumber: Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2022

Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 73,09. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH, pada setiap komponen pembentuk IKLH mengalami perbaikan.



Gambar 2.5. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

6. Indeks Risiko Bencana

Proses pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh peristiwa bencana alamnya. Tingkat risiko bencana dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perhitungan IRBI mencakup 7 (tujuh) jenis bencana, yaitu banjir, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem, kekeringan, serta cuaca ekstrem. Komponen yang dipertimbangkan dalam IRBI, antara lain bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Secara umum, nilai IRB Kabupaten Seruyan bersifat tetap pada tahun 2018-2021 yaitu 144,4 (tinggi) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 143,18 (tinggi). Pada tahun 2023, nilai IRB Kabupaten Seruyan kembali mengalami penurunan menjadi 136,28 (sedang).

Tabel 2.18. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Kelas Risiko
2018	144,40	Tinggi
2019	144,40	Tinggi
2020	144,40	Tinggi
2021	144,40	Tinggi
2022	143,18	Tinggi
2023	136,28	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2023



Analisis IRB diperoleh melalui komposit analisis indeks risiko tiap jenis bencana. Mengacu pada hasil perhitungan masing-masing bencana, terdapat 4 (empat) jenis bencana yang tergolong dalam kategori risiko tinggi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, serta cuaca ekstrem. Meskipun demikian, seluruh jenis bencana mengalami penurunan IRB pada tahun 2022 khususnya bencana cuaca ekstrem menjadi kategori sedang.

Tabel 2.19. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Tahun	IRB Banjir	Kelas Risiko	IRB Gempabumi	Kelas Risiko	IRB Karhutla	Kelas Risiko
2018	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2019	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2020	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2021	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2022	29,25	Tinggi	8,77	Sedang	29,25	Tinggi

Lanjutan Tabel 2.19. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Tahun	IRB Tanah Longsor	Kelas Risiko	IRB Gelombang Ekstrem	Kelas Risiko	IRB Kekeringan	Kelas Risiko	IRB Cuaca Ekstrem	Kelas Risiko
2018	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2019	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2020	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2021	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2022	9,75	Sedang	19,5	Tinggi	9,75	Sedang	11,05	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2022

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan mengadakan kajian risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Hasil kajian tersebut berhasil memetakan tingkat bahaya tiap bencana di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Berikut adalah rincian tingkat bahaya tiap bencana di setiap kecamatan di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.20. Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan

Kecamatan	Banjir	Longsor	Karhutla	Kekeringan	Cuaca Ekstrem
Batu Ampar	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Danau Seluluk	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi



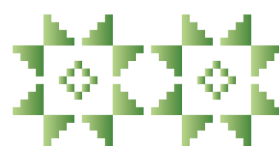
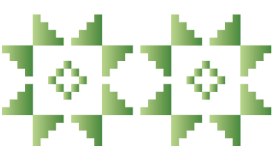
Kecamatan	Banjir	Longsor	Karhutla	Kekeringan	Cuaca Ekstrem
Hanau	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Seruyan Hilir	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Seruyan Hilir Timur	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Seruyan Hulu	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Seruyan Raya	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
Seruyan Tengah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Suling Tambun	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Danau Sembuluh	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi

Lanjutan Tabel 2.20. Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan

Kecamatan	Konflik Sosial	Covid-19	Wabah Penyakit	Kegagalan Teknologi
Batu Ampar	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Danau Seluluk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Hanau	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hilir	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hilir Timur	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hulu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Raya	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Suling Tambun	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Danau Sembuluh	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

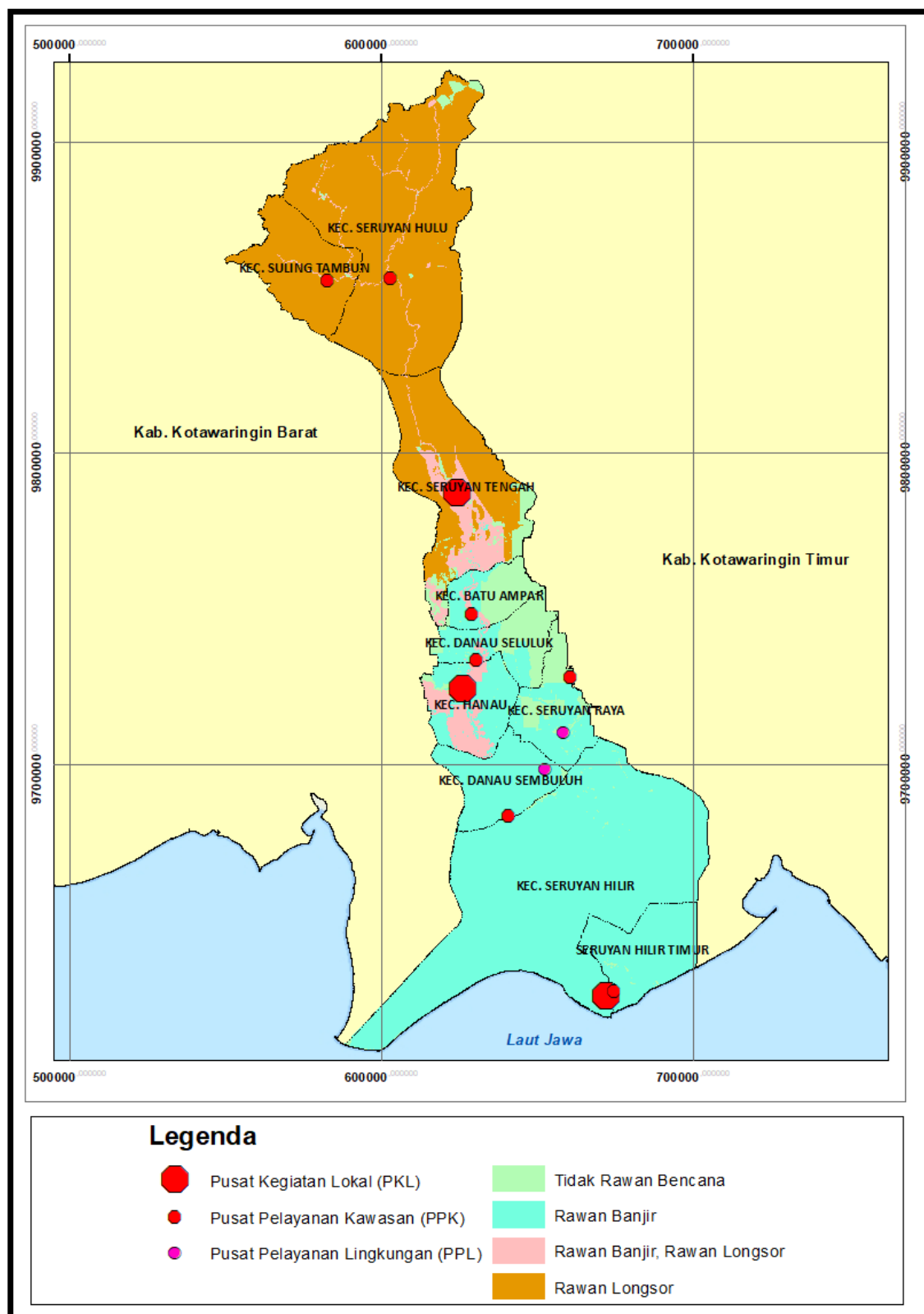
Sumber: Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Dalam rangka mengurangi kerugian dan dampak negatif apabila terjadi bencana perlu dilakukan langkah preventif pengurangan dampak bencana. Langkah awal yang dapat dilakukan yakni pemetaan kawasan rencana bencana dan sebaran penduduk. Dari gambar 2.6 dapat dilihat jika mayoritas pusat kegiatan berada pada kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, serta kawasan rawan banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor memang menjadi bencana yang memiliki risiko tertinggi terjadi di Kabupaten Seruyan karena wilayah Kabupaten Seruyan memiliki topografi berupa dataran rendah pada bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Seruyan serta memiliki topografi berupa perbukitan pada bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten Seruyan. Dengan tersebarnya mayoritas pusat kegiatan di Kabupaten Seruyan pada kawasan rawan bencana mengindikasikan bahwa sebagian besar infrastruktur publik di Kabupaten Seruyan tersebar di kawasan rawan bencana. Hal ini karena pada pusat kegiatan





terdapat/dibangun beberapa infrastruktur publik yang menunjang kehidupan masyarakat.



Gambar 2.6. Sebaran Pusat Kegiatan dan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan
(Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045)



7. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.

IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah, terdiri dari 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Hasil dari penilaian terhadap 7 fokus prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,62	0,40	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,23		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,53		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,40		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,30		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,37		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,52		

Sumber: BPBD Kabupaten Seruyan, 2022



Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Seruyan dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,40 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Seruyan perlu mempekuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

8. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan (Badan Pangan Nasional, 2022). Kondisi ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, dari sisi jumlah, dan mutu, seperti aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Pangan Nasional (IKP) merupakan salah satu inovasi dalam penyediaan data dan informasi pangan serta gizi untuk unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) yang merupakan adopsi dari indeks global (*Global Food Security Indeks – GFSI*).

Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara garis besar terdiri dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Secara lebih rinci indikator masing-masing aspek disajikan pada tabel di bawah. Perhitungan indeks ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan IKP yaitu sangat rentan, rentan, agak rentan, agak tahan, tahan, dan sangat tahan.

Tabel 2.22. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

No	Indikator
Aspek Ketersediaan Pangan	
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah
Aspek Keterjangkauan Pangan	
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Aspek Pemanfaatan Pangan	
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

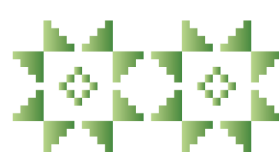


No	Indikator
8.	Persentase balita <i>stunting</i>
9.	Angka harap hidup pada saat lahir

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Berdasarkan dokumen Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan secara Nasional berada pada peringkat 353 dengan skor IKP 59,25. Berdasarkan hasil komposit, Kabupaten Seruyan masuk pada kategori prioritas 3 (agak rentan). Dibandingkan dengan hasil analisis pada unit provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IKP 68,90 dengan peringkat 28 nasional. Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kategori prioritas 5 (tahan). Kabupaten Seruyan relatif memiliki skor lebih rendah dibandingkan dengan skor IKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Seruyan menjadi salah satu dari 29 kabupaten yang menjadi prioritas 3 pada tahun 2023.

Melihat lebih jauh, perubahan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan dari tahun 2019-2023 terjadi secara fluktuatif. Kondisi ini juga diikuti dengan perubahan skor pada setiap tahunnya. Tahun 2019 Kabupaten Seruyan masuk pada kategori prioritas 4, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan skor dan masuk pada kategori prioritas 5. Namun pada tahun 2022, Kabupaten Seruyan kembali masuk pada kategori prioritas 4. Pada tahun 2023, kondisi ketahanan pangan Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dengan menurunnya nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan masuk kedalam kategori prioritas 3 (agak rentan).





Tabel 2.23. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Wilayah	Komposit	NCPR	Kemiskinan (%)	Pengeluaran Pangan (%)	Tanpa Listrik (%)	Tanpa Air Bersih (%)	Lama Sekolah Perempuan (tahun)	Rasio Tenaga Kesehatan	Angka Harapan Hidup (tahun)	Stunting (%)	IKP	IKP Ranking
1	Kotawaringin Barat	4	5	3,93	13,93	0	18,93	9,13	1,3	70,98	26,7	60,27	347
2	Kotawaringin Timur	5	2,15	5,95	22,52	0,32	25,29	8,9	1,55	70,15	35,4	73,69	257
3	Kapuas	6	0,49	5,52	36,19	1,86	42,22	8,47	4,03	69,02	29,8	80,59	148
4	Barito Selatan	4	2,83	4,88	32,98	0,14	34,18	8,97	3,03	67,48	22,6	66,35	320
5	Barito Utara	6	0,96	5,8	24,58	2,21	25,24	9,21	0,89	71,5	34,1	83,01	102
6	Katingan	6	0,94	5,5	29,77	2,32	37,8	9,06	1,67	66,16	32,6	76,74	218
7	Seruyan	3	3,99	7,12	24,5	0,11	31,69	8,56	0,86	69,46	31,3	59,25	353
8	Sukamara	4	4,84	3,72	21,98	2,4	22,43	9,51	2,51	71,8	28,3	60,04	349
9	Lamandau	3	4,71	3,34	26	5,47	23,96	9,36	1,87	69,62	22,6	58,9	356
10	Gunung Mas	3	5	5,64	26,45	0,72	42,85	8,54	3,13	70,72	28	55,49	367
11	Pulang Pisau	6	0,26	4,7	18,59	0	49,5	8,4	3,43	68,36	35,3	81,33	136
12	Murung Raya	2	5	6,4	23,12	5,2	53,53	8,75	0,52	69,75	29,9	49,08	384
13	Barito Timur	6	1,08	6,59	12,26	2,75	33,84	8,96	1,56	68,61	24,8	80,29	154
14	Kota Palangkaraya	6	0	3,61	6,8	0,03	9,56	9,08	2,78	73,47	31,2	79,61	68

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023



Tabel 2.24. Perubahan Kategori, Indeks, dan Ranking Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

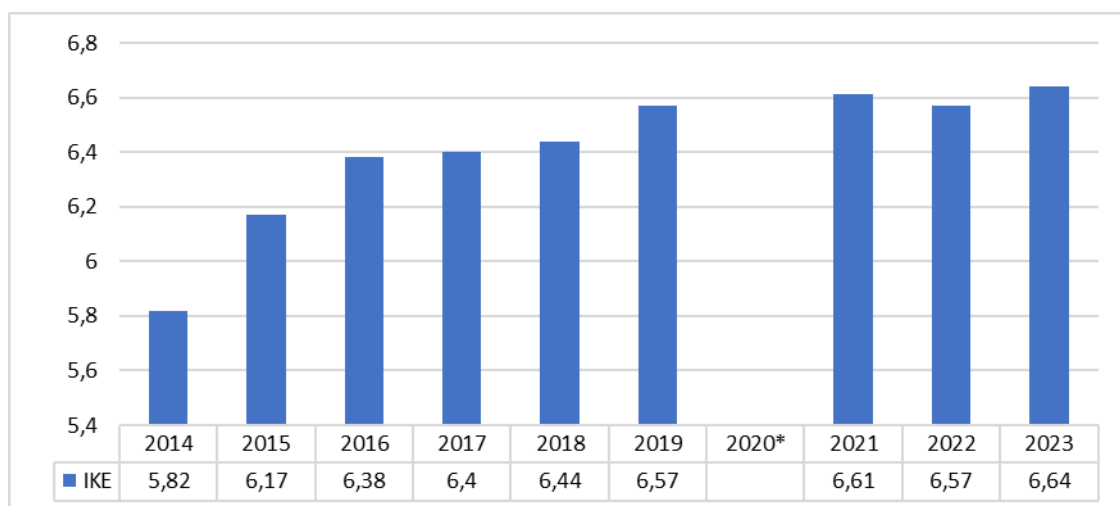
Wilayah	2019			2020			2021			2022			2023		
	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking
Kotawaringin Barat	4	62,97	328	4	59,76	350	4	4,89	346	4	60,23	342	4	60,27	347
Kotawaringin Timur	6	76,42	192	6	77,80	185	6	1,20	185	6	76,95	196	5	73,69	257
Kapuas	6	77,79	157	6	77,83	184	6	0,32	170	6	78,78	161	6	80,59	148
Barito Selatan	5	68,46	302	5	67,78	309	6	1,24	219	4	64,06	325	4	66,35	320
Barito Utara	6	82,31	61	6	83,10	69	6	0,40	40	6	83,20	67	6	83,01	102
Katingan	6	76,89	177	6	78,94	160	6	0,59	175	6	77,50	185	6	76,74	218
Seruyan	4	66,66	317	4	65,52	331	5	2,67	286	4	62,55	333	3	59,25	353
Sukamara	5	70,06	283	5	73,52	248	5	3,25	295	4	60,10	343	4	60,04	349
Lamandau	6	81,49	77	6	83,10	68	6	1,37	148	5	74,81	225	3	58,9	356
Gunung Mas	3	51,93	370	3	58,18	353	3	5,00	367	3	53,74	369	3	55,49	367
Pulang Pisau	6	80,02	110	6	80,03	133	6	0,36	108	6	79,76	140	6	81,33	136
Murung Raya	2	47,73	382	4	60,27	347	4	2,29	327	2	48,08	382	2	49,08	384
Barito Timur	6	76,23	196	5	74,96	222	6	1,28	211	6	80,41	120	6	80,29	154
Kota Palangkaraya	6	78,16	45	6	75,34	54	6	0,00	40	6	79,24	39	6	79,61	68

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

9. Indeks Ketahanan Energi (IKE)

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup *energy system performance*, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh *expert*. Aspek 4A terdiri dari, *Availability* (ketersediaan energi), *Accessibility* (kemampuan akses), *Affordability* (harga terjangkau), *Acceptability* (ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu:

- Sangat Tahan** (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
- Tahan** (Nilai 6 - 7,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.
- Kurang Tahan** (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- Rentan** (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan belum nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- Sangat Rentan** (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir.



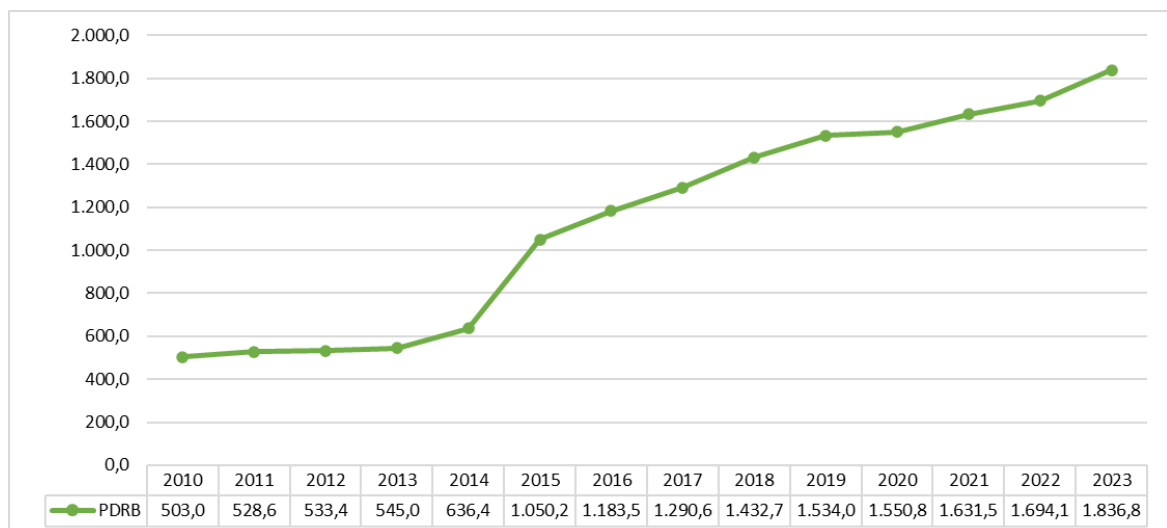
Gambar 2.7. Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Energi (IKE) Nasional Tahun 2014-2023

Sumber: Dewan Energi Nasional, 2023

Keterangan:

* : Data tidak tersedia

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indoensia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat dari tahun 2014 yang terkategori dengan kondisi tahan. **Perhitungan Indeks Ketahanan Energi belum dilakukan pada level kabupaten/kota.** Kondisi energi di Kabupaten Seruyan dianalisis menggunakan perkembangan nilai PDRB pada sektor pengadaan listrik dan gas. Dalam kurun waktu 14 tahun, sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Seruyan telah mengalami perkembangan nilai hingga 3 kali lipat. Pada tahun 2010, sektor ini memberikan sumbangan pada PDRB sebesar Rp503,00 Juta nilainya meningkat hingga mencapai Rp1.836,80 Juta pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi atau kebutuhan akan kelistrikan dan gas rumah tangga di Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



**Gambar 2.8. Perkembangan Nilai PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (Juta Rupiah)
Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

10. Indeks Ketahanan Air

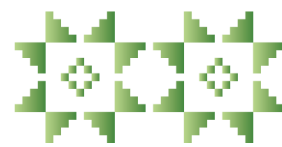
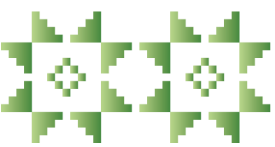
Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17

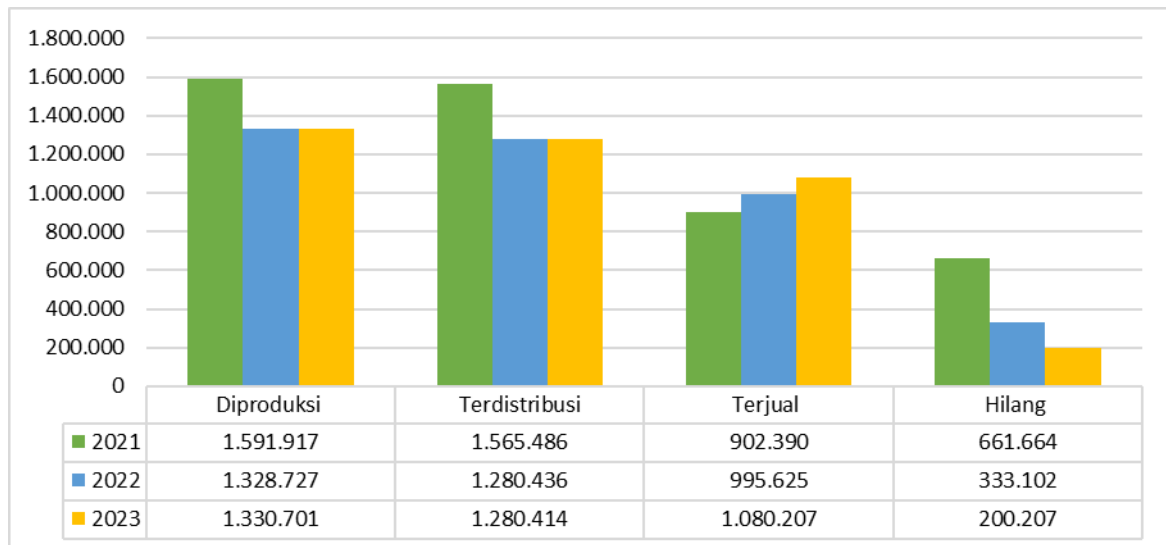


Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Berdasarkan data dari Dewan Sumber Daya Air Nasional lima pilar yang menjadi indikator ketahanan air dilihat dari beberapa provinsi terpilih berdasarkan kepadatan penduduk, lokasi, kondisi ketersediaan air, dan asumsi ketersediaan data. Provinsi tersebut antara lain Nasional, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil sementara yang disebarakan melalui kuesioner per 26 Juli 2022, perhitungan indeks ketahanan air di Nasional sebesar 77%, Jawa Barat sebesar 72%, DKI Jakarta sebesar 17%, Nusa Tenggara Timur sebesar 37%, dan Maluku Utara sebesar 34%. Hasil ini berarti masih kurang dari harapan target yang dituju.

Perhitungan Indeks Ketahanan Air masih belum dilakukan pada level kabupaten/kota. Kondisi kebutuhan air di Kabupaten Seruyan dapat digambarkan menggunakan data produksi dan distribusi air minum oleh Perusahaan Air Minum Daerah yang dikeluarkan dari BPS. Selama periode 2021-2023, produksi air minum mengalami penurunan yang cukup banyak dari 1.591.917 m³ pada tahun 2021 menjadi 1.330.701 m³ pada tahun 2023. Penurunan produksi air ini kemudian menyebabkan pula penurunan jumlah air minum yang terdistribusi ke masyarakat, pada tahun 2021 jumlah air minum yang terdistribusi sebanyak 1.565.486 m³, menurun menjadi 1.280.414 m³ pada tahun 2023. Meskipun produksi dan distribusi air minum selama periode 2021-2023 mengalami penurunan, jumlah air minum yang terjual mengalami peningkatan dari 902.390 m³ pada tahun 2021 menjadi 1.080.207 m³ pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah air minum yang hilang, dimana pada tahun 2021 jumlah air minum yang hilang sebanyak 661.664 m³ menjadi 200.207 m³ pada tahun 2023.





Gambar 2.9. Produksi dan Distribusi Air Minum oleh Perusahaan Air Minum (m³) di Kabupaten Seruyan

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

2.1.2. Demografi

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 10 kecamatan dan 100 desa/kelurahan. Pada tahun 2023, tercatat penduduk Kabupaten Seruyan sebanyak 171.304 jiwa. Persebaran penduduk Kabupaten Seruyan selama 6 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Seruyan berjumlah 189.975 jiwa, nilainya naik pada tahun 2018 menjadi 197.839 jiwa, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 148.230 jiwa. Namun pada periode selanjutnya tahun 2020-2023, jumlah penduduk Kabupaten Seruyan mulai mengalami peningkatan meskipun hingga tahun 2023 jumlahnya belum mampu menyamai kondisi pada tahun 2017. Penurunan terjadi disebabkan oleh proses *data cleaning* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk manajemen data yang *redundant*.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Seruyan Hilir sebesar 39.710 jiwa atau sekitar 23,20% dari total penduduk Kabupaten Seruyan. Hal ini sangat wajar karena terdapat Ibukota Kabupaten Seruyan yakni Kuala Pembuang di Kecamatan Seruyan Hilir. Ketersediaan fasilitas umum yang juga cukup memadai juga salah satu penyebab penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Seruyan Hilir.



Kecamatan Seruyan Tengah berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk 24.899 jiwa atau sekitar 14,50% dari total penduduk Kabupaten Seruyan. Berikutnya adalah Kecamatan Hanau dengan jumlah penduduk sebanyak 21.817 jiwa (12,7%), Kecamatan Seruyan Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 19.787 jiwa (11,60%), Kecamatan Danau Seluluk dengan jumlah penduduk sebanyak 18.220 jiwa (10,64%), Kecamatan Danau Sembuluh dengan jumlah penduduk sebanyak 14.912 jiwa (8,70%). Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Danau Sembuluh merupakan kecamatan yang memiliki jarak relatif dekat atau dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan, sehingga memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak.

Kecamatan Batu Ampar memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.721 jiwa atau sekitar 5,67% dari seluruh penduduk Kabupaten Seruyan. Kemudian Kecamatan Seruyan Hilir Timur memiliki penduduk sebanyak 10.175 jiwa (5,94%), Kecamatan Seruyan Hulu memiliki penduduk sebanyak 9.300 jiwa (5,43%). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Suling Tambun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.763 jiwa atau 1,61% dari seluruh penduduk Kabupaten Seruyan. Kondisi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk dapat merencanakan persebaran penduduk yang merata dengan cara peningkatan fasilitas-fasilitas umum yang memadai di seluruh kecamatan sehingga penduduk tidak terkonsentrasi di Ibu Kota Kabupaten. Hal ini untuk menghindari terbentuknya kota yang semrawut di masa yang akan datang.

Tabel 2.25. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2023

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Persentase Tahun 2023 (%)
Seruyan Hilir	39.192	35.655	37.380	37.930	38.530	39.710	23,2%
Seruyan Hilir Timur	9.048	9.672	9.190	9.330	9.486	10.175	5,9%
Danau Sembuluh	14.230	12.021	13.600	13.790	14.006	14.912	8,7%
Seruyan Raya	25.858	15.441	19.340	19.380	19.438	19.787	11,6%
Hanau	29.076	18.321	20.830	20.890	21.037	21.817	12,7%
Danau Seluluk	25.852	15.405	17.560	17.650	17.708	18.220	10,6%
Seruyan Tengah	26.710	22.170	23.720	23.970	24.251	24.899	14,5%
Batu Ampar	9.831	7.670	9.420	9.570	9.727	9.721	5,7%
Seruyan Hulu	14.058	9.033	9.160	9.160	9.182	9.300	5,4%
Suling Tambun	3.984	2.842	2.700	2.700	2.707	2.763	1,6%
Kabupaten Seruyan	197.839	148.230	162.910	164.380	166.072	171.304	100%

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2018-2023



Jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	2010		2020	
	Jiwa	%	Jiwa	%
Seruyan Hilir	29.456	21,05	37.380	22,95
Seruyan Hilir Timur	6.790	4,85	9.190	5,64
Danau Sembuluh	10.425	7,45	13.600	8,35
Seruyan Raya	18.910	13,51	19.340	11,87
Hanau	18.527	13,24	20.830	12,79
Danau Seluluk	16.424	11,74	17.560	10,78
Seruyan Tengah	20.044	14,32	23.720	14,56
Batu Ampar	7.378	5,27	9.420	5,78
Seruyan Hulu	9.332	6,67	9.160	5,62
Suling Tambun	2.645	1,89	2.700	1,66
Kabupaten Seruyan	139.931	100,00	162.910	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010 dan 2022)

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat kategori yakni sangat lambat, lambat, cepat dan sangat cepat. Adapun pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk kategori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2-3 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan sangat cepat dengan pertumbuhan penduduk lebih besar dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Seruyan adalah 171.304 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 166.072 jiwa. Apabila dibandingkan tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seruyan yakni sebesar -2,69% yang artinya



terjadi penurunan jumlah penduduk. Selain laju pertumbuhan penduduk kabupaten yang bernilai negatif, beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan juga mengalami pertumbuhan penduduk bernilai negatif antara lain Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.

Tabel 2.27. Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2017-2023

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2020-2023)
Seruyan Hilir	39.192	35.655	37.380	37.930	38.530	39.710	2,15%
Seruyan Hilir Timur	9.048	9.672	9.190	9.330	9.486	10.175	3,55%
Danau Sembuluh	14.230	12.021	13.600	13.790	14.006	14.912	3,25%
Seruyan Raya	25.858	15.441	19.340	19.380	19.438	19.787	0,86%
Hanau	29.076	18.321	20.830	20.890	21.037	21.817	1,76%
Danau Seluluk	25.852	15.405	17.560	17.650	17.708	18.220	1,24%
Seruyan Tengah	26.710	22.170	23.720	23.970	24.251	24.899	1,74%
Batu Ampar	9.831	7.670	9.420	9.570	9.727	9.721	1,16%
Seruyan Hulu	14.058	9.033	9.160	9.160	9.182	9.300	0,64%
Suling Tambun	3.984	2.842	2.700	2.700	2.707	2.763	0,84%
Kabupaten Seruyan	197.839	148.230	162.910	164.380	166.072	171.304	1,81%

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2017-2022

Laju pertumbuhan Kabupaten Seruyan apabila ditinjau dari data sensus penduduk 2010 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,42% dari 139.931 jiwa menjadi 162.910 jiwa. Adapun jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	2010	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)
Seruyan Hilir	29.456	37.380	2,38%
Seruyan Hilir Timur	6.790	9.190	3,03%
Danau Sembuluh	10.425	13.600	2,66%



Kecamatan	2010	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)
Seruyan Raya	18.910	19.340	0,22%
Hanau	18.527	20.830	1,17%
Danau Seluluk	16.424	17.560	0,67%
Seruyan Tengah	20.044	23.720	1,68%
Batu Ampar	7.378	9.420	2,44%
Seruyan Hulu	9.332	9.160	-0,19%
Suling Tambun	2.645	2.700	0,21%
Kabupaten Seruyan	139.931	162.910	1,52%

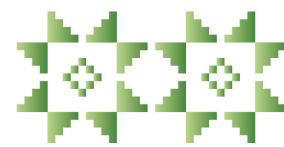
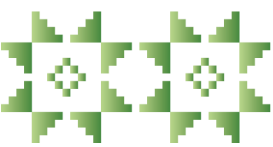
Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010 dan 2020

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada akhir tahun 2023 adalah 171.304 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/km². Kecamatan terpadat berada di Kecamatan Hanau sebesar 43 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kecamatan Hanau memiliki luas wilayah paling kecil dan menjadi 1 dari 3 kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Seruyan. Kepadatan penduduk yang terjadi di Kecamatan Hanau terjadi karena Kecamatan Hanau dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan yang merupakan jalan poros yang menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, selain itu adanya fasilitas pelayanan berupa Rumah Sakit juga menjadi salah satu faktor lebih terkonsentrasinya penduduk di Kecamatan Hanau. Selain Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya dan Kecamatan Danau Seluluk juga memiliki kepadatan yang lebih tinggi karena juga dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan.

Kecamatan Seruyan Hilir sebagai Ibukota Kabupaten Seruyan hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 9 jiwa/km². Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan yang dilewati atau berdekatan dengan Jalan Trans Kalimantan. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Suling Tambun yang hanya 2 jiwa/km²





dan Kecamatan Seruyan Hulu yang hanya 3 jiwa/km². Kecamatan Suling Tambun dan Kecamatan Seruyan Hulu merupakan kecamatan yang berada di ujung barat laut Kabupaten Seruyan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.29. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Kecamatan	Luas		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Km ²	%	Jiwa	%	
Seruyan Hilir	4.230,10	27,81	39.710	23,18	9
Seruyan Hilir Timur	1.323,41	8,7	10.175	5,94	8
Danau Sembuluh	1.442,06	9,48	14.912	8,70	10
Seruyan Raya	806,22	5,3	19.787	11,55	25
Hanau	509,59	3,35	21.817	12,74	43
Danau Seluluk	543,05	3,57	18.220	10,64	34
Seruyan Tengah	1.245,83	8,19	24.899	14,53	20
Batu Ampar	620,63	4,08	9.721	5,67	16
Seruyan Hulu	3.024,07	19,88	9.300	5,43	3
Suling Tambun	1.376,65	9,05	2.763	1,61	2
Kabupaten Seruyan	15.211,62	100	171.304	100	11

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Kepadatan penduduk Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)		Kepadatan (Jiwa/Km ²)	
		2010	2020	2010	2020
Seruyan Hilir	4.659,00	29.456	37.380	6	8
Seruyan Hilir Timur	1.428,00	6.790	9.190	5	6
Danau Sembuluh	1.555,00	10.425	13.600	7	9
Seruyan Raya	869,00	18.910	19.340	22	22
Hanau	549,00	18.527	20.830	34	38
Danau Seluluk	586,00	16.424	17.560	28	30
Seruyan Tengah	1.343,32	20.044	23.720	15	18
Batu Ampar	668,68	7.378	9.420	11	14
Seruyan Hulu	3.262,00	9.332	9.160	3	3
Suling Tambun	1.484,00	2.645	2.700	2	2
Kabupaten Seruyan	16.404,00	139.931	162.910	9	10

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010 dan 2020)



4. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu penduduk berusia 15-64 tahun yaitu sekitar 70,76% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 25,79%. Berdasarkan kategori umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori 30-34 tahun yakni sebanyak 15.688 jiwa atau 9,45% dari total penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2022. Hal ini antara lain terjadi karena banyaknya penduduk yang datang ke Kabupaten Seruyan yang merupakan usia bekerja/produktif baik dari segi kinerja maupun reproduksi, terutama pekerja di sektor perkebunan dan sektor pekerjaan lainnya maupun di sektor pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara.

**Tabel 2.31. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seruyan
Tahun 2023**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	7.534	7.239	14.773
5 – 9	7.328	7.083	14.411
10 – 14	7.490	6.979	14.469
15 – 19	7.563	6.939	14.502
20 – 24	7.305	6.856	14.161
25 – 29	7.415	6.837	14.252
30 – 34	8.016	7.211	15.227
35 – 39	8.252	7.300	15.552
40 – 44	7.622	6.617	14.239
45 – 49	6.798	5.628	12.426
50 – 54	5.391	4.279	9.670
55 – 59	3.854	2.911	6.765
60 – 64	2.614	2.043	4.657
65 – 69	1.566	1.347	2.913
70 – 74	927	777	1.704
75+	832	751	1.583
Kab. Seruyan 2023	90.507	80.797	171.304
Kab. Seruyan 2022	87.776	78.296	166.072



Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kab. Seruyan 2020	86.211	76.695	162.906
Kab. Seruyan 2010	75.235	64.969	139.931

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebanyak 166.072 jiwa. Penduduk di Kabupaten Seruyan terdiri dari 87.776 orang laki-laki dan 78.296 orang perempuan, atau dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan nilai rasio jenis kelaminnya mencapai 112, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki di Kabupaten Seruyan. Jika melihat data setiap kecamatan, kecamatan dengan sex *ratio* tertinggi adalah Kecamatan Seruyan Raya sebesar 110,99 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 111 penduduk laki-laki. Sedangkan sex *ratio* terendah adalah Kecamatan Suling Tambun sebesar 106,72 dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 107 penduduk laki-laki.

Tabel 2.32. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022*

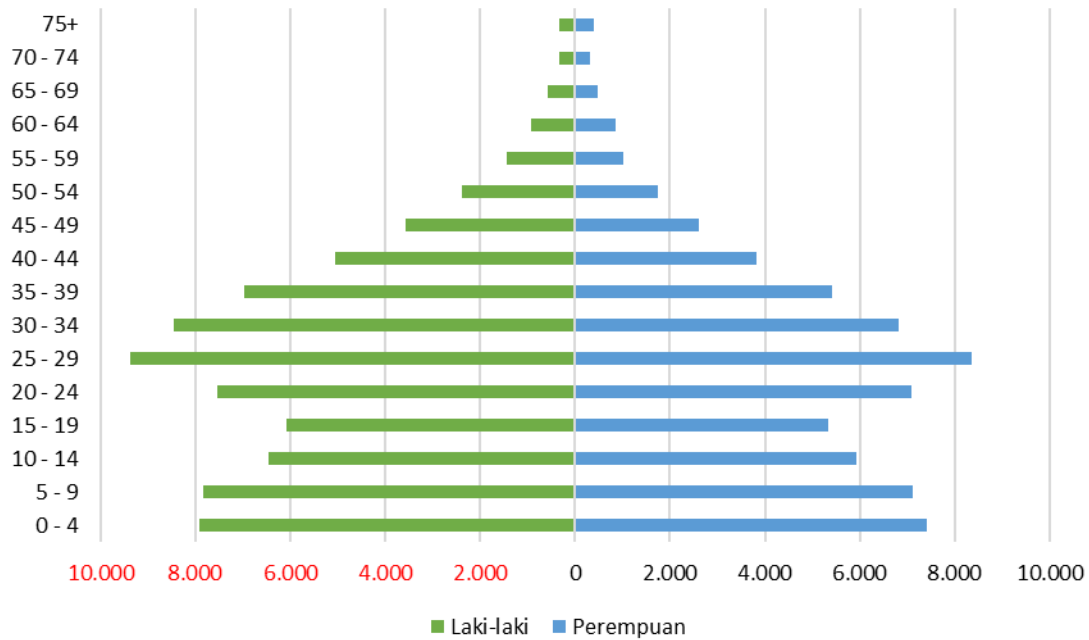
Kecamatan	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Seruyan Hilir	18.653	17.212	35.865	108,37
Seruyan Hilir Timur	5.299	4.865	10.164	108,92
Danau Sembuluh	6.898	6.247	13.145	110,42
Seruyan Raya	8.678	7.819	16.479	110,99
Hanau	9.729	9.082	18.811	107,12
Danau Seluluk	7.847	7.120	14.967	110,21
Seruyan Tengah	11.792	10.882	22.674	108,36
Batu Ampar	4.211	3.930	8.141	107,15
Seruyan Hulu	4.645	4.247	8.951	109,53
Suling Tambun	1.382	1.295	2.677	106,72
Kabupaten Seruyan	87.776	78.296	166.072	112,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan

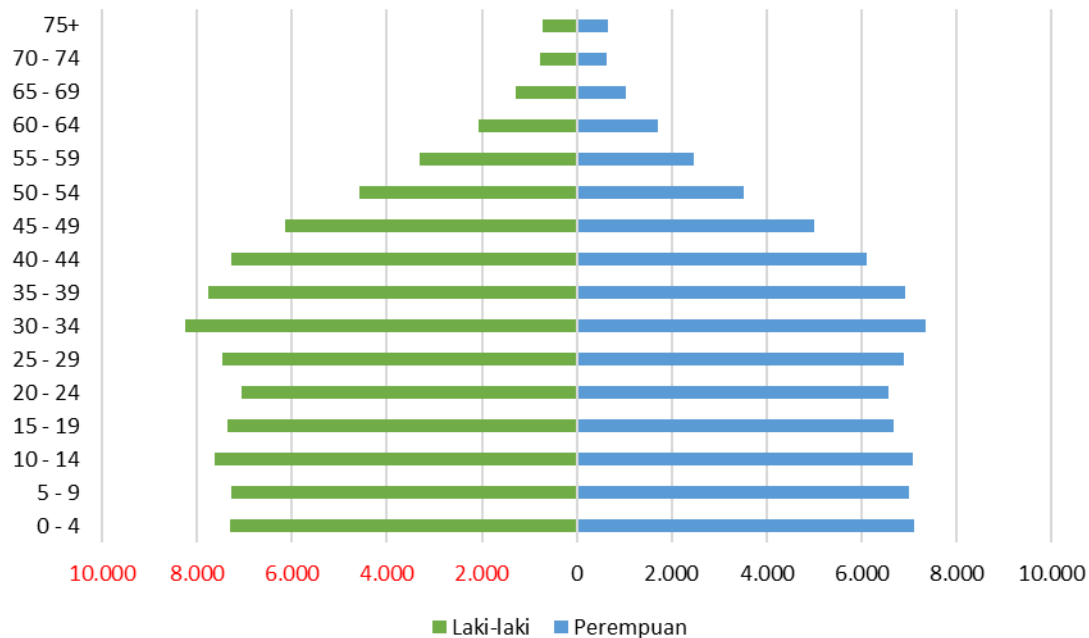


melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah.



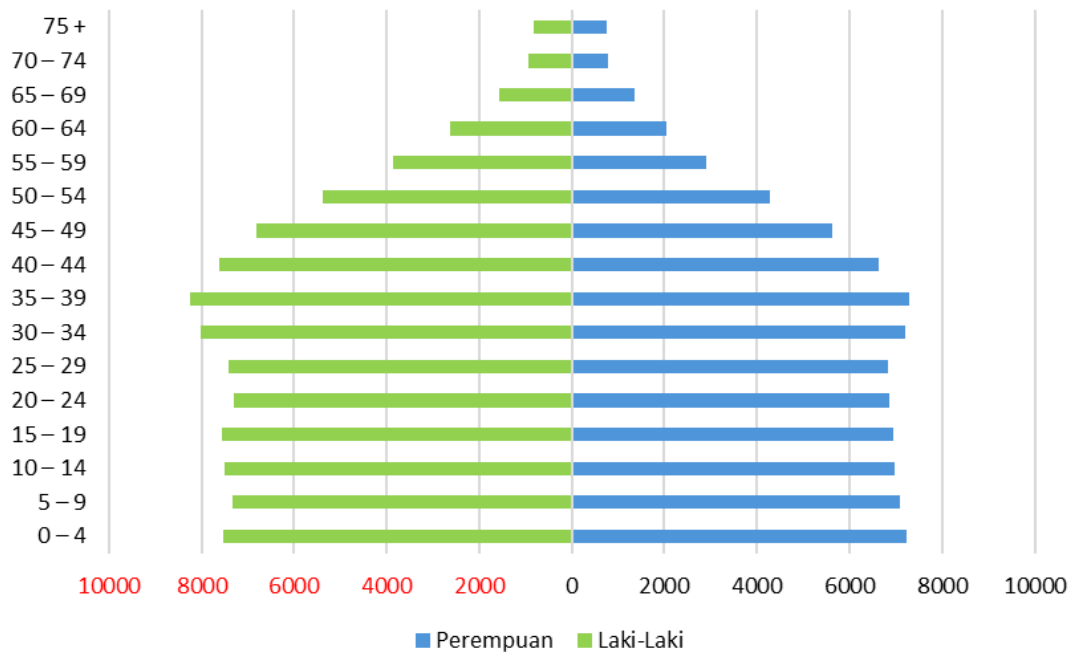
Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2010

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010



Gambar 2.11. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2020



Gambar 2.12. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023

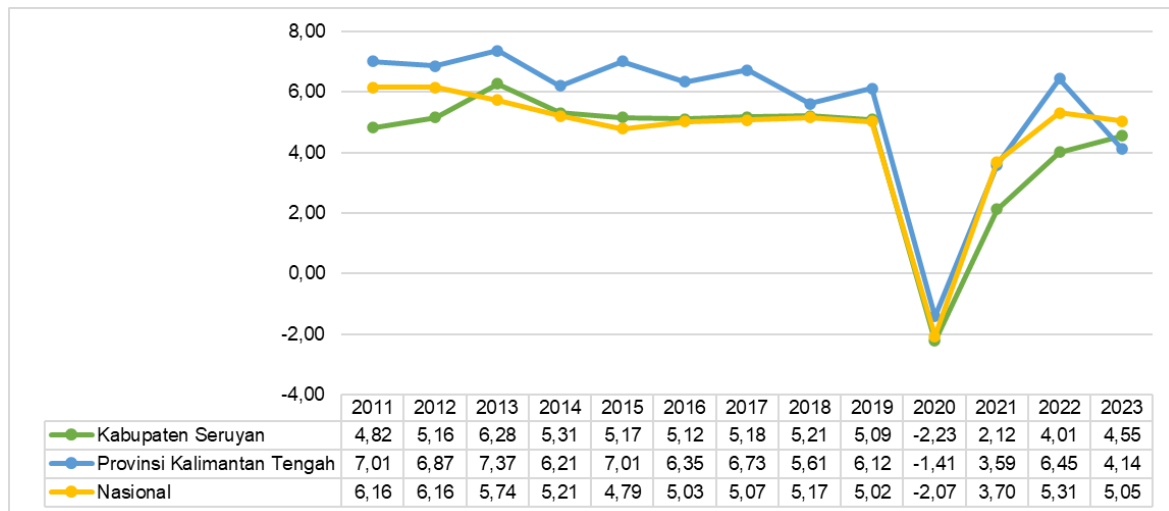
Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan sebesar Rp3.809,81 miliar. Nilainya naik hingga mencapai Rp6.560,8 miliar pada tahun 2023. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang positif. Meskipun nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan namun angka pertumbuhan tidak selalu menunjukkan peningkatan.



Gambar 2.13. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2023

Selama tahun 2010-2023 terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 14 tahun nilai laju pertumbuhan cenderung terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,29%. Laju pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -2,23%, hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan mengalami penurunan yang kemudian juga menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami guncangan, begitu pula dengan perekonomian Kabupaten Seruyan. Bahkan pada tahun 2020, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni -2,07% untuk Nasional dan -1,41% untuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2021, nilai laju pertumbuhan mengalami kenaikan karena kondisi pandemi COVID-10 yang sudah mulai terkendali. Banyak program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dijalankan, masyarakat sudah mulai mampu beradaptasi, sehingga perlahan-lahan kondisi ekonomi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Nasional mulai membaik. Meski demikian, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan masih jauh tertinggal dari Nasional dan Provinsi. Pada tahun 2023 terjadi perkembangan yang positif karena nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seruyan yang sebesar 4,55%, lebih tinggi



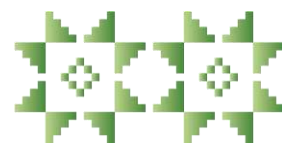
dari nilai pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,14%. Akan tetapi nilai pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seruyan tersebut masih berada di bawah nilai pertumbuhan PDB ADHK Nasional yang sebesar 5,05%.

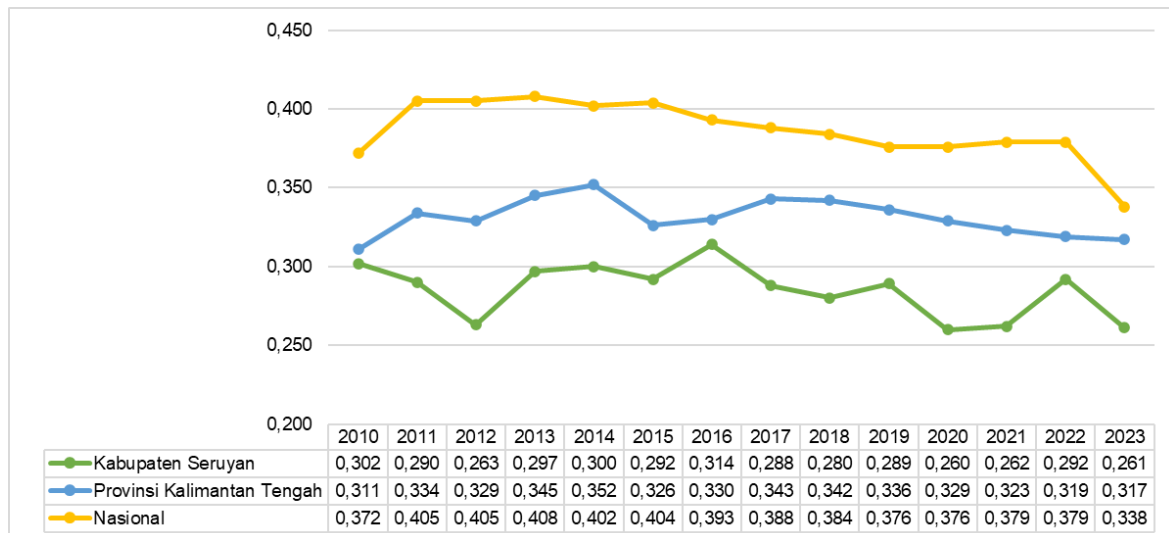
2. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. BPS mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini $< 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini $> 0,4$).

Indeks Gini Kabupaten Seruyan pada tahun 2010-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama tahun 2010-2022 tercatat Indeks Gini tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,314 dan Indeks Gini terendah pada tahun 2020 sebesar 0,260. Pada periode tahun 2010-2012 Indeks Gini Kabupaten Seruyan mengalami tren penurunan dari 0,302 yang masuk kedalam kategori ketimpangan sedang pada tahun 2010 menjadi 0,263 yang masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah pada tahun 2012. Pada periode selanjutnya tahun 2013-2017, secara bergantian setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan serta bergantian masuk dalam kategori ketimpangan sedang dan rendah. Kemudian pada periode tahun 2018-2022, nilai Indeks Gini Kabupaten Seruyan mengalami tren yang fluktuatif namun berhasil bertahan pada kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Seruyan sebesar 0,261, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,292 pada tahun 2022.

Selama 13 tahun Indeks Gini Kabupaten Seruyan selalu berada di bawah Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Kabupaten Seruyan lebih merata dibandingkan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.





Gambar 2.14. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 2010-2023

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

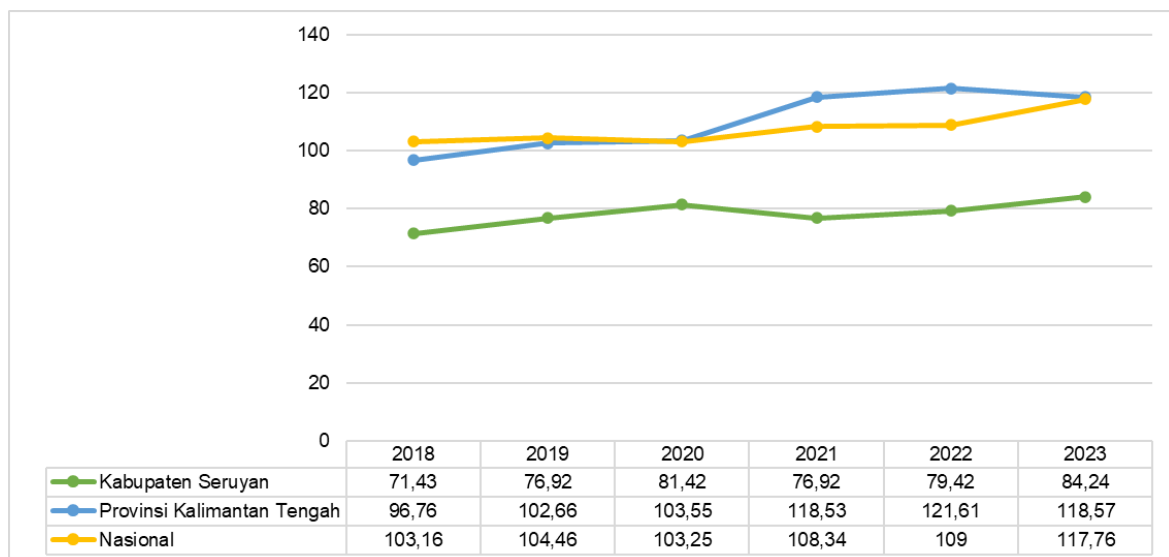
Nilai Tukar Petani (NTP) yang sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Selain itu NTP juga memiliki manfaat sebagai tolak ukur kemampuan tukar produk yang dijual dari petani dengan berbagai produk yang dibutuhkan dalam segala produksi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga besar kecilnya angka NTP akan menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk-produk lain.

Penilaian NTP dibedakan menjadi 3 kelompok yakni $NTP > 100$, maka petani mengalami keuntungan/profit, dimana petani memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian dibanding besarnya hasil konsumsi petani (pengeluaran petani); $NTP = 100$, maka petani mengalami keimpasan hasil keuntungan produksi komoditi pertanian dengan besarnya hasil konsumsi petani (pengeluaran petani); $NTP < 100$, maka petani mengalami kerugian/defisit, dimana petani tidak memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian.

Selama periode tahun 2018-20223, NTP Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, NTP Kabupaten Seruyan sebesar

71,43. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 82,24 pada tahun 2023. Meskipun NTP Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan, namun nilainya tidak mampu menyentuh pada angka 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani mengalami kerugian/defisit, dimana petani tidak memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan NTP untuk membantu petani.

Jika dibandingkan dengan kondisi NTP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, NTP Kabupaten Seruyan berada di bawah NTP Provinsi dan Nasional. Berbeda dengan Kabupaten Seruyan, NTP Provinsi dan Nasional nilainya sudah mampu melebihi 100. Pada tahun 2023, NTP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 118,57 dan NTP Nasional sebesar 117,76.



Gambar 2.15. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pertani (NTP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2023

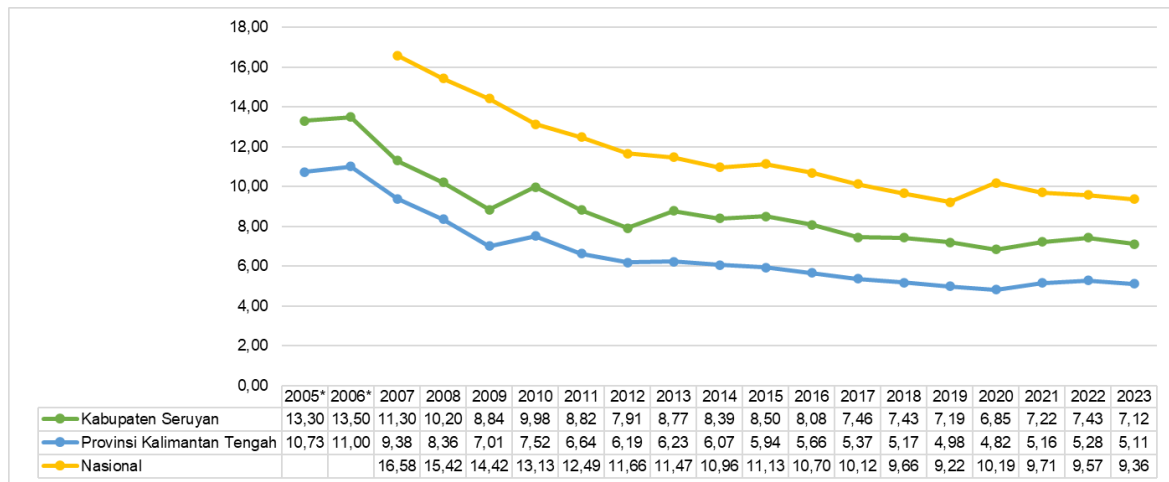
4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator, salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kemiskinan adalah persentase penduduk miskin (P0) yang dianggap mampu merepresentasikan angka kemiskinan.



Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2005-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2005 persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Seruyan sebesar 13,30%. Tahun 2006 nilainya naik sebesar 0,20% menjadi 13,50%. Kemudian pada periode tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan sebesar 4,66% sehingga pada tahun 2009 persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan sebesar 8,84%. Namun pada tahun 2010, kembali terjadi peningkatan persentase penduduk miskin (P0) menjadi 9,98%. Pada periode tahun 2011-2017, mengalami penurunan dan kenaikan secara bergantian setiap tahunnya namun secara keseluruhan cenderung menurun. Dimana pada tahun 2017, persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan sebesar 7,46%. Pada tahun selanjutnya, persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 6,85%. Namun pada tahun 2021-2022 nilainya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 7,43% pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 7,12%, dari yang sebelumnya 7,43% pada tahun 2022.

Kenaikan persentase penduduk miskin (P0) yang terjadi pada tahun 2020-2022 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Secara keseluruhan, capaian persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan lebih rendah dari Nasional yakni 7,12% untuk Kabupaten Seruyan dan 9,36% untuk Nasional pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin (P0) Provinsi Kalimantan Tengah, nilainya berada diatas Provinsi yakni sebesar 5,11% untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023.



Gambar 2.16. Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

Keterangan:

* : Data P0 Nasional Tidak Tersedia

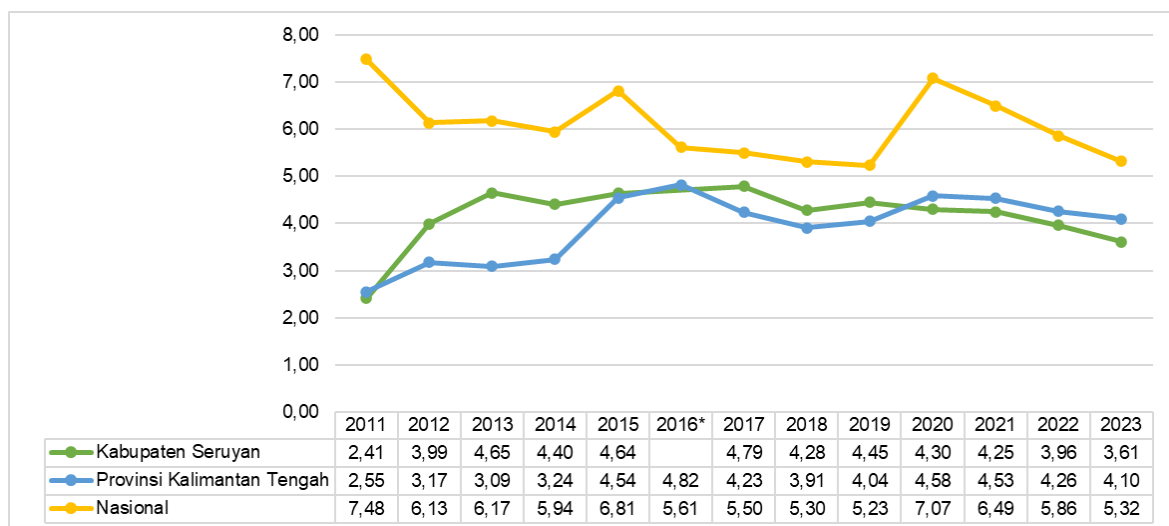
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan tahun 2011-2022 mengalami tren yang fluktuatif. Pada periode tahun 2011-2013, TPT Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2,41% pada tahun 2011 menjadi 4,65% pada tahun 2013. Selama periode tahun 2014-2021, TPT Kabupaten Seruyan secara bergantian mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya, dengan nilai TPT terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 4,25% dan nilai TPT tertinggi pada tahun 2017 yakni sebesar 4,79%. Selama periode tersebut nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di kisaran 4%, dimana kemudian nilainya mampu turun menjadi 3,61% pada tahun 2023.

Adapun kondisi TPT Kabupaten Seruyan dengan Provinsi Kalimantan Tengah cukup relevan. Pada periode tahun 2011-2016 TPT Provinsi Kalimantan

Tengah cenderung meningkat. Pada periode tahun 2017-2019 TPT Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan TPT Provinsi Kalimantan Tengah hanya berkisar 0,05-1,3%. Sedangkan kondisi TPT Nasional cenderung mengalami tren penurunan. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020, namun kembali turun pada periode tahun 2021-2022. Pada periode tahun 2020-2022, nilai TPT Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional secara bersamaan mengalami penurunan nilai TPT. Secara keseluruhan nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di bawah TPT Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi secara keseluruhan nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di atas nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada periode tahun 2020-2023 nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.17. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2023

Keterangan:

* : Data TPT Kabupaten Seruyan Tidak Tersedia

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

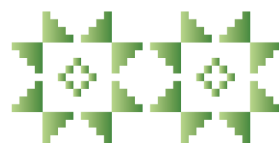
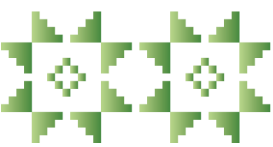
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di mana dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan

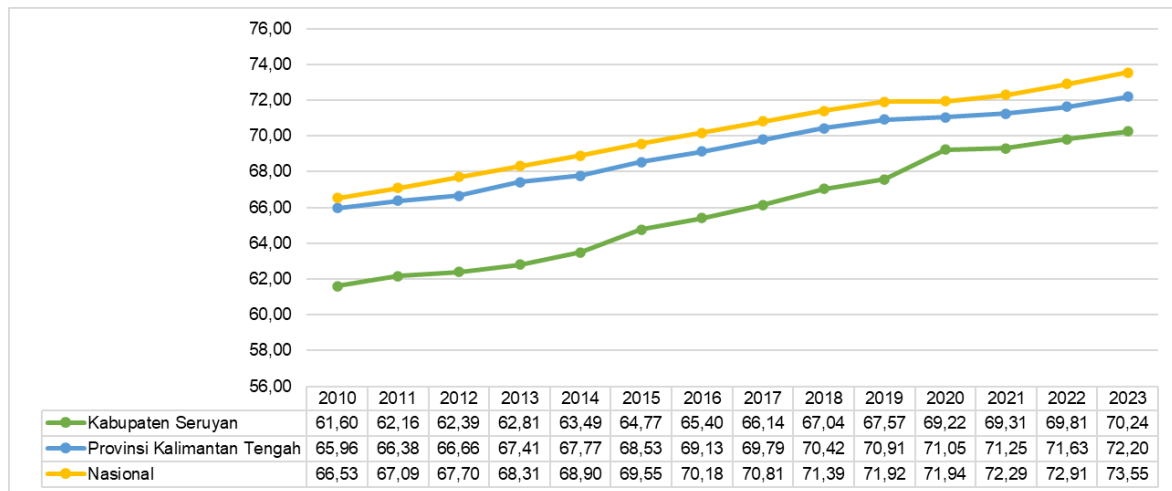


hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita. BPS mengelompokkan IPM menjadi 4 (empat) kategori yaitu rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM \leq 70$), tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Sebagai catatan bahwa terjadi perubahan perhitungan komponen IPM pada tahun 2020-2023.

Sejak tahun 2010, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Seruyan sebesar 61,60 terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 70,24. Rata-rata pertumbuhan IPM di Kabupaten Seruyan adalah 0,99% per tahun. Dalam kurun waktu 14 tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 8,64 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Seruyan. Dengan capaian ini status pembangunan manusia di Kabupaten Seruyan berada di level sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) dan pada tahun 2023 berada di level tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$).

Perkembangan IPM di Kabupaten Seruyan sejalan dengan peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Adapun nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke dalam kategori sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) ada tahun 2010 hingga tahun 2017, dan statusnya naik menjadi tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$) pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Demikian pula dengan nilai IPM Nasional yang masuk kedalam kategori sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) pada tahun 2010 hingga tahun 2015, yang kemudian pada tahun berikutnya statusnya naik menjadi tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$). Secara keseluruhan nilai IPM Kabupaten Seruyan berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.





Gambar 2.18. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

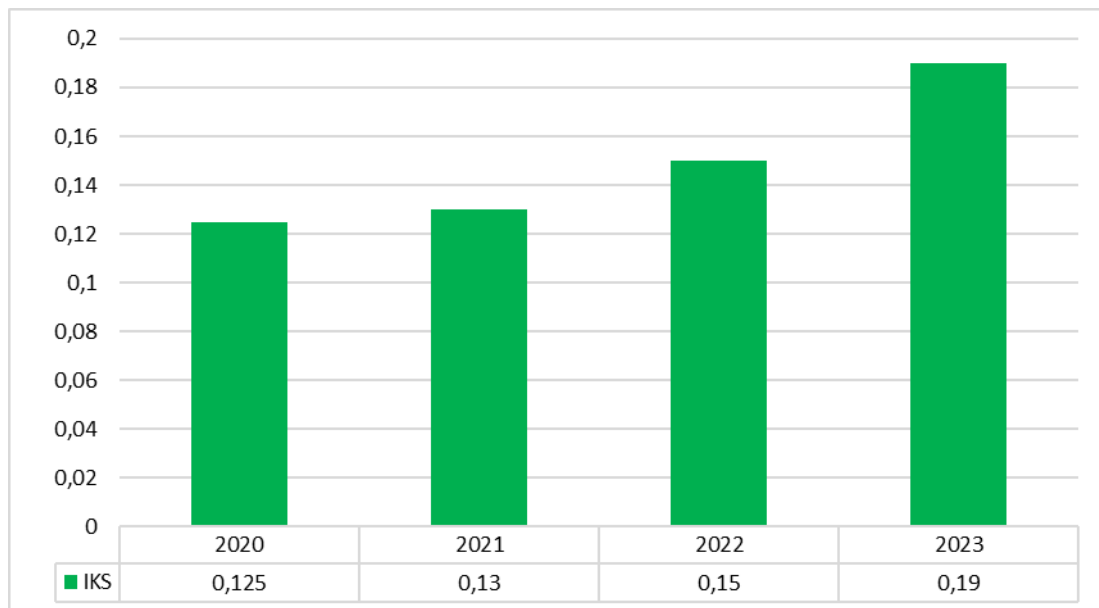
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50 - 0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai IKS Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 hanya sebesar 0,125. Nilainya terus meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2021 nilainya naik

menjadi 0,13 dan pada tahun 2023 nilai kembali mengalami kenaikan menjadi 0,19. Secara keseluruhan IKS Kabupaten Seruyan masuk kedalam IKS Tidak Sehat.



Gambar 2.19. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023

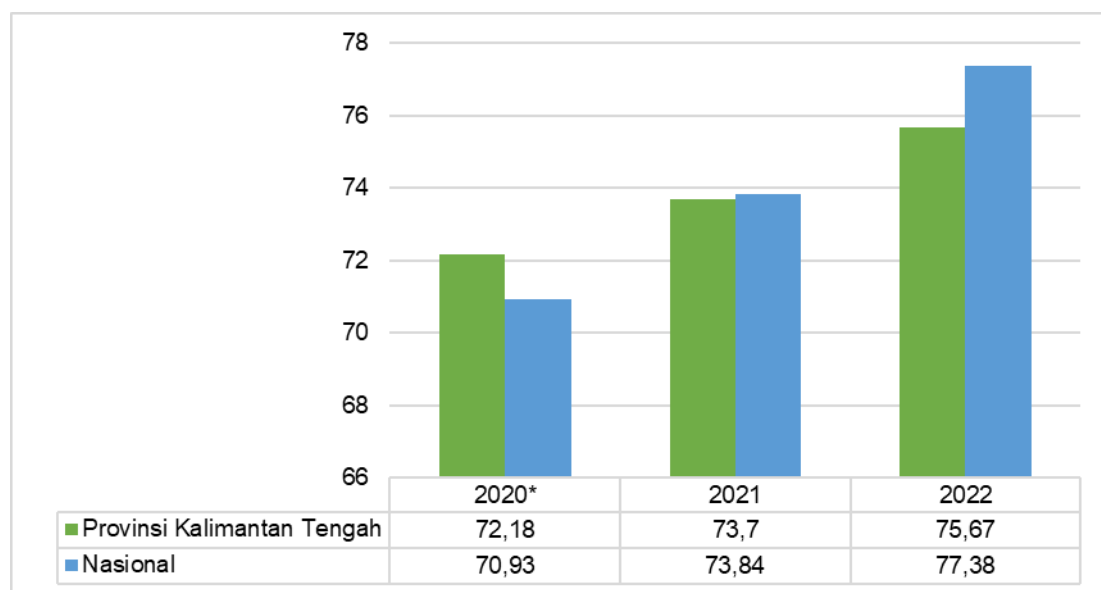
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020-2023

2. Indeks Kualitas Keluarga

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,18 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 1,89 persen menjadi 73,57 pada tahun 2021. Pada tahun

2022 nilai IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 2,1 persen menjadi 75,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang cukup responsif gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,43 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai IKK Nasional meningkat sebesar 3,54 menjadi 77,38. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak.



Gambar 2.20. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020-2022

Keterangan:

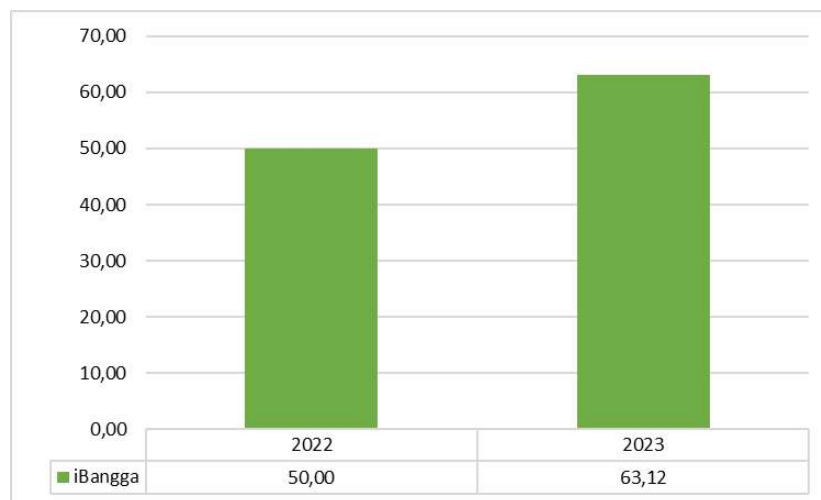
* : Data 2020 Menggunakan Metadata Lama

Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga analisis kondisi IKK hanya dilakukan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Untuk menggambarkan kondisi kualitas keluarga pada level kabupaten/kota maka digunakan indeks lain yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Nilai iBangga Kabupaten Seruyan menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pada tahun 2022, nilai iBangga Kabupaten Seruyan sebesar 50,00 yang kemudian naik menjadi 63,12 pada tahun 2023. iBangga Kabupaten Seruyan menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan status pembangunan keluarga yang berkembang.



Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023

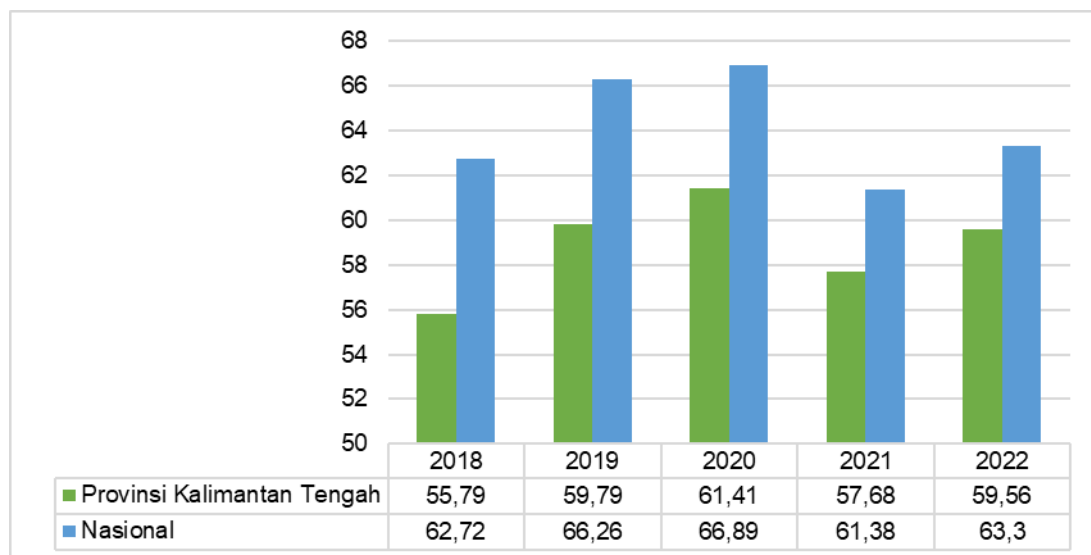
Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, 2023

3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar membentuk IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. **Perhitungan Indeks Perlindungan Anak belum dilakukan hingga level kabupaten/kota**, sehingga yang dianalisis adalah IPA Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2018-2020 nilai IPA Provinsi

Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Pada tahun 2022 Nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah Kembali mengalami perkembangan yang positif. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 61,41 yang kemudian turun menjadi 57,68 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 59,56 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2018-2020 yakni sebesar 66,89 di tahun 2020 namun turun menjadi 61,38 di tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 63,3 pada tahun 2022. Penurunan nilai IPA Provinsi dan Nasional ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021.



Gambar 2.22. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020-2022

4. Indeks Gender

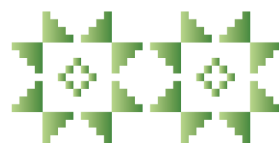
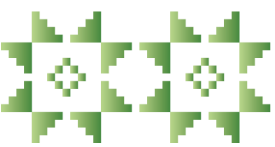
Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

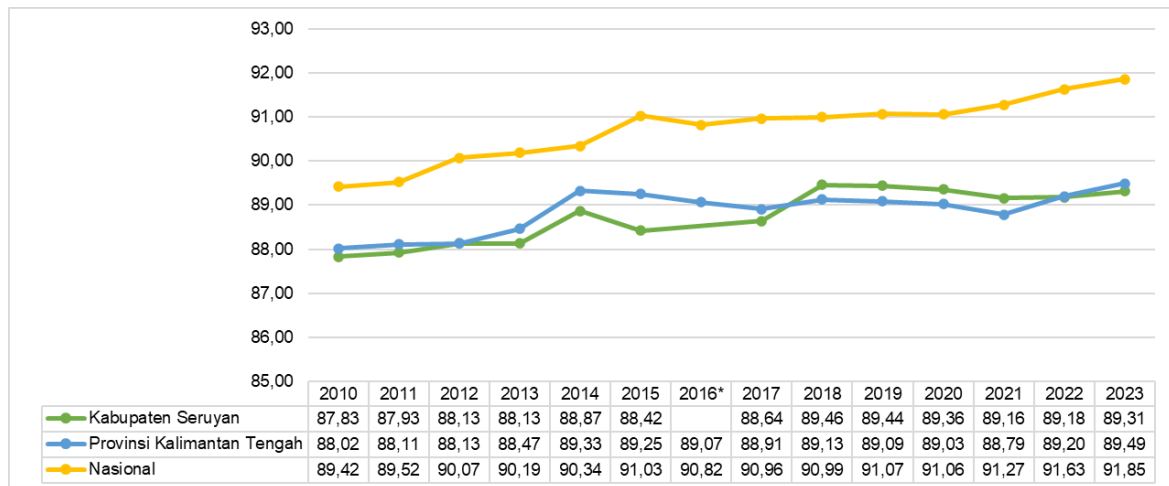


a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Adapun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah ($IPG < 90,00$) dan tinggi ($IPG > 90,00$).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai IPG Kabupaten Seruyan sebesar 87,83 dan masuk dalam kategori rendah. Penurunan nilai IPG di Kabupaten Seruyan terjadi pada periode tahun 2014-2015 sebesar 0,45 poin dari 88,87 pada tahun 2014 menjadi 88,42 pada tahun 2015. Selain itu penurunan nilai IPG juga terjadi pada periode tahun 2018-2022 dari 89,44 pada tahun 2018 menjadi 89,18 pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan 0,13 poin menjadi 89,31. Selama periode tahun 2010-2023 IPG Kabupaten Seruyan masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan nilai IPG Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai IPG Nasional, namun jika dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Kalimantan Tengah perbedaan nilai yang ada tidak begitu jauh berbeda.





Gambar 2.23. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Keterangan:

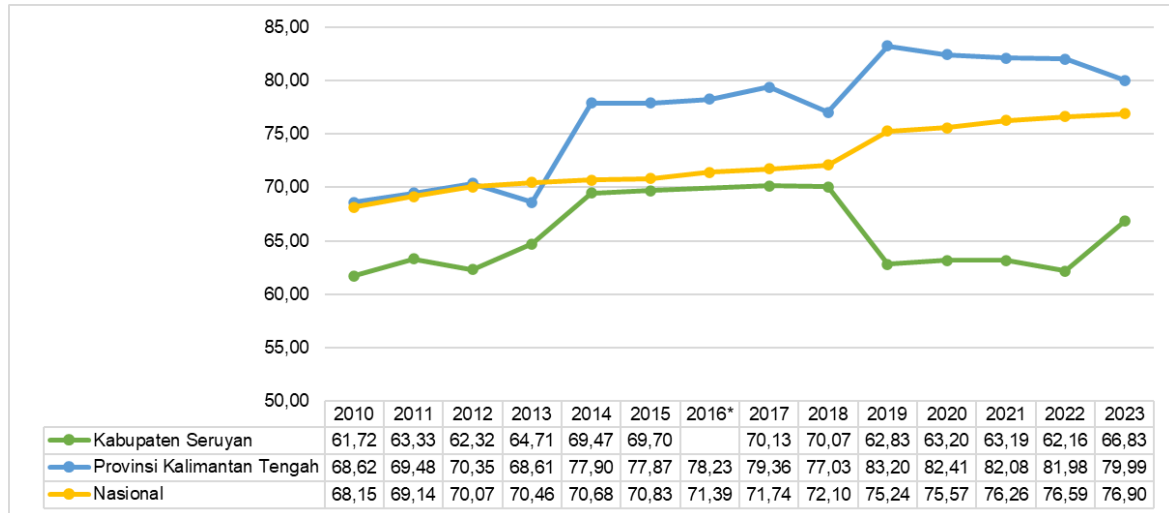
* : Data IPG Kabupaten Seruyan Tidak Tersedia

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai IDG Kabupaten Seruyan sebesar 61,72. Pada periode tahun 2011-2018, nilai IDG mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 70,07 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, nilai IDG Kabupaten Seruyan mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 62,83. Nilai IDG sempat naik pada tahun selanjutnya, namun pada tahun 2022 nilai IDG Kabupaten Seruyan turun dan menjadi hanya sebesar 62,16. Akan tetapi pada tahun 2023 nilai IDG Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan 4,67 poin menjadi 66,83 dari yang sebelumnya 62,16 pada tahun 2022. Nilai IDG Kabupaten Seruyan ini menunjukkan bahwa kondisi pemberdayaan gender di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 14 tahun tidak mengalami perubahan. Secara

keseluruhan, jika dibandingkan dengan nilai IDG Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDG Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai IDG Nasional dan Provinsi.



Gambar 2.24. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Keterangan:

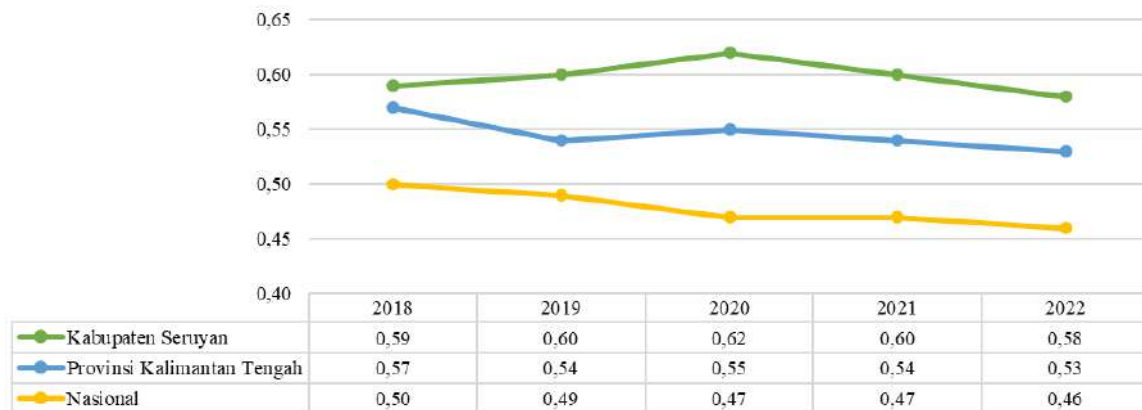
* : Data IDG Kabupaten Seruyan Tidak Tersedia

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kabupaten Seruyan berkisar antara 0,58 hingga 0,62. Pada tahun 2018, nilai IKG Kabupaten Seruyan sebesar 0,59. Nilainya terus mengalami kenaikan hingga angka 0,62 pada tahun 2020. Pada periode tahun 2021-2022 nilai IKG Kabupaten Seruyan mampu turun ke angka 0,58. Penurunan nilai IKG yang terjadi di Kabupaten Seruyan menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin

membalik. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan nilai IKG Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IKG Kabupaten Seruyan masih diatas nilai IKG Nasional dan Provinsi.



Gambar 2.25. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

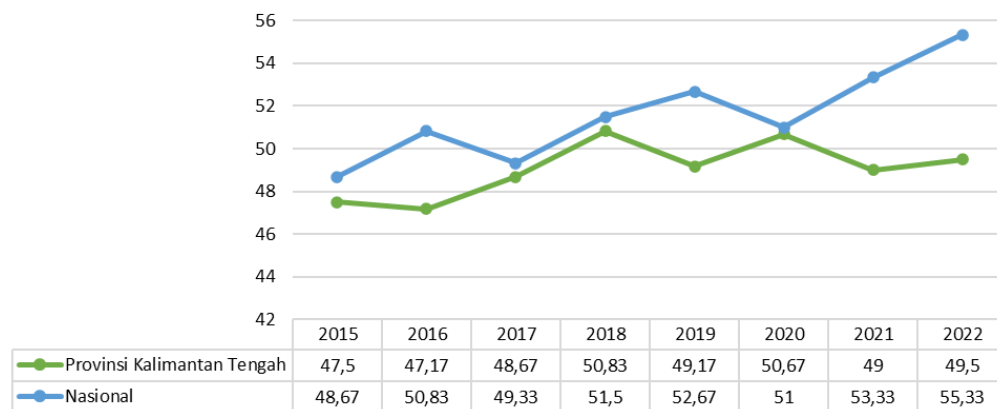
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022

5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. **Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda belum dilakukan hingga level kabupaten/kota**, sehingga yang dianalisis adalah IPP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Kondisi IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2022, mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2015 nilai IPP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 47,5 dimana kemudian nilainya turun menjadi 47,17 pada tahun 2016. Pada periode tahun 2016-2018 nilai IPP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan hingga 50,83. Selanjutnya nilai IPP Provinsi Kalimantan mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilainya sebesar 49,5. Berbeda dengan IPP Provinsi Kalimantan Tengah, IPP

Nasional justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 55,33 pada tahun 2022.



Gambar 2.26. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2022

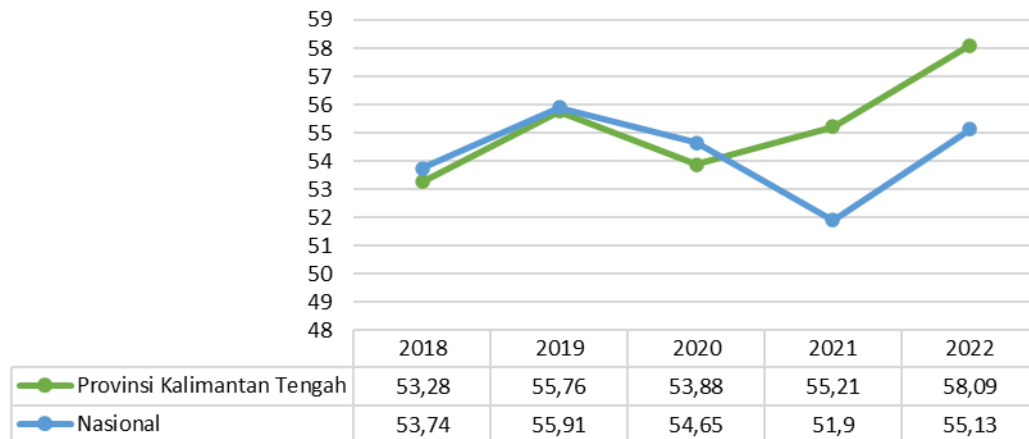
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2015-2022

6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik).

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,28 dan masuk dalam kriteria cukup, pada tahun selanjutnya nilainya naik sebesar 2,48 poin menjadi 55,76. Namun karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dan kembali pada kondisi yang sama di tahun 2018. Namun di tahun 2021 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah mampu kembali meningkat menjadi 55,21 dan nilainya terus meningkat di tahun 2022 menjadi 58,09. Kondisi

yang hampir serupa terjadi pada nilai IPK Nasional, dimana pada tahun 2018 nilai IPK Nasional sebesar 53,74 yang kemudian turun menjadi 51,9 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IPK Nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif menjadi 55,43.



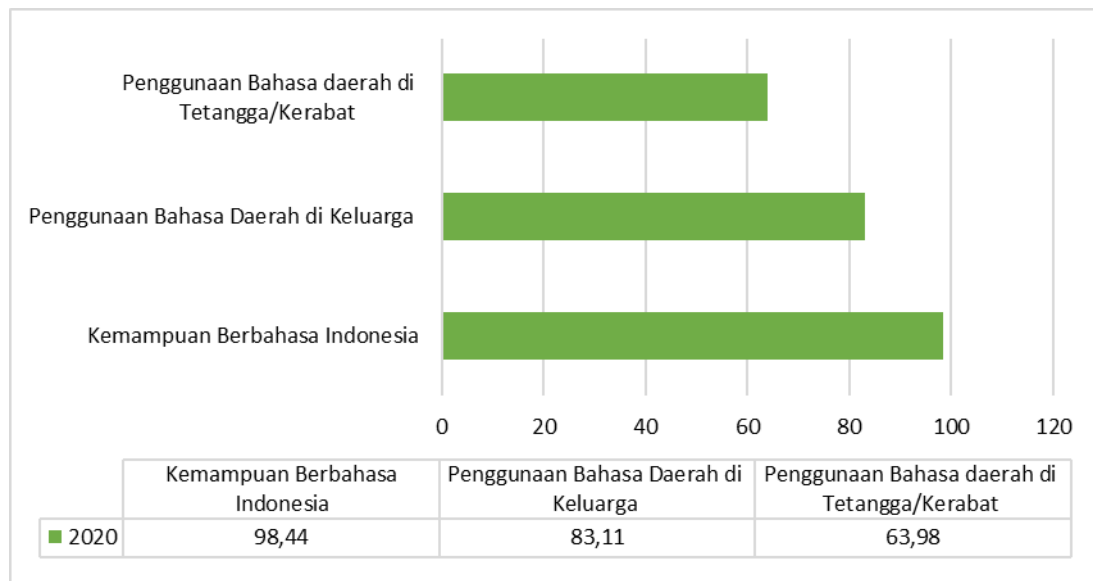
Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2018-2022)

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga yang dianalisis adalah IPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Untuk menggambarkan kondisi budaya di Kabupaten Seruyan digunakan data Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang menggambarkan kondisi pembangunan kebudayaan pada dimensi pendidikan.

Bahasa Indonesia dituturkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Namun sebagian penduduk juga tetap mempertahankan kelestarian bahasa daerah melalui penggunaan dalam berkomunikasi dengan keluarga dan tetangga/kerabat. Di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2020 sebanyak 98,44 persen penduduk mampu atau bisa menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Penduduk Kabupaten Seruyan yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga sebanyak 83,11 persen, sedangkan penduduk yang

menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga/kerabat sebanyak 63,98 persen.



Gambar 2.28. Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Seruyan

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) atau PDRB riil disusun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.



Struktur perekonomian Kabupaten Seruyan ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Seruyan. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

PDRB ADHB Kabupaten Seruyan pada tahun 2010 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai PDRB ADHB Kabupaten Seruyan sebesar Rp3.809,81 miliar. Dalam kurun waktu 14 tahun terjadi peningkatan nilai PDRB ADHB yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2023 nilai PDRB ADHB Kabupaten Seruyan sebesar Rp11.450,10 miliar. Hanya dalam waktu 4 tahun nilai PDRB ADHB Kabupaten Seruyan bertambah lebih dari Rp2.500 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp8.768,55 miliar.

Tabel 2.33. Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022, dan 2023

Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2010	2015	2020	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.448,92	2.309,32	3.166,19	4.121,20	4.355,40
B	Pertambangan dan Penggalian	154,50	49,49	55,95	60,26	64,80
C	Industri Pengolahan	1.047,97	1.927,34	2.710,60	3.449,75	3.615,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	1,05	1,55	1,69	1,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	0,92	1,43	1,53	1,60
F	Konstruksi	359,80	605,25	749,64	888,95	940,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	218,89	380,29	565,78	636,88	684,1
H	Transportasi dan Pergudangan	66,15	123,00	212,62	232,21	260,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,28	74,39	106,00	115,63	124,00
J	Informasi dan Komunikasi	27,69	43,17	66,35	73,89	78,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,78	59,58	88,58	104,44	110,40
L	Real Estate	65,02	91,95	140,96	160,46	170,70
M, N	Jasa Perusahaan	0,42	0,70	0,90	1,00	1,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	155,38	247,06	370,78	367,38	400,3
P	Jasa Pendidikan	119,47	212,15	324,17	359,80	388,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,77	85,42	135,86	155,18	168,90



Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2010	2015	2020	2022	2023
R, S, T, U	Jasa Lainnya	31,66	54,06	71,18	78,44	83,8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		3.809,81	6.265,13	8.768,55	10.808,71	11.450,10

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010, 2015, 2020, 2022, 2023)

Dilihat dari kontribusinya pada PDRB ADHB, pada tahun 2023 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB ADHB Kabupaten Seruyan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Konstruksi. Dengan nilai atau persentase kontribusi pada tahun 2023 di masing-masing sektor tersebut sebesar 38,04% untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 31,58% untuk Sektor Industri Pengolahan; serta 8,21% untuk Sektor Konstruksi. Sektor yang memberikan kontribusi paling kecil pada tahun 2023 adalah Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan persentase secara berturut-turut sebesar 0,01%; 0,01%; dan 0,02%.

**Tabel 2.34. Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan
Tahun 2010, 2015, 2020, 2023, dan 2023**

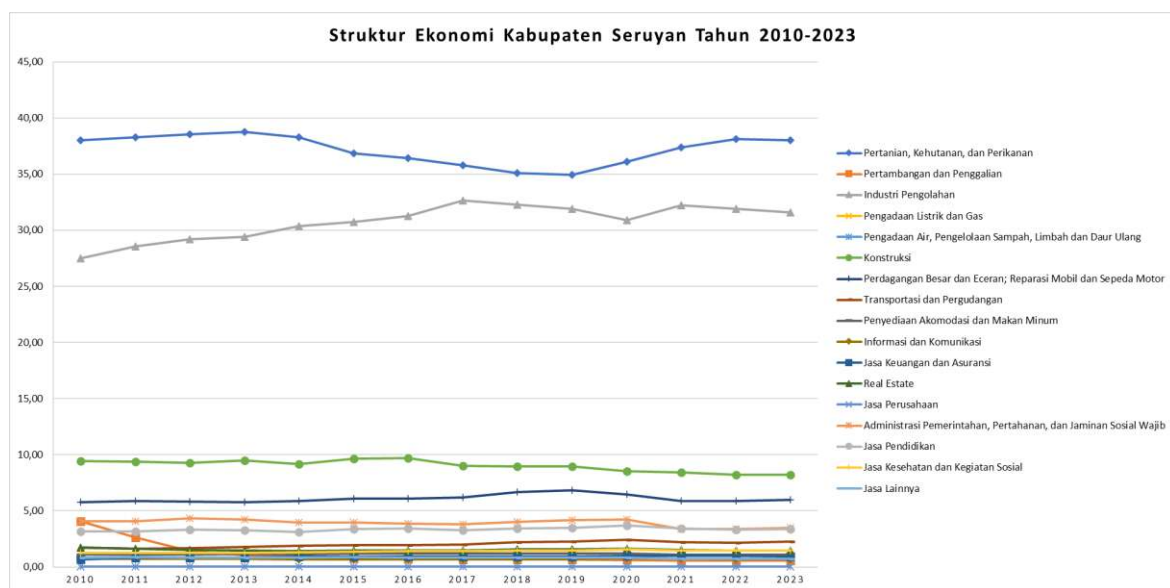
Lapangan Usaha		Distribusi Nilai PDRB ADHB (Persen)				
		2010	2015	2020	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,03	36,86	36,11	38,13	38,04
B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	0,79	0,64	0,56	0,57
C	Industri Pengolahan	27,51	30,76	30,91	31,92	31,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,44	9,66	8,55	8,22	8,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,07	6,45	5,89	5,97
H	Transportasi dan Pergudangan	1,74	1,96	2,42	2,15	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,19	1,21	1,07	1,08
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,69	0,76	0,68	0,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,65	0,95	1,01	0,97	0,96
L	Real Estate	1,71	1,47	1,61	1,48	1,49
M, N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,08	3,94	4,23	3,40	3,50
P	Jasa Pendidikan	3,14	3,39	3,70	3,33	3,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,36	1,55	1,44	1,48



Lapangan Usaha		Distribusi Nilai PDRB ADHB (Persen)				
		2010	2015	2020	2022	2023
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,83	0,86	0,81	0,73	0,73
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010, 2015, 2020, 2022, 2023)

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Seruyan masih bergantung pada sektor primer dan sekunder yaitu sektor pertanian, pengolahan dan konstruksi. Selama tahun 2010-2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Konstruksi menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Seruyan. Sehingga selama kurun waktu 14 tahun belum ada transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Seruyan.



Gambar 2.29. Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010-2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. PDRB ADHK Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010 nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan sebesar Rp3.809,81 miliar. Nilainya naik hingga mencapai Rp6.560,80 miliar pada tahun 2023.



Tabel 2.35. Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022, dan 2023

Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2010	2015	2020	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.448,92	1.875,76	2.211,23	2.336,48	2.446,00
B	Pertambangan dan Penggalian	154,50	38,04	36,98	37,95	39,20
C	Industri Pengolahan	1.047,97	1.504,55	1.870,53	1.992,64	2.086,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	0,86	1,03	1,07	1,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	0,78	0,90	0,91	0,90
F	Konstruksi	359,80	463,17	464,13	520,71	545,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	218,89	288,35	357,77	385,89	402,00
H	Transportasi dan Pergudangan	66,15	94,24	131,07	135,72	140,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,28	55,76	66,44	69,82	73,20
J	Informasi dan Komunikasi	27,69	39,46	49,20	53,71	55,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,78	49,21	65,57	69,06	71,70
L	Real Estate	65,02	79,58	99,51	105,39	108,20
M, N	Jasa Perusahaan	0,42	0,53	0,58	0,61	0,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	155,38	198,17	239,08	235,98	245,70
P	Jasa Pendidikan	119,47	151,82	190,88	195,73	203,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,77	62,52	79,26	87,51	91,8
R, S, T, U	Jasa Lainnya	31,66	40,44	44,09	46,21	48,4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		3.809,81	4.943,25	5.908,25	6.275,37	6.560,80

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010, 2015, 2020, 2022, 2023)

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

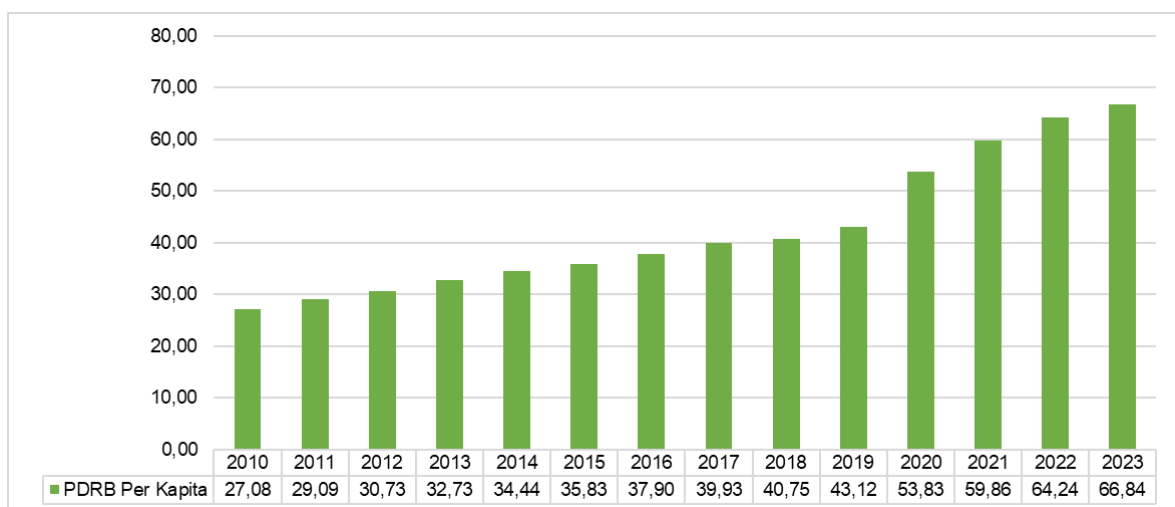
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

PDRB per kapita Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu tahun 2010-2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode tersebut. Pada



tahun 2010, PDRB per kapita tercatat sebesar 27,08 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2023 mencapai 66,84 juta rupiah. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana PDRB Per Kapita naik menjadi 43,12 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 53,83 juta rupiah. Selama periode 14 tahun ini, PDRB per kapita Kabupaten Seruyan menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan tertinggi terlihat setelah tahun 2020, mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif di wilayah tersebut.

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 tampaknya tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Seruyan. Pada tahun 2020, ketika banyak daerah mengalami penurunan ekonomi akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Seruyan justru terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Seruyan relatif tahan terhadap dampak pandemi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi termasuk struktur ekonomi daerah yang kuat di sektor-sektor yang kurang terpengaruh oleh pandemi, seperti pertanian atau perkebunan, serta kemampuan adaptasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan yang terus berlanjut hingga mencapai 66,84 juta rupiah pada tahun 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di Kabupaten Seruyan selama periode tersebut.



Gambar 2.30. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Seruyan

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010-2023



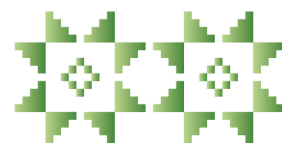
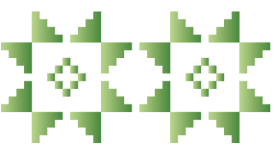
3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tujuan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI dibentuk dari 3 pilar utama yakni Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi; Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan. Kriteria capaian IPEI adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 8-10 (sangat memuaskan).

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan pada tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Selama periode tahun 2011-2021 tercatat nilai IPEI tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,16 dan nilai IPEI terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun tersebut IPEI Kabupaten Seruyan berada pada kategori memuaskan yang bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Seruyan mencapai hasil yang memuaskan.

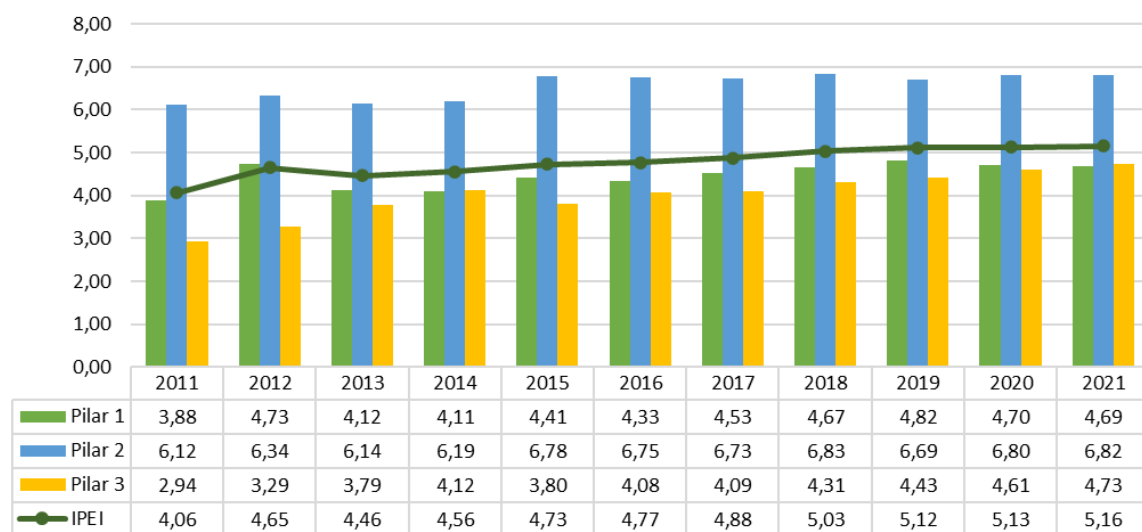
Capaian dari masing-masing pilar pembentuk IPEI di Kabupaten Seruyan pada tahun 2011-2021 menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Pada Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, selama periode tahun 2011-2021 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 nilai Pilar 1 menunjukkan capaian yang tidak memuaskan dengan nilai 3,88. Nilai Pilar 1 IPEI pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,73 dan kemudian nilainya mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021 nilai Pilar 1 IPEI sebesar 4,69 dan berada di kategori memuaskan yang artinya selama periode tahun 2012-2021 pertumbuhan dan perkembangan ekonomi inklusif di Kabupaten Seruyan menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Pada Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan selama periode tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun



cenderung meningkat. Pada tahun 2011 nilai Pilar 2 IPEI sebesar 6,12 dan terus meningkat hingga 6,82 pada tahun 2021. Secara keseluruhan nilai Pilar 2 berada pada kategori memuaskan yang artinya selama periode tahun 2011-2021 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Seruyan sudah berjalan lebih terbuka dan adil.

Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan selama periode tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2011 nilai Pilar 3 IPEI sebesar 2,94 dan masuk dalam kategori tidak memuaskan. Selama periode tahun 2011-2013 dan tahun 2015 nilai Pilar 3 IPEI berada pada kategori tidak memuaskan, nilai Pilar 3 IPEI mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori memuaskan pada tahun 2014 dan periode tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 nilai Pilar 3 IPEI sebesar 4,73. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2021 perluasan akses dan kesempatan secara ekonomi telah berjalan lebih terbuka dan adil.

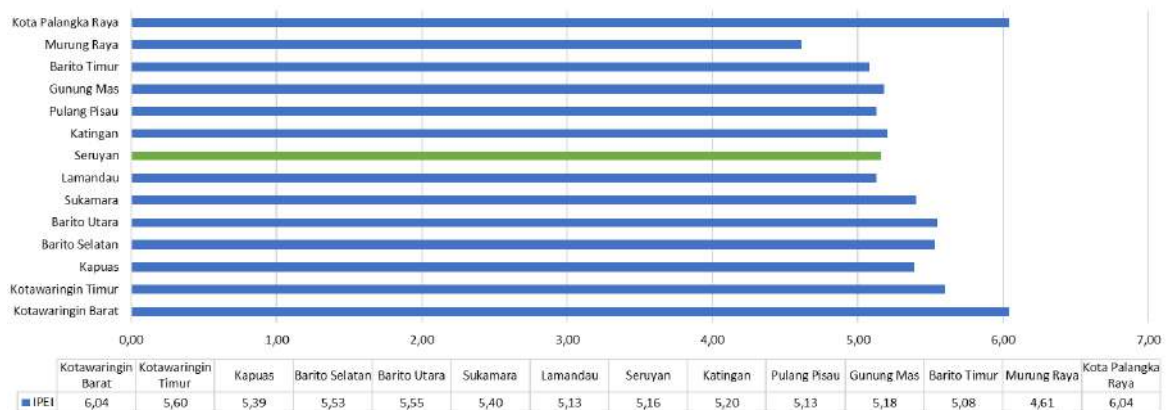


Gambar 2.31. Grafik Nilai Pilar dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2011-2021

Apabila dibandingkan dengan nilai IPEI kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IPEI Kabupaten Seruyan berada di peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota dengan nilai IPEI pada tahun 2021 sebesar 5,16. Kabupaten/kota dengan nilai IPEI tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya yakni sebesar 6,04. Sedangkan

kabupaten/kota dengan nilai IPEI terendah adalah Kabupaten Murung Raya yakni sebesar 4,61. Seluruh kabupaten/kota dua Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 memiliki nilai IPEI dengan kategori memuaskan.



Gambar 2.32. Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4. Indeks Ekonomi Hijau

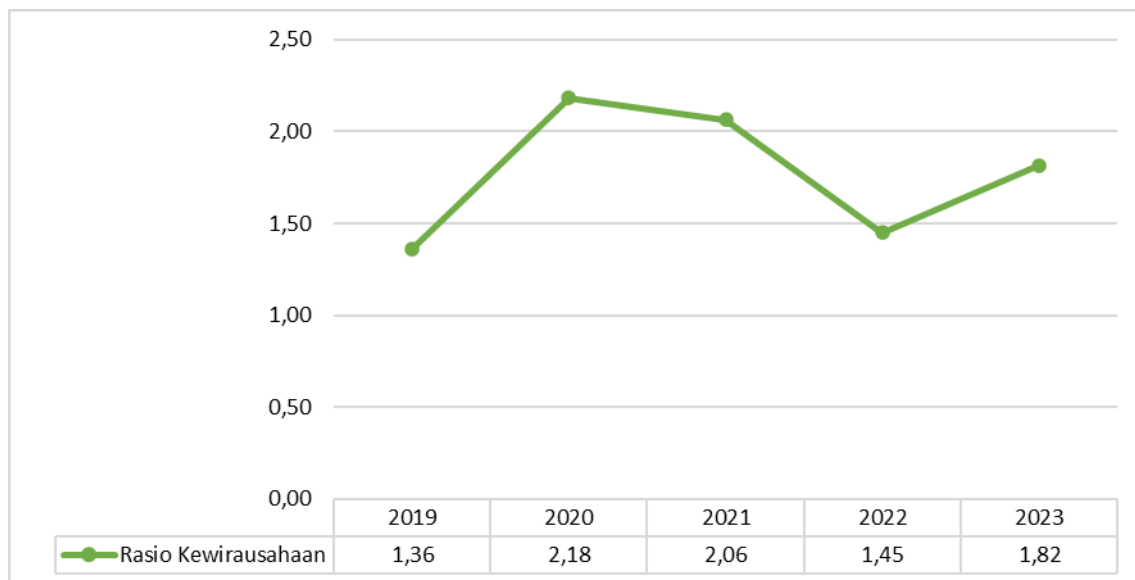
Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Indeks* (GEI) merupakan satuan ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi (intensitas emisi, intensitas energi, pendapatan nasional bruto (PNB), sosial (tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah), dan lingkungan (tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan) yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. GEI bertujuan menjada arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung dalam transisi menuju ekonomi hijau. **Data untuk GEI belum tersedia baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.**

5. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama.

Pada level nasional, Rasio Kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dengan target yang harus dicapai minimal sebesar 4,00. Saat ini Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,47. Peningkatan rasio kewirausahaan perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, karena pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio Kewirausahaan Daerah untuk Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, rasio kewirausahaan Kabupaten Seruyan sebesar 1,36 meningkat menjadi 1,82 di tahun 2023. Pada periode tahun 2021-2022 terjadi penurunan rasio kewirausahaan yang cukup signifikan, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan jumlah pengusaha yang dibantu oleh buruh tetap dan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja.



Gambar 2.33. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (diolah), 2023

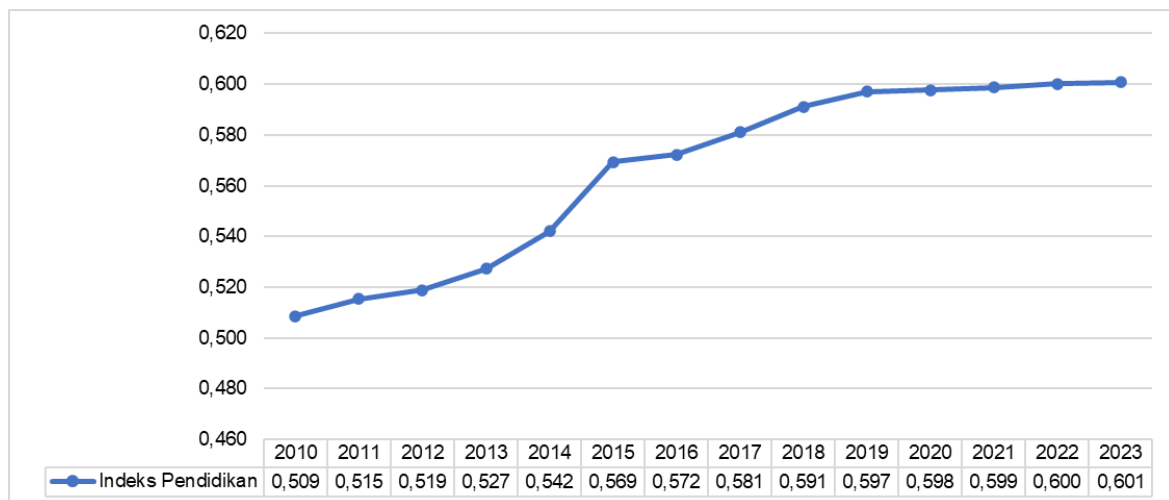
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya

manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan sendiri merupakan salah satu dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau tingkat pendidikan. Sebelum tahun 2010 Indikator yang menyusun Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, namun setelah tahun 2010 indikator Angka Melek Huruf diganti dengan Harapan Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan pada tahun 2010-2023 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan sebesar 0,509. Dalam kurun waktu 14 tahun nilainya meningkat 0,092 poin menjadi 0,601 pada tahun 2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 1,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Seruyan semakin baik dan meningkat kualitasnya.

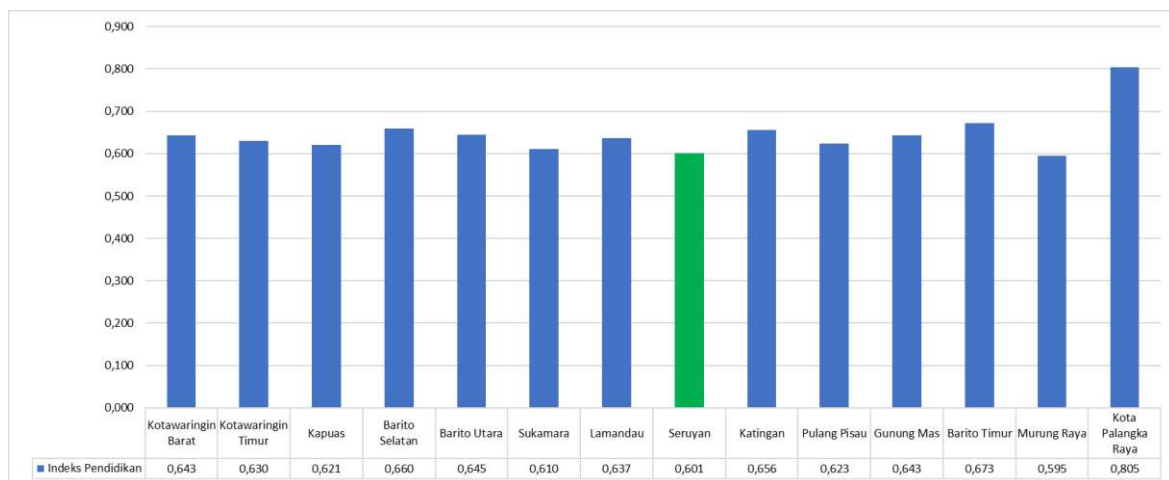


Gambar 2.34. Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010-2023 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar 0,601 dan berada pada peringkat 13 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat pertama ditempati oleh Kota Palangka Raya dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,806 sementara peringkat terakhir

ditempati oleh Kabupaten Murung Raya dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,595.



Gambar 2.35. Grafik Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023 (diolah)

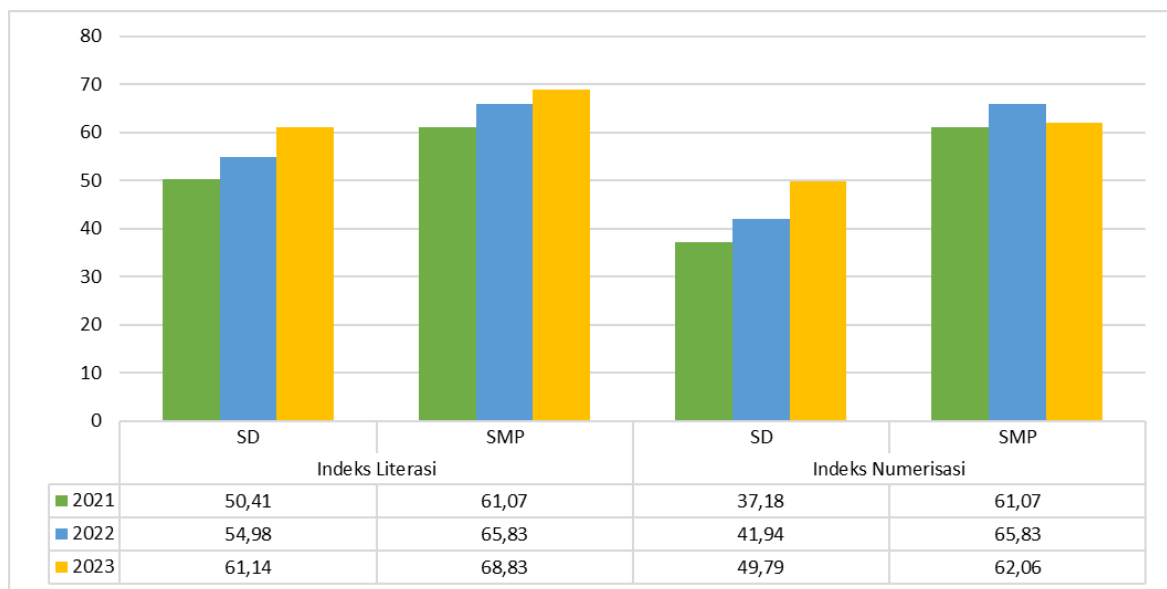
2. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi atau kemampuan yang sifatnya general dan mendasar. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks, kemampuan menganalisis informasi, serta keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tetapi juga mencakup literasi numerik atau numerisasi. Numerisasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka, serta menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi. Kemampuan ini melibatkan pemahaman terhadap bilangan, operasi matematika dasar, dan keterampilan dalam menggunakan angka dalam konteks sehari-hari maupun profesional.

Indeks Literasi/Numerisasi digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami informasi yang kompleks, serta memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka. Indeks Literasi/Numerisasi Kabupaten Seruyan dihitung pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pada periode tahun 2021-2023, Indeks Literasi SD menunjukkan peningkatan angka dari 50,41 pada tahun 2021 menjadi 61,14 pada tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Indeks Literasi SMP yang meningkat dari 61,07 pada tahun 2021 menjadi 68,83 pada tahun 2023. Nilai Indeks Literasi pada jenjang SMP lebih tinggi dibanding pada jenjang SD.

Pada periode yang sama, Indeks Numerasi Kabupaten Seruyan juga mengalami peningkatan di tingkat SD maupun SMP. Indeks Numerasi SD pada tahun 2021 sebesar 37,18 dan meningkat menjadi 49,79 pada tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Indeks Numerasi SMP yang meningkat dari 61,07 pada tahun 2021 menjadi 62,06 pada tahun 2023. Secara keseluruhan nilai Indeks Numerasi pada jenjang SMP jauh lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SD.



Gambar 2.36. Grafik Indeks Literasi/Numerasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023

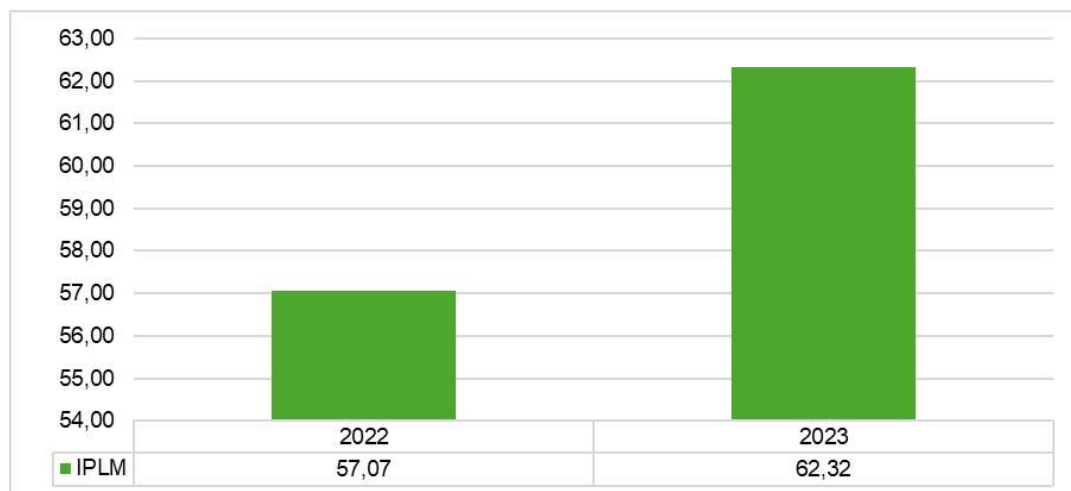
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2021-2023

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan

mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

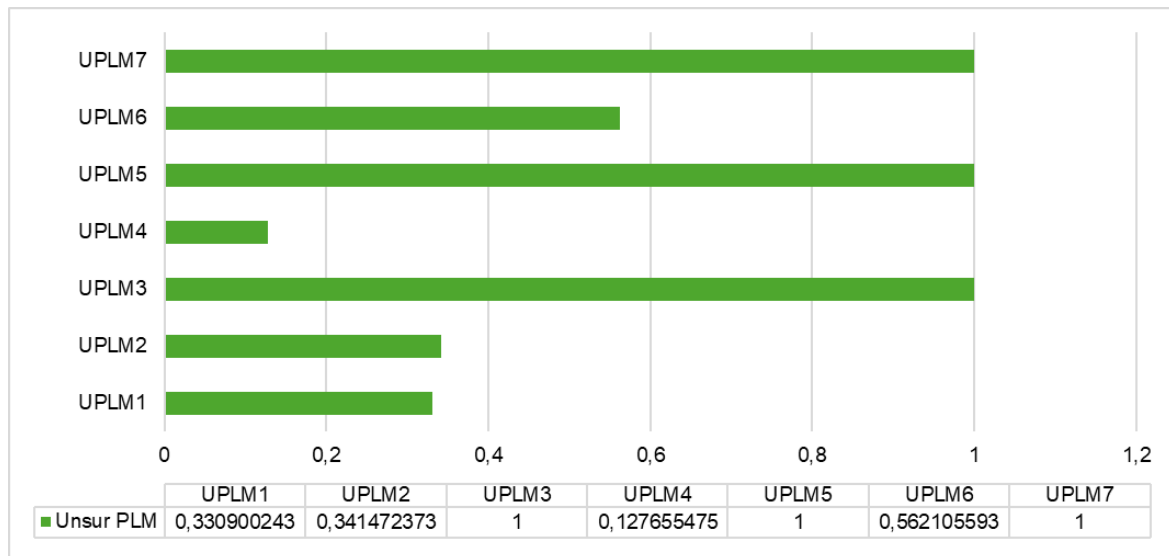
Nilai IPLM mulai dihitung oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2020. Namun untuk tingkat Kabupaten/Kota baru dihitung pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 Kabupaten Seruyan memiliki skor IPLM sebesar 57,07. Pada tahun 2023, nilai IPLM Kabupaten Seruyan naik menjadi 62,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Seruyan memiliki tingkat pembangunan literasi masyarakat yang sedang.



Gambar 2.37. Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Seruyan Tahun 2023 menunjukkan besaran antara 0,127 sampai 1. Rasio UPLM terbesar terjadi pada ketercukupan tenaga perpustakaan, rasio perpustakaan ber-SNP, dan anggota perpustakaan yaitu sebesar 1. Sedangkan, nilai rasio UPLM terendah ada pada tingkat kunjungan perpustakaan per hari yaitu sebesar 0,127.



Gambar 2.38. Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Keterangan:

UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan

UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

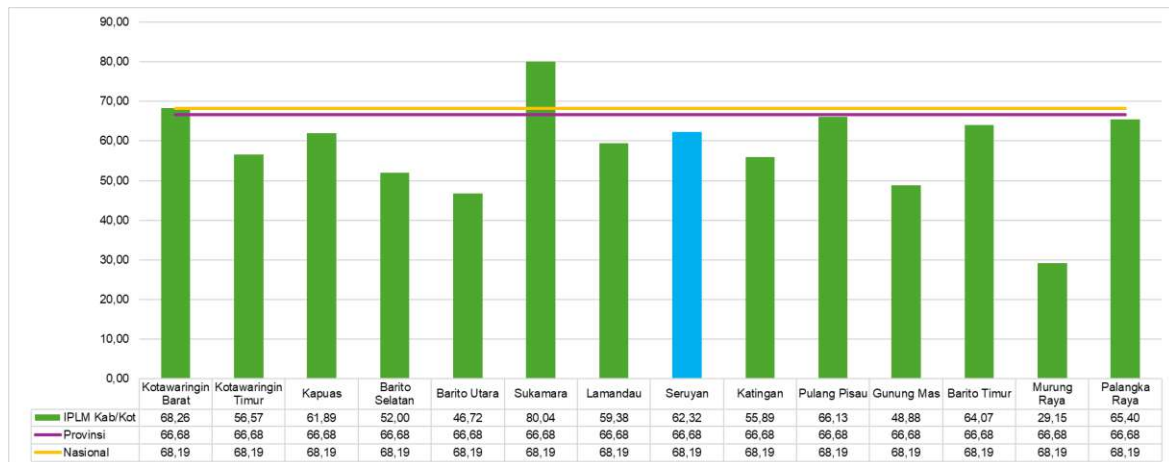
UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari

UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

UPLM 7 : Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan memiliki nilai IPLM sebesar 62,32 dan berada di peringkat 6 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Sukamara dengan nilai IPLM 80,04 dan masuk dalam kategori tinggi, hanya Kabupaten Sukamara yang nilai IPLM-nya masuk dalam kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPLM kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan tengah berada di kategori sangat rendah, rendah dan sedang. Dengan Kabupaten Murung Raya yang memiliki nilai IPLM paling rendah sebesar 29,15 dan masuk dalam kategori sangat rendah.



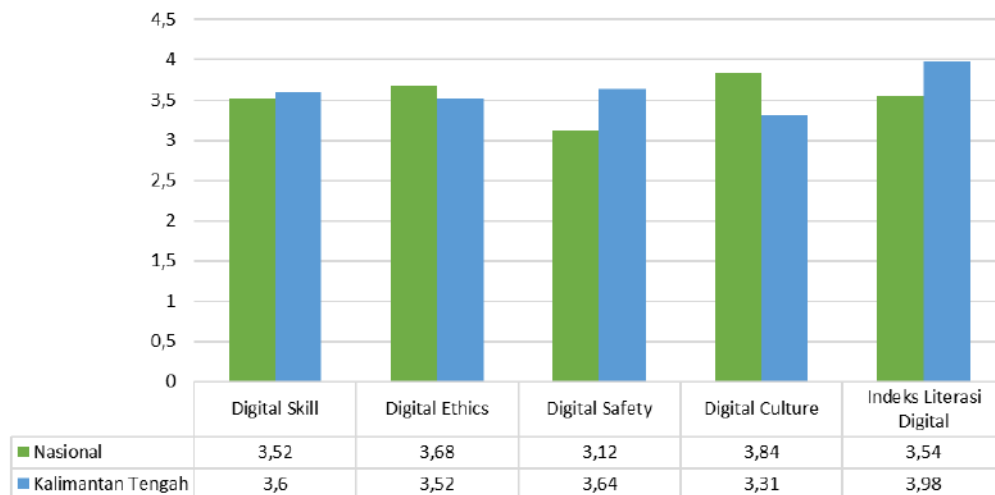
Gambar 2.39. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54 dengan Pilar *Digital Culture* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,84), dan Pilar *Digital Safety* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,54 dimana Pilar *Digital Safety* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,64) dan Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,31).



Gambar 2.40. Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

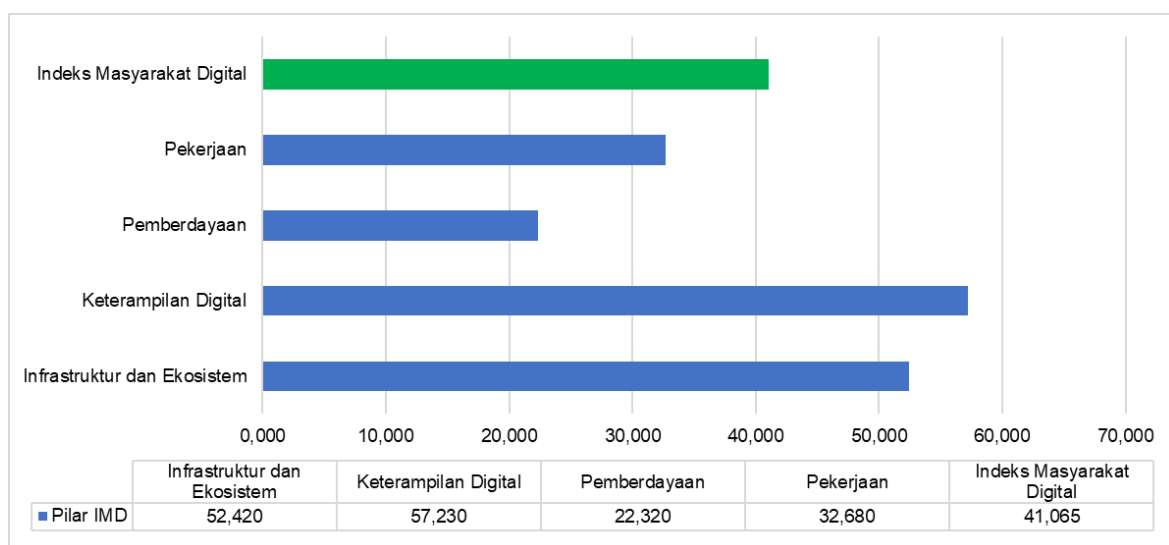
Data Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Seruyan tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

5. Indeks Masyarakat Digital (IMD)

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, dimana kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar 41,065 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan

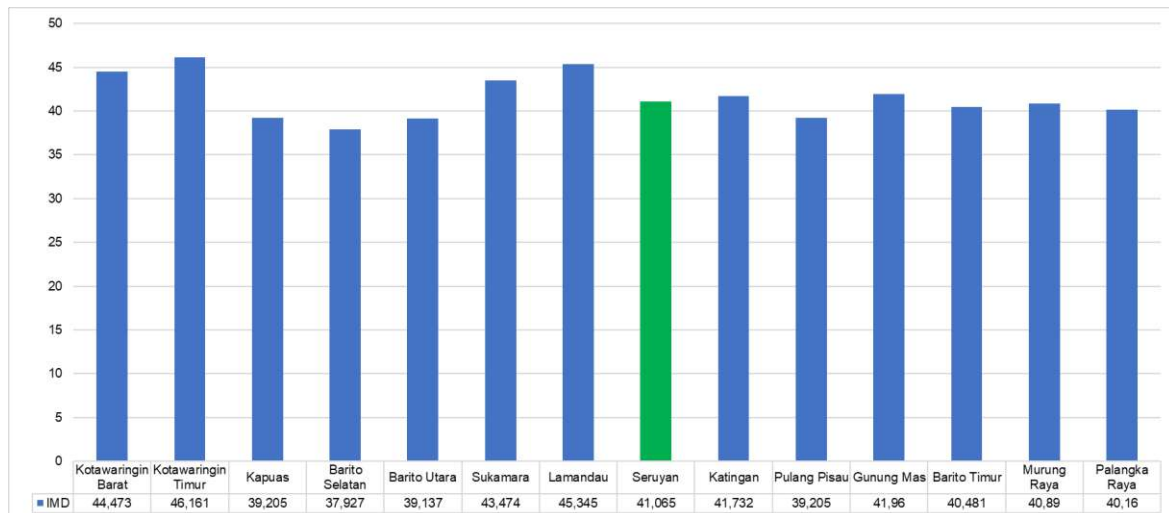
ekosistem (52,420), pilar keterampilan digital (57,230), pilar pemberdayaan (22,320), dan pilar pekerjaan (32,680). Secara lebih rinci, pilar keterampilan digital memiliki poin paling tinggi yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Seruyan telah memiliki keterampilan digital atau memiliki penguasaan teknologi yang baik. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kabupaten Seruyan memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.



Gambar 2.41. Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan cenderung tinggi. Nilai IMD Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar 41,065 dan berada di peringkat 7 dari 14 kabupaten/kota. Dimana Kabupaten Kotawaringin Timur di peringkat pertama dengan nilai IMDI sebesar 46,161 dan Kabupaten Barito Selatan di peringkat 14 atau terakhir dengan nilai IMDI sebesar 37,927.



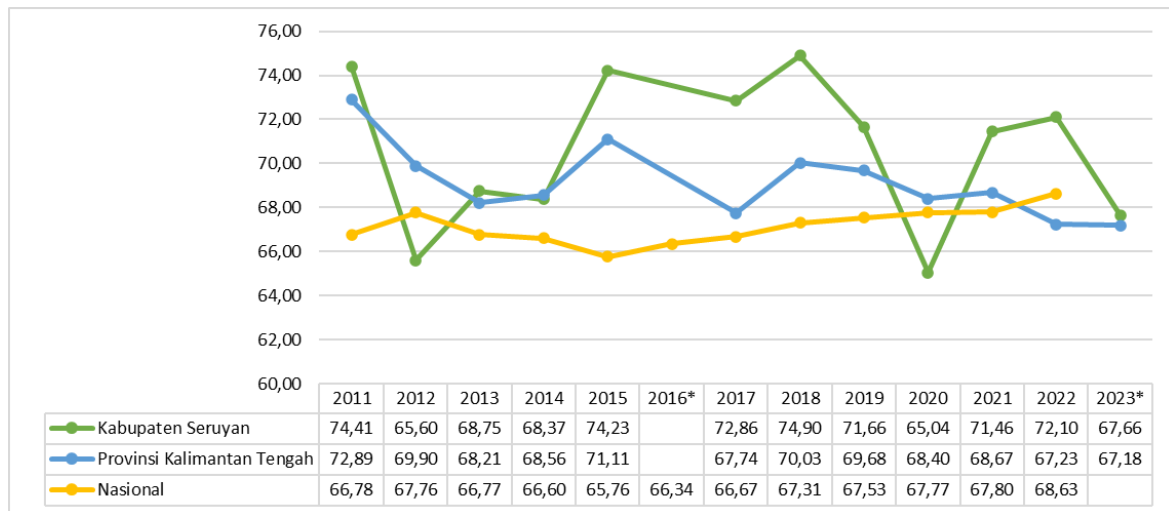
Gambar 2.42. Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif. Nilai TPAK dikelompokkan menjadi 3 yaitu tinggi (TPAK ≥ 70), sedang ($50 < \text{TPAK} < 70$), rendah (TPAK ≤ 50).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan tahun 2011-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2011 TPAK Kabupaten Seruyan sebesar 74,41% kemudian pada tahun 2012 nilainya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 8,81% menjadi 65,6%. Nilainya terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 74,23% kemudian pada tahun-tahun selanjutnya nilainya terus mengalami peningkatan dan penurunan antara 65,04% hingga 74,90%. Pada tahun 2022, nilai TPAK Kabupaten Seruyan sebesar 72,10% dan mengalami penurunan menjadi 67,66% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Nasional, nilai TPAK Kabupaten Seruyan secara keseluruhan berada di atas nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

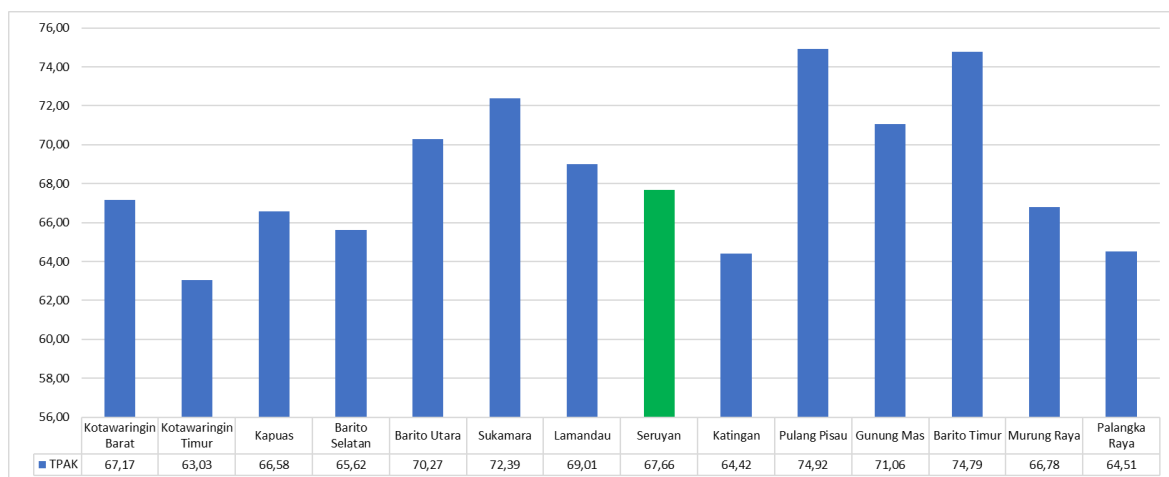


Gambar 2.43. Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2011-2023

Keterangan:

* : Data Tidak Tersedia



Gambar 2.44. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

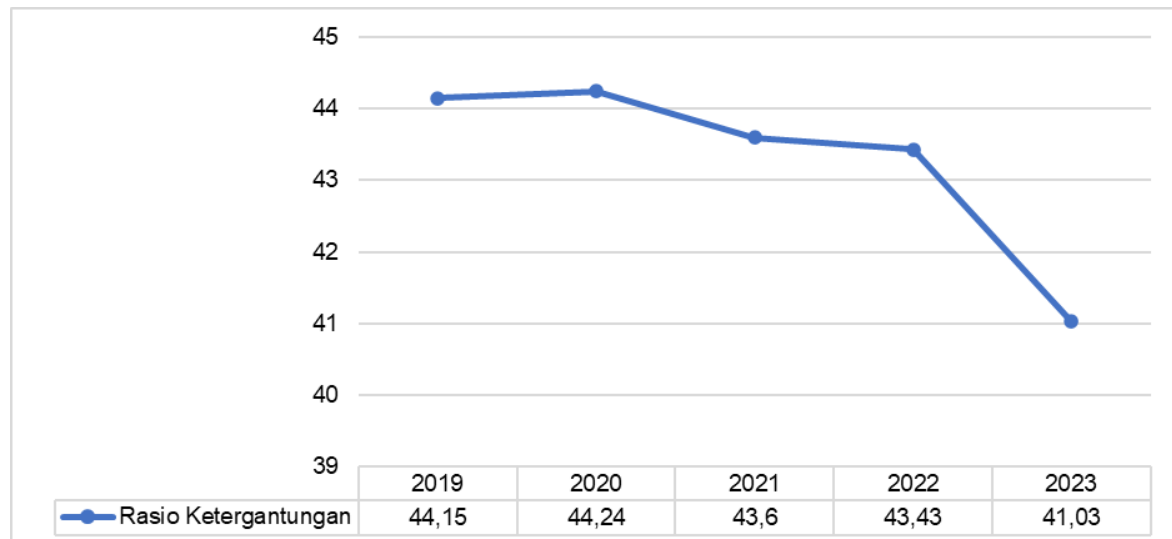
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

7. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 15-64 tahun. Usia tersebut merupakan usia angkatan kerja. Penduduk usia non produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 0-14 tahun dan 65+ atau 65 tahun ke atas. Usia

non produktif tersebut tergolong usia bukan angkatan kerja. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Tanggungan ini berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non produktif walaupun mereka tidak bekerja.

Angka ketergantungan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019 angka ketergantungan Kabupaten Seruyan sebesar 44,15. Artinya sebanyak 44-45 penduduk usia non produktif di Kabupaten Seruyan bergantung pada 100 penduduk usia produktif. Angka ketergantungan Kabupaten Seruyan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 44,24 namun nilainya mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan memiliki angka ketergantungan sebesar 41,03. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 41-42 penduduk tidak produktif di Kabupaten Seruyan yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif.



Gambar 2.45. Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

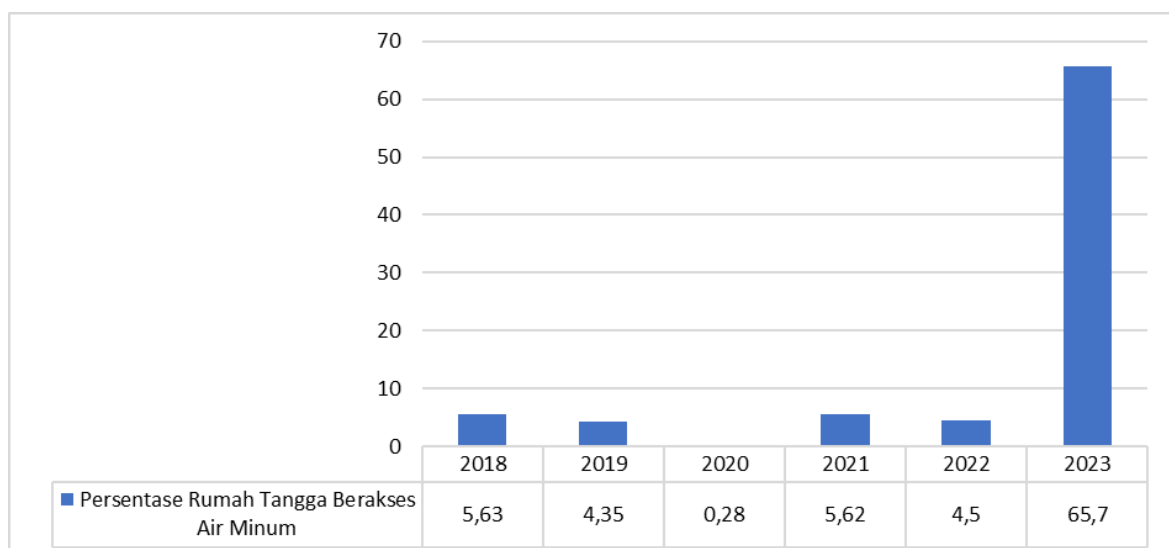
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI) yang digunakan untuk

mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan di suatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.

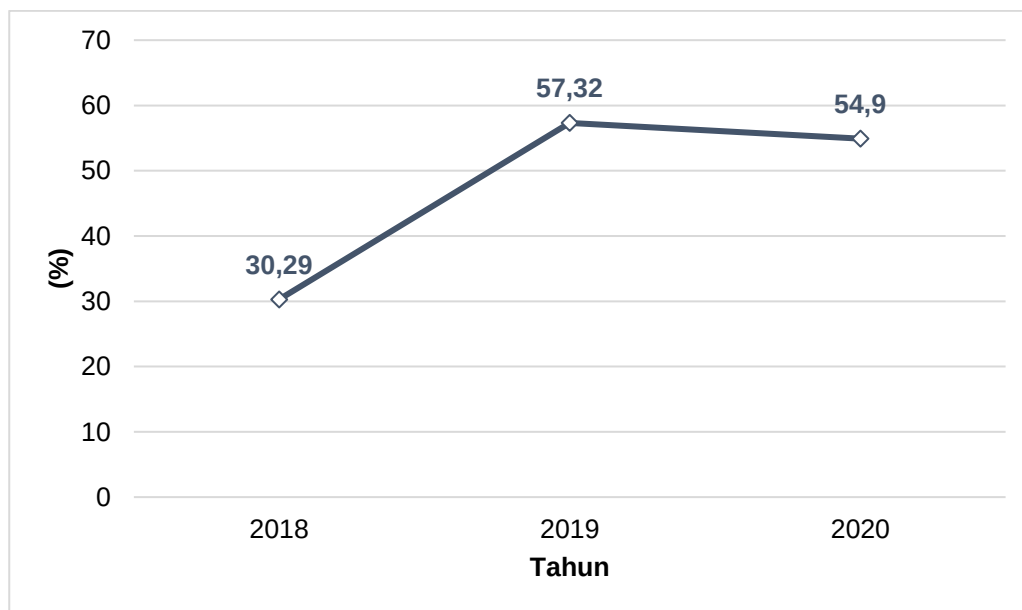
Indikator akses air bersih dan akses listrik yang digunakan untuk menyusun Indeks Infrastruktur dapat disubstitusi menggunakan Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rasio Elektrifikasi. Persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2018, sebanyak 5,63% rumah tangga di Kabupaten Seruyan telah memiliki akses terhadap air minum. Nilainya terus turun hingga pada tahun 2020 nilainya turun sangat signifikan menjadi hanya 0,28%. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 5,62%. Namun nilainya kembali turun pada tahun 2022 menjadi 4,5%. Pada tahun 2023 persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni menjadi 65,7% dari yang sebelumnya 4,5% (meningkat 61,2% dari tahun 2022).



Gambar 2.46. Grafik Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Indeks infrastruktur menggunakan proksi indikator Persentase Rumah Tangga Berakses Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan untuk mendukung layanan air bersih dan sanitasi aman. Berdasarkan Gambar 2.47 akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 namun menurun pada tahun 2020. Sanitasi menurut Kepmenkes Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 memiliki definisi segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

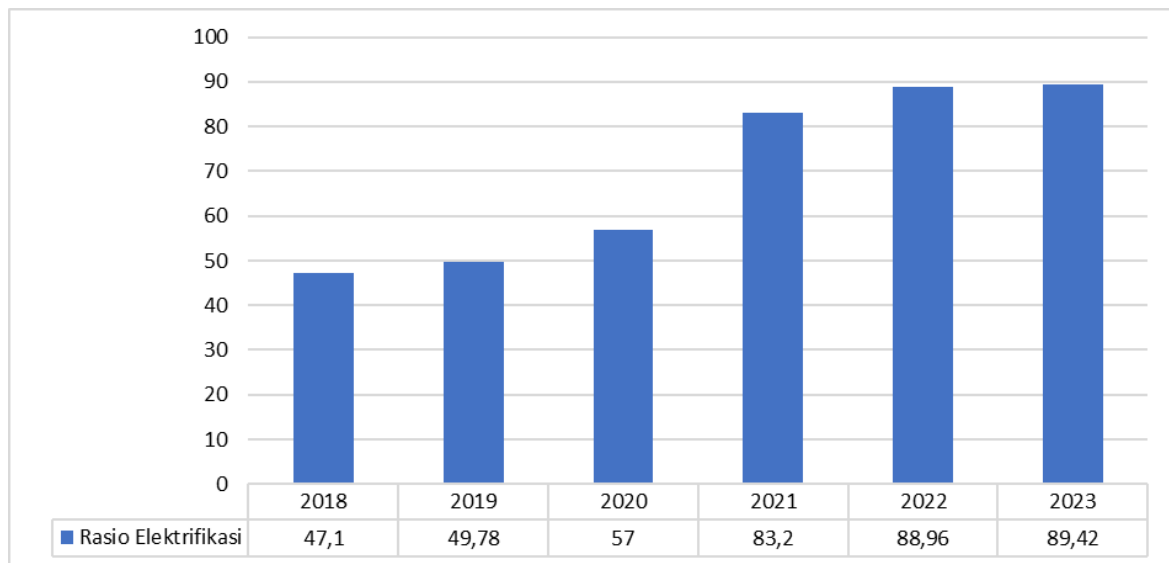


Gambar 2.47. Persentase Rumah Tangga Berakses Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan atau proporsi dari jumlah rumah tangga atau daerah yang memiliki akses atau terhubungan dengan pasokan listrik terhadap total jumlah rumah tangga atau daerah yang ada dalam suatu wilayah. Tingkat elektrifikasi yang tinggi menandakan akses yang lebih luas terhadap listrik. Jika rasio elektrifikasi rendah, ini dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau. Rasio elektrifikasi Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan nilai yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, rasio elektrifikasi Kabupaten Seruyan sebesar 47,1 yang artinya sebanyak 47,1% rumah tangga di Kabupaten Seruyan telah mendapat akses terhadap listrik. Rasio elektrifikasi terus meningkat hingga

pada tahun 2023 nilainya mencapai 89,42 yang artinya sudah 89,42% rumah tangga di Kabupaten Seruyan sudah mendapatkan akses terhadap listrik.



Gambar 2.48. Grafik Rasio Elektrifikasi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur*

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. **Secara lebih lengkap data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.**

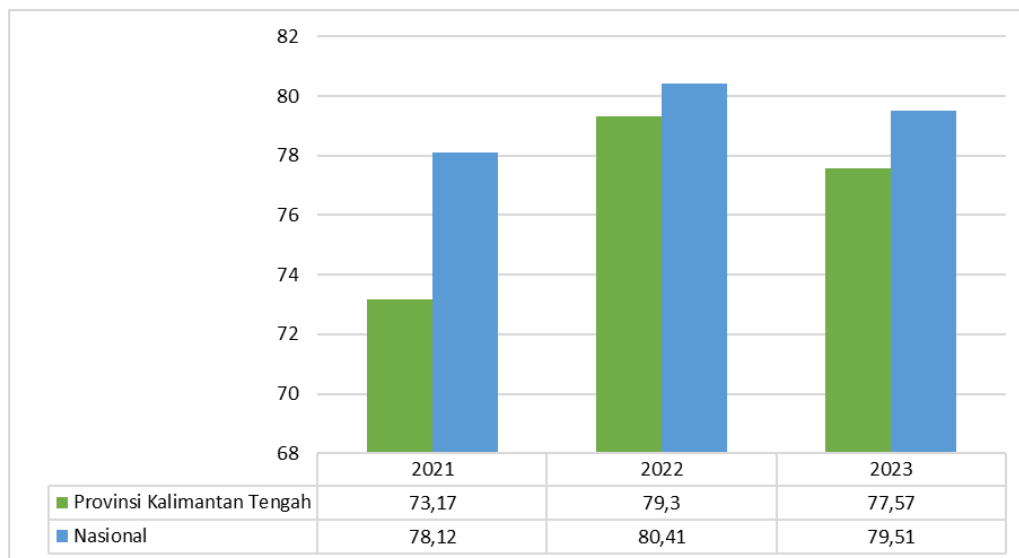
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi*

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan

perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021-2022 menunjukkan kinerja yang baik. Dimana pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 73,17 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,13 poin menjadi 79,3 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, Indeks Demokrasi Provinsi dan Nasional mengalami penurunan menjadi 77,57 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan 79,51 untuk Nasional.



Gambar 2.49. Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023

Perhitungan Indeks Demokrasi belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Seruyan digunakan beberapa data pengganti yang merupakan indikator penyusun dari Indeks Demokrasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024, Kecurangan dalam Perhitungan Suara, Partisipasi Perempuan dalam DPRD, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Jumlah Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintah, serta Data Kejadian Demonstrasi.



Pada Pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Seruyan sebanyak 108.248 pemilih dimana hanya 74,28 persen dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi.

Tabel 2.36. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah DPT	56.747	51.501	108.248
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	41.421	38.981	80.402
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	924	582	1.506
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	1.459	1.276	2.735
Jumlah Pengguna Hak Pilih	43.804	40.839	84.643

Sumber: KPU RI, 2023

Partisipasi perempuan dalam DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam Indeks Demokrasi karena partisipasi ini mencerminkan beberapa aspek penting dari sebuah demokrasi yang sehat dan inklusif. Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Seruyan sebanyak 25 orang dimana 4 diantara adalah perempuan.

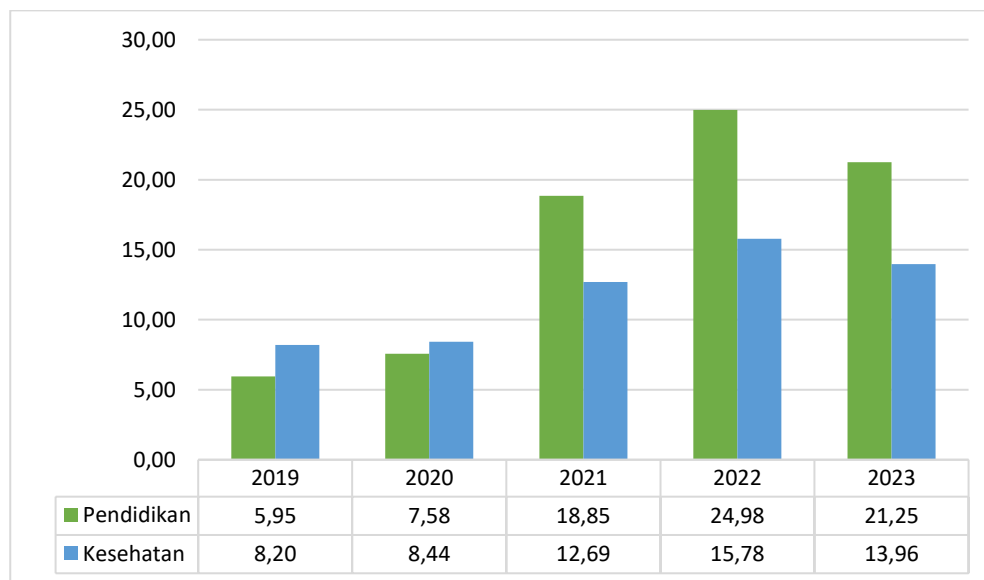
Tabel 2.37. Partisipasi Perempuan dalam DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	8	2	10
Diploma I/II	-	-	-
Akademi/DIII	-	-	-
DIV	-	-	-
S1	10	1	11
S2	3	1	4
S3	-	-	-
Jumlah	21	4	25

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi komponen pembentuk Indeks Demokrasi karena keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya memperkuat institusi demokrasi melalui partisipasi yang lebih berkualitas dan informatif. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 5,95 persen dan anggaran kesehatan sebesar 8,20 persen. Pada tahun 2022, persentasenya meningkat

menjadi 24,98 persen untuk pendidikan dan 15,78 persen untuk kesehatan. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi 21,25 persen untuk pendidikan dan 13,96 persen untuk kesehatan. Meskipun terjadi penurunan persentase alokasi anggaran, nilai alokasinya tetap meningkat.



Gambar 2.50. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kabupaten Seruyan, 2023

2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kemudian pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena rasa aman berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena rasa aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah maka diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu disusunlah suatu indeks mengenai keamanan manusia, yang kemudian disebut dengan Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman disusun dengan tujuan mampu menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. **Secara lebih lengkap data Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.** Untuk mengetahui kondisi keamanan masyarakat di Kabupaten Seruyan digunakan data jumlah kejahatan yang dilaporkan dan risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk.



Pada periode tahun 2019-2023, tercatat sebanyak 436 kasus kejahatan dilaporkan kepada pihak berwajib. Dimana angka kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 109 kejahatan. Dari 10 kecamatan, pelaporan kejahatan yang paling tinggi ada di Kecamatan Seruyan Hilir yakni sebanyak 29 kejahatan. Sedangkan di Kecamatan Suling Tambun tidak ada tindak kejahatan yang di laporkan. Dari catatan pelaporan tidak kejahatan di Kabupaten Seruyan, diketahui bahwa risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.00 penduduk di Kabupaten Seruyan adalah sebesar 65 persen di tahun 2023.

Tabel 2.38. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Seruyan Hilir	24	32	22	27	29
Seruyan Hilir Timur	3	3	6	5	6
Danau Sembuluh	8	7	10	13	12
Seruyan Raya	10	6	6	9	11
Hanau	8	3	12	4	6
Danau Seluluk	14	3	4	11	10
Seruyan Tengah	4	9	12	8	9
Batu Ampar	5	6	12	12	22
Seruyan Hulu	1	2	12	3	4
Suling Tambun	0	0	0	1	0
Kabupaten Seruyan	77	71	86	93	109

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Tabel 2.39. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Seruyan Hilir	68	89	14	17	18
Seruyan Hilir Timur	22	30	3	3	3
Danau Sembuluh	67	57	6	6	7
Seruyan Raya	67	38	3	5	7
Hanau	44	16	7	2	3
Danau Seluluk	91	19	2	7	6
Seruyan Tengah	18	40	7	5	5
Batu Ampar	66	78	7	7	14
Seruyan Hulu	11	22	1	1	2
Suling Tambun	0	0	0	1	0
Kabupaten Seruyan	53	47	42	54	65

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban*

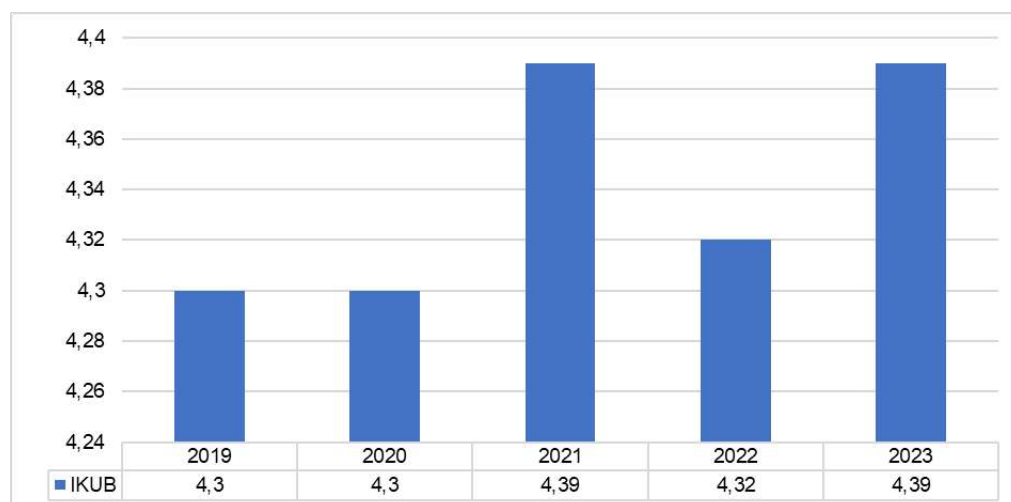
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Dimana

stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketenteraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. **Secara lebih lengkap Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Seruyan belum tersedia.**

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100).

Nilai IKUB Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung stabil. Pada tahun 2019, IKUB Kabupaten Seruyan sebesar 4,30. Nilai IKUB Kabupaten Seruyan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,39. Namun pada periode tahun selanjutnya yakni pada tahun 2022 nilainya turun menjadi 4,32 dan mengalami peningkatan Kembali menjadi 4,39 pada tahun 2023. Secara keseluruhan nilai IKUB Kabupaten Seruyan masuk dalam kategori IKUB Sedang.



Gambar 2.51. Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

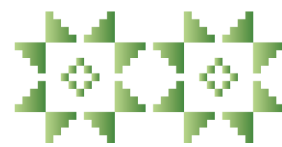
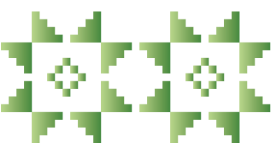
Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

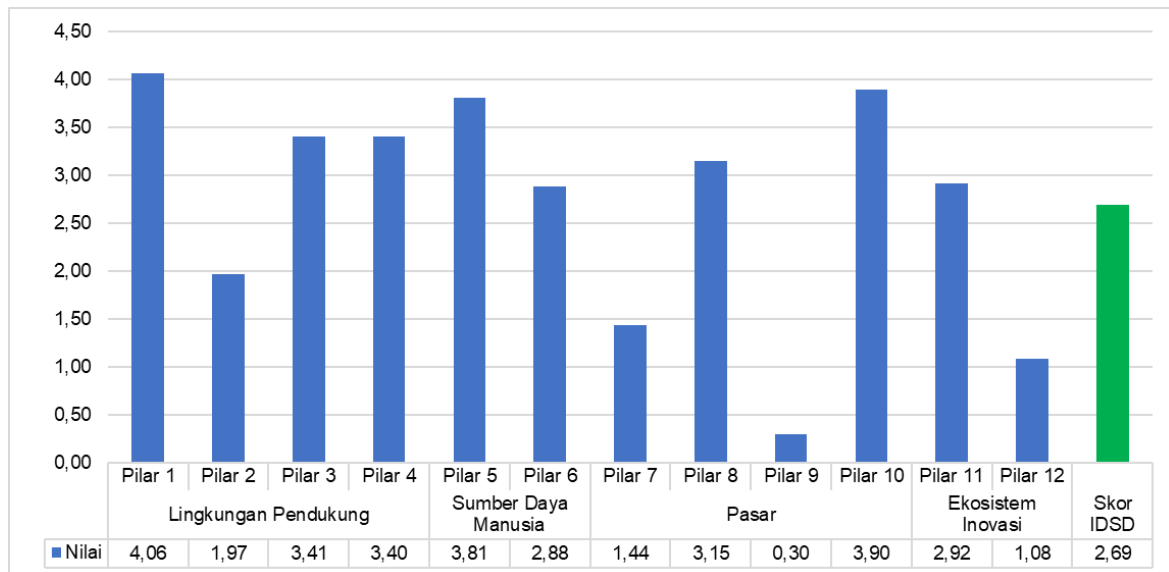


5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan memiliki nilai Indeks Daya Saing sebesar 2,69. Jika dilihat secara rinci pada setiap pilar di tiap komponen daya saing daerah memiliki nilai yang berbeda-beda. Rincian nilai tiap pilar pada komponen lingkungan pendukung yakni 4,06 pada pilar 1; 1,97 pada pilar 2; 3,41 pada pilar 3; dan 3,40 pada pilar 4. Nilai setiap pilar pada komponen sumber daya manusia sebesar 3,81 pada pilar 5 dan 2,88 pada pilar 6. Nilai setiap pilar pada komponen pasar sebesar 1,44 pada pilar 7; 3,15 pada pilar 8; 0,30 pada pilar 9; dan 3,90 pada pilar 10. Kemudian besarnya nilai setiap pilar pada komponen ekosistem inovasi sebesar 2,92 pada pilar 11 dan 1,08 pada pilar 12.





Gambar 2.52. Grafik Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023

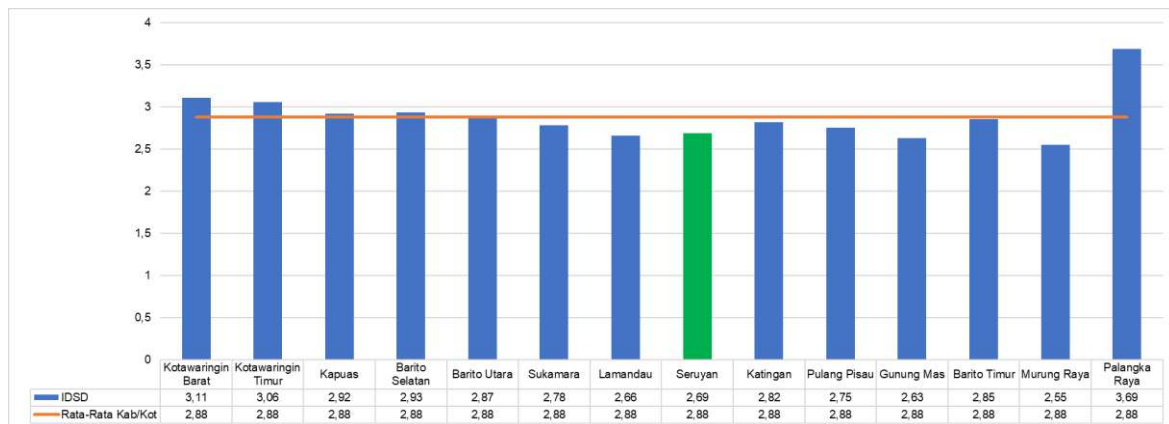
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

Keterangan:

- Pilar 1 : Institusi
- Pilar 2 : Infrastruktur
- Pilar 3 : Adopsi TIK
- Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
- Pilar 5 : Kesehatan
- Pilar 6 : Keterampilan
- Pilar 7 : Pasar Produk
- Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
- Pilar 9 : Sistem Keuangan
- Pilar 10 : Ukuran Pasar
- Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
- Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDSD Kabupaten Seruyan cenderung rendah. Nilai IDSD Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,69 dan berada di bawah rata-rata nilai IDSD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 2,88. Sehingga IDSD Kabupaten Seruyan

cenderung rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.53. Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

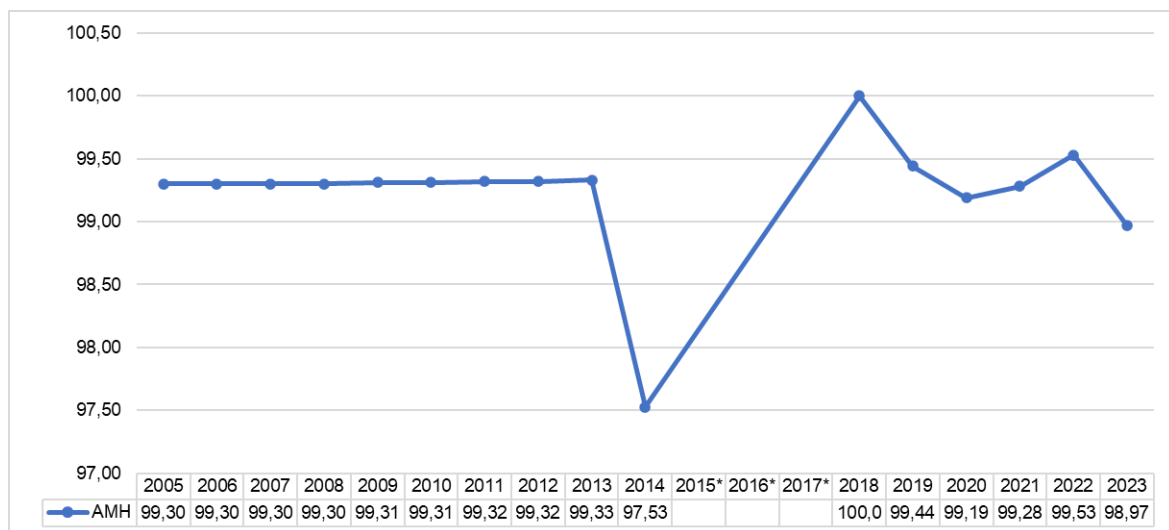
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup manusia daerah dengan beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Pendidikan (APP), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, serta Fasilitas Pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Perkembangan AMH Kabupaten Seruyan

pada periode tahun 2005-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2005, AMH Kabupaten Seruyan 99,30. Selama periode tahun 2005-2022, AMH terendah tercatat terjadi pada tahun 2014 sebesar 97,53 dan AMH tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2018 sebesar 100. Pada tahun 2023, AMH Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dari 99,53 pada tahun 2022 menjadi 98,97. Hal ini berarti 98 dari 100 orang dewasa di Kabupaten Seruyan memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis.



Gambar 2.54. Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2005-2023

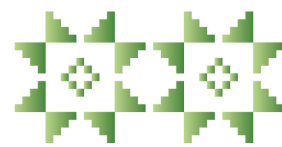
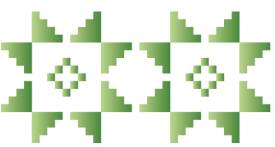
Indikator keberhasilan pendidikan selanjutnya adalah Angka Partisipasi Pendidikan (APP). APP digunakan untuk menggambarkan proporsi individu dalam kelompok usia tertentu yang terlibat dalam suatu jenis pendidikan pada suatu periode waktu tertentu. APP dibedakan menjadi 3 kelompok yakni Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

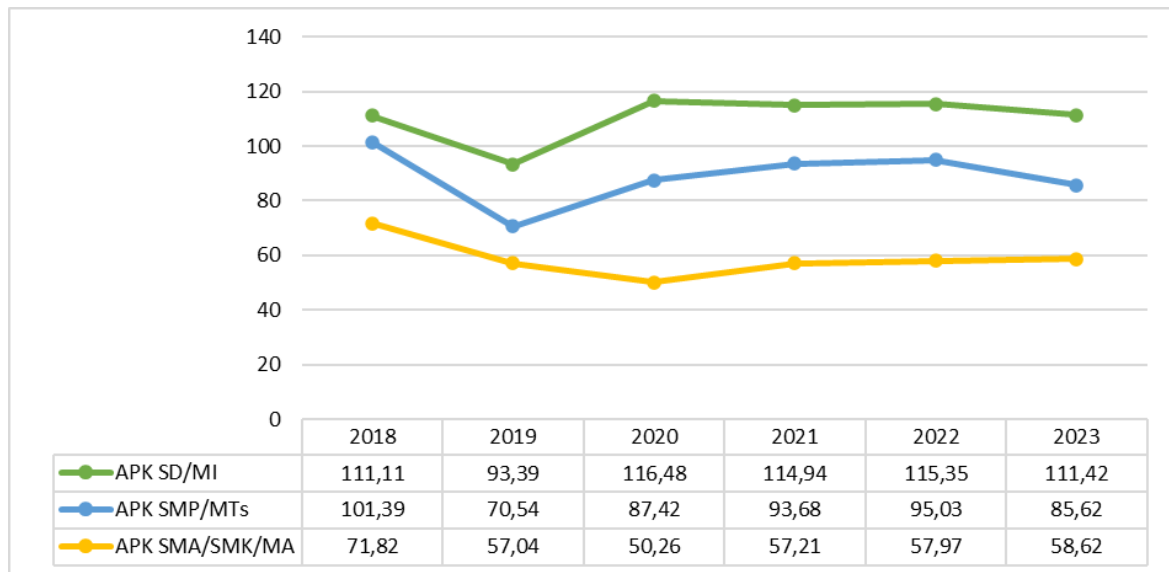
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan



indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Kondisi APK pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APK SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 111,11%, nilainya turun pada tahun 2019 menjadi 93,39%. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2023, yang mana nilai APK SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 115,35% di tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 111,42 di tahun 2023. Kondisi APK SD/MI yang bernilai diatas 100% menunjukkan bahwa ada penduduk Kabupaten Seruyan yang bersekolah ketika usianya belum mencukupi dan atau melebihi batas umur yang seharusnya. Sedangkan APK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan APK SD/MI. Pada tahun 2018, APK SMP/MTs sebesar 101,39% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 70,54%. Pada tahun 2023 nilai APK SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 85,62 % dari yang sebelumnya sebesar 95,03% pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 13 sampai 15 tahun belum maksimal. Masih ada anak usia 13-15 tahun yang belum bersekolah. Selain APK SD/MI dan APK SMP/MTs, APK SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APK SMA/SMK/MA sebesar 71,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 57,04%. Akan tetapi pada tahun 2023 APK SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 58,62% dari yang sebelumnya 57,97% pada tahun 2022.





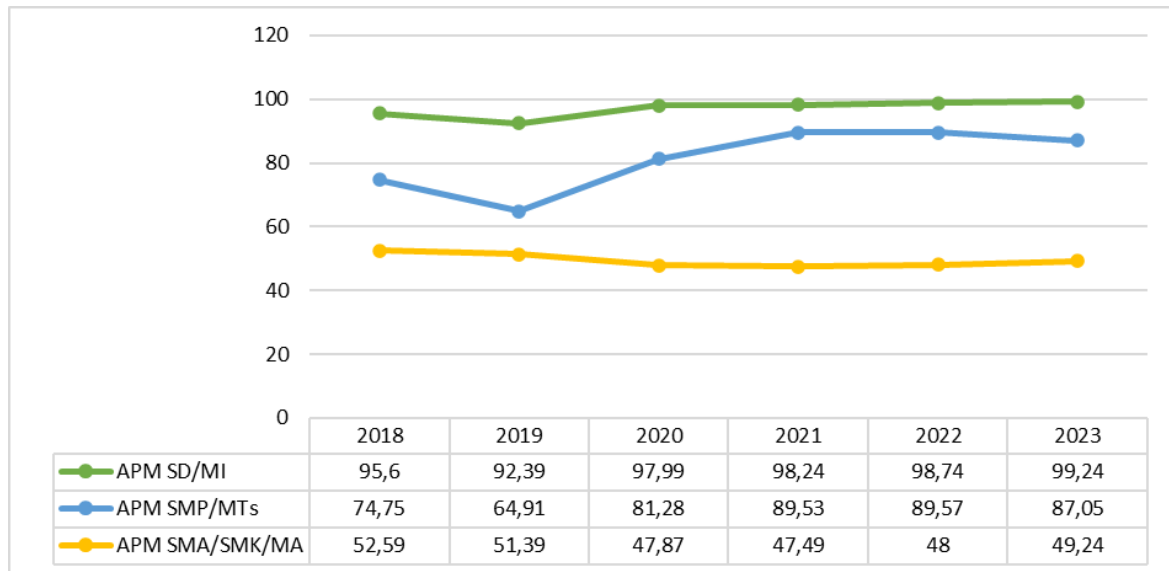
Gambar 2.55. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Kondisi APM Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 96,60%, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,39%. Pada periode tahun 2020-2023, APM SD/MI mengalami peningkatan menjadi 99,24% di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir semua anak usia sekolah SD/MI secara keseluruhan di Kabupaten Seruyan bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI. Perkembangan nilai APM yang fluktuatif juga terjadi pada jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2018 sebesar 74,75% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 64,91%. Pada tahun 2023 nilai APM SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 87,05% dari yang sebelumnya sebesar 89,57% pada tahun 2022. Selain APM SD/MI dan APM SMP/MTs, APM SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APM SMA/SMK/MA sebesar 52,59% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 51,39%. Akan tetapi pada tahun 2023 APM

SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 49,24% dari yang sebelumnya 48% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hanya kurang dari separuh anak usia sekolah SMA/SMK/MA secara keseluruhan di Kabupaten Seruyan yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.



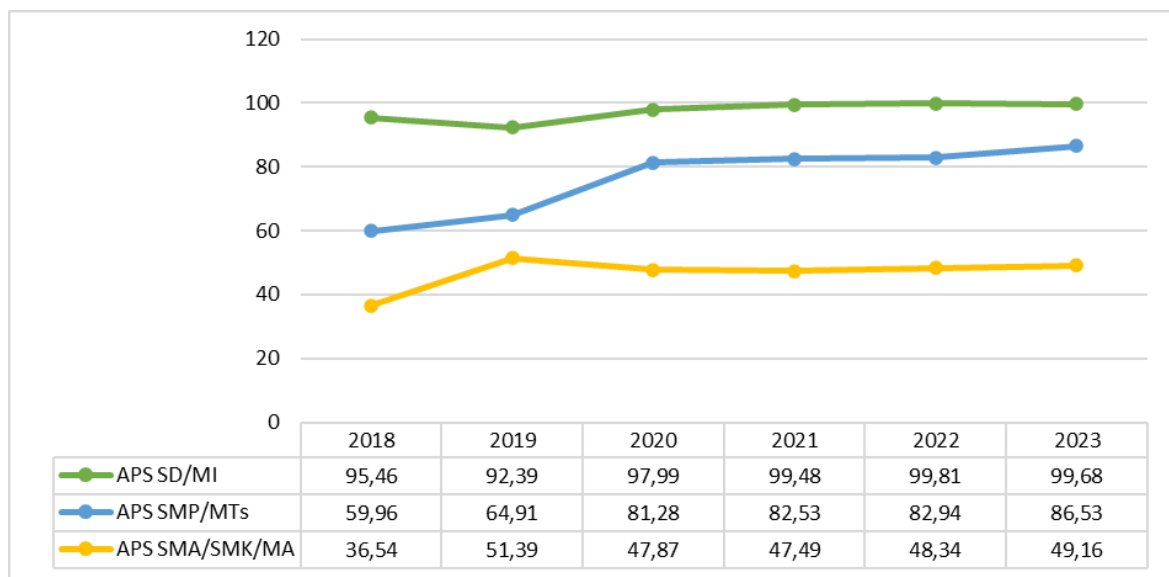
Gambar 2.56. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. APS dikaitkan dengan keadaan putus sekolah.

Kondisi APS pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2018, APS SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 95,46% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,23%. Pada periode tahun 2020-2022, APS SD/MI mengalami peningkatan menjadi 99,81% di tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 APS SD/MI Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 99,68%. Hal ini menunjukkan bahwa SD/MI di Kabupaten Seruyan telah mampu menyerap hampir seluruh penduduk usia sekolah SD/MI. Sedangkan untuk APS SMP/MTs pada periode tahun 2018-2023 nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilainya sebesar 59,96% kemudian

nilainya terus meningkat hingga pada tahun 2023 APS SMP/MTs Kabupaten Seruyan mencapai 86,53%. Selain APS SD/MI, APS SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APS SMA/SMK/MA sebesar 36,54% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 51,39%. Pada tahun 2023 APS SMA/SMK/MA Kabupaten Seruyan mengalami kenaikan menjadi 49,16% dari yang sebelumnya 48,34% pada tahun 2022.

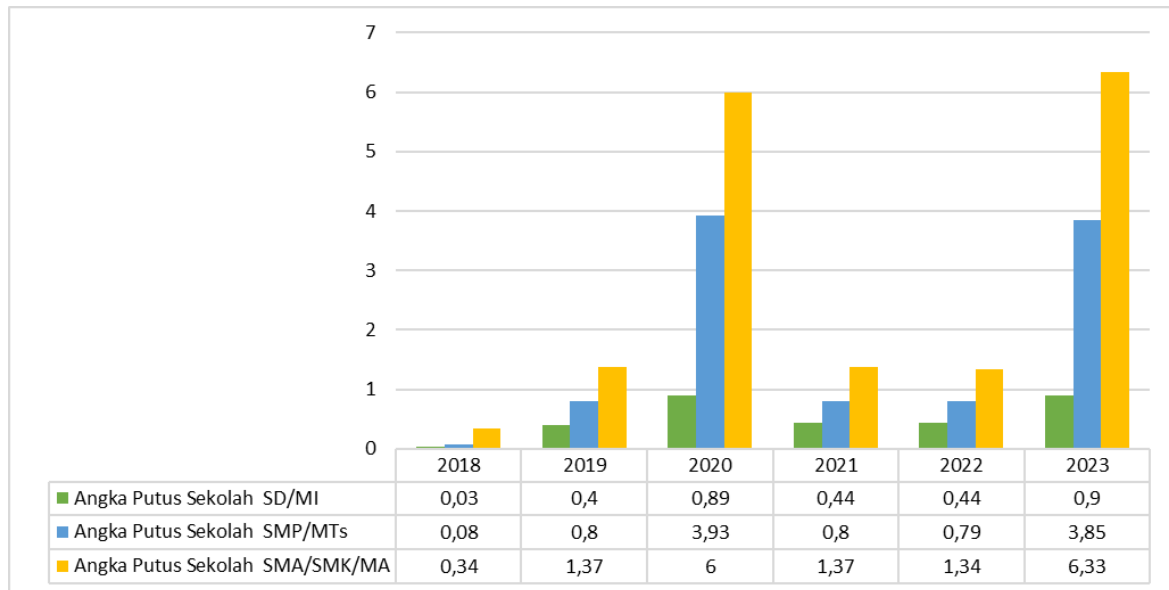


Gambar 2.57. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Kondisi angka putus sekolah di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,03%. Pada periode tahun 2019-2020, nilainya meningkat menjadi 0,40% dan 0,89%. Namun pada periode tahun 2021-2022, nilainya turun menjadi 0,44% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 0,9%. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 0,80%, yang kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 3,93%. Namun pada periode tahun 2021-2022 nilainya turun menjadi 0,8% dan 0,79% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,85%. Peningkatan angka putus sekolah juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2018 angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,34% dan mengalami perkembangan yang fluktuatif

hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan mencapai 6,33%. Meningkatnya angka putus sekolah pada semua jenjang di Kabupaten Seruyan harus mendapat perhatian lebih, khususnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan agar tren putus sekolah tidak meningkat. Hal ini berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Seruyan di masa mendatang.

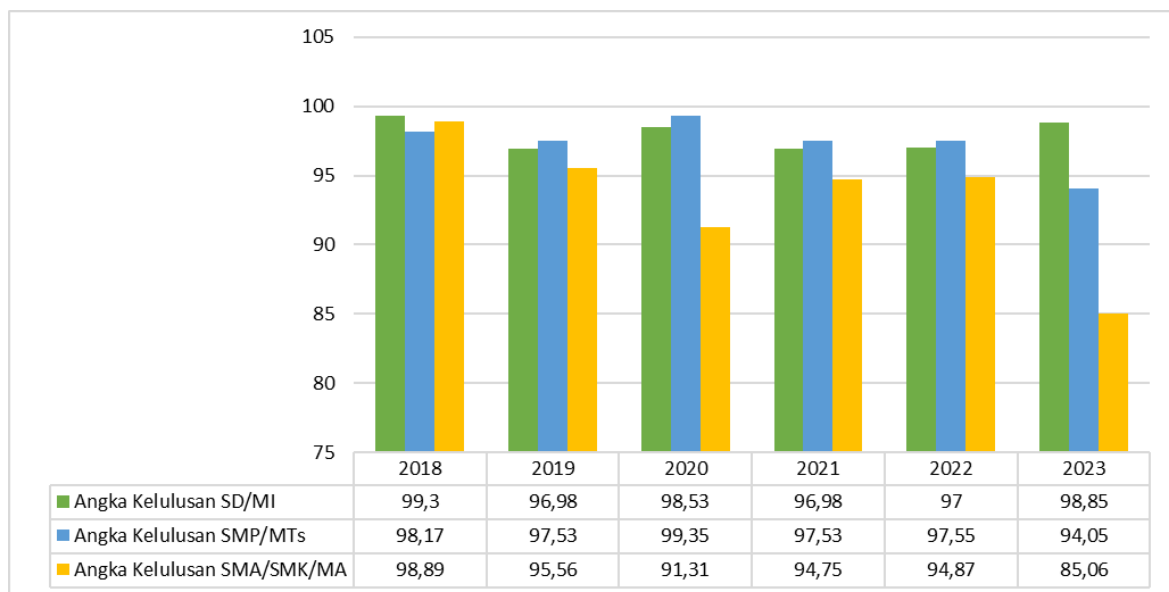


Gambar 2.58. Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Angka kelulusan di Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 99,3%. Pada tahun 2019, angka kelulusan mengalami penurunan menjadi 96,98% dan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2022 memiliki angka kelulusan sebesar 97. Pada tahun 2023 Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 98,85%. Hal ini menandakan bahwa hampir semua siswa SD/MI tingkat akhir di Kabupaten Seruyan dapat lulus dari jenjang SD/MI di tahun 2023. Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan pada tahun 2018 adalah sebesar 98,17%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan angka kelulusan menjadi 97,63% dan angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 Angka Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 94,05% dari yang sebelumnya 97,55% pada tahun 2022. Untuk jenjang SMA/SMK/MA, angka kelulusan di Kabupaten Seruyan mengalami

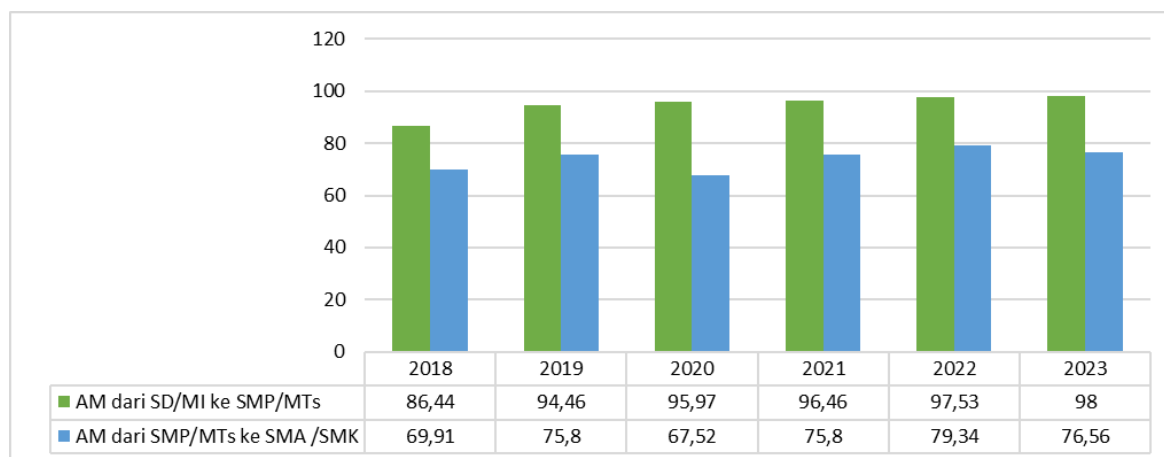
perkembangan yang juga fluktuatif. Pada tahun 2018 jenjang SMA/SMK/MA memiliki Angka Kelulusan sebesar 99,89% dan mengalami penurunan menjadi 95,56% pada tahun 2019. Pada tahun 2023 Angka Kelulusan jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan menjadi 85,06% dari yang sebelumnya 94,87% pada tahun 2022. Angka Kelulusan yang tidak mencapai 100% pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Seruyan menunjukkan bahwa masih ada siswa/siswai pada setiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Seruyan yang tidak mampu menamatkan pendidikannya.



Gambar 2.59. Grafik Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Seruyan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2018, angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 87,17%. Nilai tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2023 angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mencapai 98%. Angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 65,94% dan meningkat menjadi 75,8% pada tahun 2019. Pada tahun 2023 angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami penurunan menjadi 76,56% dari yang sebelumnya 79,34% pada tahun 2022.



**Gambar 2.60. Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
APK SD/MI	%	111,52	93,39	111,93	116,48	116,89	114,94	117,3	115,35	117,71	111,42	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	75,41	71,44	76,63	71,13	77,88	69,73	79,14	71,72	80,43	85,62	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
APK SMP/MTs	%	102,69	70,54	104,01	87,42	105,35	93,68	106,7	95,03	108,07	97,53	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	87,54	85,83	89,57	90,61	91,64	76,73	93,76	91,72	95,93	96,64	Tercapai	Dinas Pendidikan
APK SMA/SMK/MA	%	72,56	57,04	73,3	50,26	74,04	57,21	74,8	57,97	75,56	58,62	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Rasio	TAD	85,83	TAD	90,61	91,64	93,14	93,76	93,14	95,93	97,72	Tercapai	Dinas Pendidikan
AMP SD/MI	%	96,12	92,39	96,65	97,99	98,5	98,24	99	98,74	99,5	99,24	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
APM SMP/MTs	%	74,79	64,91	74,84	81,28	81,32	89,53	81,36	89,57	81,4	87,05	Tercapai	Dinas Pendidikan
APM SMA/MA/SMK	%	53,08	51,39	53,58	47,87	54,08	47,49	54,59	48	55,11	49,24	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SD	%	95,83	92,39	96,21	97,99	98,37	99,43	98,75	99,81	99,13	99,68	Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	64,63	64,91	65,04	81,28	81,69	82,53	82,1	82,94	82,51	86,53	Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SMA	%	37,3	51,39	38,08	47,87	48,68	47,49	49,49	48,34	50,3	49,16	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,4	0,03	0,89	0,03	0,44	0,03	0,44	0,03	0,9	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan



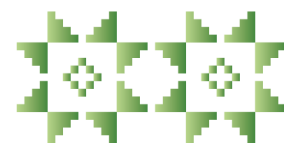
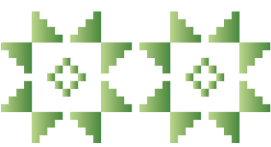
Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07	0,8	0,06	3,93	0,05	0,8	0,04	0,79	0,04	3,85	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	%	0,28	1,37	0,24	6	0,2	1,37	0,17	1,34	0,15	6,33	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,55	96,98	99,76	98,53	99,98	96,98	100	97	100	98,85	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,29	97,53	98,4	99,35	99,98	97,53	100	97,55	100	94,05	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	%	99,22	95,56	99,55	91,31	99,88	94,75	100	94,87	100	85,06	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,42	96,46	94,58	95,97	98,93	96,46	100	97,53	100	98	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	%	73,02	75,8	76,27	67,52	79,67	75,8	83,21	79,34	86,92	76,56	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	175	421	177	519	521	475	523	475	525	512	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	87	97	87	223	250	250	270	250	290	304	Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	21	21	21	21	21	24	21	24	21	64	Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	127,05	124	127,05	122,56	127,05	186	127,05	186	127,05	120,5	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Kualifikasi Guru yang Memiliki Ijazah S1/D4	%	97,99	85,74	99,73	87,68	100	99,8	100	99,8	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan
Persenase Pendidikan Anak Usia Dini	%	TAD	TAD	TAD	49,16	50	63,55	55	68,55	60	84,66	Tercapai	Dinas Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

2. Kesehatan

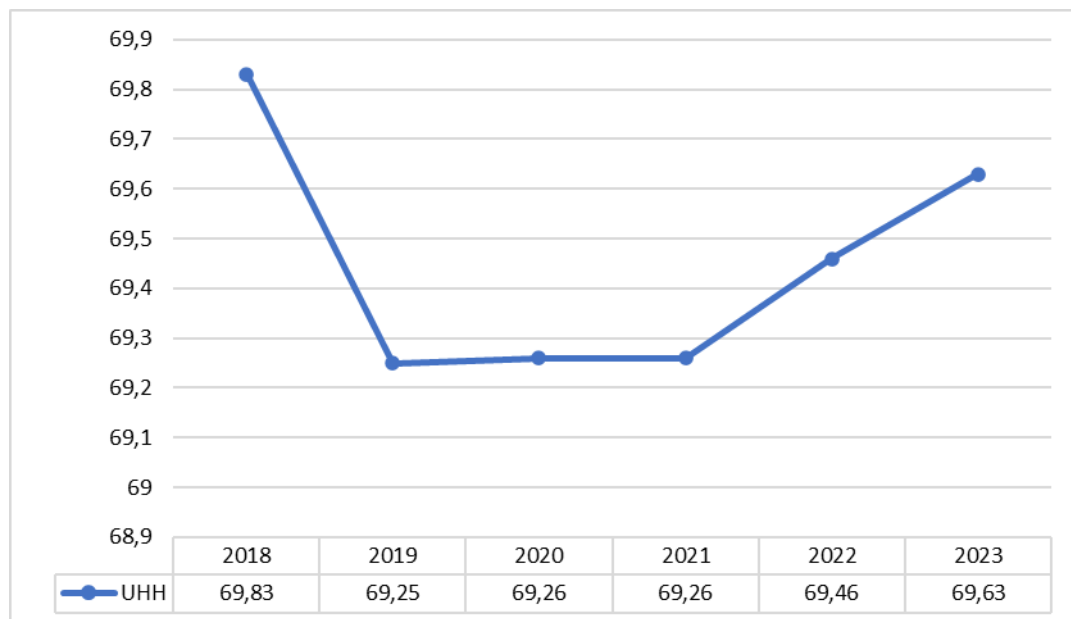
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini seperti yang tertuang dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional. Selain itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup



penduduk. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi. Selain penyelenggaraan kinerja yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain: Usia Harapan Hidup (UHH), Status Gizi Balita, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta Status Gizi Balita yang akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

UHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. UHH Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 69,83 tahun menurun pada tahun 2019 menjadi 69,25 tahun. UHH Kabupaten Seruyan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hingga akhirnya pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan memiliki nilai Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 69,63 tahun.



Gambar 2.61. Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Status gizi balita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kekurangan gizi terutama pada balita dan anak-anak dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan



perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun usia berikutnya kebutuhan gizi terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering luput dari pengamatan.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 3 balita mengalami gizi buruk, begitupula pada tahun 2019 juga dilaporkan sebanyak 3 balita mengalami gizi buruk. Kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2022, dilaporkan bahwa terjadi penurunan kasus gizi buruk. Dimana pada tahun 2022 tidak ditemukan adanya kasus gizi buruk pada balita.

Status gizi balita terdiri dari Stunting, Wasting, dan Underweight. Pada tahun 2019 jumlah Stunting sebanyak 1250 anak dengan persentase 24,36%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 831 anak atau 10,68%. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 779 anak atau 17,51% dan pada tahun 2022 menjadi 547 anak. Namun pada tahun 2023, Angka Stunting di Kabupaten Seruyan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 919 anak. Sedangkan untuk Wasting pada tahun 2019 sebanyak 644 anak atau 12,55%, pada tahun 2020 turun menjadi 418 anak atau 5,38% dan tahun 2021 turun lagi menjadi 363 anak atau 8,16%. Nilainya terus turun menjadi 168 anak pada tahun 2022 dan 18 anak pada tahun 2023. Untuk Underweight pada tahun 2019 sebanyak 900 anak atau 17,54%, pada tahun 2020 turun menjadi 543 anak atau 6,69% dan tahun 2021 naik menjadi 900 anak atau 20,23%. Kemudian angkanya mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 345 anak dan pada tahun 2023 menjadi 29 anak.

Tabel 2.41. Status Gizi Balita di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

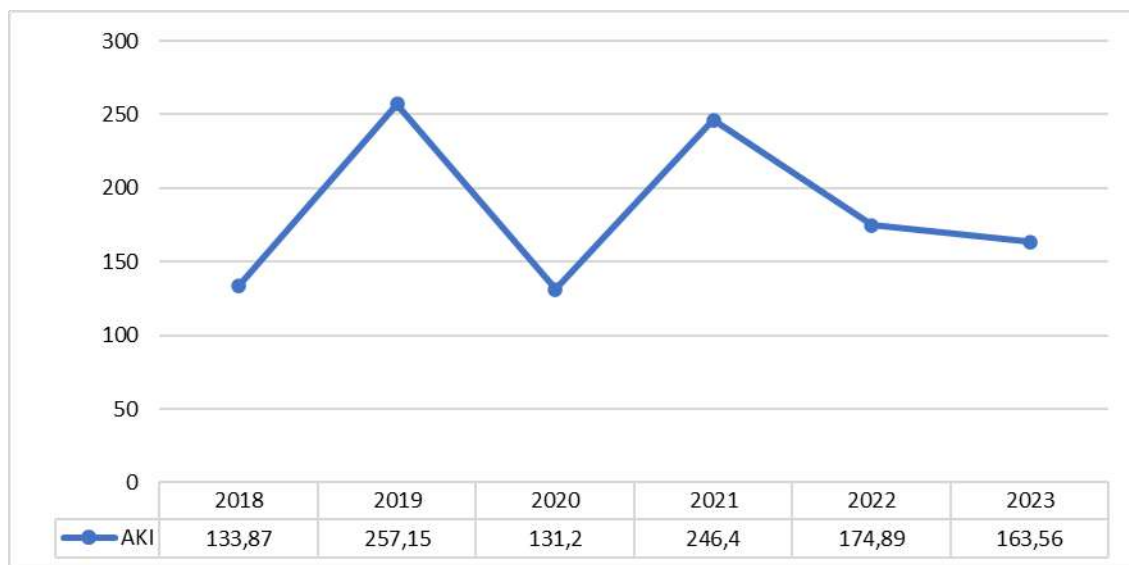
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gizi Buruk	3	3	2	1	0	TAD
Stunting	1.235	1.250	831	779	547	919
Wasting	752	644	418	363	168	18
Underweight	810	900	543	900	345	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan di Kabupaten Seruyan. AKI merupakan jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, serta nifas disuatu wilayah pada setiap

100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Gambaran AKI di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Terlihat adanya tren kenaikan angka kematian ibu dari tahun 2018 sebanyak 133,87 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 275,15 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Kemudian terjadi penurunan AKI pada tahun 2020 menjadi 131,2 per 100.000 kelahiran hidup. Besaran AKI kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 246,4 per 100.000 kelahiran hidup. Namun besaran AKI pada tahun 2022 mampu turun menjadi 174,89 per 100.000 kelahiran hidup dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 163,56 per 100.000 kelahiran hidup.



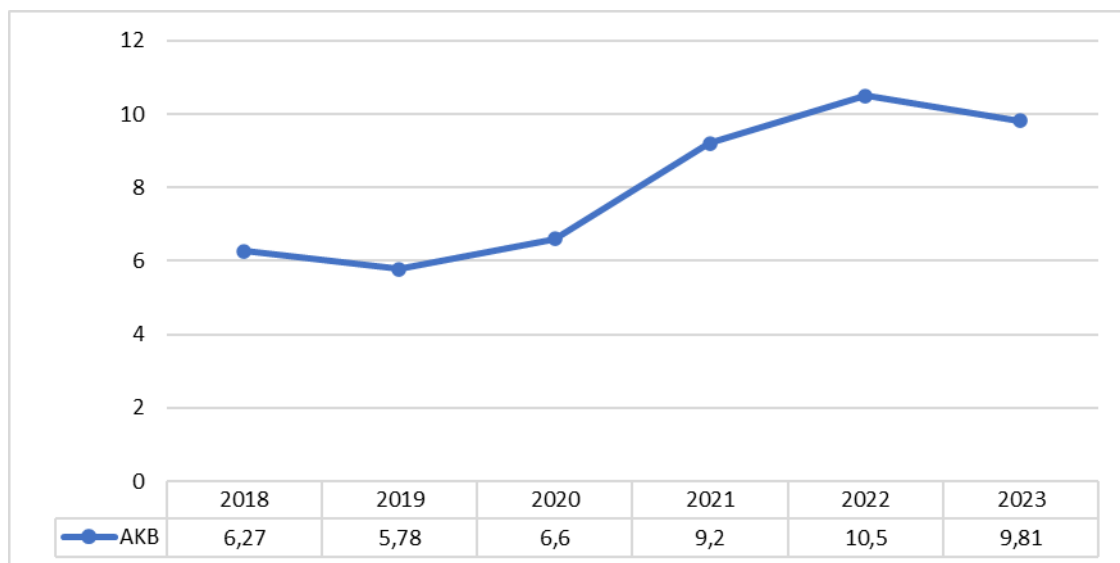
Gambar 2.62. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar, yang berperan terhadap mutu pelayanan kebidanan. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena kelompok ini rentan terhadap masalah kesehatan

terutama terhadap paparan lingkungan sekitar. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan AKB didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal (berumur kurang dari 1 tahun) dalam wilayah dan kurun waktu tertentu setiap 1.000 kelahiran hidup. Tren jumlah kematian bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 4,9 per 1.000 kelahiran hidup meningkat hingga 10,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Dan mengalami sedikit penurunan menjadi 9,81 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Angka kematian bayi yang cenderung meningkat seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak di Kabupaten Seruyan, terlebih Pemerintah Daerah dan pihak yang berwenang.



Gambar 2.63. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,11	5,78	5,95	6,6	5,8	9,2	5,64	10,5	5,5	9,81	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	Per 1.000 KH	19	994,22	19	993,4	994,2	990,08	994	989,5	993	TAD		Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	132,53	257,15	131,2	131,2	129,88	246,4	128,57	174,89	127,28	163,56	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	6,83	7,86	6,57	6,57	6,31	8,27	6,07	1,27	5,83	1,75	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1.000	0,63	0,63	0,67	0,54	0,69	0,62	0,73	0,69	0,75	0,692	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Per 1.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06	0,072	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Poliklinik per satuan penduduk	Per 1.000	0,09	0,09	0,09	0,1	0,09	0,08	0,09	0,07	0,09	0,096	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Pustu per satuan penduduk	Per 1.000	0,45	0,46	0,45	0,39	0,45	0,47	0,45	0,53	0,45	0,524	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan Penduduk	Per 1.000	0,62	0,63	0,72	0,97	0,98	1,05	1,08	1,35	1,19	1,33	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,26	0,112	0,26	0,2	0,26	0,43	0,26	0,49	0,26	39,1	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	400	3,6	400	6,62	9,64	0,43	12,66	4,48	15,68	592,29	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	18	100	29,9	35,4	51	43,07	35	50,74	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	71	67	72	28,45	73	84	74	71	75	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Universal Children Immunization (UCI)	%	85	50	85	62,46	85	75,59	85	79,8	85	81	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA +	%	15	53,29	16	15,81	16	23,67	16	27,3	16	33,46	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	17,75	16,5	20,23	20,23	23,06	20,2	26,28	24,5	29,94	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	%	75,99	61	78,94	29,48	82,01	91	85,19	80	88,5	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas	%	120	120	120	120	130	120	130	120	130	TAD		Dinas Kesehatan
Cakupan Puskesmas Pembantu	%	83	82	85	80	88	84	92	80	95	TAD		Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	75,31	100	62,55	100	83,81	100	79	100	87,8	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	48,27	100	50,8	100	62,93	100	37	100	63,66	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	74,02	100	74,65	100	81,15	100	69	100	84,1	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	41,31	100	57,79	100	70,5	100	56	100	69,9	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	%	100	25,5	100	28,15	100	96,66	100	12	100	60,43	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
pelayanan kesehatan sesuai standar													
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	12,59	100	23,16	100	49,31	100	39,4	100	81,78	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	23,21	100	28,89	100	45,23	100	18,5	100	32,63	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	36,47	100	100	100	22,67	100	17,4	100	65	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	39,67	100	100	100	98,34	100	70,9	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	44,88	100	100	100	95,38	100	51,5	100	65,27	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	25,67	100	12,64	100	17,03	100	39,74	100	52,4	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan risiko teinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	22	100	9,99	100	44,54	100	62,96	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	%	TAD	TAD	TAD	52	53	51	55	53	55	57	Tercapai	Dinas Kesehatan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
epidemologi < 24 jam													

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

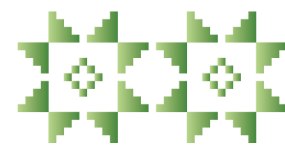
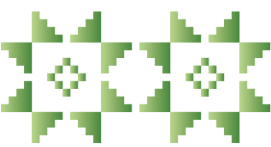
Perencanaan dan pembangunan prasarana kota merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Salah satu prasarana yang paling dibutuhkan adalah jaringan jalan. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di suatu wilayah. Kemudahan akses jalan akan berdampak pada peningkatan laju distribusi barang dan jasa sehingga roda perekonomian masyarakat terus berputar. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan yang baik dan memadai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan berkembang.

Di Kabupaten Seruyan, panjang jalan negara sepanjang 82,33 km, jalan provinsi mencapai 188,31 km, dan panjang jalan kabupaten sebesar 1.050,89 km. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana proporsi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 16,73% yang kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 24,21% pada tahun 2023. Jika melihat panjang jalan di setiap kecamatan, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki panjang jalan terpanjang mencapai 260,83 km. Sedangkan panjang jalan terpendek berada di Kecamatan Suling Tambun dengan panjang jalan hanya sepanjang 20,00 km.

Tabel 2.43. Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	175,86	188,92	213,03	224,58	239,95	253,17
Sedang	106,08	55,57	141,15	186,4	181,02	166,41
Mantap	281,94	244,49	354,18	410,98	420,97	419,58
Rusak	769,02	803,81	696,71	639,91	629,82	626,31
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	16,73	17,98	20,27	21,37	22,83	24,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan





Tabel 2.44. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			
	Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
Seruyan Hilir	73,84	26,9	160,4	260,83
Seruyan Hilir Timur	35,56	52,8	32,9	121,26
Danau Sembuluh	17,30	2,50	12,44	32,24
Seruyan Raya	31,85	-	33,15	65,00
Hanau	11,90	5,40	17,70	35,00
Danau Seluluk	18,23	5,77	45,77	69,86
Seruyan Tengah	56,90	47,9	121,36	225,45
Batu Ampar	13,20	25,5	17,35	55,80
Seruyan Hulu	-	0,20	165,25	165,45
Suling Tambun	-	-	20,00	20,00
Jumlah	258,17	166,41	626,31	1.050,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

Tabel 2.45. Ketersediaan dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Kondisi Jembatan	Jumlah (unit)	Persentase (%)
Baik	14	42,42
Sedang	16	48,49
Rusak ringan	1	3,03
Rusak berat	2	6,06
Jumlah	33	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

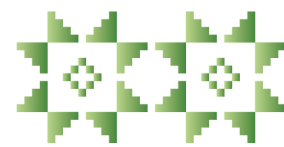
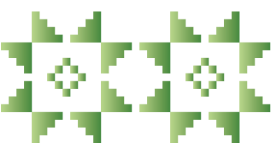
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	49,76	49,76	45	45,68	47	66,28	47	33,56	49	49,22	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio Jaringan Irigasi	%	27,04	22,5	29,33	22,8	31,81	30,2	34,51	9,9	37,43	14,86	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	TAD	73,4	TAD	62,76	49,72	49,72	34,44	29,99	18,3	54,59	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	TAD	13,23	TAD	14,05	15,2	14,44	17,29	3,63	19,66	41,29	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	TAD	75,12	TAD	75,12	77	77	79	61,4	81	12,04	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio Areal Kawasan Kumuh	%	TAD	0,9	TAD	1,9	3,4	2,72	5,88	0,04	9,34	TAD	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	14,09	17,98	18,32	20,27	23,82	21,54	30,96	22,6	40,25	24,57	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase SDM Terampil Konstruksi Bersertifikat	%	65	65	65	65	75	18,86	85	62	100	71,5	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	2,33	2,33	2,33	2,33	3,75	2,4	4,8	4,62	5,9	4,62	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	45,24	57,32	47,22	54,9	57,4	58,01	59,9	51,38	62,4	67,7	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Sistem Air Limbah yang dikelola dengan baik	%	57,32	57,32	54,9	54,9	57,4	58,01	59,9	51,38	62,4	67,7	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





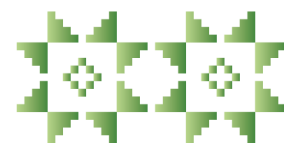
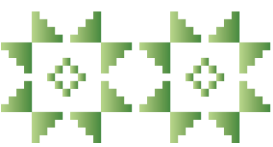
Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	107,24	29,09	107,24	30,29	33,98	32,28	35,78	117	37,69	4,76	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	TAD	36,75	TAD	48,99	61,24	48,99	73,49	73	85,74	TAD		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketaatan Terhadap RTRW	%	TAD	12,36	TAD	13,91	15,45	17,99	16,2	91,48	17,01	91,48	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

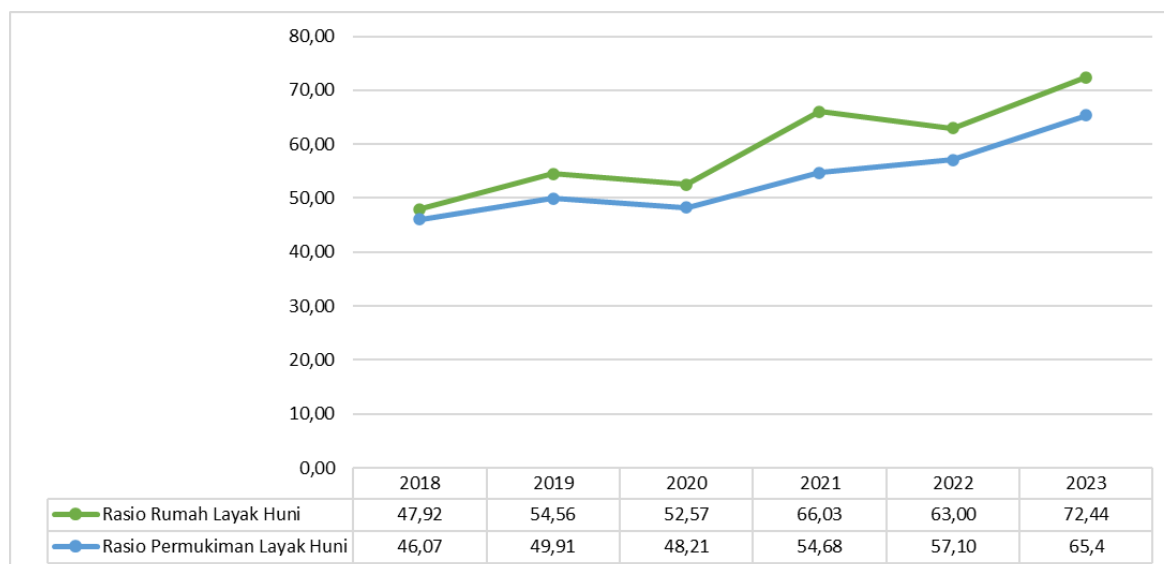
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Pada periode tahun 2018-2023, rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni sebesar 47,92% kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 54,56%. Namun pada tahun 2020, nilai rasio rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 52,57%. Pada periode tahun 2021-2023, nilainya mampu meningkat cukup signifikan menjadi 72,44% pada tahun 2023. Sedangkan rasio permukiman layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 46,07% yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 49,91%. Pada tahun 2020, rasio permukiman layak huni menurun menjadi 48,21%, namun nilainya kembali meningkat pada periode tahun 2021-2023 menjadi 65,4% di tahun 2023.





Gambar 2.64. Grafik Perkembangan Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio permukiman layak huni	%	5,41	49,91	5,61	48,21	55,07	54,68	57,57	57,1	60,07	65,4	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni	%	46,1	54,56	46,13	52,57	52,91	66,03	53,21	63	55,71	72,44	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	85	90	87	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,

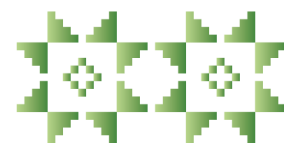
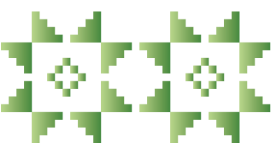


Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
													dan Pertanahan
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	TAD	TAD	TAD	TAD	20	10	10	10	10	20	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	20	90	90	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	30	20	20	20	10	10	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	99,61	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase permukiman yang tertata	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	TAD	85	85	85	85	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Iklim ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang kondusif dalam sebuah kota menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemeliharaan situasi wilayah yang kondusif ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah





Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan ke pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat. Selain dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan pula oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	Rasio	22,51	47,93	20,9	48,32	49,38	55,86	50,76	58,41	52,14	TAD		Satpol PP
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	100	83	100	85	TAD		Satpol PP
Penegakan Perda dan Perkada	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	TAD		Satpol PP
Persentase penanganan bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan kebakaran hutan dan lahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penurunan titik hotspot Karhutla	%	100	738	100	95	100	27,85	100	40	100	1,00 4	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan non kebakaran	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	TAD		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



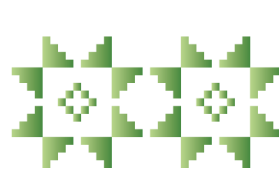
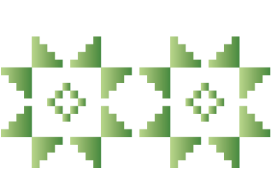
Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	TAD		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	TAD		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Seruyan

6. Sosial

Sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga. Pada tahun 2018, Kabupaten Seruyan memiliki 8 unit Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al Mustagfirin, Pesantren Asseruyaniyah, Darul Mukmin, Pa Aladin Seruyan Hilir, Hidayatul Amin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul Tolibin Seruyan. Namun kini hanya tersisa 4 unit LKSA di Kabupaten Seruyan, yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al Mustagfirin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul Tolibin Seruyan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada tahun 2022, jumlah PMKS di Kabupaten Seruyan sebanyak 79.673 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi bencana banjir dan COVID-19. Jumlah tersebut menurun menjadi 50.001 pada tahun 2023. Penurunan tersebut seiring dengan jumlah penduduk yang dapat bangkit pasca bencana banjir dan COVID-19.





Tabel 2.49. Jumlah LKSA dan PMKS di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

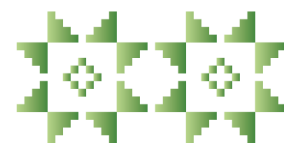
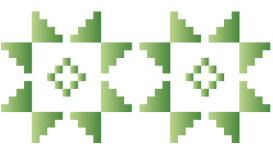
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	8	4	4	4	4	TAD
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	26.876	5.401	6.558	29.147	79.673	50.001

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	8	4	8	4	8	4	8	9	8	6	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase Pemberdayaan Sosial	%	TAD	95	TAD	95	98	1	98	100	98	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	TAD	95	TAD	95	98	0	98	0	98	0	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	TAD	98	TAD	98	98	1	98	100	98	94,45	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PMKS yang tertangani	%	TAD	98	TAD	98	98	1	98	100	98	96,48	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	TAD	98	TAD	98	98	1	98	100	98	94,45	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang	%	TAD	95	TAD	95	95	1	95	100	95	100	Tercapai	Dinas Sosial





Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
telah menerima jaminan sosial													
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	TAD	97	TAD	97	97	1	97	100	97	87	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	TAD	97	TAD	97	97	0	97	0	97	100	Tercapai	Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

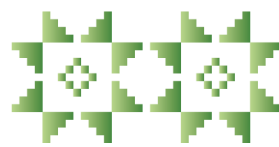
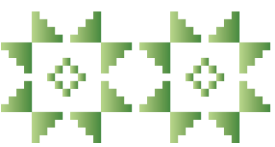
2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu upaya pembangunan diarahkan kepada perluasan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan daerah.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Seruyan dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan perekonomian. Penurunan angka pengangguran ini seharusnya diikuti oleh meningkatnya angka partisipasi tenaga kerja. Namun yang terjadi di Kabupaten Seruyan, tingkat partisipasi angkatan kerja nilainya terus mengalami perubahan yang fluktuatif.

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.





Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,33	4,45	4,17	4,3	3,99	4,25	3,79	3,96	3,66	3,61	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,92	71,09	79,04	65,04	81,21	71,46	85,74	72,1	85,74	67,66	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Kasus	14	339	14	133	13	133	13	135	12	125	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	TAD	TAD	TAD	TAD	85	0,019	85	0,23	85	83,33	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	50	0,36	55	12,56	60	10,79	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	TAD	TAD	TAD	TAD	85	100	85	100	85	100	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	TAD	TAD	TAD	TAD	21,31	58,11	21,31	45,76	20	22,2	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	TAD	TAD	TAD	TAD	85	100	85	100	85	0	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	88,30	100	82	100	84,12	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase keselamatan dan perlindungan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

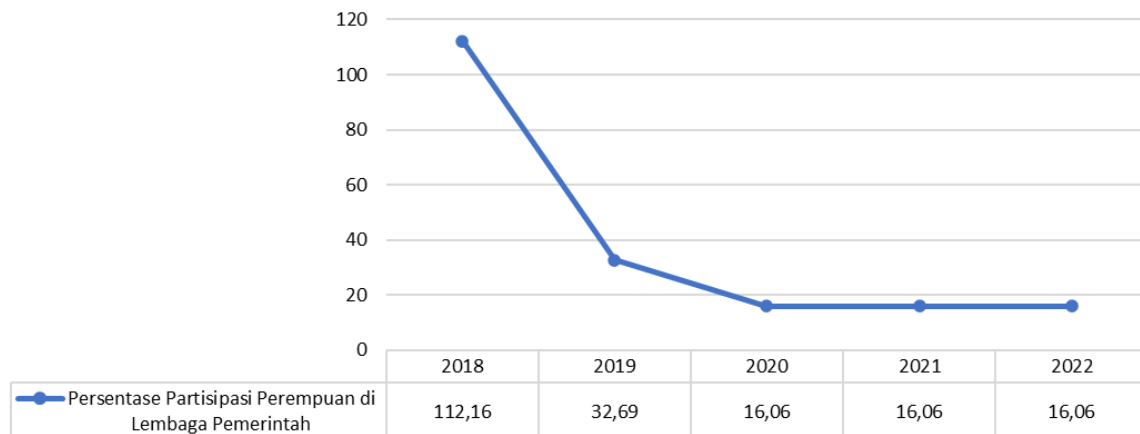
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan



2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Manifestasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seruyan mencakup peningkatan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Realisasi pelaksanaannya dapat dilihat dari besarnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, salah satunya pelibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Seruyan sebesar 112,16%. Kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 32,69% dan pada tahun 2020 nilainya kembali turun menjadi 16,06%. Nilai tersebut bertahan hingga akhir tahun 2022.



Gambar 2.65. Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kabupaten Seruyan

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah KDRT	Kasus	TAD	1	TAD	1	0	100	0	3	0	TAD		DP3AP2KB
Selesai Tindak Pidana KDRT	Kasus	TAD	1	TAD	1	0	100	0	1	0	TAD		DP3AP2KB
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	TAD	1	TAD	0,96	1,125	0,96	0,02	0,2	0,02	8	Tercapai	DP3AP2KB
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	TAD	12	TAD	12	12	12	12	TAD	12	TAD		DP3AP2KB
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	TAD	0,39	TAD	0,38	0	0	0	TAD	0	0	Tercapai	DP3AP2KB
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	TAD	1	TAD	0,96	1,125	0,96	0,02	0,2	0,02	3	Tercapai	DP3AP2KB

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan

3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa sehingga ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu ketahanan pangan suatu wilayah akan menjadi sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.



Ketahanan pangan, tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Sementara itu pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Ketersediaan Pangan Utama	%	36,11	35,8	37,2	36,31	38,32	80,34	39,47	80	40,66	38,41	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	36,02	100	37,32	100	40	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

4. Pertanahan

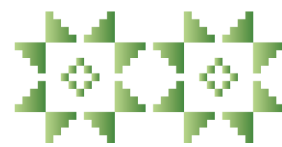
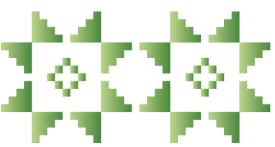
Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam urusan bidang pertanahan adalah:



- a) Pemberian ijin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota.
- b) Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
- c) Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
- d) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota.
- e) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
- f) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- g) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- h) Penerbitan izin membuka tanah.
- i) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan urusan pertanahan tersebut, berdasarkan pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan bahwa penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tahan Kawasan Hutan) dilaksanakan oleh Kementerian. Dimana Pemerintah Daerah mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH kepada Tim Inver PPTPKH melalui bupati/wali kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai upaya berkelanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka menyelesaikan dan memberikan hak-hak masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Seruyan mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH pada tahun 2024 yang dilakukan dalam 3 tahap. Luas lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah 130.265,00 Ha yang terbagi menjadi 69.869,10 Ha pada tahap 1, 28.297,57 Ha pada tahap 2, dan 32.098,33 pada tahap 3. Hingga saat ini, tital lahan yang telah dilakukan Invert adalah +/- 35.565,05 Ha atau sekitar 59 persen. Rincian usulan yang dimohonkan untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi PPTKH di Kabupaten Seruyan tahun 2024, sebagai berikut:





Tabel 2.54. Usulan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Jenis Peruntukan Bidang Tanah	Luas (Ha)		
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
1.	Permukiman	747,70	857,47	
2.	Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	10,27	96,65	
3.	Lahan Garapan	69.111,13	27,343,45	
4.	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan, dan Tambak	-	-	30.218,26
5.	Permukiman Diluar Indikatif	-	-	48,95
6.	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	1.129,32
7.	Permukiman, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Umum	-	-	663,78
Jumlah		69.869,10	28.297,57	32.098,33

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penyelesaian kasus tanah negara	%	TAD	TAD	TAD	TAD	85	85	90	90	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penyelesaian izin lokasi	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	80	90	90	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase luas lahan bersertifikat	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	80	90	75	100	100	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan.

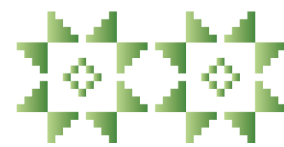
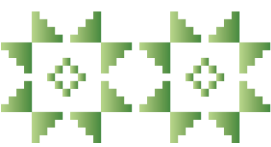
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Penanganan Sampah	%	19	51	21,84	51	25,11	70	28,86	12,28	33,18	24	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase timbunan sampah yang ditangani	%	TAD	8,96	TAD	8,76	10	0,004	11	12,29	12	0,27	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Operasional TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Buah	TAD	1	TAD	1	2	1	2	1	3	1	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	TAD	4	TAD	4	5	4	5	20	6	20	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	TAD	54,98	TAD	56,76	77,4	72,69	79,4	68,71	81,4	66,53	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	TAD	50	TAD	50	50,2	62,29	50,3	48	50,4	56,67	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	TAD	83,72	TAD	84,56	84,66	84,33	84,76	87,80	84,86	91,89	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	TAD	TAD	TAD	TAD	1	1	1	TAD	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penetapan hak MHA	Ketetapan	TAD	TAD	TAD	TAD	1	1	1	TAD	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Lembaga	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	1	TAD	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Lembaga	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	1	1	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana	Lembaga	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	1	TAD	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Lembaga	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	1	1	1	8	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



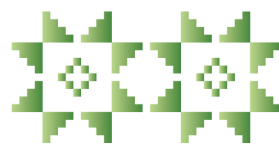
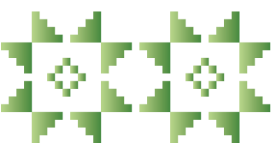


Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	TAD	Tidak Ada	TAD	Tidak Ada	Tidak Ada	TAD	Ada	TAD	Ada	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase berkurangnya kerusakan lingkungan hidup	%	TAD	TAD	TAD	TAD	76	TAD	76	TAD	77	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	TAD	TAD	TAD	TAD	1	TAD	1	Tidak Ada	1	TAD		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	TAD	14	TAD	1	25	8	30	24	30	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang terdiri atas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data informasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sistem administrasi kependudukan, yang mencakup: (1) pelaksanaan pelayanan; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) pengelolaan informasi; (4) pengawasan internal; (5) penyuluhan kepada masyarakat; (6) pelayanan konsultasi; serta (7) pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	94	93,66	95	95,27	96	95,11	97	95,11	98	98,59	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	96	97,77	96,5	99,73	99,81	100	99,83	99,09	99,85	99,72	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	49	38,15	52	37,16	55	63,28	58	59,60	61	66,07	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	TAD	93,66	TAD	95,27	96	95,11	97	95,11	98	98,59	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	TAD	97,77	TAD	99,73	99,81	100	99,83	99,09	99,85	100	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1000	610	576,182	670	599,89	623,60	624,32	647,31	628,08	671,01	659,35	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan



7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dalam tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan/desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di tingkat kelurahan semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan dapat terwujud.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	177	97	274	97	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	TAD	70	TAD	70	78,83	60	86,65	70,1	96,69	70,1	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase LPM Berprestasi	%	TAD	TAD	TAD	TAD	10,3	8	20,61	0	30,91	0	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
													Masyarakat dan Desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	TAD	59,37	TAD	59,37	71,87	60	84,75	28,86	100	28,86	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase LSM Aktif	%	TAD	5,54	TAD	5,54	10,3	8	20,61	4,12	30,91	4,12	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan

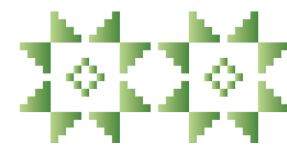
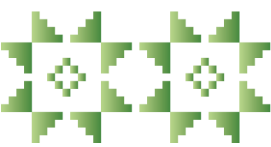
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga sub-urusan/bidang terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	2	2	2	1,3	2	2,3	2	TAD		DP3AP2KB
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	TAD	0,04	TAD	0,02	1,22	0,02	1,19	1,48	1,16	TAD		DP3AP2KB
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	TAD	1,5	TAD	1,5	1,5	63	1,5	74,38	1,5	100	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase PKB/PLKB yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DP3AP2KB





Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk													
Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan masyarakat	%	TAD	100	TAD	100	100	96	100	100	100	100	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	TAD	21	TAD	28	29	100	30	180	32	100	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS) yang ber KB mandiri	%	TAD	10,2	TAD	11,6	11,6	100	12	100	15	100	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	TAD	56	TAD	56	56	100	60	100	62	80	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	TAD	41	TAD	41	41	100	41	100	41	100	Tercapai	DP3AP2KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	TAD	20	TAD	20	25	100	25	100	25	78	Tercapai	DP3AP2KB

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan

9. Perhubungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan kewenangan urusan perhubungan untuk kabupaten dan kota adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan



perkeretaapian. Untuk meningkatkan mobilitas atau gerak barang, manusia, dan informasi dibutuhkan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai guna memperpendek waktu untuk menempuh jarak antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut harus memadai demi mencapai tujuan akhir yaitu efisiensi ekonomi. Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam satu wilayah di suatu daerah saja, tetapi juga antar daerah, antar pulau dan antar negara. Terdapat tiga macam perhubungan, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara.

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bus	Unit	81	96	82	96	100	100	102	100	104	100	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.042	3.110	3.236	3.305	3.442	3.685	3.662	3.691	3.895	3.902	Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	29.362	6.106	34.998	6.327	6.546	6.954	6.765	6.842	6.984	6.986	Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1.460	1.130	1.469	1.362	1.478	1,669	1.486	1.694	1.495	1.497	Tercapai	Dinas Perhubungan
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,71	0,62	0,87	0,63	1,07	0,86	1,31	0,66	1,61	0,85	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Pemasangan Rambu-Rambu	Unit	208	214	207	247	250	247	266	247	275	277	Tercapai	Dinas Perhubungan
Rasio Ijin Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam Satu Kabupaten	%	3	3	3	3	5	3	8	3	9	3	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40,2	41	29,12	47	5	39,1	5	39,28	5	39,46	Tercapai	Dinas Perhubungan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,05	0.034	0,05	0,032	0,05	0,035	0,05	0,028	0,06	0,032	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

10. Komunikasi dan Informatika



Perkembangan suatu daerah antara lain dapat dilihat dari sarana dan prasarana telekomunikasi yang tersedia. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program aplikasi informatika, layanan akses telekomunikasi sangat diperlukan di semua sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jumlah operator jaringan seluler di Kabupaten Seruyan sebanyak 3 operator, sedang operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator.

Jaringan komunikasi seluler telah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan. Untuk sebaran jaringan seluler 4G saat ini hanya ada di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh, dan Kecamatan Seruyan Raya. Sedangkan sebaran jaringan 2G dan 3G ada pada Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Dari data yang di himpun dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 102 Base Tranceiver Station (BTS) di Kabupaten Seruyan.

Guna pemeratakan jangkauan jaringan seluler di Kabupaten Seruyan dan meminimalisir Desa Blank Spot, Dinas Kamonukasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Seruyan telah bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan laporan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah bulan Desember 2023, di Kabupaten Seruya terdapat 49 titik *blankspot* yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.61. Sebaran Wilayah *Blankspot* di Kabupaten Seruyan

No	Kelurahan	Kecamatan	Elektrifikasi
1	Muara Dua	Seruyan Hilir	PLN
2	Sungai Perlu	Seruyan Hilir	PLN
3	Mekar Indah	Seruyan Hilir Timur	
4	Bangun Harja	Seruyan Hilir Timur	PLN
5	Halimaung Jaya	Seruyan Hilir Timur	PLN
6	Ulak Batu	Danau Sembuluh	Listrik Desa
7	Palingkau	Danau Sembuluh	Listrik Desa
8	Paren	Danau Sembuluh	Listrik Desa
9	Tabiku	Seruyan Raya	PLN
10	Selunuk	Seruyan Raya	PLN
11	Lanpasa	Seruyan Raya	PLN
12	Tanjung Rangas II	Danau Seluluk	PLN
13	Penimba Raya	Danau Seluluk	PLN
14	Tanjung Paring	Danau Seluluk	PLN
15	Parang Batang	Hanau	PLN



No	Kelurahan	Kecamatan	Elektrifikasi
16	Paring Raya	Hanau	PLN
17	Derangga	Hanau	PLN
18	Bahaur	Hanau	PLN
19	Tanjung Hanau	Hanau	Listrik Desa
20	Derawa	Batu Ampar	PLN
21	Sahabu	Batu Ampar	PLN
22	Batu Menangis	Batu Ampar	PLN
23	Bukit Buluh	Seruyan Tengah	PLN
24	Panca Jaya	Seruyan Tengah	PLN
25	Mugi Panyuhu	Seruyan Tengah	PLN
26	Gantung Pengayuh	Seruyan Tengah	PLN
27	Suka Jaya	Seruyan Tengah	PLN
28	Teluk Bayur	Seruyan Tengah	PLN
29	Bumi Jaya	Seruyan Tengah	PLN
30	Ayawan	Seruyan Tengah	PLN
31	Tumbang Ba'i	Seruyan Tengah	PLN
32	Tangga Batu	Seruyan Tengah	PLN
33	Sepundu Hantu	Seruyan Hulu	Non PLN
34	Tumbang Kubang	Seruyan Hulu	Non PLN
35	Tanjung Paku	Seruyan Hulu	Non PLN
36	Riam Batang	Seruyan Hulu	Non PLN
37	Tumbang Sepan	Seruyan Hulu	Non PLN
38	Tumbang Setawai	Seruyan Hulu	Non PLN
39	Tumbang Darap	Seruyan Hulu	Non PLN
40	Tumbang Bahan	Seruyan Hulu	Non PLN
41	Marandang	Seruyan Hulu	Non PLN
42	Tumbang Suei	Seruyan Hulu	Non PLN
43	Tumbang Manjul	Seruyan Hulu	PLN
44	Rantau Panjang	Seruyan Hulu	Non PLN
45	Tumbang Setoli	Suling Tambun	Non PLN
46	Tumbang Hentas	Suling Tambun	Non PLN
47	Tanjung Tukal	Suling Tambun	Non PLN
48	Rangkang Munduk	Suling Tambun	Non PLN
49	Tumbang Salau	Suling Tambun	Non PLN

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Surat Kabar Nasional	Unit	20	11	20	14	16	11	18	11	20	4	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah Surat Kabar Lokal	Unit	34	11	35	13	15	14	17	5	19	7	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	53	53	53	53	53	53	53	53	53	44	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	43	43	54	54	66	85	70	68	70	77	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Proporsi Rumah Tangga Berakses Internet	%	60	60	65	65	65	80	80	61	80	62,83	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan

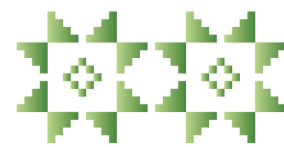
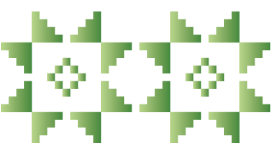
11. Koperasi dan UKM

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Selain itu koperasi merupakan salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyak koperasi yang aktif menunjukkan akan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran dan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	99,5	99	99,5	90	94,17	90	90	85	99	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



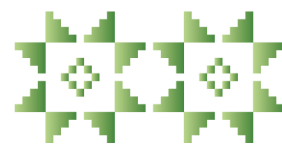
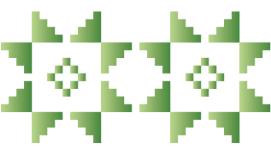


Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase koperasi aktif	%	82,19	86,81	82,56	86,81	87,17	87,59	87,53	87,5	87,89	88,44	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	86,95	86,95	85,21	83,3	82,46	80,84	81,72	86	79,98	81,72	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase BPR/LKM Aktif	%	13,05	13,05	14,79	16,7	16,94	16,94	18,28	14	20,02	18,28	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Usaha Kecil Mikro yang berdaya saing	%	1,94	1,94	2,94	1,94	3,94	TAD	4,94	4	5,94	1		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan

12. Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki wewenang untuk melakukan aktivitas penanaman modal dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun wewenang tersebut adalah (1) merumuskan kebijakan untuk mengembangkan penanaman modal, (2) melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penanaman modal, (3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penanaman modal, (4) mempromosikan kegiatan penanaman modal dan melakukan kerjasama





penanaman modal, (5) mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di daerah, serta (6) melaksanakan kegiatan pelayanan penanaman modal, yaitu memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, melakukan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	72	TAD	75	TAD	80	88	85	62	90	TAD		DPMPTSP
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	TAD	TAD	TAD	TAD	44	87	44	48	44	TAD		DPMPTSP
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	TAD	TAD	TAD	TAD	1.071.428.571.400	941.724.700.000	1.071.428.571.400	362.014.820.969	1.071.428.571.400	671.753.060.000	Tidak Tercapai	DPMPTSP
Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	77	0,88	79	2	81	1,15	Tidak Tercapai	DPMPTSP

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyaknya jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai salah satu aset bangsa.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Presentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	68	70	83	60	70	86	80	86	90	90	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	20	62,5	21	92	94	92	96	92	98	96	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	37	32	41	32	37	12	42	31	47	66	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	10	11	12	0	11	2	13	8	15	13	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

14. Statistik

Terkait dengan statistik Kabupaten Seruyan, acuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkrue Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas pokok pemerintah daerah dalam Urusan Statistik adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara itu, fungsi pemerintah daerah dalam urusan statistik adalah (1) melaksanakan kebijakan di bidang statistik, dan (2) membangun metadata statistik sektoral berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	TAD	TAD	TAD	TAD	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan

15. Persandian

Urusan persandian dalam penyediaan layanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dikelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	TAD	TAD	TAD	TAD	20	10	20	10	20	20	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan

16. Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Undang Undang



Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan, pemberian kompensasi atau insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfaatan, perbanyakkan benda cagar budaya. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya daerah	Jumlah	2	2	2	0	2	0	3	1	4	1	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya	Jumlah	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	2	24	4	24	30	35	35	35	40	40	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan

17. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, dan



koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah pembinaan perpustakaan, dengan lingkup pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Kemudian pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang meliputi pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (dihapus) ganti Persentase Sesuai Rumus PMDN	Orang	11.018	11.784	11.657	7.855	7.900	4.929	8.500	4.929	8.165	9.385	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	%	TAD	9,14	TAD	5,98	37	3,53	37,25	3,77	37,5	7,22	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	TAD	64.582	TAD	71.923	72,3	71.923	72,6	72.365	73	73.608	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	Unit	45	1 PUD dan 45 PD	45	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	%	41,08	35,27	41,08	35,25	37	35,31	37,25	0	37,5	36,5	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan



18. Kearsipan

Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi publik dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, akuntabilitas suatu kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Fungsi arsip aktif harus dapat memberikan dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik seiring dengan penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Arsip mempunyai kontribusi dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Fungsi kearsipan sebagai proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	25	50	25	56	62	100	66	100	72	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0	2	300	40	47,61	42,86	75	62,5	73,2	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan



2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembanguan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

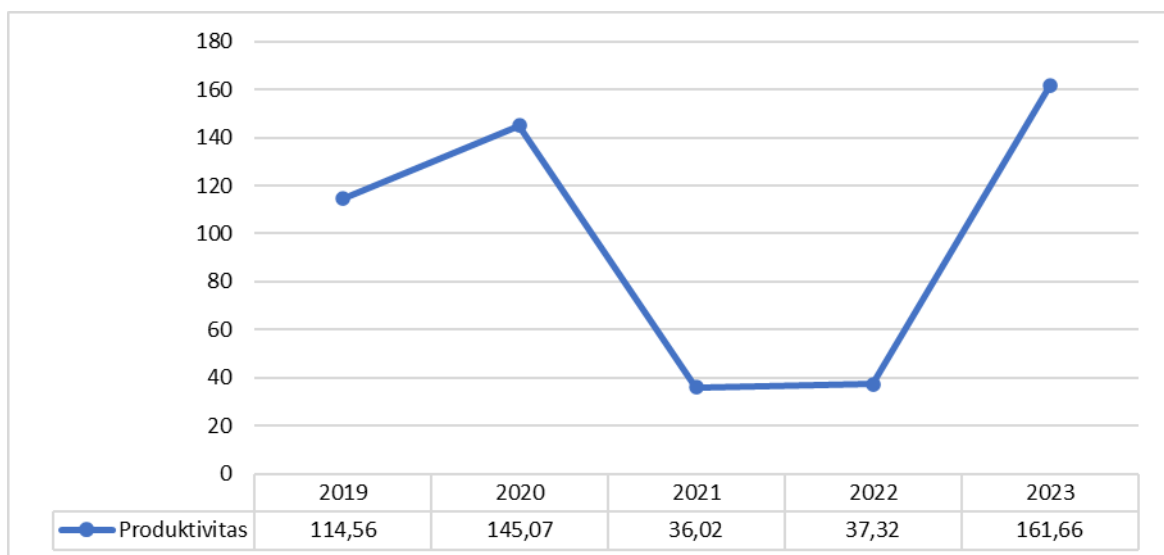
Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	39.859	29.922	45.562	19.164	24.189	24.134	29.214	21.639	34.239	17.490	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,026	0,14	0,029	0,14	0,29	0,15	0,3	0,02	0,31	0,19	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan

2. Pertanian

Dari sisi ekonomi makro, pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan sebagainya memiliki andil yang sangat signifikan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Seruyan. Hal ini terlihat dari dominasi struktur ekonomi pertanian pada nilai tambah produk Kabupaten Seruyan hingga mencapai 37,28% pada 2021 yang menggambarkan perekonomian daerah secara umum. Meskipun begitu, pertumbuhan sektor pertanian masih belum optimal dimana pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar -1,62% dan pada masa pemulihan tahun 2021 baru mencapai 1,09%. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018-2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 114,56% dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 161,66%.



Gambar 2.66. Grafik Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase produktivitas padi	%	147,42	144,56	152,97	145,07	158,74	36,02	164,73	37,32	170,94	161,66	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Cakupan bina kelompok petani	%	100	85	100	85	100	87,31	100	90,86	100	93,12	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	TAD	TAD	TAD	TAD	1,2	36,30	1,2	37,60	1,2	37,87	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	TAD	TAD	TAD	TAD	1,2	76,92	1,2	79,42	1,2	79,93	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

3. Kehutanan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pengawasan terhadap kerusakan kawasan hutan.

Kinerja urusan kehutanan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kerusakan kawasan hutan. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	2,04	0,31	2,15	0,31	2,28	170,50	2,41	0,05	2,55	0,78	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kerusakan kawasan hutan	%	4	9,48	4	9,48	4	TAD	4	1,00	4	7	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan

4. Energi dan Sumber Daya

Kinerja urusan energi dan sumber daya di Kabupaten Seruyan diukur dengan menggunakan indikator persentase pemakaian listrik (Kwh) dan produksi listrik. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Pemakaian Listrik (kWh)	%	3,97	3,97	4,69	2,64	5,54	3,66	6,54	5,5	7,73	5,78	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Produksi Listrik	Kwh	1.757 .277	1.75 7.27 7	1.84 7.70 4	2.00 5.72 2	2.00 6.73 6	2.34 8.82 0	2.17 4.60 8	1.99 6.60 4	2.28 2.48 0	2.17 8.31 0	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)

Sumber: RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

5. Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi (pedagang). Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (Pedagang)	%	TAD	87,5	TAD	87,5	86,76	86,76	86,85	86,76	90,45	88,7	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

6. Perindustrian

Sebagai upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor primer yang ada di Kabupaten Seruyan, termasuk didalamnya peningkatan kualitas usaha mikro kecil khususnya industri mikro kecil, maka Kabupaten Seruyan memiliki program kebijakan khusus dalam pengembangan perindustrian daerah. Upaya peningkatan kapasitas perindustrian juga terlihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam mengelola barang dan jasanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai tinggi.

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	32,56	31,38	32,87	32,8	33,18	33,18	33,48	32,04	33,8	31,29	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	%	2,29	2,29	2,58	2,89	2,95	-4,49	3,16	1,76	3,45	5,78	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
													dan Perdagangan
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (IKM)	%	TAD	7,85	TAD	3,75	0,18	0,18	10	0,19	12	3,35	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan

7. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarkan penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Seruyan diukur menggunakan beberapa indikator antara lain persentase kawasan transmigrasi yang direncanakan; persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan; persentase kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	42,85	80	42,85	80	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	0	100	0	100	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Kawasan Permukiman Transmigrasi yang Dibangun	%	TAD	TAD	TAD	TAD	65	0	65	0	65	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

8. Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan untuk kewenangan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Seruyan mencapai 19.177,45 ton dan produksi perikanan tangkap mencapai 21.374,12 ton. Kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan beberapa indikator antara lain laju pertumbuhan produksi perikanan; persentase konsumsi ikan; persentase produksi perikanan; angka konsumsi ikan; produksi perikanan; produksi perikanan budidaya; produksi perikanan tangkap; produksi pengolahan hasil perikanan; proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan bilogis yang aman; persentase



kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan dan UU yang berlaku; serta cakupan bina kelompok nelayan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya).

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Laju pertumbuhan produksi perikanan	%	5	4,6	7	6,7	7	8	7	7,36	7	8,8	Tercapai	Dinas Perikanan
Persentase Konsumsi Ikan	%	95	106	95,2	101,4	96,3	109,4	97,5	102,37	98,6	119	Tercapai	Dinas Perikanan
Persentase Produksi Perikanan	%	95	96,32	96	98,74	98,18	97,9	98,29	88,98	98,65	93,46	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Angka Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun	49,3	52,24	51,76	52,5	54,26	57,46	56,96	54,74	59,76	54,68	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi Perikanan	ton/ tahun	33.39 0,16	32.160 ,67	35.727 ,96	35.276 ,92	42.389 ,98	40.786 ,75	45.256 ,00	43.544 ,96	48.365 ,44	45.200 ,14	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan budidaya	ton/ tahun	13.36 5,78	12.167 ,69	14.702 ,36	14.457 ,88	16.172 ,60	15.838 ,92	17.789 ,85	17.458 ,41	19.568 ,84	19.177 ,45	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan tangkap	ton/ tahun	20.02 4,38	19.992 ,98	21.025 ,60	20.819 ,04	22.076 ,88	21.596 ,38	23.180 ,72	21.521 ,66	24.339 ,76	21.374 ,12	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan	ton/ tahun	TAD	TAD	TAD	TAD	4.140, 51	4.141, 21	4.285, 43	4.456, 84	4.456, 84	4.648, 57	Tercapai	Dinas Perikanan
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	TAD	TAD	TAD	TAD	98,18	97,9	98,29	90,07	98,65	93,46	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	81,92	80	81,95	85	82	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku													
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	68,29	52	69,35	52,45	70,16	53	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

2.4.4. Penunjang Urusan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu jumlah informasi manajemen pemda. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	Jumlah	4	4	4	9	9	25	9	25	9	25	Tercapai	Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

2. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli apabila dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan badan fungsinya Pemerintah Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja Sekretariat Dewan antara lain jumlah anggota DPRD; tersedianya rencana



kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten; tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD; terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD; persentase terlaksananya fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD); Persentase Pokok Pikiran DPRD yang terintegrasi dalam dokumen RPJM dan RKPD.

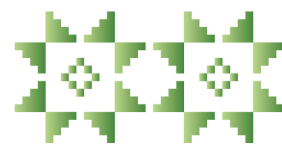
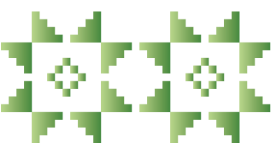
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Anggota DPRD	Anggota	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Tercapai	Sekretariat Dewan
Tersedianya rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/ Tidak	TAD	Ada	TAD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Sekretariat Dewan
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen	Ada/ Tidak	TAD	Ada	TAD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Sekretariat Dewan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
RPJMD maupun dokumen RKPD													
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	TAD	Ada	TAD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Sekretariat Dewan
Persentase terlaksananya fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	95	98,57	95	75	95	100	Tercapai	Sekretariat Dewan
Persentase Pokok Pikiran DPRD yang	%	TAD	TAD	TAD	93	93	50	93	50	93	50	Tidak Tercapai	Sekretariat Dewan





Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
terintegrasi dalam dokumen RPJM dan RKPD													

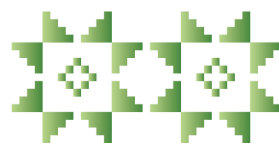
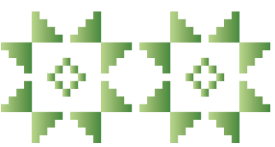
Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis. Dalam menyelesaikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan kewenangan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan harus sinergis dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional agar keterpaduan pembangunan daerah dapat dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan baik ditingkat provinsi maupun nasional agar rencana pembangunan daerah Kabupaten Seruyan sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 2.81. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun
2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Terjadinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	TAD	Ada	TAD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase Penjabaran Kontribusi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	89,04	100	95,85	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase Penjabaran Kondistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	TAD	100	TAD	100	100	100	100	92,12	100	100	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	TAD	TAD	TAD	TAD	50	TAD	50	4	50	23	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan



4. Keuangan

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Seruyan sudah berjalan transparan dan akuntabel yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar.

Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Seruyan antara lain tergambar dari besarnya belanja daerah terhadap anggaran belanja. Ada 8 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan keuangan di Kabupaten Seruyan. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tepat/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	TAD	TAD	TAD	TAD	0,6	10	0,5	0,65	0,5	10,16	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	18,9	18,9	19,9	24,98	21	21,25	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	12,7	12,7	12,6	15,85	13,3	13,96	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase SILPA	%	TAD	TAD	TAD	TAD	10,5	12,4	9,9	5,3	4,9	10,81	Tercapi	Badan Keuangan



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
terhadap APBD													dan Aset Daerah
Persentase program dalam APBD yang dilaksanakan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	96,52	100	94,63	100	98,04	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	94,1	100	90,5	100	98,36	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	TAD	7,92	TAD	6,95	10	7,26	11	7,41	12	8,61	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah

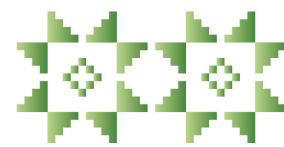
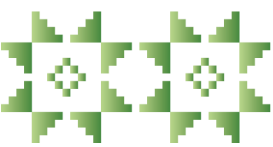
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan kepegawaian di pemerintah Kabupaten Seruyan dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan dan jenis kelamin, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi ASN, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi ASN, jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah yang terisi ASN. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

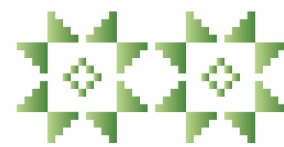
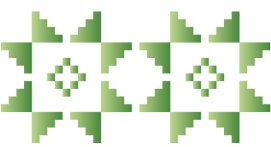
Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan dan jenis kelamin	Orang	TAD	3.107	TAD	3.134	3.810	TAD	4.110	3.094	4.110	2.966	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia





Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	TAD	TAD	TAD	TAD	5	TAD	5	61	5	TAD		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	TAD	TAD	TAD	TAD	5	TAD	5	4	5	TAD		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TAD	TAD	TAD	28	30	TAD	34	28	34	35	Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TAD	TAD	TAD	583	569	TAD	671	373	671	349	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TAD	TAD	TAD	1.771	1.764	TAD	2.325	2.914	2.355	1.930	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan





6. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Seruyan dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan kualitas produk, baik dalam bentuk produk hukum, kebijakan, maupun perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Seruyan berupaya mendorong implementasi rencana kelitbangan, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dan perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas atau efisiensi dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi dan konsumsi di Kabupaten Seruyan di masa yang akan datang.

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan diukur menggunakan beberapa indikator kinerja antara lain persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	100	80	60	80	80	Tercapai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	76	80	60	80	0	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	33	80	60	80	80	Tercapai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,



Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
													Penelitian dan Pengembangan
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	100	80	60	80	80	Tercapai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan

7. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan daerah yang diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Kinerja urusan pengawas diukur menggunakan beberapa indikator kinerja antara lain persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai, jumlah temuan BPK, dan persentase terlaksananya pengendalian internal pemerintahan pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah). Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase tindak lanjut temuan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	70	79,86	75	81,53	80	82	Tercapai	Inspektorat
Persentase pelanggaran pegawai	%	TAD	TAD	TAD	TAD	2	0,1	2	0,06	1,5	0,23	Tidak Tercapai	Inspektorat
Jumlah temuan BPK	Temuan	TAD	TAD	TAD	TAD	26	26	24	23	22	37	Tercapai	Inspektorat
Persentase terlaksananya pengendalian intern pemerintahan pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah)	% / Level	TAD	TAD	TAD	TAD	85 / (3)	Level 3	85 / (3)	Level 3	85 / (4)	Level 2	Tidak Tercapai	Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kabupaten Seruyan

8. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penentu keberlangsungan dan keberlanjutan pemerintahan. Di dalamnya tercakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerukunan umat beragama. Semua aspek ini bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Kinerja urusan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Seruyan menggunakan 3 indikator kinerja antara lain laju pertumbuhan masyarakat yang dibina dalam pengembangan wawasan kebangsaan, laju pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik, dan persentase konflik sosial yang diselesaikan. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam pengembangan wawasan kebangsaan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	4,75	17,73	5	5,1	5	7,6	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laju pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	%	TAD	TAD	TAD	TAD	4,75	5,58	72,64	16,12	76,91	99,8	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	90	100	90	50	90	50	Tidak Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

2.4.5. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di



lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Data untuk IPP Kabupaten Seruyan belum tersedia.

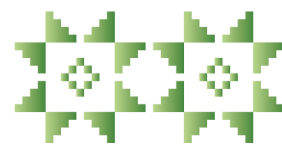
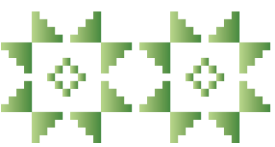
2.4.6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu daerah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mempromosikan inovasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan memiliki kondisi perkembangan yang kurang baik pada tahun 2020-2022. Dimana pada periode tersebut, Indeks Inovasi Daerah terkategori kurang inovatif. Namun pada tahun 2023, Indeks Inovasi Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar 46,23 dan masuk dalam kategori Inovatif. Nilai tersebut jauh diatas nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 25,70 dan masuk dalam kategori kurang inovatif.

Tabel 2.87. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2022

Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Kabupaten Seruyan		Provinsi Kalimantan Tengah	
2020	206	Kurang Inovatif	73	Kurang Inovatif
2021	22,29	Kurang Inovatif	15,69	Kurang Inovatif





Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Kabupaten Seruyan		Provinsi Kalimantan Tengah	
2022	18,27	Kurang Inovatif	47,82	Inovatif
2023	46,23	Inovatif	25,70	Kurang Inovatif

Sumber: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2020-2023

2.4.7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government Index*) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terbuka. Berdasarkan Publikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022-2023, Indeks SPBE Kabupaten Seruyan mengalami perbaikan dari 1,35 (kurang) pada tahun 2022 menjadi 1,91 (cukup) pada tahun 2023. Namun nilai Indeks SPBE Kabupaten Seruyan masih jauh dibawah nilai Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah yakni 2,75 (baik) pada tahun 2023.

**Tabel 2.88. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Seruyan
Tahun 2022-2023**

Tahun	Indeks SPBE			
	Kabupaten Seruyan		Provinsi Kalimantan Tengah	
2022	1,35	Kurang	1,902	Cukup
2023	1,91	Cukup	2,75	Baik

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022-2023

2.5. Refleksi Pembangunan

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Secara umum, pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 tercermin dalam evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan dari tahun 2005 hingga 2025.



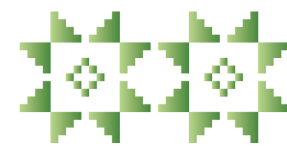
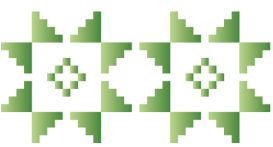
Tabel 2.89. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,91	70,24	(0,95)	
2.	Angka Kemiskinan	13,30	7,12	(46,47)	
3.	Angka Pengangguran	2,41	3,61	49,79	2011 untuk data Capaian Kinerja Awal
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,87	4,55	(6,57)	
5.	Pendapatan per Kapita	27,08	68,27	146,82	Juta Rupiah 2010 untuk data Capaian Kinerja Awal
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,285	0,261	(8,42)	2010 untuk data Capaian Kinerja Awal
7.	PDRB per Kapita (PDRB ADHK)	27,08	38,30	41,43	Juta Rupiah 2010 untuk data Capaian Kinerja Awal

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Tabel 2.89. menunjukkan 7 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), dan PDRB per Kapita. Dari 7 indikator makro pembangunan yang digunakan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tren penurunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan dari kondisi awal tahun 2005 sebesar 70,91 menjadi 70,24 pada tahun berjalan 2023 dan masuk pada kategori IPM Tinggi. Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator makro lain yang mengalami penurunan adalah angka kemiskinan dari 13,30 pada periode awal tahun 2005 menjadi 7,12 pada periode berjalan tahun 2023. Namun menurunnya angka kemiskinan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupateh Seruyan mengalami penurunan dari kondisi awal tahun 2005 sebesar 4,87 menjadi 4,55 pada tahun berjalan 2023.

Indikator makro yang mengalami peningkatan nilai adalah Angka Pengangguran, Pendapatan per Kapita, dan PDRB per Kapita. Peningkatan nilai tersebut tidak selalu berarti positif. Untuk indikator Angka Pengangguran,





peningkatan nilai tersebut berarti menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kinerja tersebut berarti peningkatan nilai PDRB per Kapita yang terjadi di Kabupaten Seruyan tidak mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga meningkatkan pengangguran. Hal ini juga didukung oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan.

2.5.2. Evaluasi Misi

1. Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

Perwujudan Misi 1 ditunjukkan oleh 1 (satu) sasaran pokok yaitu **Sasaran Pokok 1.1.** Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian IPM Kabupaten Seruyan sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari angka 67,04 menjadi 70,24 di tahun 2023. Nilai tersebut mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.90. Capaian Indikator Sasaran Pokok 1.1

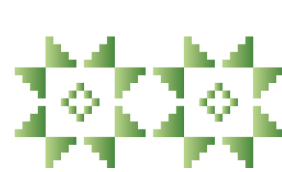
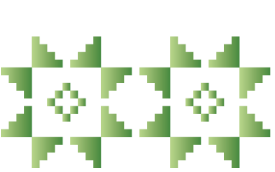
Indikator	Target	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,91	70,24	101,93%

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

2. Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

Perwujudan Misi 2 ditunjukkan oleh 1 (satu) sasaran pokok yaitu **Sasaran Pokok 2.1.** Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal. Peningkatan perekonomian daerah diukur menggunakan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi dan nilai Laju Inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang kurang baik, bahkan nilainya belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan sebesar 4,01% dengan target 5,32% dan pada tahun 2023 nilainya meningkat menjadi 4,55% dengan target 5,36%. Salah satu faktor yang





melatarbelakangi buruknya perkembangan perekonomian di Kabupaten Seruyan adalah terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Pengukuran laju inflasi di Kabupaten Seruyan mengikuti data pengukuran terdekat yaitu di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Selama 5 tahun terakhir laju inflasi Kabupaten Seruyan selalu lebih tinggi dari rata-rata laju inflasi nasional dan Kota Palangka Raya. Pada tahun 2022, nilai laju inflasi Kabupaten Seruyan sebesar 5,99% dengan target 3,73% dan pada tahun 2023 nilai laju inflasi Kabupaten Seruyan sebesar 2,56% dari target 3,82%. Meskipun pada tahun 2023 nilai laju inflasi dapat ditekan namun nilai tersebut sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, tingginya laju inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa di Kabupaten Seruyan relatif terpenuhi.

Upaya pemerintah Kabupaten Seruyan untuk menjaga stabilitas laju inflasi jangka pendek salah satunya dengan mengadakan operasi pasar murah; pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas memantau kondisi pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang konsumsi lainnya secara berkala; serta melakukan optimalisasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan sehingga dapat menjaga ketersediaan komoditas bahan pokok dalam rangka memenuhi permintaan pasar.

Tabel 2.91. Capaian Sasaran Pokok 2.1

Indikator	Target	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,36	4,55	84,88%
Laju Inflasi	3,82	2,56	67,01%

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

3. Misi 3: Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional

Perwujudan Misi 3 ditunjukkan oleh 1 (satu) sasaran pokok yaitu **Sasaran Pokok 3.1.** Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Seruyan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Seruyan diukur menggunakan Indeks Aksesibilitas yang disusun dari Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Persentase Wilayah Desa yang Terhubung dengan Jalan Kondisi Baik. Indeks Aksesibilitas di Kabupaten Seruyan baru dapat dihitung mulai tahun 2020



dengan realisasi sebesar 21,56 dari target sebesar 58,25. Tahun 2022 realisasi capaian indeks aksesibilitas sebesar 22,4 dari target 60,75. Untuk tahun 2023 realisasi capaian indeks aksesibilitas sebesar 24,57 dari target 63,25. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.92. Capaian Indikator Sasaran Pokok 3.1

Indikator	Target	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian
Indeks Aksesibilitas	63,25	24,57	38,84%

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Tabel 2.93. Nilai Komponen Penyusun Indeks Aksesibilitas

Komponen Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	17,98	TAD	21,54	22,6	24,57
Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	17,98	20,78	52	55	TAD

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

4. Misi 4: Mewujudkan tata pemerintah yang baik, demokratis dan partisipatif

Perwujudan Misi 4 ditunjukkan oleh 1 (satu) sasaran pokok yaitu **Sasaran Pokok 4.1**. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif. Terwujudnya tata pemerintah yang baik, demokratis dan partisipatif diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.94. Capaian Indikator Sasaran Pokok 4.1

Indikator	Target	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	77,95	51,49	66,05%

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan pada tahun 2021 sebesar 60,08 yang masuk pada kategori B. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan kembali mendapat predikat B dengan nilai capaian 62,25. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 51,49 dengan predikat CC. Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.95. Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021-222

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,15	12,44
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,63	4,85
	III. Reform	30,00	14,29	14,33
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,07	31,62
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,38	7,47
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,76	9,81
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,66	7,96
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,21	5,39
	Total Komponen Hasil	40,00	29,01	30,63
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	60,08	62,25

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan reformasi.

5. Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pembangunan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

Perwujudan Misi 5 ditunjukkan oleh 1 (satu) sasaran pokok yaitu **Sasaran Pokok 5.1.** Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Tercapainya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi diukur dengan menggunakan nilai Pendapatan per Kapita dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pendapatan per Kapita di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2018-2022 setiap tahun terus mengalami kenaikan dan pada akhir tahun 2023 nilainya mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Pendapatan per Kapita Kabupaten Seruyan sebesar Rp68,27 juta dengan target yang ditetapkan sebesar Rp55,69 juta.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Seruyan setiap tahunnya menunjukkan kinerja yang baik dengan terus meningkatnya nilai indeks, meskipun belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Seruyan sebesar 68,71

dengan target sebesar 79,40. Kemudian pada tahun 2023 nilainya meningkat menjadi 73,09 dengan target sebesar 81,4. Peningkatan nilai indeks tersebut didukung dengan terlaksananya program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Pemulihan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 2.96. Capaian Indikator Sasaran Pokok 5.1

Indikator	Target	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian
Pendapatan per Kapita	Rp55,69 juta	Rp 68,27juta	123,51%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,4	73,09	89,79%

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

2.5.3. Evaluasi Per Periode RPJMD

Memperhatikan evaluasi pencapaian RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 pada setiap periode yang terbagi menjadi 4 periode RPJMD, dimana pada setiap periode termuat arah kebijakan serta uraian pencapaian pembangunan jangka panjang daerah. Analisis setiap periode ini akan menggambarkan rujukan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025.

1. Periode 2003 – 2008

Pada periode 2003-2008, Kabupaten Seruyan memiliki 5 misi dengan 408 arah kebijakan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam penataan ruang, pemerataan pembangunan antar kecamatan, kesinambungan pertumbuhan antara kota kecil dan wilayah sekitarnya, serta percepatan kemajuan daerah pedesaan, pedalaman, dan tertinggal.

Pada bidang ekonomi, pengembangan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui serta teknologi modern. Beberapa hal penting dalam pembangunan ekonomi termasuk peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, dan peningkatan partisipasi. Faktor pendukung utama dalam pengembangan sektor unggulan berfokus pada:

- a. Penguatan keunggulan komparatif;



- b. Peningkatan mutu sumber daya manusia;
- c. Pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik;
- d. Pengelolaan keuangan dan investasi daerah; serta
- e. Penjaminan kepastian hukum.

2. Periode 2008 – 2013

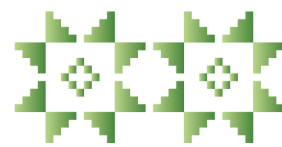
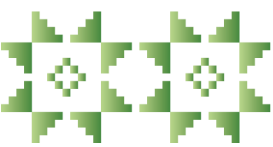
Pada periode 2008-2013, evaluasi pembangunan daerah masih berfokus pada 5 misi utama dengan 408 arah kebijakan, sama seperti periode sebelumnya. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam penataan ruang, pemerataan pembangunan antar kecamatan, serta percepatan kemajuan daerah pedesaan dan tertinggal. Terdapat 40 indikator sasaran yang diselaraskan dengan RPJMD, dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan. Selanjutnya pembangunan pada bidang ekonomi juga menekankan peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan partisipasi.

3. Periode 2013 – 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 merupakan tahap kedua (2011-2015) dan ketiga (2016-2020) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025. Fokus utama pada periode ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi wilayah, prasarana dasar, politik dan pemerintahan, serta penataan ruang dan lingkungan.

Selama periode ini, perekonomian Kabupaten Seruyan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan sektor pengadaan listrik, gas, dan jasa perusahaan berkontribusi paling kecil. Prioritas pembangunan mencakup penerapan *good governance*, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengembangan UMKM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta penataan infrastruktur.

Capaian kinerja selama 2013-2018 menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target seperti penilaian LAKIP dan Opini WTP dan BPK. Namun, pada pendidikan, angka kematian bayi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran masih memerlukan perhatian. Beberapa indikator yang belum tercapai di periode 2013-2018 terdapat pada fokus kesejahteraan masyarakat yang meliputi





kesehatan, sanitasi, tempat pembuangan sampah, perumahan layak huni, dan perhubungan.

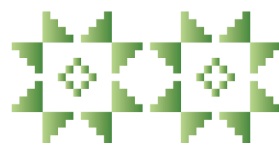
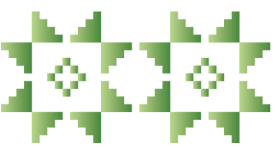
4. Periode 2018 – 2023

Pada periode-periode sebelumnya tingkat ketercapaian RPJMD belum dapat dihitung secara kuantitatif dengan maksimal karena masih banyak keterbatasan data dan masih belum sempurnanya penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan. Pada periode ini ditetapkanlah RPJMD Tahun 2018-2023 yang kemudian disempurnakan dengan penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023. Dimana dalam dokumen perubahan tersebut telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelaksanaan 10 misi kepala daerah terpilih yang belum mencapai target sampai dengan realisasi tahun capaian 2022 adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. Indeks Pembangunan Manusia
- c. Pendapatan Per Kapita (ADHB)
- d. Laju Inflasi
- e. Indeks Aksesibilitas
- f. Indeks Gini
- g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- i. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

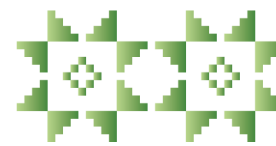
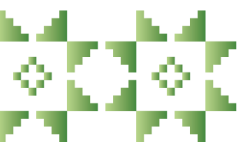
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pembangunan daerah pada setiap periode RPJMD, dapat dilihat dari Evaluasi Pencapaian RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 pada Tabel 2.97. berikut ini.





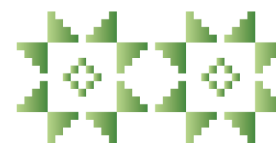
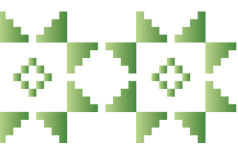
Tabel 2.97. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
PERIODESASI : 2003-2008							
VISI : " Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera"							
MISI 1							
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri. berdayasaing tinggi dan beraklak mulia	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						Pada Periode Pertama 2003-2008 Hanya Termuat Narasi (Kualitatif)
	Terwujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri. berdayasaing tinggi dan beraklak mulia	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	-	-	-	-	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	-	-	-	-	
		Jumlah Pendidikan Non Formal yang mendapatkan Pembinaan	-	-	-	-	
		Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	
		Angka Kematian Ibu	-	-	-	-	
		Prevalensi Gizi Buruk	-	-	-	-	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	
		Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Kerja	-	-	-	-	
		Persentase Penduduk Miskin	-	-	-	-	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	-	
		Persentase Penduduk yang BerKTP	-	-	-	-	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-	
		Jumlah Pemuda/Atlet Berprestasi	-	-	-	-	
MISI 2							
Mewujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						Pada Periode Pertama 2003-2008 Hanya
	Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-	



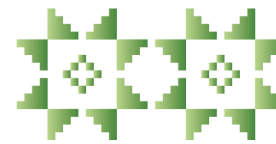
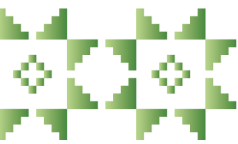


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
pada potensi keunggulan lokal	berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	PDRB Per kapita - ADHB	-	-	-	-	Termuat Narasi (Kualitatif)
		Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	-	-	-	-	
		Persentase Koperasi Aktif	-	-	-	-	
		Persentase UKM Aktif	-	-	-	-	
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Perkebunan Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB	-	-	-	-	
		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	-	-	-	-	
		MISI 3					
Mewujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						Pada Periode Pertama 2003-2008 Hanya Termuat Narasi (Kualitatif)
	Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	
		Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/Tahun	-	-	-	-	
		- Jumlah Orang	-	-	-	-	
		- Jumlah Barang (Ton)	-	-	-	-	
		Jumlah Orang/Barang melalui Bandara/Tahun	-	-	-	-	
		- Jumlah Orang	-	-	-	-	
		- Jumlah Barang (Ton)	-	-	-	-	



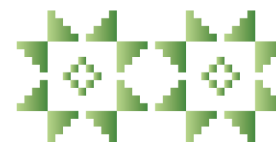
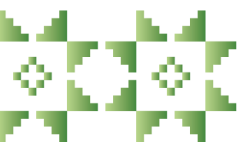


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
		Jumlah desa yang telah memiliki dermaga desa	-	-	-	-	
		Pertumbuhan Arus Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segitung	-	-	-	-	
MISI 4							
Mewujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						Pada Periode Pertama 2003-2008 Hanya Termuat Narasi (Kualitatif)
	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Penilaian Lakip	-	-	-	-	
		Opini Penilaian BPK	-	-	-	-	
		Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidang	-	-	-	-	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	-	-	-	-	
		Penegakan Peraturan daerah	-	-	-	-	
		Jumlah Konflik bernuansa SARA	-	-	-	-	
		Angka Kriminalitas	-	-	-	-	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	
MISI 5							
Mewujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						Pada Periode Pertama 2003-2008 Hanya Termuat Narasi (Kualitatif)
	Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Persentase Rumah tangga Berakses Air Minum	-	-	-	-	
		Rasio Elektrifikasi	-	-	-	-	
		Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	-	
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	-	-	-	-	



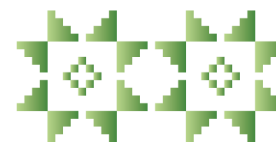
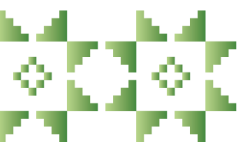


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	
Rata - Rata Capaian Kinerja Periode 2003 - 2008 (%)							
Predikat Kinerja							
PERIODESASI : 2008-2013							
VISI : " Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera"							
MISI 1							
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri. berdayasaing tinggi dan beraklak mulia	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						
	Terwujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri. berdayasaing tinggi dan beraklak mulia	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	d.t.a	0,13	d.t.a	-	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	96,87	97	96,88	99,88	
		Jumlah Pendidikan Non Formal yang mendapatkan Pembinaan	d.t.a	120	d.t.a	-	
		Angka Harapan Hidup	d.t.a	71,7	d.t.a	-	
		Rata-rata lama sekolah	0,04	7,85	7,81	99,49	
		Angka Melek Huruf	91,39	99,2	92,12	92,86	
		Angka Kematian Bayi	10	50	40	80,00	
		Angka Kematian Ibu	100	130	120	92,31	
		Rata-rata Harapan Lama Sekolah	d.t.a	d.t.a	0,5	100,00	
MISI 2							
Mewujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						
	Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	d.t.a	10,00	d.t.a	-	
		Lama Proses Perijinan SIUP	d.t.a	1-3 Hari	d.t.a	-	
		TDP	3 Hari	1-3 Hari	3 Hari	100,00	
		IUI	3 Hari	1-3 Hari	3 Hari	100,00	
		TDI	6 Hari	1-3 Hari	6 Hari	100,00	
		IMB	6 Hari	1-7 Hari	6 Hari	100,00	
		HO	2 Hari	1-2 Hari	2 Hari	100,00	



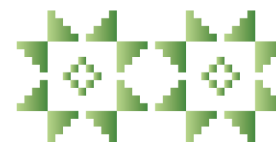
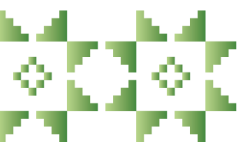


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
		PDRB Per kapita - ADHB	0	30.688.148	30.688.148	100,00	
		Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	d.t.a	226,35	d.t.a	-	
		Persentase Koperasi Aktif	81,95	92,75	10,8	11,64	
		Persentase UKM Aktif	10,93	99,76	88,83	89,04	
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	d.t.a	72	d.t.a	-	
		Jumlah Wisatawan (Orang)	85	19.471	19.386	99,56	
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarkan	0,614	20,00	19,39	96,93	
		Persentase Penduduk yang BerKTP	7,89	100,00	100	100,00	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	10,54	81,80	71,26	87,11	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,21	3,69	3,84	104,07	
		Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Kerja	30,2	75	44,8	59,73	
		Persentase Penanganan PMKS	20	75	55	73,33	
		Persentase Penduduk Miskin	d.t.a	d.t.a	d.t.a	-	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	d.t.a	d.t.a	7,91	100,00	
MISI 3							
Mewujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertaqwa						
	Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	242	300	300	100	
		Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/Tahun					
		- Jumlah Orang	9,875	10.125	11.000	100	
		- Jumlah Barang (Ton)	3,75	3,75	3,75	100	
		Jumlah Orang/Barang melalui Bandara/Tahun					



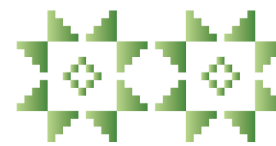
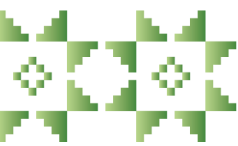


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
		- Jumlah Orang	1,988	2.897	1.787	61,68	
		- Jumlah Barang (Ton)	9	8.691	5.679	65,34	
		Jumlah desa yang telah memiliki dermaga desa	69	69	69	100,00	
		Pertumbuhan Arus Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	n.a	n.a	n.a	n.a	
MISI 4							
Mewujudnya tata pemerintahan yang baik. demokratis dan partisipatif	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertakwa						
	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik. demokratis dan partisipatif	Penilaian Lakip	C/Cukup Baik	C/Cukup Baik	CC/ Baik	100	
		Opini Penilaian BPK	WDP	WDP	WDP	100	
		Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidang	50%	50%	50%	100	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban. Keamanan. Keindahan)	75%	80%	70%	87,50	
		Penegakan Peraturan daerah	35	35	35	100	
		Jumlah Konflik bernuansa SARA	1	1 Kasus	1	100	
		Jumlah Pemuda/Athlet Berprestasi	25	30,00	32	100,00	
		Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)	d.t.a	30	d.t.a	-	
MISI 5							
Mewujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seruyan Adil dan Sejahtera yang Beriman dan Bertakwa						
	Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Persentase Rumah tangga Berakses Air Minum	0,65	1,25	1,23	98,40	
		Rasio Elektrifikasi	38,05	46,07	42,10	91,38	
		Rasio Rumah Layak Huni	48,45	8,04	79,90	100,00	
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan	1	1	1,00	100,00	



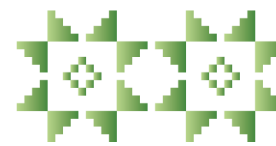
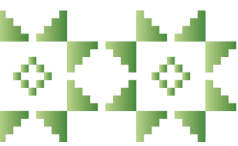


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
		Pencemaran dan atau Perusakan dan Pencemaran Lingkungan					
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	33,2	35	2,33	6,66	
Rata - Rata Capaian Kinerja Periode 2008 - 2013 (%)						76,70	
Predikat Kinerja						TINGGI	
PERIODESASI : 2013-2018							
VISI : "Menembus Keterisolasian Daerah dari arus Barang dan jasa serta arus informasi, menyambung disparitas pelayanan antara daerah Hilir dan daerah Hulu guna mengantar masyarakat Seruyan menjadi Sejahtera dan berkeadilan"							
MISI 1							
Menciptakan pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif dan Profesional	Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.						
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Penilaian LAKIP	C/CUKUP BAIK	CC/BAIK	d.t.a	-	
		Opini Penilaian BPK	WDP	WTP	WTP	100	
MISI 2							
Mendorong Iklim Investasi yang Sehat berbasis pada Potensi Daerah	Meningkatkan Investasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah yang Memberdayakan Masyarakat Lokal						
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	n.a	58	39,59	68,26	
	Terwujudnya layanan perijinan yang prima	Lama Proses Perijinan SIUP	3 Hari	1-3 Hari	3 Hari	100	
		TDP	3 Hari	1-3 Hari	3 Hari	100	
		IUI	3 Hari	1-6 Hari	6 Hari	100	
		TDI	6 Hari	1-6 Hari	6 Hari	100	
		IMB	6 Hari	1-7 Hari	7 Hari	100	
		HO	7 Hari	1-6 Hari	6 Hari	100	
MISI 3							
Menciptakan rasa aman bagi masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan menghormati hak azasi manusia.						
	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman wilayah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan	n.a	80	80	100	
	Meningkatnya penerapan dan penegakan hukum	Penegakan peraturan daerah	n.a	75	50	66,67	



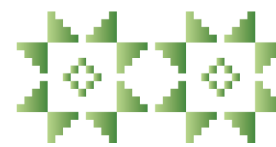
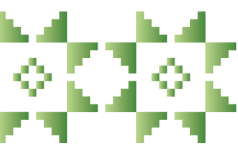


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
MISI 4							
Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan berakses serta merata	Meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu pendidikan.						
	Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah diseluruh wilayah	Rata-rata lama sekolah	7,85	8,2	7,98	97,32	
		Angka Melek Huruf	99,83	100	98,89	98,89	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	n.a	127,05	189,05	100,00	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,56	100	98,28	98,28	
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan formal dan non formal	Jumlah lembaga pendidikan non formal yang mendapatkan pembinaan	n.a	190	80	42,11		
MISI 5							
Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu kesehatan masyarakat.						
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup masyarakat	Angka Harapan hidup	71,7	73	69,24	94,85	
	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.	Angka kematian Bayi	7,15	20	6,27	31,35	
		Angka kematian ibu	337,42	80	134,13	100,00	
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	n.a	0,6	0,6	100,00	
MISI 6							
Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman	Meningkatkan akses dan membuka keterisolasian wilayah.						
	Meningkatkan akses dan membuka keterisolasian wilayah.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	30,00	22,62	22,6	99,91	
	Lancarnya arus barang dan jasa serta arus orang/ penumpang.	Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun:					
		Jumlah orang:	10.125	10.370	3.014	29,06	
		Jumlah barang:	3,75	3,86	5,93	100,00	
	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar lainnya hingga wilayah pedalaman.						
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Rumah tangga pengguna air bersih	60,99	70	5,63	8,04		



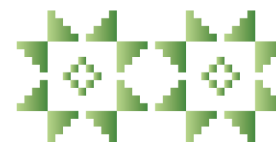
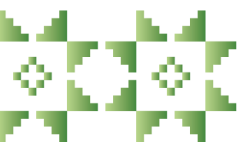


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika	Persentase desa yang terjangkau jaringan komunikasi	n.a	81,12	38	46,84	
MISI 7							
Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan komoditas unggulan daerah guna peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan.						
	Meningkatnya kontribusi perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan dan pertambangan terhadap PDRB.	Kontribusi perkebunan terhadap PDRB	n.a	37,04	37	99,89	
		Kontribusi pertanian terhadap PDRB	4,33	53,04	36,95	69,66	
		Kontribusi perikanan terhadap PDRB	n.a	62,83	60	95,50	
		Kontribusi peternakan terhadap PDRB	19,39	44,63	19,39	43,45	
	Meningkatnya ketersediaan energi dan protein masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita (KKAL)	n.a	2,75	2,1	76,25	
Meningkatkan kelestarian lingkungan							
	Meningkatnya pengawasan dan penanganan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	n.a	80	40	50	
MISI 8							
Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi	Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.						
	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita: ADHB	30,68	37,88	40,75	100,00	
	Menjadikan industri kecil, rumah tangga dan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penopang perekonomian rakyat						
	Meningkatnya peran industri rumah tangga, koperasi dan UMKM	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	15	27,87	2,02	7,25	
		Persentase koperasi Aktif	81	99,5	86,57	87,01	
		Persentase usaha kecil dan menengah aktif	99	99,85	99,5	99,65	



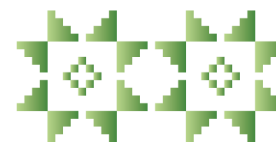
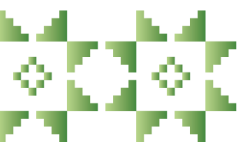


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
MISI 9							
Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal masyarakat seruyan	Mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata sekaligus melestarikan budaya lokal						
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	72	0,26	0,24	92,31	
		Jumlah Wisatawan (orang)	19,471	34,780	35,288	100,00	
	Meningkatnya pelestarian budaya lokal.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	20	35	100	
MISI 10							
Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.						
	Meningkatnya layanan dokumen kependudukan.	Persentase penduduk yang ber-KTP	87,99	100	100	100	
	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	71,26	86,7	88,52	100,00	
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3,84	3,09	4,28	100,00	
	Meningkatnya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	Tingkat keselamatan dan perlindungan kerja	44,8	85	85	100	
	Meningkatnya pembinaan dan penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	55	100	98	98	
MISI 11							
Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat seruyan.	Mewujudkan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, berprestasi, beriman dan bertaqwa						
	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik bernuansa SARA	0	1	1	100	
	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam memajukan daerahnya	Jumlah pemuda berprestasi	n.a	50	40	80	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	n.a	55	25	45,45	



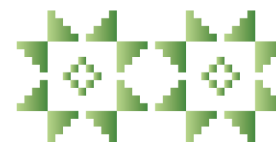
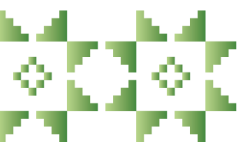


Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
Rata - Rata Capaian Kinerja Periode 2013 - 2018 (%)						79,32	
Predikat Kinerja						TINGGI	
PERIODESASI : 2018-2023							
VISI : "Mewujudkan Kabupaten Seruyan S.E.H.A.T (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram)"							
MISI 1							
Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC 55.55	BB 77.95	B 62.25	79,86	
	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	WTP	WTP	100,00	
		b. Nilai SAKIP	B 60.67	B	B 63.81	100,00	
	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,03	83,69	83,85	100,00	
MISI 2							
Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.	T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	67,04	70,94	68,24	96,19	
	S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah.	7,98	9,26	8,94	96,54	
		b. Harapan lama sekolah.	11,68	12,74	12,51	98,19	
		c. Angka Melek Huruf	98,89	98,97	98,92	99,95	
MISI 3							
Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.	T3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	67,04	70,94	68,24	96,19	
	S3.1.1. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	69,24	71,03	69,26	97,51	
MISI 4							
Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi	T4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	40,75	55,69	49,30	88,53	
		Laju Inflasi	6,02	3,82	6,97	100,00	
	S4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan.	Persentase penduduk miskin	7,43	6,03	5,28	87,56	
	S4.1.2. Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	31,93	33,80	32,04	94,79	





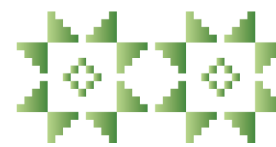
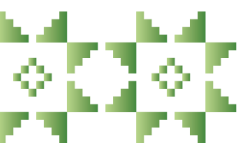
Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
	S4.1.3. Berkembangnya agroindustri	Kontribusi agroindustri terhadap PDRB sektor industri	1,09	1,74	0.75	2,99	
MISI 5							
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.	T5.1. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	Indek aksesibilitas	53,45	63,25	n.a	-	
	S5.1.1. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana pemukiman.	a. Persentase rumah tangga berakses air minum	5,63	7,23	4,50	62,24	
		b. Rasio elektrifikasi	47,10	71,09	88,98	100,00	
		c. Rasio Rumah layak huni	46,07	55,71	63	100,00	
	S5.1.2. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana transportasi	Persentase wilayah yang terhubung dengan jalan kondisi baik	39	50	41,6	83,20	
MISI 6							
Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan	T6.1. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	Indek aksesibilitas	53,45	63,25	n.a	-	
	S6.1.1. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana transportasi	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	n.a	5	5	100,00	
MISI 7							
Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan	T7.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	a. Laju pertumbuhan ekonomi	5,21	5,36	6,74	100,00	
		Indeks Gini	0,287	0,281	0,292	100,00	
	S7.1.1. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	36,57	39,09	37,60	96,19	
	S7.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	91,5	96,5	80,1	83,01	





Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
	T7.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	81,4	68,71	84,41	
	S7.2.1. Meningkatkan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	n.a	81,4	68,71	84,41	
MISI 8							
Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya	T8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	a. Laju pertumbuhan ekonomi	5,21	5,36	6,74	100,00	
		b. Indeks Gini	0,287	0,281	0,292	100,00	
	S8.1.1. Meningkatkan sektor industri pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,24	0,31	n.a	-	
MISI 9							
Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja	T9.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	4,28	3,66	3,96	100,00	
	S9.1.1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,5	85,74	72,1	84,09	
MISI 10							
Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI	T10.1. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	n.a	4,6	4,32	93,91	
	S10.1.1. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	3,96	4,35	5,33	100,00	
	S10.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	n.a	4,6	4,32	93,91	
Rata - Rata Capaian Kinerja Periode 2018 - 2023 (%)						84,67	
Predikat Kinerja						TINGGI	

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025





2.5.4. Faktor Pendorong dan Penghambat

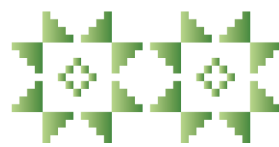
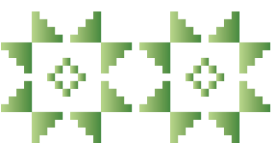
Dalam setiap misi yang tertiang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 memiliki sasaran pokok yang beragam. Dalam pencapaian tersebut banyak faktor yang mempengaruhi ketercapaiannya. Berikut adalah faktor pendorong dan faktor penghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok yang termuat dalam Tabel 2.98.

**Tabel 2.98. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Ketercapaian Sasaran RPJPD
Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025**

Misi/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan yang Mandiri Berdaya Saing dan Berakhlak Tinggi. Sasaran Pokok : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Tinggi.	1. Meningkatkan ketersediaan Lembaga Pendidikan diseluruh Kabupaten Seruyan. 2. Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kualitas hidup yang baik. 4. Ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang adil dan layak, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.	1. Belum terpenuhinya standar minimal tenaga pendidikan dan kependidikan. 2. Minimnya peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Kurangnya fasilitas kesejatan dan kurangnya tenaga medis yang berkualitas, serta ketidak merataan distribusi layanan kesehatan. 4. Angka Harapan Hidup 5. Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas dan terlatih. 6. Faktor-faktor kesehatan yang dapat menghambta angka harapan hidup meliputi penyakit menular, penyakit kronis, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kurangnya kesadaran daka praktik kesehatan yang baik.
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal Sasaran Pokok : Terwujudnay Perekonomian Daerah yang maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bekesimbangan sehingga pada tahun 2025 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seruyan semakin meningkat, pengangguran menurun, dan penduduk miskin berkurang. 2. Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan permohonan perijinan. 3. Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk jaringan transportasi yang efisien, akses yang baik terhadap kelistrikan, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya. 4. Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan dan aktivitas UKM. 5. Ketersediaan infrastruktur wisata yang baik seperti akomodasi yang berkualitas dan transportasi yang nyaman dan terjangkau serta aksesibilitas ke tempat wisata yang terus diperbaiki demi kenyamanan wisatawan. 6. Kesadaran akan nilai budaya dan warisan sejarah yang dimiliki oleh benda, situs, dan kawasan cagar budaya sebagai warisan bersama dan sumber pengetahuan tentang masa lalu	1. Presentasi koperasi aktif dimana kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang koperasi sebagai model bisnis dan manfaatnya sehingga menghambat minat dan partisipasi dalam membentuk dan bergabung dengan koperasi. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya administrasi kependudukan serta faktor bencana seperti perpindahan penduduk akibat bencana yang tidak melakukan pembaharuan data. 3. Ketidaksiapan tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kualifikasi menjadi penghambta tingkat pengangguran terbuka. 4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keselamatan dan perlindungan kerja.



Misi/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	mendorong upaya untuk melindungi dan mearawatnya. - Disdukcapil melakukan administrasi kependudukan langsung ke daerah terpencil dengan sistem jemput bola untuk tertibnya administrasi di daerah Kabupaten Seruyan. - Akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. - Kebijakan dan program pemerintah yang mendukung partisipasi angkatan kerja, seperti insentif bagi perusahaan untuk menciptakan lapanga kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan pencarian kerja. - Ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan terintegrasi, termasuk layanan detoksifikasi, rehabilitasi, konseling, dan dukungan psikososial. - Kebijakan dan program pemerintah yang mendukung partisipasi angkatan kerja, seperti insentif bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan batuan pencrian kerja.	
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional Sasaran Pokok : Terwujudnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Merata dan Proporsional	- Perencanaan yang baik untuk pembangunan jalan yang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, penggunaan material yang tepat, dan teknik konstruksi yang berkualitas. - Dermaga yang terletak di lokasi strategis. - Kondisi geografi Kabupaten Seruyan dimana banyak desa yang berada di jaur sungai serta potensi ekonomi di sepanjang jalur aliran suingai.	- Dermaga tidak memadai atau tidak sesuai kebutuhan, dapat menghambat jumlah orang yang melalui dermaga. Faktor cuaca dan kondisi geografis. - Kurangnya konektivitas penerbangan antar bandara. - Infrastruktur yang tidak memadai, termasuk jalan, jaringan listrik, transportasi dan telekomunikasi. Ketidakpastian ekonomi, termasuk fluktuatif nilai tukar dan inflasi. - Keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya saluran distribusi air bersih, terbatasnya akses ke sumber air bersih, atau rendahnya jangkauan jaringan distribusi air. - Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, seperti kurangnya jaringan telepon, jaringan internet, atay sinyal yang lemah. Faktor geografis dimana terdapat desa-desa yang sulit dijangkau secara fisik. Keterbatasan dana dan sumber daya finansial.
Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik, Demokratis dan Partisipasif Sasaran Pokok : Terwujudnya Tata Pemerintah yang Baik, Demokratis, dan Partisipasif	- Keterbatasan dan akuntabilitas dalam penyajian informasi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. - Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan terhadap standar profesional yang relevan, termasuk standar audit dan standar pengendalain internal. - Proses seleksi dan rekrutmen yang bauk dan berkualitas. - Kesadaran akan pentingnya K3 serta kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keselamatan. - Tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pihak terkait terhadap pentingnya peraturan daerah.	- Kurangnya anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pelatihan dan pengembangan aparatur. - Kurangnya pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.





Misi/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	6. Kepemimpinan yang bertujuan untuk mempersatukan masyarakat, membangun dialog antar kelompok, dan mempromosikan persamaan hak dan perlindungan bagi semua golongan. 7. Adanya fasilitas olahraga yang memadai, seperti lapangan, arena, dan sarana latihan yang lengkap dan terawat dengan baik. Program pengembangan bakat yang efektif dan terarah. Serta adanya pembinaan dan pelatihan yang profesional, berpengalaman, dan berdedikasi.	
Misi 5 : Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah berbasis Ekonomi dan Ekologi Sasaran Pokok : Terwujudnya Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi	1. Dukungan masyarakat desa terhadap elektrifikasi. 2. Upaya konservasi sumber daya alam, seperti hutan, lahan, air, dan keanekaragaman hayati. 3. Program subsidi perumahan, program pembiayaan perumahan, dan insentif lainnya. 4. Ketersediaan infrastruktur listrik yang memadai, seperti jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi, jaringan transmisi yang efisien, dan stasiun pembangkit listrik yang cukup.	1. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan pipa yang rusak atau tidak mencakup seluruh wilayah, kurangnya sumur atau sumber air bersih, dan fasilitas penyediaan air yang terbatas. Keterbatasan sumber daya air yang berkualitas. 2. Kelistrikan sudah buka kewenangan kabupaten dan merupakan kewenangan pusat/BUMN (PT PLN).

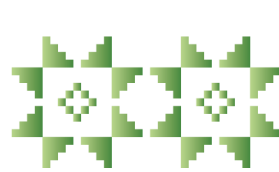
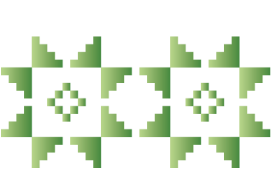
Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

2.5.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025 dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045. Hal ini untuk memastikan kontinuitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Seruyan.
- RPJPD 2005-2025 Kabupaten Seruyan telah berhasil mencapai sebagian besar sasaran pembangunan yang ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, dan perubahan iklim. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja ekonomi makro di Kabupaten Seruyan.





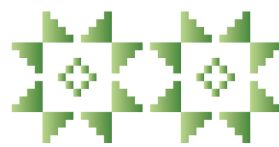
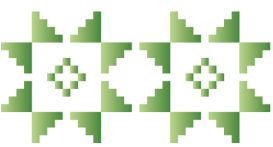
- c. RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025 telah menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dan komprehensif.
- d. Realisasi antaran capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD Kabupaten Seruyan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran telah selaras atau konsisten dengan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, masih terdapat beberapa sasaran yang belum selaras atau konsisten dengan arah kebijakan Provinsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut antara lain:
 - i. Kesesuaian dan keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten dengan Provinsi;
 - ii. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Provinsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - iii. Harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan pembangunan;
 - iv. Pemetaan dan penyelesaian permasalahan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten dengan Provinsi dalam pembangunan.
 - v. Indikator Kinerja Utama yang meliputi 9 (sembilan) faktor yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Aksesibilitas, Indeks Gini, Indeks Kuliatas Lingkungan Hidup (IKLH), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperoleh dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 meliputi poin-poin berikut.

- a. Penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045 dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan sebagai bahan acuan.

Tindak Lanjut: Melakukan analisis mendalam terhadap hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025 dan memperhatikan rekomendasi yang terdapat dalam evaluasi tersebut. Selanjutnya,





melakukan penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045 dengan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan acuan penyusunan RPJPD mendatang.

- b. Mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan sejalan dengan RPJPD yang telah ditetapkan dan memastikan dapat tercapai.

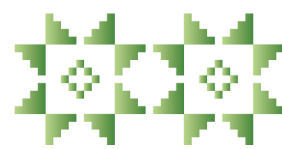
Tindak Lanjut: Melakukan analisis mendalam terhadap capaian kinerja dan pencapaian sasaran pokok yang terdapat dalam evaluasi. Selanjutnya, mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan dapat terwujud.

- c. Melakukan pengendalian jangka menengah berdasarkan hasil evaluasi.

Tindak Lanjut: Melakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan. Jika terdapat kendala atau hambatan, mengambil langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan pencapaian tujuan jangka menengah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Perencanaan pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan aspek demografi dan kebutuhannya terkait infrastruktur wilayah. Aspek demografi menggambarkan dinamika kependudukan sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan sasaran pemenuhan kebutuhan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Dinamika kependudukan dan infrastruktur wilayah dapat diketahui melalui proyeksi kependudukan yang dibagi menjadi lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan (2045). Hasil analisis proyeksi kependudukan meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk, komposisi umur, dan penduduk usia produktif. Secara lebih khusus untuk aspek infrastruktur wilayah, analisis proyeksi dibagi menjadi lima tahunan sampai tahun 2045 dengan basis data (*baseline*) tahun 2022. Proyeksi kebutuhan infrastruktur dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)





dari kementerian/lembaga (K/L) terkait, yang terdiri atas rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

2.6.1. Kependudukan

1. Proyeksi Jumlah Penduduk Total

Data dan informasi jumlah penduduk eksisting dan proyeksi berperan penting terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Jumlah penduduk di setiap wilayah memiliki distribusi, kuantitas, komposisi, dan pertumbuhan yang berbeda sehingga perlu mempertimbangkan karakteristik dinamika kependudukan untuk mencapai arah pembangunan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai perubahan dan perkembangan wilayah ke arah positif bagi publik, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu. Informasi terkait data kependudukan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang sudah berjalan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang akan berlangsung pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Seruyan, jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 171.304 jiwa dan hasil proyeksi pada akhir tahun 2045 mencapai 234.997 jiwa. Apabila dilihat distribusi per kecamatan, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Suling Tambun. Perbedaan distribusi jumlah penduduk dapat disebabkan oleh aspek geografi dan faktor lainnya. Selama rentang waktu 2025-2045, jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan diperkirakan mengalami peningkatan secara terus menerus sampai akhir tahun 2045. Pertumbuhan penduduk dari 2025 sampai 2045 sebesar 57.677 jiwa.

Tabel 2.99. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

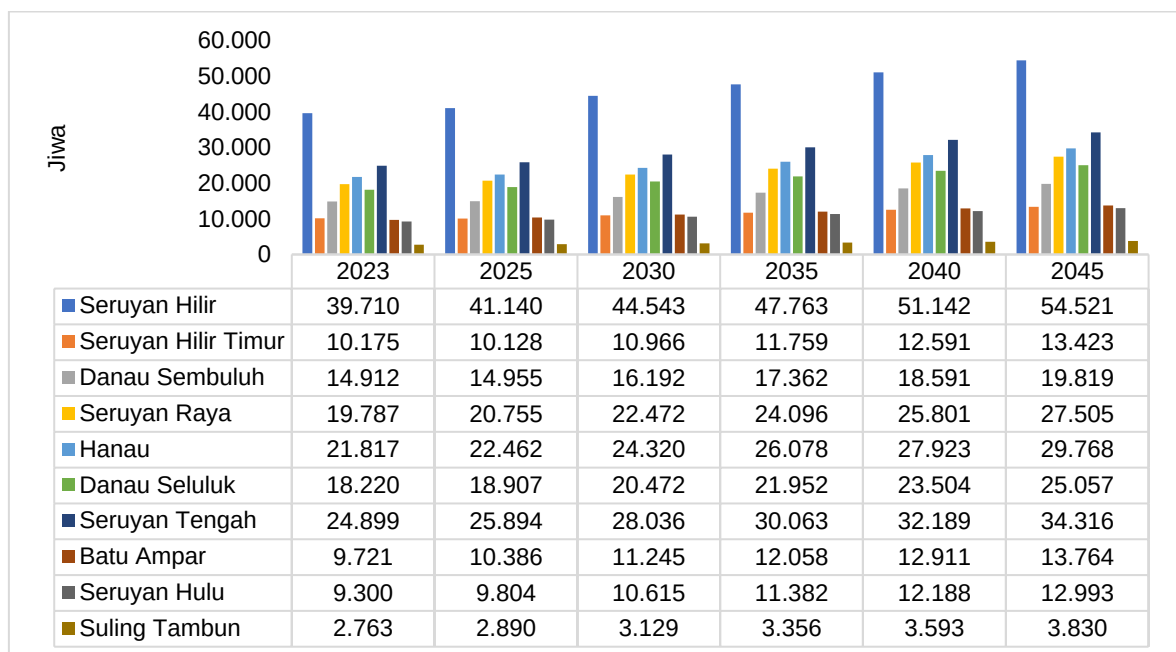
No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Seruyan Hilir	39.710	41.140	44.543	47.763	51.142	54.521
2	Seruyan Hilir Timur	10.175	10.128	10.966	11.759	12.591	13.423
3	Danau Sembuluh	14.912	14.955	16.192	17.362	18.591	19.819
4	Seruyan Raya	19.787	20.755	22.472	24.096	25.801	27.505
5	Hanau	21.817	22.462	24.320	26.078	27.923	29.768



No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
6	Danau Seluluk	18.220	18.907	20.472	21.952	23.504	25.057
7	Seruyan Tengah	24.899	25.894	28.036	30.063	32.189	34.316
8	Batu Ampar	9.721	10.386	11.245	12.058	12.911	13.764
9	Seruyan Hulu	9.300	9.804	10.615	11.382	12.188	12.993
10	Suling Tambun	2.763	2.890	3.129	3.356	3.593	3.830
Kab. Seruyan		171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

Perkembangan jumlah penduduk paling drastis dapat dilihat dalam Gambar 2.67. Secara umum, distribusi jumlah penduduk di setiap kecamatan memiliki kesamaan karakteristik. Kabupaten Seruyan memiliki perkembangan jumlah penduduk pada rentang 170.000-240.000 jiwa selama 20 tahun perencanaan. Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Suling Tambun mempunyai jumlah penduduk terendah pada tahun 2025-2045.



Gambar 2.67. Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



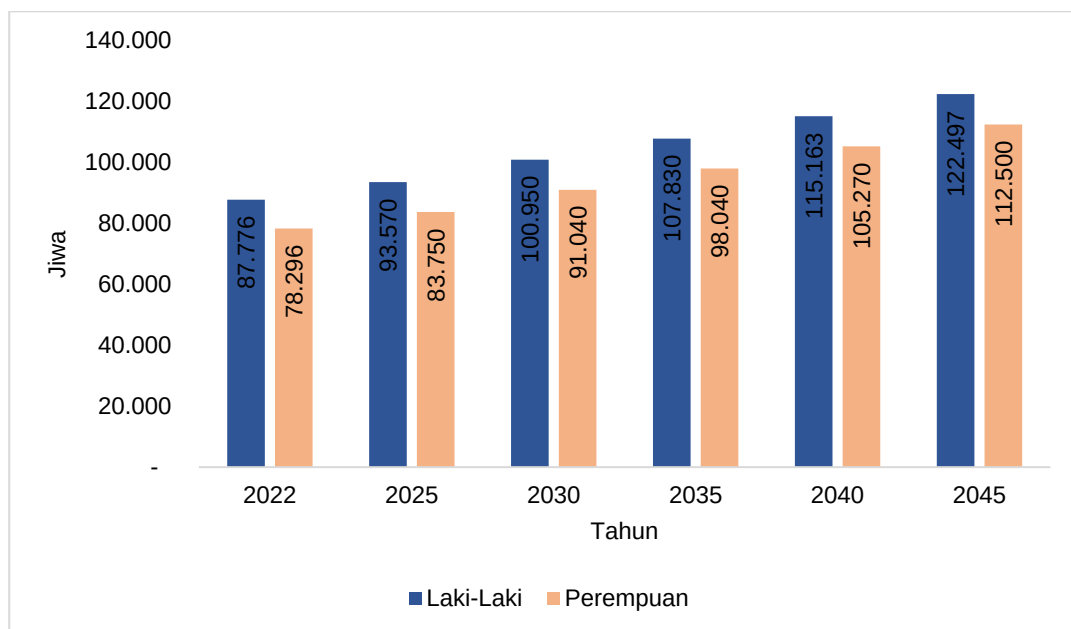
2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk di Kabupaten Seruyan didominasi oleh laki-laki sampai akhir tahun 2045 dengan rasio jenis kelamin tertinggi 112,11 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sampai akhir tahun perencanaan. Jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 122.497 jiwa dan perempuan sebesar 112.500 jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Seruyan mendekati seimbang dengan rasio jenis kelamin 108,89 yang berarti terdapat 108-109 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Semakin seimbang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.100. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	87.776	93.570	100.950	107.830	115.163	122.497
Perempuan	78.296	83.750	91.040	98.040	105.270	112.500
Rasio	112,11	111,73	110,89	109,99	109,40	108,89

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



Gambar 2.68. Grafik Perkembangan Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



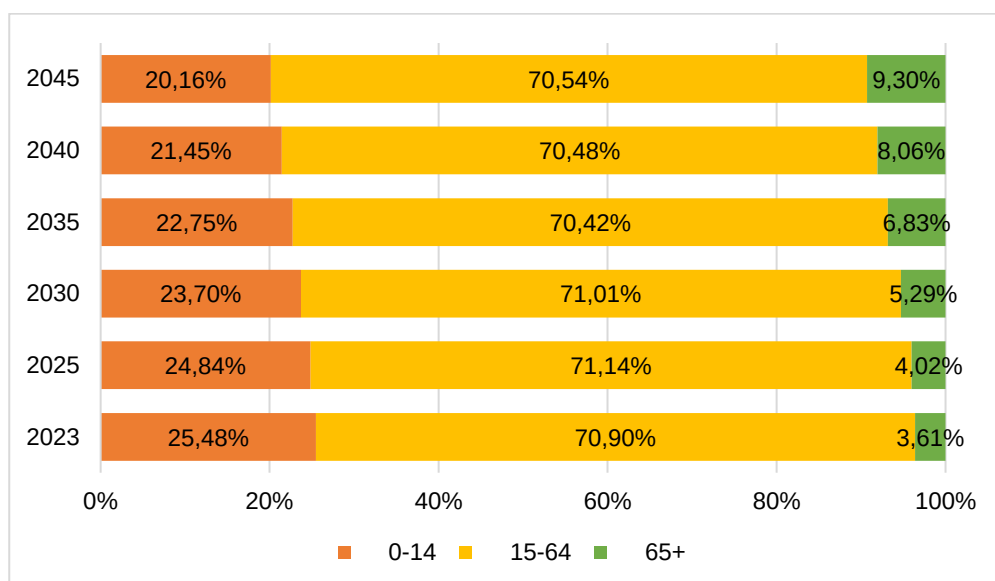
3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur terdiri atas usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Seruyan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sampai akhir tahun 2045 sebanyak 165.767 jiwa. Apabila melihat persentase komposisi umur, penduduk usia produktif berkisar 70% - 71% dari jumlah keseluruhan. Penduduk lanjut usia, yaitu kelompok umur > 65 tahun, mempunyai persentase dan jumlah terendah yang berkisar antara 3% - 9% atau 21.847 jiwa pada tahun 2045. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan angka ketergantungan dari 41,03 pada tahun 2023 menjadi 41,75 pada tahun 2045. Dengan demikian, terdapat 41-42 penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif.

Tabel 2.101. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	43.650	44.050	45.510	46.840	47.290	47.367
15-64 Tahun	121.460	126.130	136.340	144.970	155.361	165.767
> 65 Tahun	6.190	7.130	10.150	14.050	17.774	21.847
Angka Ketergantungan	41,03	40,58	40,82	42,00	41,88	41,75

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



Gambar 2.69. Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Seruyan

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



4. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan satuan luas wilayah. Wilayah dianggap semakin padat jika penduduknya semakin banyak. Untuk melihat kepadatan penduduk dan perkembangannya, proyeksi dilakukan dengan membandingkan analisis proyeksi jumlah penduduk dan luas wilayah. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2.102, distribusi penduduk tertinggi dan luas lahan paling kecil berada di Kecamatan Hanau. Kecamatan Hanau mempunyai kepadatan tertinggi sampai akhir tahun 2045 yaitu 54 jiwa tiap km². Wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 2 jiwa tiap km² pada tahun 2025-2040 lalu meningkat menjadi 3 jiwa tiap km² tahun 2045, adalah Kecamatan Suling Tambun. Letaknya berada di bagian utara Kabupaten Seruyan, sekaligus berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh desa di Kecamatan Suling Tambun yang berjumlah 9 desa berada di kawasan hutan.

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan pada tahun 2025-2045. Peningkatan kepadatan penduduk berkisar 1 jiwa/km² setiap lima tahun. Tingkat kepadatan tertinggi sebesar 14 jiwa/km² pada tahun 2045, sedangkan tahun 2035-2040 memiliki perkembangan kepadatan penduduk yang stagnan. Kecamatan dengan angka kepadatan penduduk mencapai > 20 jiwa/km² meliputi Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Raya, dan Kecamatan Seruyan Tengah.

Tabel 2.102. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Seruyan Hilir	4.659	41.140	44.543	47.763	51.142	54.521
2	Seruyan Hilir Timur	1.428	10.128	10.966	11.759	12.591	13.423
3	Danau Sembuluh	1.555	14.955	16.192	17.362	18.591	19.819
4	Seruyan Raya	869	20.755	22.472	24.096	25.801	27.505
5	Hanau	549	22.462	24.320	26.078	27.923	29.768
6	Danau Seluluk	586	18.907	20.472	21.952	23.504	25.057
7	Seruyan Tengah	1.343	25.894	28.036	30.063	32.189	34.316
8	Batu Ampar	669	10.386	11.245	12.058	12.911	13.764
9	Seruyan Hulu	3.262	9.804	10.615	11.382	12.188	12.993



No	Kecamatan	Luas (km ²)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
10	Suling Tambun	1.484	2.890	3.129	3.356	3.593	3.830
Kab. Seruyan		16.404	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997

Lanjutan Tabel 2.102 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Seruyan Hilir	9	10	10	11	12
2	Seruyan Hilir Timur	7	8	8	9	9
3	Danau Sembuluh	10	10	11	12	13
4	Seruyan Raya	24	26	28	30	32
5	Hanau	41	44	48	51	54
6	Danau Seluluk	32	35	37	40	43
7	Seruyan Tengah	19	21	22	24	26
8	Batu Ampar	16	17	18	19	21
9	Seruyan Hulu	3	3	3	4	4
10	Suling Tambun	2	2	2	2	3
Kab. Seruyan		11	12	13	13	14

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

5. Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Penduduk yang diklasifikasikan ke dalam usia produktif memiliki usia 15-64 tahun dan dianggap mampu produktif secara ekonomi. Proyeksi penduduk usia produktif menjadi penting dilakukan untuk memberikan informasi perubahan populasi penduduk usia produktif dalam periode tertentu. Ketepatan sasaran dan arah pembangunan, lebih khusus pada bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia produktif. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa Kecamatan Seruyan Hilir memiliki jumlah penduduk usia produktif paling tinggi selaras dengan jumlah penduduk totalnya. Jumlah penduduk usia produktif paling rendah berada di Kecamatan Suling Tambun yang berada di kawasan hutan bagian utara Kabupaten Seruyan. Secara keseluruhan, Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan penduduk usia produktif yang berlangsung secara terus menerus pada tahun 2025-2045. Terdapat tujuh kecamatan yang diperkirakan memiliki penduduk usia produktif di atas 10.000 jiwa pada tahun 2045, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk,



Kecamatan Danau Sembuluh, dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Perbedaan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan disebabkan oleh faktor kondisi fisik dan ekonomi wilayah.

Tabel 2.103. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2045

Kecamatan	Penduduk Usia 15-64 Tahun Tahun 2022 (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Seruyan Hilir	27.679	29.707	32.111	34.144	36.591	39.042
Seruyan Hilir Timur	7.847	8.422	9.104	9.680	10.374	11.069
Danau Sembuluh	10.297	11.052	11.947	12.703	13.613	14.525
Seruyan Raya	12.989	13.940	15.069	16.022	17.171	18.321
Hanau	14.418	15.474	16.727	17.786	19.061	20.337
Danau Seluluk	11.644	12.497	13.509	14.364	15.394	16.425
Seruyan Tengah	17.506	18.789	20.310	21.596	23.144	24.694
Batu Ampar	6.209	6.664	7.204	7.660	8.209	8.759
Seruyan Hulu	6.850	7.352	7.947	8.450	9.055	9.662
Suling Tambun	2.080	2.232	2.413	2.566	2.750	2.934
Kab. Seruyan	117.519	126.130	136.340	144.970	155.361	165.767

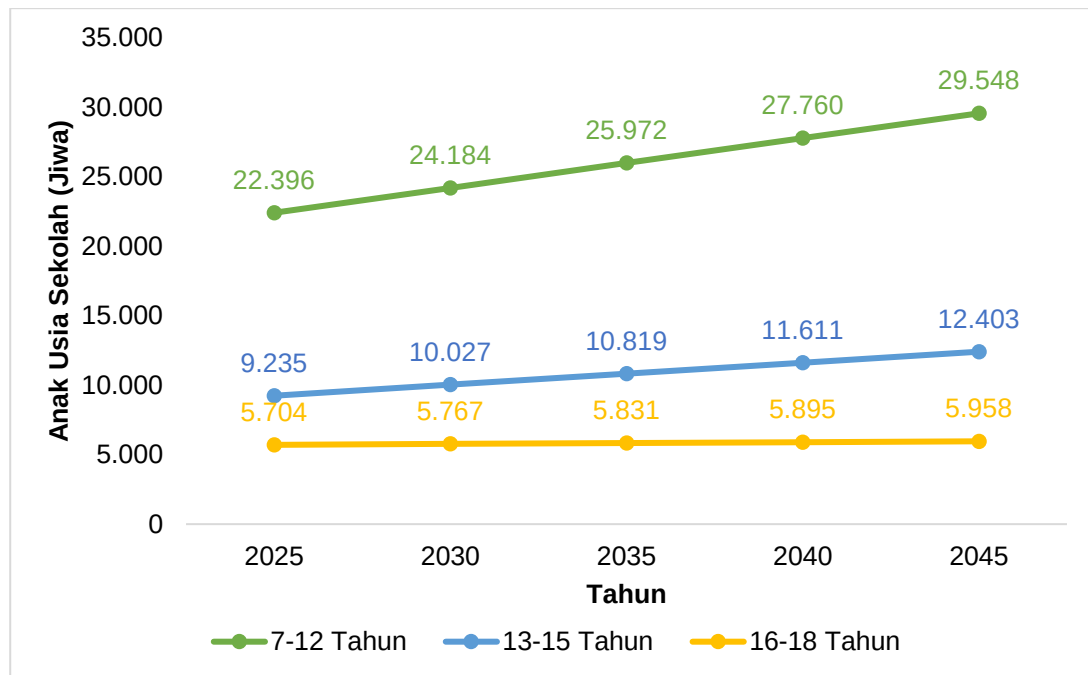
Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

6. Proyeksi Anak Usia Sekolah

Perencanaan pendidikan perlu mengetahui jumlah penduduk atau anak usia sekolah untuk mengetahui distribusi jumlah anak usia sekolah yang terus mengalami perubahan. Selanjutnya, distribusi jumlah tersebut digunakan untuk memperkirakan kebutuhan jumlah sarana dan prasarana sekolah. Proyeksi anak usia sekolah juga digunakan untuk mengetahui persebaran jumlah anak usia sekolah yang terus mengalami perubahan. Anak usia sekolah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok umur dan jenjang pendidikan, yaitu 7-12 tahun untuk pendidikan SD/MI, 13-15 tahun untuk pendidikan SMP/MTs, dan 16-18 tahun untuk pendidikan SMA/SMK/MA.

Hasil proyeksi dalam Gambar 2.70 menggambarkan perkembangan jumlah anak usia sekolah yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2025-2045. Seluruh kelompok usia sekolah mengalami peningkatan jumlah penduduk. Distribusi anak usia sekolah tertinggi berada pada kelompok usia 7-12 tahun yaitu pendidikan SD/MI dengan perkiraan mencapai 29.548 jiwa pada akhir tahun 2045.

Kelompok usia 13-15 tahun yang tengah mengenyam pendidikan SMP/MTs berkisar 9.000-12.000 jiwa dengan jumlah tertinggi 12.403 jiwa pada akhir tahun 2045. Anak usia sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun memiliki jumlah terendah sejak tahun 2025 sampai akhir 2045, yaitu 5.704 sampai 5.958 jiwa.

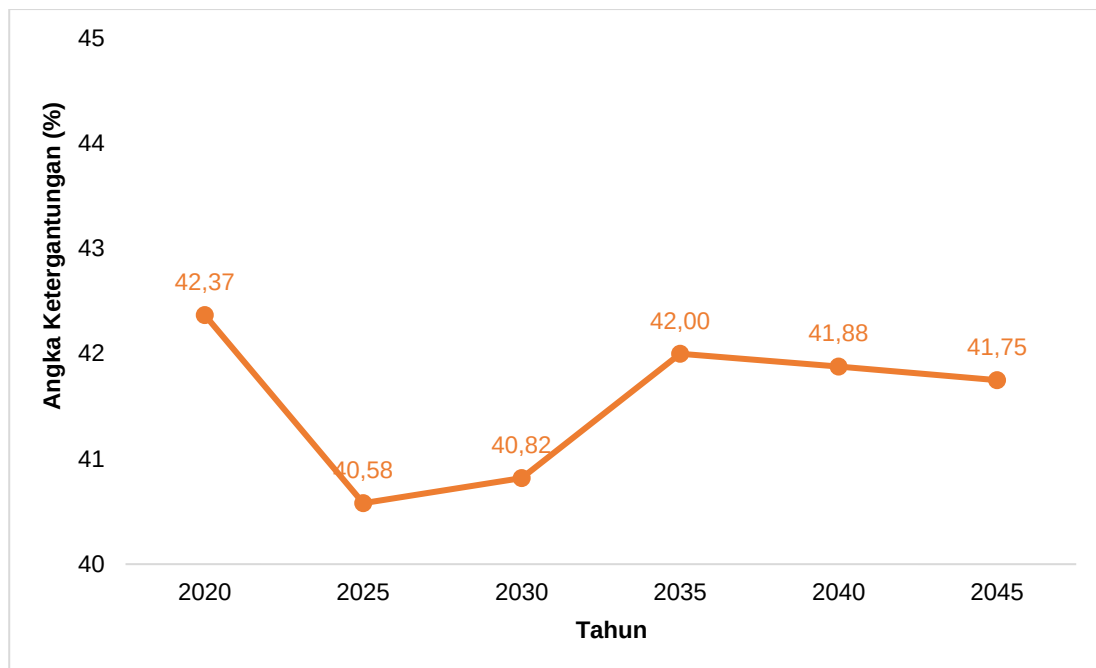


Gambar 2.70. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun)

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

7. Proyeksi Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan beban tanggungan penduduk usia tidak produktif oleh penduduk usia produktif. Penduduk yang dianggap produktif secara ekonomi memiliki rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia tidak produktif terdiri atas 2 (dua) kelompok umur, yaitu 0-15 tahun dan > 65 tahun. Kabupaten Seruyan diperkirakan mengalami peningkatan angka ketergantungan pada tahun 2025-2035, lalu menurun pada periode 2040-2045. Angka ketergantungan pada tahun 2045 mencapai nilai 41,75 sehingga setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 41-42 penduduk usia tidak produktif. Setiap lima tahun Kabupaten Seruyan mengalami penurunan angka ketergantungan antara 0,1-0,25. Kondisi penurunan angka ketergantungan perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan potensi usia produktif dan memberikan alternatif pemberdayaan usia tidak produktif khususnya lanjut usia.

**Gambar 2.71. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045**

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

8. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi saat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan > 65 tahun) dengan proporsi > 60% dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi terjadi ketika besar persentase angka ketergantungan di bawah 50%. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan, Kabupaten Seruyan telah mendapatkan bonus demografi (*the window of opportunity*) pada tahun 2022 dan akan terjadi sampai tahun 2045 yaitu 41,75%. Peristiwa bonus demografi telah diperoleh Kabupaten Seruyan sejak tahun 2018 dengan angka ketergantungan 42,02%. Kondisi penduduk usia produktif yang dominan berdampak besar bagi perkembangan wilayah melalui upaya perencanaan yang optimal. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan memberikan dampak positif bagi suatu wilayah jika pemerintah mampu memanfaatkan melalui pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, optimalisasi program Keluarga Berencana (KB), pendidikan berkualitas, kesehatan prima, dan ketenagakerjaan.



2.6.2. Kebutuhan Infrastruktur Dasar Wilayah

1. Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal

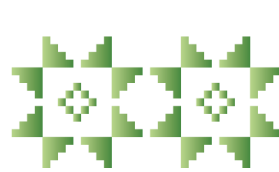
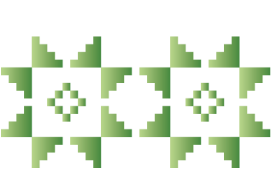
Rumah atau tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan primer manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Pertumbuhan populasi penduduk yang berlangsung secara terus menerus menyebabkan kebutuhan tempat tinggal meningkat. Kondisi tersebut memerlukan proyeksi kebutuhan rumah dalam perencanaan pembangunan untuk perencanaan kebutuhan lahan. Proyeksi kebutuhan rumah menggunakan skenario jumlah penghuni tiap rumah sebanyak 5 jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan rumah di Kabupaten Seruyan selama 20 tahun mendatang diperkirakan mencapai 46.999 unit pada tahun 2045. Kebutuhan rumah terus bertambah dari tahun 2022 sampai 2045 karena peningkatan populasi penduduk. Perkembangan kebutuhan rumah setiap lima tahunnya berkisar 2.700-2.900 unit. Upaya proyeksi kebutuhan rumah ini juga bertujuan untuk meminimalisasi munculnya permukiman kumuh.

Tabel 2.104. Proyeksi Kebutuhan Jumlah Rumah di Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	34.261	35.464	38.398	41.174	44.087	46.999

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

Rumah atau tempat tinggal membutuhkan luas lahan minimal 100 m² berdasarkan SNI 03-6981-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan. Selaras dengan penambahan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan rumah, maka kebutuhan luas lahan tempat tinggal juga mengalami kenaikan sampai tahun 2045. Peningkatan kebutuhan luas lahan tempat tinggal berkisar antara 27-29 hektar tiap lima tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebutuhan luas lahan untuk tempat tinggal di Kabupaten Seruyan diperkirakan mencapai 469,99 hektar pada akhir tahun perencanaan.





Tabel 2.105. Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah/Tempat Tinggal (Ha)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Rumah (Ha)	342,61	354,64	383,98	411,74	440,87	469,99

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

2. Kebutuhan Air Bersih

Ketersediaan air bersih berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain kebutuhan akan kuantitas air, kualitas air bersih dan layak minum perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Analisis proyeksi kebutuhan air bersih dilakukan berdasarkan penggunaan air rerata dari domestik dan non domestik. Hasil perhitungan penggunaan air rerata digunakan untuk memperkirakan kebutuhan air rerata tiap harinya. Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan air bersih berkisar pada 14 – 20 juta m³ sampai akhir tahun perencanaan. Kebutuhan air bersih untuk air minum pada tahun 2045 di Kabupaten Seruyan mencapai 19.573.577,36 m³.

Tabel 2.106. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (m ³)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Kebutuhan Air (m ³)	14.268.424,07	14.769.514,76	15.991.423,07	17.147.529,91	18.360.553,63	19.573.577,36

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

3. Kebutuhan Energi Listrik

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatannya di suatu wilayah, ketersediaan energi listrik menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, upaya pemerintah dalam proses digitalisasi pelayanan publik dan penyebaran informasi juga memerlukan energi listrik. Oleh karena itu, kebutuhan listrik saat ini dan perkiraan kebutuhan listrik masa mendatang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan distribusi aliran listrik ke rumah tangga. Upaya tersebut termasuk



salah satu indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan terkait Energi Bersih dan Terjangkau serta pilar sosial terkait Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Hasil proyeksi dalam Tabel 2.107 menunjukkan perkiraan jumlah rumah dan kebutuhan listrik sampai tahun 2045. Kebutuhan energi listrik berkisar pada 15 – 22 juta kilo volt ampere. Sampai akhir tahun perencanaan, kebutuhan listrik terus mengalami peningkatan tiap 5 tahun sebesar 1 – 1,5 juta kilo volt ampere. Kebutuhan listrik pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 21,23 juta kilo volt ampere. Kondisi tersebut selaras dengan pertumbuhan populasi penduduk sekaligus peningkatan jumlah rumah.

Tabel 2.107. Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Jumlah Rumah (unit)	34.261	35.464	38.398	41.174	44.087	46.999
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	15.475.175,10	16.018.645,50	17.343.896,63	18.597.781,13	19.913.396,25	21.229.011,38

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

4. Kebutuhan Fasilitas Persampahan

Salah satu dampak pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi secara terus menerus adalah peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Kabupaten Seruyan karena populasi penduduk terus bertambah sampai akhir tahun perencanaan. Volume sampah di Kabupaten Seruyan diperkirakan mengalami peningkatan 12.000 – 13.000 m³ tiap 5 tahun. Kondisi pada akhir tahun 2045, volume sampah yang dihasilkan penduduk mencapai 205.857,08 m³.

Tabel 2.108. Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbulan Sampah (m ³)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Timbulan Sampah (m ³)	150.062,30	155.332,32	168.183,24	180.342,12	193.099,60	205.857,08

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



Timbulan sampah yang terus meningkat perlu strategi dalam pengelolaannya agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kegiatan pengelolaan sampah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan terkait Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Upaya pengelolaan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas persampahan, meliputi gerobak sampah, transfer depo, container, dan dump truck. Fasilitas-fasilitas tersebut berfungsi untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir, menampung sampah, dan mengelola sampah. Kebutuhan fasilitas persampahan pada tahun 2022-2045 merupakan hasil perhitungan berdasarkan ketentuan NSPK dari kementerian/lembaga. Sampai akhir tahun 2045, total kebutuhan fasilitas persampahan diperkirakan mencapai 501 unit dengan rincian yaitu gerobak sampah berjumlah 426 unit, transfer depo berjumlah 43 unit, container berjumlah 21 unit, dan dump truck berjumlah 11 unit.

Tabel 2.109. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan Tahun 2025-2045

No	Fasilitas Persampahan	Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Gerobak Sampah Kap. 2 m ³ /unit	TAD	77.666	84.092	90.171	96.550	102.929
2	Transfer Depo Kap. 10 m ³ /unit	TAD	7.767	8.409	9.017	9.655	10.293
3	Container (Melayani 2 Depo)	TAD	3.883	4.205	4.509	4.827	5.146
4	Dump Truck (Melayani 2 Container)	TAD	1.942	2.102	2.254	2.414	2.573
Kabupaten Seruyan		TAD	91.258	98.808	105.951	113.446	120.941

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan menjadi penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata di suatu wilayah akan berpengaruh pada kemudahan akses ke layanan kesehatan. Dalam proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Seruyan, ketersediaan fasilitas eksisting yang digunakan sebagai tahun dasar (2022) meliputi rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan apotek. Terdapat 2 (dua) rumah sakit umum di Kabupaten Seruyan yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Hanau. Keberadaan rumah sakit tersebut dapat dijangkau di bagian tengah



dan selatan Kabupaten Seruyan, sedangkan akses dari utara cukup jauh. Fasilitas kesehatan yang sudah terdapat di setiap kecamatan adalah puskesmas dan puskesmas pembantu, sehingga penduduk yang berada jauh dari rumah sakit tetap bisa memperoleh layanan kesehatan melalui puskesmas.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk sampai akhir tahun 2045, kebutuhan rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu dianggap tetap. Kebutuhan apotek diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 23 unit pada tahun 2045. Selain layanan kesehatan oleh tenaga medis dan kesehatan, akses ke layanan obat juga dibutuhkan oleh penduduk melalui fasilitas apotek. Merujuk pada dokumen Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2023, ketersediaan apotek tahun 2022 berjumlah 6 unit yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar. Untuk memperluas akses apotek ke enam kecamatan lainnya, perlu penambahan jumlah apotek sampai 23 unit pada tahun 2045.

Tabel 2.110. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)						
Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
Poliklinik	13	13	13	13	13	13
Puskesmas	12	12	12	12	12	12
Puskesmas Pembantu	77	77	77	77	77	77
Posyandu	149	149	149	149	149	149
Apotek	6	18	19	21	22	23

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung oleh kualitas sumberdaya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak menjadi salah satu aspek pendorong meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Selaras dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah anak usia sekolah juga bertambah sehingga membutuhkan jumlah fasilitas pendidikan yang cukup dan layak. Berdasarkan dokumen Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2023, fasilitas SD dan SMP tersedia di seluruh kecamatan sedangkan SMA tersedia di hampir seluruh



kecamatan kecuali Kecamatan Suling Tambun. Merujuk pada keadaan eksisting pada tahun 2022, jumlah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dianggap tetap dengan menekankan peningkatan kualitas yang memadai. Fasilitas pendidikan yang perlu penambahan jumlah sampai akhir tahun perencanaan adalah PAUD dan TK.

Tabel 2.111. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	171.304	177.320	191.990	205.870	220.433	234.997
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)						
PAUD	8	10	12	14	16	18
TK	91	142	154	165	176	188
SD/MI	176	176	176	176	176	176
SMP/MTs	71	71	71	71	71	71
SMA/MA/SMK	25	25	25	25	25	25

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2023

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Konteks keruangan tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan dan kebijakan di level program dan kegiatan berkaitan dengan konteks keruangan dalam hal ini adalah kondisi lokasi dan sumber daya yang tersedia di suatu ruang kewilayahan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan. Subbab 2.7 menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Selain itu, subbab ini juga menelaah arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045. Dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah Pulau Kalimantan.

2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis

Pusat pertumbuhan yang dikembangkan di suatu wilayah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada wilayah tersebut. Penetapan pusat-pusat kegiatan melalui rencana tata ruang baik pada level nasional, provinsi, atau



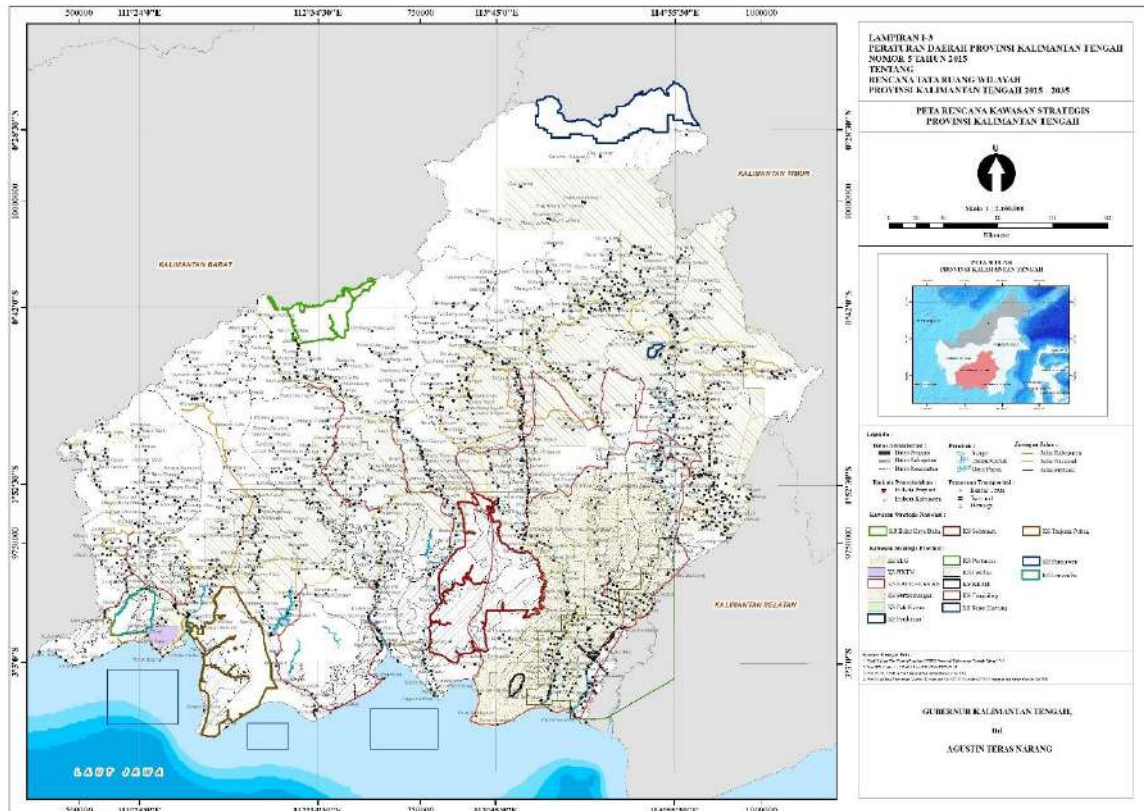
kabupaten/kota menjadi pintu masuknya berbagai program atau proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Kabupaten Sukamara berada di daerah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palangkaraya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, menetapkan empat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, Muara Teweh, dan Sampit. Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan program atau proyek strategis menjadi peluang bagi daerah untuk berkembang.

Sampit menjadi salah satu pusat kegiatan yang berada di sebelah timur Kabupaten Seruyan, dan memiliki jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan dengan pusat kegiatan wilayah lainnya. Selain itu, keberadaan infrastruktur Bandara Udara H. Asan di Sampit dapat menjadi hub yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah.

Tabel 2.112. Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Provinsi	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Kuala Kapuas	-
		Pangkalan Bun	
		Muarateweh	
		Sampit	

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017



Gambar 2.72. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

(Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035)

Berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan pada sudut kepentingan, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan fungsi sosial budaya, kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan pada empat kepentingan tersebut, kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di daerah Kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel 2.113. berikut.

Tabel 2.113. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah Kabupaten Seruyan

No.	Kepentingan Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Provinsi	Lokasi
1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:	Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, dan DR. Lebak.	Kabupaten Seruyan
		Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia	Kabupaten Seruyan

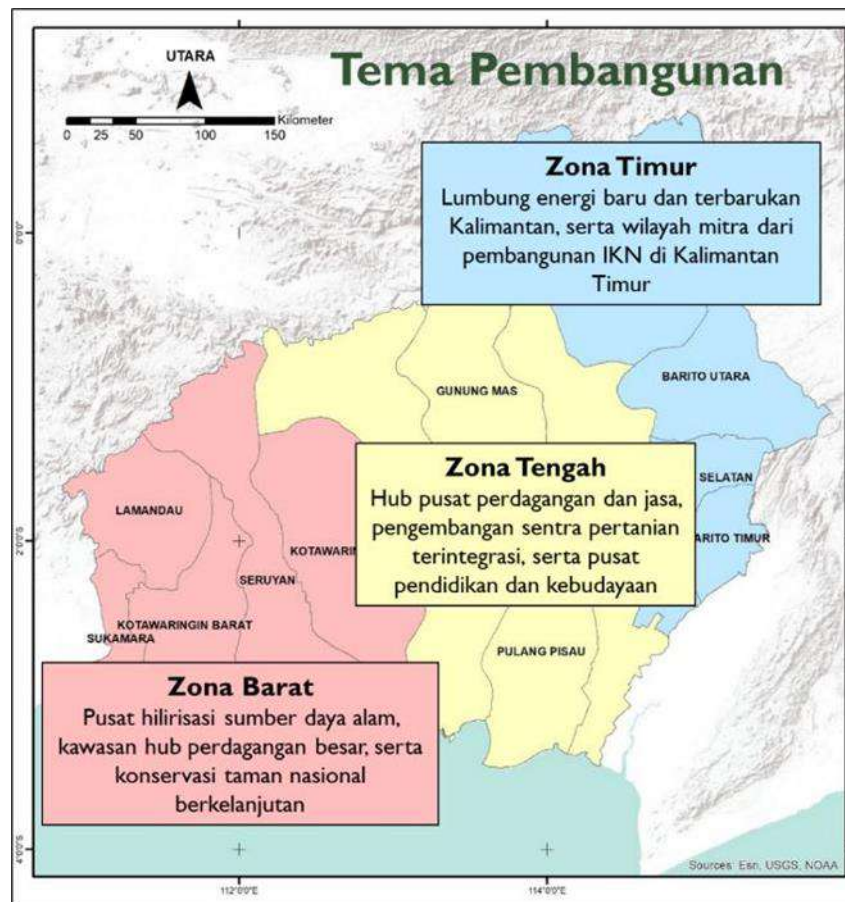


No.	Kepentingan Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Provinsi	Lokasi
		Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao)	Kabupaten Seruyan
		Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara	Segintung, Kabupaten Seruyan
		Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
		Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan	Kabupaten Seruyan
2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya	Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan	Kabupaten Seruyan
3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi	Kabupaten Seruyan
		Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut	Kabupaten Seruyan
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Kalimantan Tengah	Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau. Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB)
		Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Taman Nasional Tanjung Puting Danau Sembuluh

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Seruyan terdapat semua jenis Kawasan Strategis. Peruntukkan ini juga diakomodir/sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah terbagi ke dalam 3 Zona Pembangunan, yakni Zona Barat, Zona Tengah, dan Zona Timur. Kabupaten Seruyan masuk ke dalam Zona Barat bersama dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Seruyan. Zona Barat terbagi ke dalam 2 Klaster, yakni Klaster PKW Pangkalan Bun dan Klaster PKW Sampit. Kabupaten Seruyan masuk ke dalam Klaster PKW Sampit bersama dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tema Pembangunan dari Zona

Barat yaitu “Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam, Kawasan Hub Perdagangan Besar, serta Konservasi Taman Nasional Berkelanjutan”.



Gambar 2.73. Pembagian Zona dan Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

(Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045)

Dari rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi, ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berlokasi di Kota Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Rencana pengembangan ini juga diakomodasi dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. Selain itu, dikembangkan juga Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Pematang Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul, Tumbang Manjul, dan Tumbang Langkai, serta Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Bangkal dan Sembuluh I. Tabel 2.114. berikut merupakan program dan kegiatan pada sistem perkotaan di Kabupaten Seruyan.

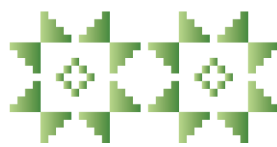
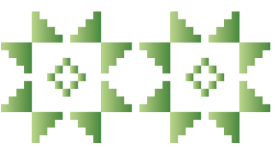


Tabel 2.114. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Seruyan

Program	Kegiatan	Lokasi
Peningkatan fungsi PKL Kuala Pembuang	Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kota Kuala Pembuang	Kota Kuala Pembuang
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan	
	Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Formal dan Non Formal	
	Pengembangan Lahan Kasiba dan Lisiba	
	Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	
	Pengembangan Pasar Regional Kota Kuala Pembuang	
	Pembangunan Terminal Regional Tipe B	
	Pengembangan Perguruan Tinggi	
	Pengembangan Sekolah Vokasional yang bermutu	
	Pengembangan SMA Negeri bertaraf Internasional	
	Pengembangan RSUD	
	Pembangunan Kawasan Pusat Olahraga dan Budaya	
	Pengembangan Masjid Raya (Mesjid Agung) Kota Kuala Pembuang dan Islamic Center	
	Pembangunan dan Penataan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah	
	Peningkatan Kapasitas PDAM	
	Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Penyediaan TPST yang Ramah Lingkungan	
	Penataan Kawasan Tamah (RTH) Kota Kuala Pembuang	
	Pembenahan Drainase Perkotaan	
	Pengembangan Tourist Center	
	Pengembangan Kawasan Pusat Penanganan Bencana Alam	
Peningkatan Beberapa Kota Sebagai Fungsi PPK	Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Perkotaan	Asam baru, Rantau Pulut, Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Penataan dan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan	Telaga Pulang



Program	Kegiatan	Lokasi
	Pengembangan perumahan rakyat	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pengembangan terminal tipe C	Telaga Pulang, Pembuang Hulu, Asam Baru, Rantu Pulut dan Tumbang Manju
	Pembangunan Sub terminal agribisnis sebagai pendukung Terminal Tipe C	Pembuang Hulu dan Tumbang Manjul
	Pengembangan Puskemas rawat inap dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pengembangan jaringan PDAM - IKK	Pematang Panjang dan Pembuang Hulu (PDAM), Telaga Pulang, Terawan, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pembangunan jaringan drainase	Pematang Panjang, Telaga



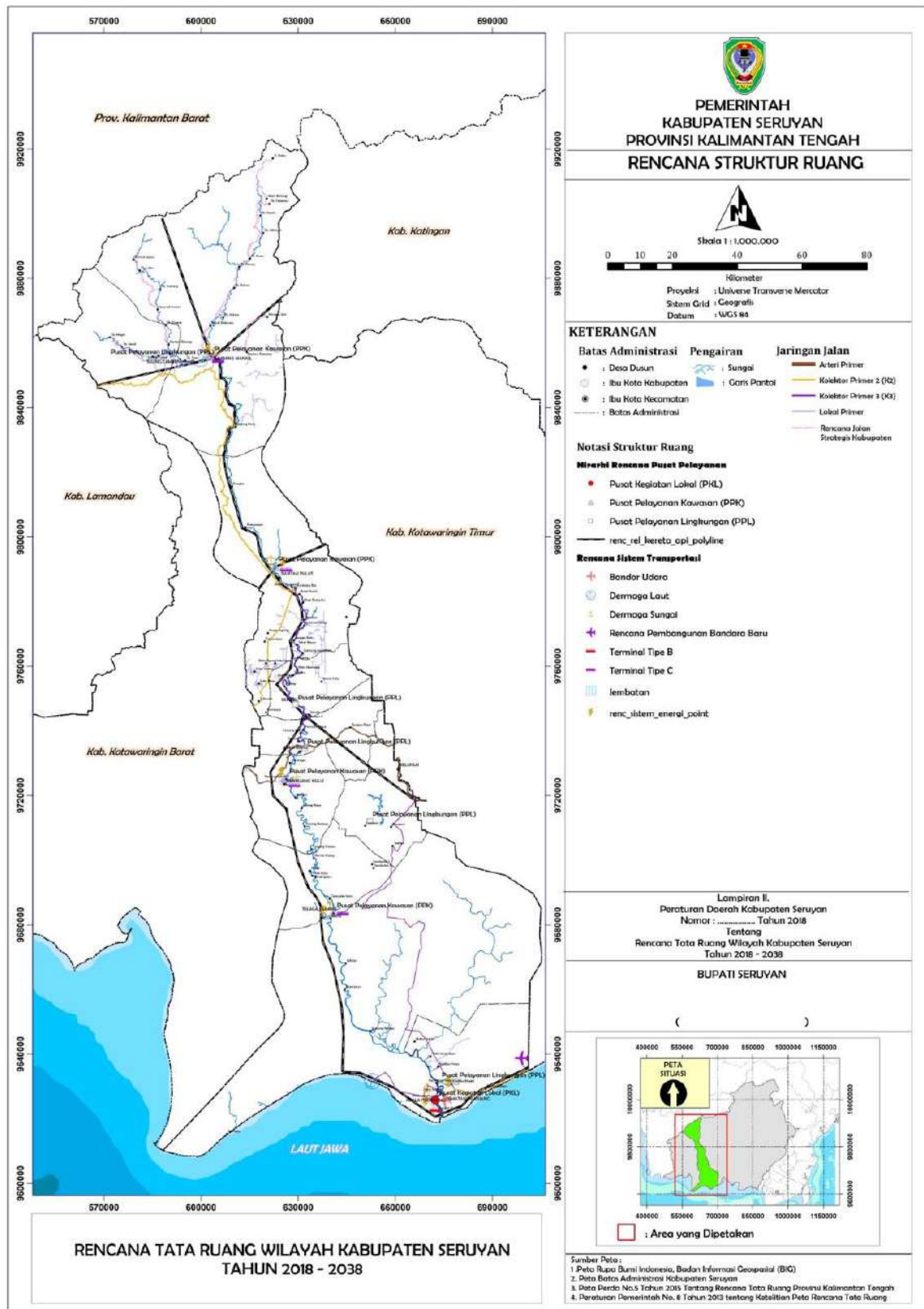


Program	Kegiatan	Lokasi
		Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pengembangan TPST	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pembangunan dan Pengembangan TPA	Pematang Panjang
	Pengembangan fasilitas pendidikan dan peribadatan	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pengembangan pasar lokal	Pematang Panjang, Telaga Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
	Pembangunan Litbang Pertanian	Telaga Pulang, Pembuang Hulu, Tumbang Manjul, Terawan, Pematang panjang
	Pembangunan Pusat Pengolahan hasil pertanian	Telaga Pulang, Pembuang Hulu, Tumbang Manjul, Terawan, Pematang panjang
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Pematang Panjang, Telaga



Program	Kegiatan	Lokasi
		Pulang, Terawan, Pembuang Hulu, Asam baru, Rantau Pulut, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai
Peningkatan beberapa perkotaan sebagai fungsi PPL	Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra pertanian, perkebunan dan perikanan	Bangkal dan Sembuluh I
	Pembangunan gudang pengumpul dan lahanjemur hasil pertanian	
	Pembangunan jalan produksi pertanian dan Perkebunan	
	Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan	
	Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019



Gambar 2.74. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seruyan

(Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2038)

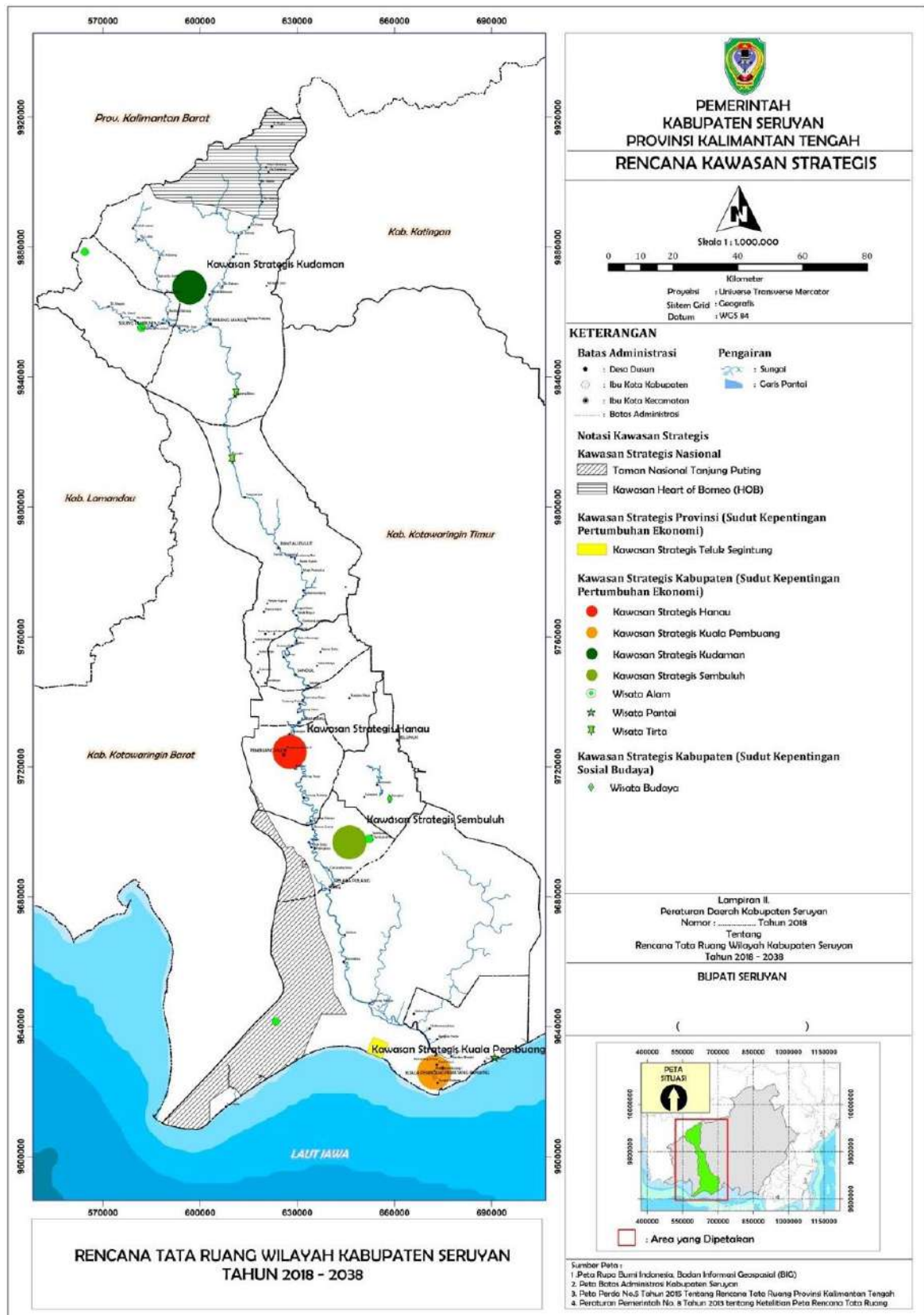


Selain pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Seruyan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan juga memuat penetapan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Seruyan mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel 2.115. berikut.

Tabel 2.115. Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan

Kepentingan	Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan Perkotaan Kuala Pembuang
	Kawasan Perkotaan Rantau Pulut
	Kawasan Perkotaan Pembuang Hulu
	Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pengembangan Jasa yaitu Kawasan Hanau
	Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara di Kawasan Segintung
	Kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat yaitu Kawasan Segitiga Kudaman (Tb. Kubang, Tb. Darap dan Tb. Manjul)
	Kawasan pengembangan terpadu untuk sektor unggulan perkebunan komoditi kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata yaitu Kawasan Sembuluh.
Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	Kawasan Danau Sembuluh

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019



Gambar 2.75. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Seruyan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2038



2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RJPN 2025-2045

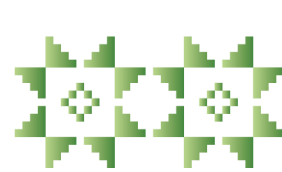
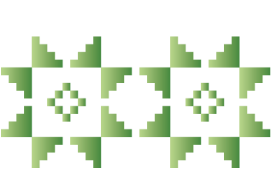
Kebijakan Wilayah Kalimantan berdasarkan RPJPN 2025-2045 diarahkan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara. Arah kebijakan didasari oleh potensi Wilayah Kalimantan menjadi pusat aglomerasi pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selain itu, kehadiran Ibu Kota Nusantara membutuhkan berbagai kegiatan prioritas strategis pendukung sehingga terdapat lima arah Pembangunan Wilayah Kalimantan yang disajikan pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116. Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

No.	Arah Pembangunan Wilayah
1.	Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.
2.	pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai <i>superhub</i> ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3.	Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep <i>superhub</i> ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4.	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5.	Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Arah pembangunan wilayah Kalimantan dijabarkan berdasarkan lima prioritas arah pembangunan yang disajikan pada Tabel 2.116 meliputi arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kebijakan pada transformasi sosial disajikan pada Tabel 2.117 sebagai berikut.



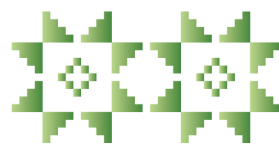
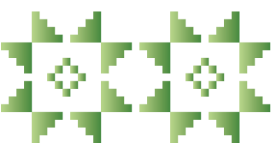


Tabel 2.117. Arah Kebijakan Transformasi Sosial di Wilayah Kalimantan

Transformasi Sosial
(i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
(ii) Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria
(iii) Perkuatan tenaga medis dan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP
(iv) Penyediaan layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis yang lebih kompleks, didukung teknologi kedokteran baru untuk memperluas jangkauan layanan khususnya ke daerah afirmasi seperti layanan telemedicine untuk penduduk di daerah perbatasan
(v) Pengembangan pelayanan kesehatan modern di wilayah IKN
(vi) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
(vii) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
(viii) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3
(ix) Pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global
(x) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment dan pembentukan Center of Excellence di IKN
(xi) Pembangunan sekolah baru dan perguruan tinggi yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global dalam mendukung pembangunan IKN
(xii) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka
(xiii) Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh Wilayah terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara melalui perlindungan sosial adaptif
(xiv) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi ekonomi di Wilayah Kalimantan diarahkan kepada pembangunan klaster ekonomi, pembangunan ketenagalistrikan, dan pembangunan ekosistem digital. Pembangunan klaster ekonomi dimaksudkan untuk mencapai sasaran menjadikan Pulau Kalimantan sebagai super hub





ekonomi. Di sisi lain, pembangunan klaster-klaster ekonomi sebagai komponen super hub membutuhkan dukungan infrastruktur dan sumber energi yang besar. Pulau Kalimantan sendiri dikenal dengan kekayaan sungainya yang merupakan sumber energi bersih. Selain itu, kekayaan minyak, gas, dan batu bara juga menjadikan wilayah ini kaya akan sumber-sumber energi. Arah kebijakan dari penjabaran transformasi ekonomi disajikan dalam Tabel 2.118 sebagai berikut.

Tabel 2.118. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi di Wilayah Kalimantan

Transformasi Ekonomi
Klaster Ekonomi
(i) Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing
(ii) Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi
(iii) Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan seperti biokimia pangan, herbal, dan nutrisi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri
(iv) Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia
(v) Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan
(vi) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk <i>food estate</i> untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani
(vii) Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan
(viii) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik
(ix) Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema education to employment
(x) Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
(xi) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
Pembangunan Ketenagalistrikan
(i) Pengembangan grid skala kecil terisolasi (<i>isolated mini grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
(ii) Penyediaan listrik Ibu Kota Nusantara yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan



Transformasi Ekonomi
(iii) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik
(iv) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi primer (Sungai Kayan) serta batu bara dan gas
(v) Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Kalimantan maupun antarpulau
(vi) Mengembangkan interkoneksi antarwilayah (transmisi interkoneksi ke Sistem Jawa Sumatera) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA di Kalimantan Utara)
Pembangunan Ekosistem Digital
(i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok (utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara) serta kawasan industri dan pertambangan
(ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
(iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>

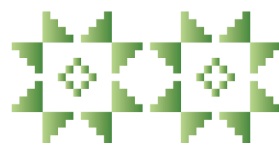
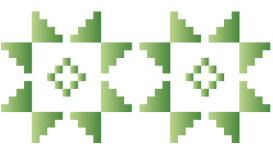
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Transformasi tata kelola bertujuan untuk menguatkan tata kelola yang diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut Tabel 2.119.

Tabel 2.119. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola di Wilayah Kalimantan

Transformasi Tata Kelola
(i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra- regulasi yang memadai di daerah
(ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan
(iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
(iv) Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
(v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
(vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
(vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045





Landasan transformasi diarahkan melalui supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Landasan transformasi di Wilayah Kalimantan diarahkan melalui kebijakan yang disajikan pada Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120. Landasan Transformasi di Wilayah Kalimantan

Landasan Transformasi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
(i)Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
(ii)Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems</i> (OBP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara
(iii)Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
(iv) Penguatan pengendalian inflasi daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
(i)Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
(ii)Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Kalimantan
(iii)Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi
(iv) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
(v)Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
(vi)Pengembangan diversifikasi pangan
(vii)Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya tambang serta penghambatan laju deforestasi
(viii)Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
(ix)Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan
(x)Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
(xi)Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
(xii)Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan
(xiii)Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana
Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu
(i)Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan



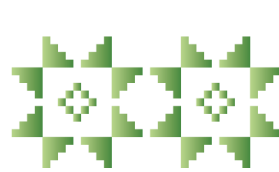
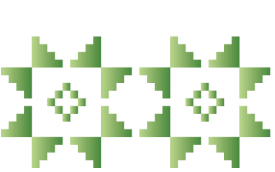
Landasan Transformasi
(ii)Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
(iii)Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir
(iv)Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin
(v)Pembangunan <i>check dam</i> pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran
(vi)Perlindungan IKN dari banjir kala ulang 100 tahun

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Kerangka implementasi di Wilayah Kalimantan dilaksanakan berdasarkan agenda kewilayahan dan sarana prasarana serta kesinambungan pembangunan, yang mencakup kebijakan-kebijakan sebagai berikut Tabel 2.121.

Tabel 2.121. Landasan Transformasi di Wilayah Kalimantan

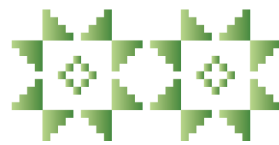
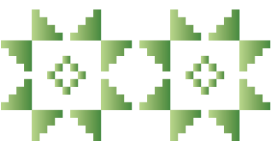
Landasan Transformasi
Kebijakan Sarana dan Prasarana Dasar
(i)Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan
(ii)Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut
(iii)Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
(iv)Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Kalimantan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep <i>Economic Hub</i> tiga kota di Kalimantan Timur (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat), yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)
(v)Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di sisi wilayah Kalimantan bagian barat dan ALKI II di sisi wilayah Kalimantan bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
(vi) Pengembangan bandara utama (Bandara SAMS di Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk <i>aerocity</i>) serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi)
(vii)Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan antarnegara, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan
(viii)Pengembangan moda kereta api untuk angkutan logistik serta kereta api antar kota selaras dengan pertumbuhan <i>demand</i> dan pengembangan wilayah
(ix)Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
(x)Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan





Landasan Transformasi
proyeksi perkembangan penduduknya, seperti Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak dan kota-kota lainnya
(xi)Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri terutama melalui pemanfaatan energi hidro seperti Sungai Kayan
Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
(i)Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
(ii)Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air
(iii)Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana
(iv)Pembangunan permukiman dan hunian vertikal yang kompak, layak, dan terhubung dengan infrastruktur strategis
(v)Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST, dan 30% sampah terdaur ulang dengan untuk menciptakan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti <i>waste hub</i> atau <i>nexus</i>
(vi)Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
Kesinambungan Pembangunan
(i)Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
(ii)Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi
(iii)Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
(iv)Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko
(v)Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
(vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan Kabupaten Seruyan dari tahun 2005 hingga 2025 telah berjalan dengan baik. Saat ini, indikator-indikator pembangunan mencapai target yang menunjukkan berhasilnya program-program yang telah direncanakan melalui RPJPD. Kemajuan pembangunan di kabupaten ini beragam, dari yang berhasil hingga program yang belum memberikan hasil. Cara program-program yang dilaksanakan sendiri bisa jadi bagian masalahnya, baik dari dalam maupun karena adanya tantangan dan perubahan dari luar. Hal ini menciptakan masalah pembangunan dan isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dalam rencana pembangunan selanjutnya. Bab ini mengevaluasi kemajuan pembangunan sebelumnya dan menyoroti masalah serta isu terkini di Kabupaten Seruyan. Hal tersebut menjadi landasan untuk merancang perencanaan pembangunan berikutnya.

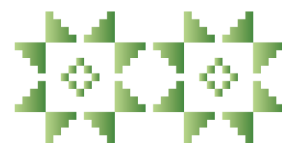
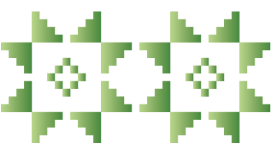
3.1. Permasalahan Umum Pembangunan Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Seruyan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Untuk menciptakan pendidikan yang baik, merata, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan program-program yang mengikuti standar pendidikan nasional. Berdasarkan gambaran daerah pada BAB II, permasalahan urusan pendidikan di Kabupaten Seruyan terdapat pada rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan, khususnya di jenjang SMA/MA/SMK. Adapun permasalahan lainnya sebagai berikut.

- 1) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA/SMK;
- 2) Sarana dan prasarana yang belum memadai pada jenjang SMA/MA/SMK baik dari segi kualitas maupun kuantitas;



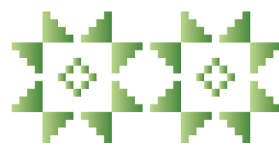
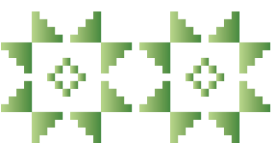


- 3) Terdapat penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK;
- 4) Tingginya angka putus sekolah sehingga terdapat penurunan angka kelulusan ditingkat SMA;
- 5) Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA karena belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah; dan
- 6) Distribusi lembaga pendidikan dan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di jenjang SMA belum merata.

2. Urusan Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat, terjadi perkembangan signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Seruyan sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- 2) Masih rendahnya status gizi masyarakat khususnya balita yang ditandai masih ditemukannya kasus gizi buruk, stunting;
- 3) Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh permasalahan perilaku dan lingkungan yang belum memenuhi syarat kesehatan;
- 4) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar yang ditandai dengan pemenuhan rasio puskesmas dan puskesmas belum sesuai standar dan belum terakreditasi puskesmas sebagai parameter mutu pelayanan kesehatan dasar;
- 5) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi yang ditandai dengan belum optimalnya sertifikasi dan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 6) Masih kurangnya cakupan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandai dengan belum tercapainya target Universal Coverage penduduk Kabupaten Seruyan;





- 7) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditandai tingkat keaktifan sarana UKBM yang belum optimal;
- 8) Belum optimalnya pencapaian kinerja upaya kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM); dan
- 9) Belum optimalnya manajemen berbasis system informasi kesehatan.

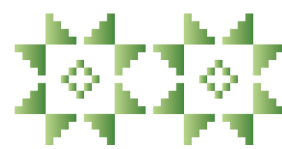
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Kualitas dan kapasitas jalan serta jembatan ditingkatkan untuk membantu kelancaran lalu lintas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, infrastruktur irigasi juga ditingkatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian. Permasalahan urusan Pekerjaan dan Penataan Ruang sebagai berikut.

- 1) Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur tata ruang;
- 2) Kondisi jalan belum sepenuhnya dalam kondisi yang baik;
- 3) Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi;
- 4) Belum optimalnya sistem drainase sehingga masih terjadi genangan;
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah regional;
- 6) Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan tata ruang;
- 7) Banyaknya daerah irigasi yang sudah beralihfungsi, sehingga berkurangnya lahan pertanian dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian ke perkebunan;
- 8) Sulitnya mendapatkan ketersediaan air baku yang layak di beberapa daerah tertentu untuk pembangunan SPAM; dan
- 9) Ketersediaan masyarakat untuk pembangunan SPALD masih rendah.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan, sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti air





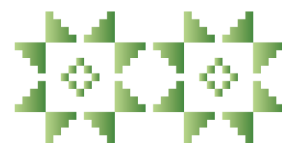
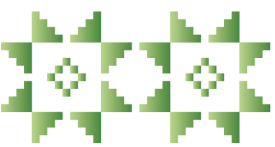
bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan pemakaman. Permasalahan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- 1) Masih belum adanya data lengkap terkait rumah masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah;
- 2) Kurangnya informasi dan data rumah penduduk yang rawan bencana di wilayah Kabupaten Seruyan;
- 3) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terjangkau;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan akibat Bencana dan dampak relokasi akibat Kebijakan Pemerintah Daerah. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- 5) Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh; dan
- 6) Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Permasalahan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 Sub urusan yakni Sub Urusan Trantibum, Bencana dan Damkar. Permasalah pada masing-masing sub urusan ialah sebagai berikut.

- 1) Sub Urusan Trantibum
 - i. Belum tertibnya administrasi pelaporan
 - ii. Kurang Personil, sarana dan prasarana, serta luasnya cakupan patrol
 - iii. Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing-masing RT
- 2) Sub Urusan Damkar
 - i. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam masih kurang

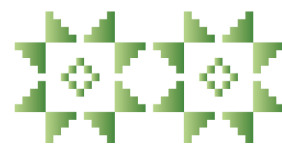
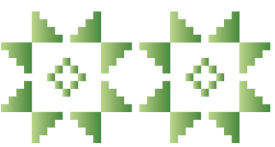




- 3) Sub Urusan Bencana
 - i. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana
 - ii. Belum lengkapnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana menyulitkan BPBD dalam menyusun Rencana PB yang berbasis masyarakat rawan bencana
 - iii. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - iv. Kuantitas dan kualitas serta profesionalisme aparatur penanggulangan bencana yang belum memadai
 - v. Peralatan dan logistik penanggulangan bencana selain karhutla belum memadai
 - vi. Luasnya dan letak geografis Kabupaten Seruyan yang begitu luas sehingga penanggulangan bencana tidak bisa cepat
 - vii. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Seruyan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan
 - viii. Masih belum adanya tenaga yang memenuhi syarat dalam melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana
 - ix. Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
 - x. Fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi secara tepat, sehingga dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi kurang dapat terantisipasi dengan baik.

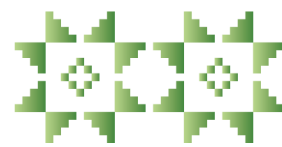
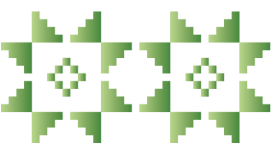
6. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahan urusan Sosial dapat dilihat secara lebih detail pada penjelasan berikut.





- 1) Penambahan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak bisa terprediksi akibat adanya kejadian bencana alam / sosial (banjir, kebakaran, dll) dampak pandemi covid dan dampak inflasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan kenaikan harga BBM;
- 2) Masih belum optimalnya mutu pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat dari jumlah PPKS yang terus meningkat dan keterbatasan anggaran kegiatan;
- 3) Kurangnya partisipasi dan kompetensi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Kelemahan dalam segi administrasi (juklak dan juknis) untuk dasar pelaksanaan kegiatan pemberian hibah dan Bantuan Sosial;
- 5) Data penerima bantuan yang tidak valid sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan Data keterlantaran untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak yang tidak valid;
- 6) Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal;
- 7) Penanganan kesiapsiagaan bencana dan pasca bencana yang belum maksimal;
- 8) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib sosial dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
- 9) Masih ada beberapa elemen dari 26 (dua puluh enam) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani;
- 10) Rumah singgah belum berfungsi karena sarana dan prasarana belum memadai;
- 11) Adanya dampak pandemic covid-19 dan dampak inflasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang juga berdampak pada menurunkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Seruyan;
- 12) Mentalitas miskin masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran;





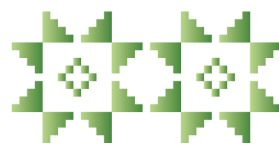
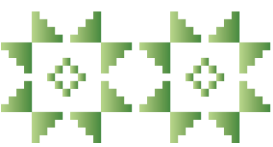
- 13) Data PPKS dari hasil MusDes dan MusKel tidak disampaikan secara periodik pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai bahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial pada SIKS-NG;
- 14) Penetapan dari Kementerian Sosial terkait Balai Rujukan untuk rehabilitasi sosial berada di termasuk zona/wilayah Jawa (Solo) yang menyebabkan jangkauan dan pelayanan terkendala jarak;
- 15) Masih banyak Desa/Kelurahan yang belum tersedia Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos);
- 16) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- 17) Adanya pemahaman keliru bahwa penanganan permasalahan Sosial dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) yang berdampak pada berkurangnya empati /rasa kepedulian sosial masyarakat ketika terjadi permasalahan sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan hal yang mendasar dan cukup kompleks dalam pembangunan karena berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan urusan tenaga kerja di Kabupaten Seruyan meliputi:

- 1) Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Masih terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada;
- 3) Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- 5) Iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan;
- 6) Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
- 7) Masih adanya kasus perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Pengusaha, sehingga perlu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.





2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

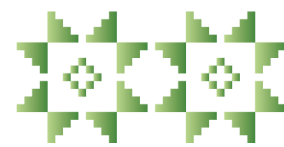
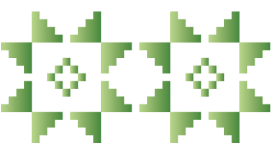
Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumber daya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun kesenjangan tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sebagai berikut.

- 1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih kurang;
- 2) Masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan;
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
- 5) Kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap program pembangunan yang berorientasi pada anak;
- 6) Belum terkelolanya data gender dan anak;
- 7) UPT PPA belum berfungsi maksimal;
- 8) Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko; dan
- 9) Masih minimnya pemahaman keluarga tentang stunting.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu wilayah sampai dengan perseorangan, tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan jumlah, keamanan dan keterjangkauan harga, untuk dapat meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan urusan Pangan:

- 1) Ketahanan daerah masih relatif rendah
- 2) Masih minimnya kemampuan mengolah hasil tanama pangan





4. Urusan Pertanahan

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Permasalahan urusan Pertanahan di Kabupaten Seruyan yaitu sebagai berikut.

- 1) Masih banyaknya tanah yang belum besertifikat yang hanya memiliki surat keterangan yang terkadang menjadikan beberapa pihak saling klaim atas kepemilikannya;
- 2) Kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan;
- 3) Belum optimalnya sertifikasi tanah aset Pemda;
- 4) Kurangnya data kebutuhan dan ketersediaan tanah;
- 5) Dalam hal pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah; dan
- 6) Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

5. Urusan Lingkungan Hidup

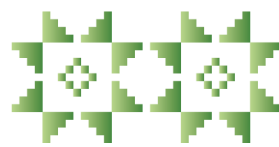
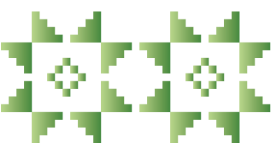
Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Seruyan sebagai berikut.

- 1) Banyaknya aktivitas ekonomi yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup; dan
- 2) Regulasi dan administrasi dalam pengelolaan lingkungan di wilayah masih kurang memadai.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang cukup penting dalam pembangunan. Sebab data kependudukan merupakan salah satu data yang cukup dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Seruyan meliputi.

- 1) Pelayanan yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku;
- 2) Terhambatnya pencetakan dan penerbitan KTP Elektronik;
- 3) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal;
- 4) Adanya perubahan regulasi mengenai *database* Kependudukan SIAK terpusat di Kemendagri; dan



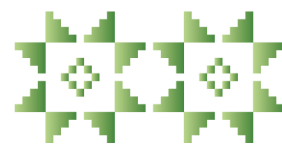
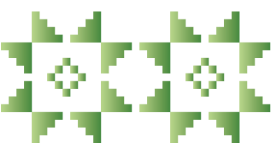


- 5) Peralatan yang perlu diremajakan/diganti dengan yang lebih baik.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi.

- 1) Masih rendahnya tingkat SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam manajemen administrasi pemerintahan desa;
- 2) Masih rendahnya tingkat SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan desa;
- 3) Kurangnya peran aktif masyarakat di desa terhadap pembangunan di desa;
- 4) Profil desa belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pembangunan;
- 5) Belum terbinanya lembaga kemasyarakatan desa dan ada sebagian dari lembaga kemasyarakatan yang belum terinventarisir guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 6) Minimnya partisipasi masyarakat desa dalam program kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten;
- 7) Sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- 8) Kurangnya pembinaan terhadap penerapan teknologi tepat guna di pedesaan;
- 9) Masih minimnya pertumbuhan lembaga perekonomian/ usaha ekonomi produktif di pedesaan; dan
- 10) Masih ada beberapa lembaga ekonomi pedesaan yang perlu dilakukan pembinaan guna peningkatan peran lembaga perekonomian desa dalam mendukung pembangunan.





8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

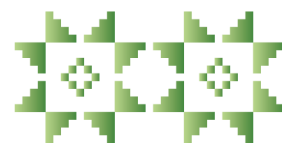
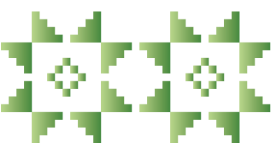
Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Seruyan cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Adapun permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada penjelasan berikut.

- 1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
- 2) Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
- 3) Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga; dan
- 4) Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini.

9. Urusan Perhubungan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Permasalahan urusan Perhubungan meliputi 11 (sebelas) poin berikut.

- 1) Terbatasnya anggaran pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Tidak seimbang antara pertumbuhan jumlah kendaraan, baik itu di Kabupaten Seruyan secara khusus di Kuala Pembuang dengan penambahan jumlah prasarana jalan;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa angkutan darat akan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan akan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 5) Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang berkompeten;



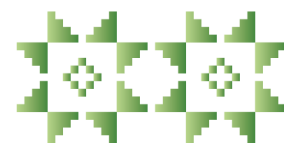
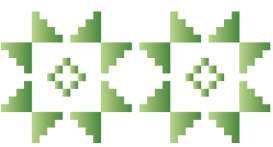


- 6) Terbatasnya anggaran pengembangan lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan;
- 7) Adanya sungai Seruyan yang membelah Kabupaten Seruyan dari utara ke selatan serta bermuara di Laut Jawa disertai banyaknya anak sungai merupakan potensi infrastruktur alam yang sangat besar bila dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperlancar mobilitas barang/jasa/orang;
- 8) Di daerah hulu terdapat riam yang cukup besar dan relatif banyak merupakan kendala, tantangan sekaligus peluang mengembangkan transportasi jalan sungai;
- 9) Tidak tersedia fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan monitoring maupun penertiban;
- 10) Kurangnya tenaga operasional lapangan dalam penindakan maupun penertiban; dan
- 11) Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan urusan Komunikasi dan Informasi ialah sebagai berikut.

- 1) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi dokumentasi/publikasi;
- 2) Kurangnya sdm dalam melakukan tugas dokumentasi serta publikasi;
- 3) Penguatan sarana dan prasarana serta pelatihan berkelanjutan tenaga sdm dalam menjunjung tugas dan fungsi dokumentasi/publikasi;
- 4) Bagaimana meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan PPID;
- 5) Penguatan pengelolaan ppid kabupaten seruyan menuju informatif;
- 6) Bagaimana meningkatkan jumlah pengaduan dari masyarakat;





- 7) Penguatan kelembagaan, kebijakan, SDM, optimalisasi pemanfaatan data dan aplikasi serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan pada pengelolaan sp4n-lapor!;
- 8) Terintegrasinya jaringan intra pemerintah kabupaten seruyan;
- 9) Pengelolaan aplikasi dan domain/sub domain milik pemerintah yang berkualitas;
- 10) Sosialisasi dan pelatihan TIK; dan
- 11) Menuju SPBE kabupaten seruyan.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

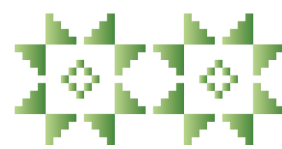
Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai tonggak perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi 3 (tiga) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian rakyat; dan
- 3) Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum merata.

12. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditopang dengan besarnya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Seruyah. Permasalahan urusan Penanaman Modal meliputi 7 (tujuh) poin berikut.

- 1) Belum Optimal Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan ruang pelayanan kurang representatif;
- 2) Belum Optimal Anggaran SKPD untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor, sehingga pelayanan belum optimal;
- 3) Belum Optimal Sistem Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan yang belum berjalan secara maksimal;
- 4) Belum Optimal Perencanaan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum adanya data peluang investasi daerah, belum





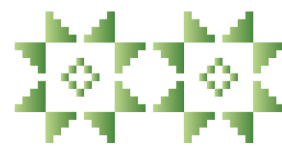
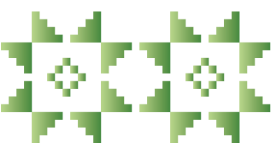
adanya data Potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD;

- 5) Belum Optimal tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan belum optimalnya tindak lanjut persen pengeluaran tingkat masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 6) Belum Optimal pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga Pengelolaan LKPM dan Pengelolaan data belum biasa berjalan secara optimal; dan
- 7) Belum Optimal jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Seruyan. Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas 11 (sebelas) poin berikut.

- 1) Pembinaan terhadap IMTAQ di kalangan pemuda yang belum optimal;
- 2) Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang perlu ditingkatkan;
- 3) Pemuda yang berpotensi dan kreatif yang perlu ditingkatkan;
- 4) Sarana dan prasarana bagi kegiatan kepemudaan yang belum memadai;
- 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga yang masih rendah;
- 6) Pembinaan keolahragaan dan atlit-atlit berbakat yang belum optimal;
- 7) Belum adanya olahraga bagi penyandang difabel;
- 8) Sarana prasarana pemuda dan olahraga (termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja, dan sebagainya) yang belum memadai;
- 9) Upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga yang perlu ditingkatkan;
- 10) Peningkatkan jumlah pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi; dan





- 11) Fasilitas olahraga bagi masyarakat penyandang cacat masih perlu ditingkatkan.

14. Urusan Statistik

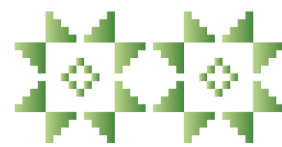
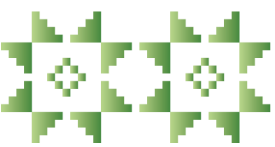
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Permasalahan urusan Statistik ialah sebagai berikut.

- 1) Fungsi Dinas Yang Menyelenggarakan Urusan Statistik Sektoral Adalah Sebagai Wildata Terhadap Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Urusan Kewenangan Daerah dari masing-masing OPD yang menyelenggarakan kewenangan daerah untuk mendukung Satu Data Indonesia;
- 2) Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
- 3) Rendahnya penyediaan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia dan tidak tersedianya ASN formasi bidang statistik; dan
- 4) Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral.

15. Urusan Persandian

Persandian adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian, perumusan kebijakan teknis di bidang persandian, dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang persandian. Permasalahan urusan Persandian ialah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya sumber daya keamanan informasi dan sumber daya manusia;
- 2) Tidak memadainya alat keamanan informasi;
- 3) Belum dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat internal di Pemerintahan Daerah;
- 4) Belum pernah dilakukan kontra penginderaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;





- 5) Belum pernah melakukan pelatihan fungsi persandian pada tingkat provinsi maupun pusat; dan
- 6) Audit informasi pada perangkat daerah Kabupaten Seruyan masih dilakukan masing-masing belum melalui bidang persandian.

16. Urusan Kebudayaan

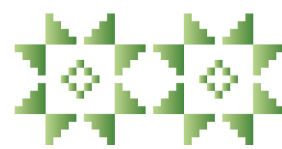
Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Seruyan bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Permasalahan urusan Kebudayaan ialah sebagai berikut.

- 1) Perlunya peningkatan keikutsertaan penyelenggaraan pegelaran seni budaya berskala regional, nasional, maupun internasional;
- 2) Pembinaan bagi sanggar dan grup kesenian/kebudayaan yang belum optimal;
- 3) Pelestarian benda dan situs cagar budaya yang belum optimal;
- 4) Perlunya peningkatan apresiasi oleh masyarakat terhadap budaya; dan
- 5) Resistensi masyarakat terhadap pengaruh budaya asing yang perlu ditingkatkan.

17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan urusan Perpustakaan terdiri atas 8 (delapan) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya koleksi bahan pustaka;
- 2) Kurangnya minat baca anak-anak, pelajar, dan masyarakat umum;
- 3) Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa/kelurahan;





- 4) Belum optimalnya kunjungan ke perpustakaan;
- 5) Kurang optimalnya pelayanan perpustakaan;
- 6) Perlunya pengembangan SDM di bidang perpustakaan;
- 7) Kurang optimalnya kapasitas masyarakat; dan
- 8) Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan urusan Kearsipan terdiri atas 3 (tiga) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah;
- 2) Pembinaan dan pengawasan kearsipan belum optimal; dan
- 3) Perlunya pengembangan SDM di bidang kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

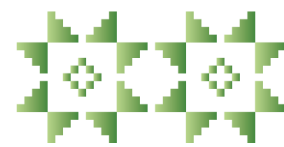
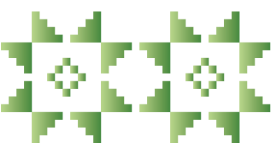
1. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup yang sedang berkembang di kalangan masyarakat dan memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Permasalahan urusan Pariwisata ialah sebagai berikut.

- 1) Destinasi pariwisata yang perlu ditingkatkan;
- 2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- 3) Perlu peningkatan investasi dalam bidang pariwisata;
- 4) Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
- 5) Belum adanya kerjasama pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- 6) Promosi pariwisata yang belum optimal;
- 7) Belum adanya kemitraan antara usaha pariwisata sehingga belum terciptanya sinergi antar usaha; dan
- 8) Perlunya peningkatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

2. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu bidang yang cukup penting utamanya terkait penyediaan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Seruyan. Meski





sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar, akan tetapi pertanian di Kabupaten Seruyan menghadapi permasalahan seperti berikut.

- 1) Fasilitas jaringan irigasi yang belum memadai;
 - 2) Pemanfaatan Jalan Usaha Tani oleh petani tidak maksimal;
 - 3) Kondisi bangunan dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang masih belum memadai;
 - 4) Tidak terjangkaunya Alsintan;
 - 5) Terbatasnya jumlah benih bersertifikat;
 - 6) Tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu hasil produksi pertanian dan perkebunan;
 - 7) Posisi tawar petani lemah;
 - 8) Rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani;
 - 9) Kelas kelompok pertanian dan perkebunan masih didominasi kelompok pemula dan generasi tua; dan
- Rendahnya kerjasama antar kelompok tani.

3. Urusan Kehutanan

Kehutanan merupakan urusan yang mengurus tentang hutan (diluar hutan negara) di Kabupaten Seruyan. Urusan kehutanan di Kabupaten Seruyan menghadapi permasalahan berupa

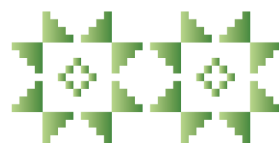
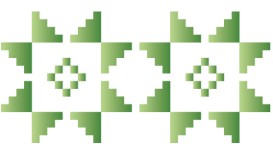
- 1) Banyaknya aktivitas yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas ekologi hutan
- 2) Regulasi dan administrasi dalam pengelolaan hutan yang belum memadai.

4. Urusan Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Permasalahan urusan perdagangan yakni terkait bina kelompok pedagang/usaha informal yang belum optimal karena keterbatasan anggaran.

5. Urusan Perindustrian

Industri (baik industri besar, menengah, kecil, hingga mikro) secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap meningkatnya





kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi urusan perindustrian di Kabupaten Seruyan ialah sebagai berikut.

- 1) Masih rendahnya kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri pengolahan;
- 2) Pertumbuhan industri yang masih rendah; dan
- 3) Belum optimalnya bina kelompok pengrajin industri kecil menengah karena minimnya dana yang dialokasikan.

6. Urusan Transmigrasi

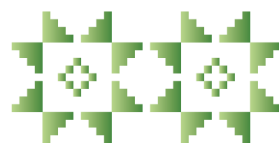
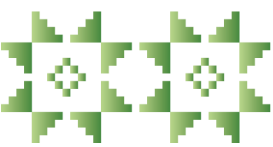
Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Permasalahan transmigrasi di Kabupaten Seruyan meliputi 4 (empat) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah;
- 2) Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal;
- 3) Masih perlunya pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi khususnya pembinaan usaha dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi yang juga memberi pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas; dan
- 4) Belum tersedianya tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi.

7. Urusan Kelautan dan Perikanan

Secara geografis Kabupaten Seruyan memiliki wilayah perairan berupa laut dan sungai yang cukup potensial untuk perkembangan sektor perikanan. Permasalahan urusan kelautan dan perikanan ialah sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap;
- 2) Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI); dan
- 3) Belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan.





D. Penunjang Urusan

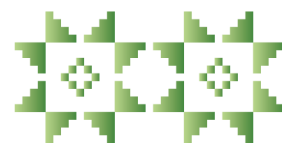
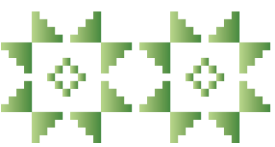
1. Sekretariat Daerah

Permasalahan urusan sekretariat daerah meliputi:

- 1) Belum optimalnya layanan fasilitasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- 3) Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
- 4) Masih rendahnya fungsi pengawasan, dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
- 5) Belum optimalnya kebijakan penanganan permasalahan pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- 6) Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah;
- 7) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- 8) Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja;
- 9) Kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- 10) Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum optimal;
- 11) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan;
- 12) Kuantitas dan kualitas SDM pada sebagian/unit kerja masih kurang;
- 13) Kurangnya komitmen aparatur dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi; dan
- 14) Kurang memadainya sarana kerja terutama akses jaringan internet yang belum sepenuhnya dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan memiliki fungsi untuk mendukung kinerja DPRD dalam penyelenggaraan administrasi umum, penyelenggaraan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat, serta penyediaan tenaga ahli. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan antara lain:





- 1) Masih rendahnya pemahaman jajaran Sekretariat Dewan DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi fasilitasi terhadap Anggota DPRD;
- 2) Masih terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
- 4) Kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
- 5) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

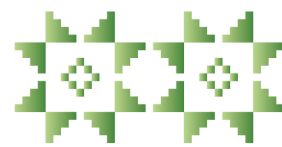
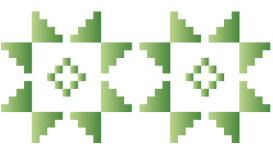
3. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga dalam proses tersebut hendaknya memenuhi 5 prinsip pendekatan yang meliputi: a) Pendekatan Politik, b) Pendekatan Teknokratik, c) Pendekatan Partisipatif, d) Pendekatan Atas-Bawah/*Top-Down*, dan e) Pendekatan Bawah-Atas/*Bottom-Up*. Permasalahan terkait urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan meliputi 6 (enam) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
- 2) Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan RPJPD;
- 3) Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan muktahir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi maupun untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan strategis;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
- 5) Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu dan terbatasnya kuantitas formasi aparatur perencana di BAPPEDALITBANG sesuai dengan struktur perangkat daerah

4. Keuangan

Pengelolaan keuangan terkait tingkat kinerja penerimaan daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah unggulan guna peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan





regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi capaian yang ditargetkan. Permasalahan urusan keuangan Kabupaten Seruyan terdiri atas 11 (sebelas) poin berikut.

- 1) Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
- 2) Kurangnya SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu;
- 4) Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- 5) Belum optimalnya tata Kelola aset secara tertib administrasi sehingga kurang akuratnya data barang milik daerah;
- 6) Lemahnya koordinasi;
- 7) Lemahnya fungsi pengawasan melekat;
- 8) Potensi pajak belum tergali maksimal;
- 9) Kualitas pelayanan belum optimal;
- 10) Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan restribusi; dan
- 11) Kurangnya sarana prasarana.

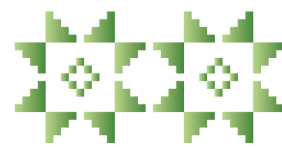
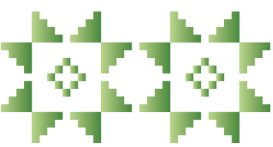
5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian merupakan urusan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ialah sebagai berikut.

- 1) Belum meratanya pengembangan kompetensi aparatur;
- 2) Masih kurangnya disiplin dan kinerja aparatur. Kedisiplinan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja baik dalam pelaksanaan tugas pembangunan daerah maupun pelayanan publik; dan
- 3) Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan yang belum dapat terpenuhi secara menyeluruh.

6. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penelitian dan pengembangan yaitu:





- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

7. Pengawasan

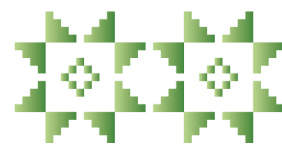
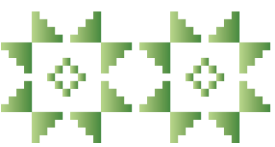
Permasalahan urusan pengawasan meliputi 4 (empat) poin berikut.

- 1) Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
- 2) Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan; dan
- 4) Banyaknya objek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan kuantitas aparatur pengawas yang tersedia.

8. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat meliputi:

- 1) Belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi;
- 2) Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan muktahir pada KESBANGPOL untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- 3) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- 4) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun;
- 5) Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada KESBANGPOL;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur KESBANGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- 8) Terbatasnya anggaran yang berpotensi tidak tercapainya target kinerja pada KESBANGPOL.

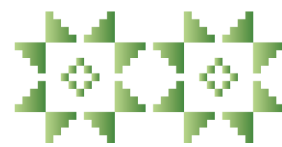
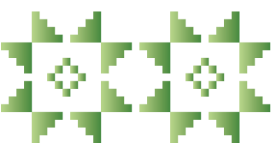




9. Urusan Kewilayahan

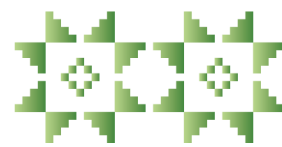
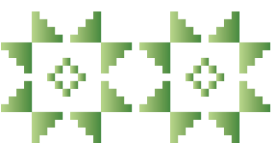
Urusan kewilayahan di Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan, yang masing-masing kecamatan memiliki permasalahan yang berbeda. Permasalahan urusan kewilayahan ialah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Batu Ampar terhadap prosedur pelayanan;
- 2) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Batu Ampar sering terkendala Keterlambatan Penerbitan Kartu KK, Akte Kelahiran dan KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan dikarenakan Pencetakan tidak dilakukan di Kecamatan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan prosesnya yang agak lama;
- 3) SDM aparatur Pada Kantor Kecamatan Batu Ampar yang belum memadai;
- 4) Kasubbag dan Kasi di Kecamatan Batu Ampar belum mengikuti Diklatpim;
- 5) Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan Danau Sembuluh;
- 6) Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen;
- 7) Sarana dan prasarana di Kecamatan Danau Sembuluh yang kurang memadai;
- 8) Infrastruktur wilayah dan pedesaan yang belum memadai;
- 9) Terbatasnya anggaran dalam menunjang pelaksanaan program;
- 10) Dengan Adanya Fasilitas dan Mediasi oleh Pihak Kecamatan Danau Sembuluh Yang Intensif serta mengedepankan semangat kekeluargaan diharapkan berkurangnya permasalahan sengketa Lahan;
- 11) Makin tingginya kesadaran masyarakat Danau Sembuluh akan pentingnya administrasi kependudukan;
- 12) Masih kurangnya fungsi koordinasi desa – desa di wilayah Kecamatan Hanau;
- 13) Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai;
- 14) Ketersediaan dana yang masih minim dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Hanau;
- 15) Kurang Kapasitas aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;



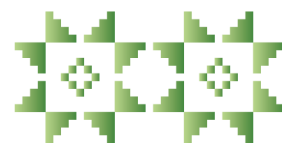
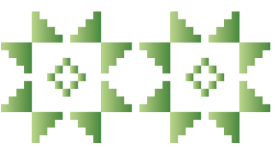


- 16) Kondisi geografis yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten sehingga cukup menghambat dalam melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi;
- 17) Belum tersedianya jalur transportasi yang memadai, khususnya jalur transportasi darat menuju ibu kota kecamatan untuk desa – desa di Kecamatan Hanau;
- 18) Masih kurangnya fungsi koordinasi desa – desa di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu;
- 19) Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Seruyan Hulu yang tersedia masih kurang memadai;
- 20) Ketersediaan dana yang masih minim dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Seruyan Hulu;
- 21) Kurang Kapasitas aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;
- 22) Kondisi geografis yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten sehingga cukup menghambat dalam melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi;
- 23) Belum tersedianya jalur transportasi yang memadai, khususnya jalur transportasi darat menuju ibu kota kecamatan untuk desa – desa di Kecamatan Seruyan Hulu;
- 24) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah Kecamatan Seruyan Raya;
- 25) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 26) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip;
- 27) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- 28) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 29) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- 30) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 31) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- 32) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
- 33) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- 34) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- 35) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;



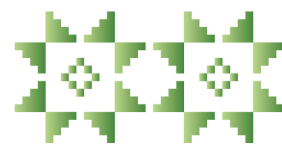
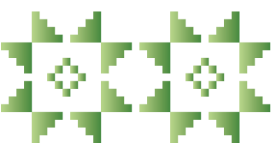


- 36) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil Kecamatan Seruyan Raya;
- 37) Masih terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Seruyan Tengah;
- 38) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Seruyan Tengah yang belum memadai;
- 39) Ketersedian dana yang masih belum memadai untuk seluruh program/kegiatan Kecamatan Seruyan Tengah;
- 40) Sering adanya perubahan aturan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- 41) Masih banyak masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah yang berstatus sebagai penerima bantuan sosial yang belum terakomodir pada data Dinas Sosial;
- 42) Masih banyak terdapat SDM perangkat desa di Kecamatan Seruyan Tengah yang belum memahami peraturan- peraturan yang berkaitan dengan Desa;
- 43) Tidak adanya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasional ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Seruyan Tengah;
- 44) Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Suling Tambun yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- 45) Kurangnya jumlah anggaran dan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Suling Tambun sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
- 46) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan Suling Tambun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
- 47) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan Suling Tambun sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- 48) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kecamatan;
- 49) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan Suling Tambun;
- 50) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Kecamatan Suling Tambun tentang kebijakan pemerintah Kabupaten;





- 51) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan Paten;
- 52) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Danau Seluluk sering terkendala Keterlambatan Penerbitan Kartu KK, Akte Kelahiran dan KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan dikarenakan Pencetakan tidak dilakukan di Kecamatan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan prosesnya yang agak lama;
- 53) Sarana prasarana Internet mengalami kerusakan sehingga mengganggu kinerja dan pelayanan Paten;
- 54) Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Seruyan Hilir memiliki kemampuan IT;
- 55) Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
- 56) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
- 57) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Seruyan Hilir sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
- 58) Kurangnya ketersediaan SDM aparatur Kecamatan dan Desa;
- 59) Masih kurangnya fungsi koordinasi desa-desa di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- 60) Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai;
- 61) Ketersediaan dana yang masih minim dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- 62) Masih banyaknya permasalahan/konflik pertanahan di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur, baik antar perorangan dalam masyarakat, maupun antar masyarakat dengan pihak pengelola perkebunan;
- 63) Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ;
- 64) Sebagian besar anggota BPD kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di desa;
- 65) Kurangnya kesejahteraan Perangkat desa, Ketua RT dan RW di lingkungan desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;





- 66) Jalur transportasi darat yang kurang memadai, khususnya pada saat musim penghujan menuju ibu kota kecamatan; dan
- 67) Pengembangan komoditas unggulan berbasis komoditas unggulan lokal masih belum signifikan.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Internasional

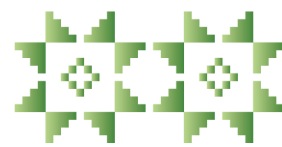
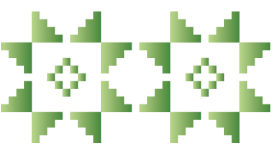
Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran. Intervensi dan penanganan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut dan isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak atau potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas, dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan yang lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertikal).

Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang. Oleh sebab itu, perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam suatu perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya.

1. Kemiskinan Global

Kemiskinan global adalah masalah kompleks dan mendalam yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemiskinan global merupakan kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks pendapatan, kemiskinan ditunjukkan dengan keluarga hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya di seluruh dunia. Beberapa negara atau wilayah





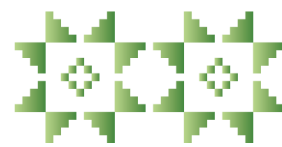
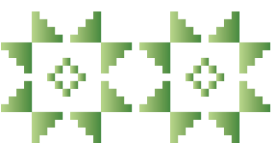
memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan global, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Ketidaksetaraan gender juga berperan dalam memperburuk kemiskinan bagi perempuan di banyak bagian dunia. Kemiskinan memiliki dampak yang merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampaknya meliputi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Ini juga dapat memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kondisi kemiskinan global ditunjukkan pada data Bank Dunia pada tahun 2021, lebih dari 9% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari. Selain itu, kemiskinan global tidak merata secara geografis. Beberapa wilayah di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Timur Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Di Afrika Sub-Sahara, sekitar 41% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Di Asia Selatan, sekitar 15% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (Bank Dunia). Data kemiskinan lainnya yakni pada tahun 2020, sekitar 9,2% anak di dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2020, 1% teratas populasi dunia memiliki lebih dari 33% dari seluruh kekayaan dunia, sementara 50% terbawah hanya memiliki sekitar 2% dari kekayaan global (Oxfam).

Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mencakup penurunan kemiskinan global sebagai salah satu target utama. Kemiskinan global masih menjadi tantangan besar di masa depan, terutama mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan global.

2. Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi merupakan periode ketika aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan. Resesi sering kali





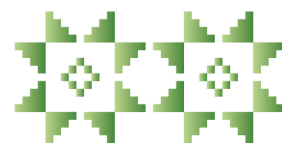
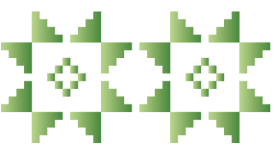
menyebabkan masalah ekonomi seperti peningkatan pengangguran, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakpastian ekonomi secara umum. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor global atau regional yang mempengaruhi banyak ekonomi di seluruh dunia. Resesi ekonomi sering kali dipicu oleh peristiwa atau faktor-faktor global, seperti krisis keuangan global, penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas global, atau ketidakstabilan mata uang internasional. Resesi semacam ini dapat menyebar ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Penurunan permintaan dan investasi global dapat memiliki dampak luas pada perekonomian yang terhubung secara global.

Negara-negara yang terkena resesi sering mengalami penurunan dalam ekspor dan pertumbuhan ekonomi domestik mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan finansial. Dalam menghadapi resesi ekonomi, kerja sama antar negara dalam mengambil tindakan kebijakan menjadi penting. Negara-negara dapat berusaha untuk mengkoordinasikan stimulus ekonomi dan tindakan lainnya untuk meminimalkan dampak resesi. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial dan saran kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak resesi ekonomi internasional.

Durasi dan keparahan resesi internasional dapat bervariasi. Beberapa resesi mungkin singkat dan diikuti oleh pemulihan yang cepat, sementara yang lain dapat berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih serius. Contoh nyata dari resesi ekonomi yakni Krisis Keuangan Asia 1997, Krisis Keuangan Global 2008, dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Semua ini adalah contoh-contoh situasi di mana faktor-faktor global mempengaruhi perekonomian banyak negara secara bersamaan.

3. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu





keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

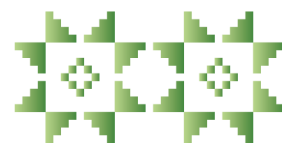
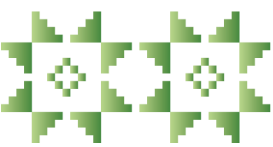
Melalui *Paris Agreement to The United Nations Framework Conservation on Climate Change* atau Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahwa negara G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, peran daerah Kabupaten Seruyan penting dalam berkontribusi melaksanakan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

4. Isu Geopolitik dan Stabilitas Regional

Isu geopolitik dan stabilitas regional terkait dengan friksi atau gesekan antar negara yang terkait dengan ancaman. Perang dan konflik, yang terkini salah satunya adalah invasi Rusia ke Ukraina, menjadi perhatian karena mengganggu suplai energi dan pangan secara global. Apabila perang Rusia dan Ukraina berlangsung jangka panjang, tentunya akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Adapun pengaruh perang yaitu akan terjadinya ketidakstabilan harga minyak dunia yang meroket, terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah dan ekspor impor yang terganggu. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan. Selain itu, perang dapat mendorong negara lainnya mencari instrumen militer, sehingga dapat meningkatkan ketegangan antarnegara yang dapat memungkinkan adanya konflik atau perang di masa depan.

5. Perubahan Demografi Global

Perubahan demografi global adalah transformasi dalam struktur dan karakteristik populasi dunia. Hal ini mencakup perubahan dalam jumlah, usia, jenis kelamin, distribusi geografis, dan komposisi etnis serta faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi penduduk secara global. Perubahan demografi ini



memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi global saat ini berjumlah lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal ini memberikan tantangan dalam penyesuaian antara kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dengan sumber daya yang terbatas.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhannya terus melambat. Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa pada tahun 2030 dan 2045. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan rata-rata harapan hidup orang saat lahir meningkat. Terkait proporsi demografi seperti kelompok penduduk usia tua (*aging population*) yang dan jumlah penduduk usia muda yang meningkat akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.



Gambar 3.1. Isu-Isu Strategis Internasional

Dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045

3.2.2. Isu Nasional

Dalam posisinya, isu-isu strategis di Kabupaten Seruyan dirumuskan terkait dengan konteks Kabupaten Seruyan dalam konstelasi regional dan posisinya secara nasional. Isu strategis tersebut disintesis berdasarkan pembacaan situasi dan kondisi terkini. Di tingkat nasional, isu-isu strategis tertuang dalam Perencanaan jangka panjang Nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi



segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Daftar isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Isu Strategis Nasional

No.	Isu dan Tantangan	Kategori Isu
1.	Produktivitas rendah	Ekonomi
2.	Kemiskinan	
3.	Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah	
4.	Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi	
5.	Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat	
6.	Angka ketergantungan meningkat	Sosial Budaya
7.	Pembangunan kesehatan yang belum optimal	
8.	Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan	
9.	Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia,	
10.	Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel	Tata Kelola
11.	Belum meratanya kualitas pelayanan publik	
12.	Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar	
13.	Pembangunan infrastruktur yang masih rendah	Infrastruktur
14.	Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa	
15.	Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau,	
16.	Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.	Lingkungan
17.	Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,	
18.	Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	
19.	Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.	
20.	Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)	

Sumber: Dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045



Berdasarkan dokumen RPJP Nasional terdapat sepuluh megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global berpotensi mengembangkan kondisi sosial ekonomi global, namun dapat memberikan disrupsi. Berikut ini merupakan megatren global menuju 2045.

1. Perkembangan Demografi Global

- Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar
- Porsi LANSIA meningkat

2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi

- Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru
- Nilai *output* negara berkembang mencapai 71%

3. Disrupsi teknologi

- Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

- Penduduk perkotaan 65%
- Peranan PDB 70%

5. Peningkatan Peran Perdagangan Internasional

- Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun

6. Perubahan Keuangan Internasional

- Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies

7. Peningkatan Penduduk Kelas Menengah

- Jumlah *middle* dan *upper income class* lebih dari 90% (8,8 miliar)

8. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam

- Peningkatan peranan ekonomi asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA

9. Perubahan Iklim

- Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

- Ekonomi Antariksa
- Kelestarian Antariksa
- Keamanan Antariksa



Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 memiliki visi:

“Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Transformasi Indonesia

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola

2. Landasan Transformasi

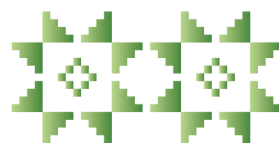
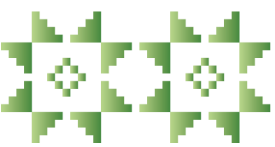
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

3. Kerangka Implementasi Transformasi

- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Selanjutnya, kedelapan misi (agenda) tersebut dijabarkan atau dilaksanakan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan yang meliputi sebagai berikut.

1. Kesehatan untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Intergrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
10. Stabilitas Ekonomi Makro;
11. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;





12. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
13. Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; dan
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

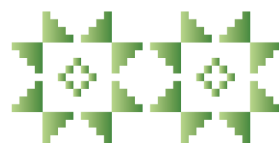
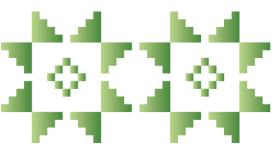
Isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi isu hangat yang diperbincangkan, dimana isu utamanya adalah beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat dalam berbagai aspek terutama ekonomi, sosial dan lingkungan. Diketahui separuh kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari Provinsi di Pulau Jawa dan sisanya baru provinsi lain. Jika 20 tahun kedepan arah pembangunan akan difokuskan pada Ibu Kota Indonesia berada di Kalimantan Timur tentu saja berdampak positif bagi Kabupaten Seruyan sebagai **Pintu Gerbang Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera** dan dapat diperhitungkan dengan keberadaannya pada tatanan Provinsi Kalimantan Tengah maupun regional Kalimantan secara umum.

3.2.3. Isu Regional Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana pembangunan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam RPJPD tahun 2025-2045 terdapat dalam visi daerah yakni **“KALTENG TANGGUH”**. Visi tersebut mengharapkan Kalimantan Tengah Menuju Provinsi Tangguh yang Bangkit, Melaju, Terarah, dan Berkelanjutan. Pemerintah Kalimantan Tengah sedang merajut mimpi masyarakat Provinsi Kalimantan tengah menjadi Provinsi Tangguh Tahun 2045. Provinsi Tangguh berakar dari semboyan **“Menteng Ureh Mamut”** yang berarti Seseorang yang Gagah Berani dan Pantang Menyerah.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif;
2. Melakukan Transformasi Ilmu Pengetahuan Pendukung Pembangunan;
3. Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Bermartabat;
4. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Global;





5. Meningkatkan Resiliensi Daerah terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Pengurangan Laju serta Dampak Perubahan Iklim.

Dari visi dan kondisi riil di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat isu-isu strategis yang terdiri atas pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah, pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, pandemi COVID-19, ketenteraman dan ketertiban berbasis pemberdayaan modal sosial masyarakat, pemekaran wilayah, angka stunting, fasilitas kesehatan, *corporate education* dalam manajemen ASN, dan tumpang tindih lahan.

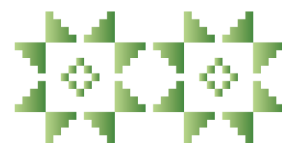
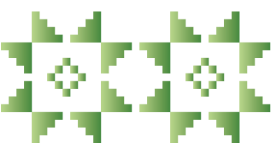
Selain isu-isu tersebut, terdapat beberapa isu lain di Pulau Kalimantan yang perlu menjadi perhatian bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Seruyan dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Ibu Kota Nusantara

Narasi pemindahan Ibu Kota Nusantara telah santer terdengar dalam beberapa tahun terakhir dan pada tahun 2019, pemerintah mengumumkan bahwa rencana pemindahan ibu kota akan dilaksanakan dengan lokasi ibu kota baru berada di Pulau Kalimantan. Kehadiran ibu kota baru di Pulau Kalimantan menjadi isu yang strategis mengingat berbagai program dan sasaran kebijakan akan banyak mengarah ke wilayah ini termasuk di dalamnya infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan isu lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan konsep utama pengembangan ibu kota yang bertumpu pada tiga pilar yakni *forest city*, *sponge city*, dan *smart city*.

Pemerintah merancang Ibu Kota Nusantara untuk tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, simbol negara, dan pusat pelayanan publik, namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah timur Indonesia. Sebagai dampak turunannya, Ibu Kota Nusantara akan berkembang menjadi *growth pole* baru yang berdampak tidak hanya ke arah timur melainkan ke seluruh arah.

Berdasarkan RPJPN 2025-2045, kehadiran Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan diharapkan mendorong wilayah ini untuk menjadi super hub ekonomi. Kekayaan sumber daya alam, ketahanan bencana, dan modal sosial budaya masyarakat tempatan menjadi pilar penting yang nanti dapat mendukung rencana





tersebut. Kehadiran super hub ekonomi di Pulau Kalimantan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah secara signifikan.

2. Pemekaran provinsi atau wilayah baru

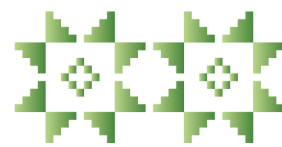
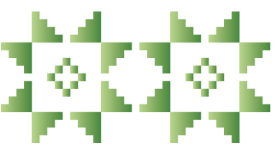
Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, secara khusus Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah mengajukan permohonan pemekaran mengingat luas dan kompleksitas wilayah yang dihadapi sangat tinggi. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memiliki luas 153.000-kilometer persegi atau 1,5 kali lebih besar dari Pulau Jawa dan terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 kota. Rencana pengembangan dan pemekaran provinsi Kalimantan Tengah mulai digalakan dan digodok dari tahun 2021 dan apabila telah disetujui maka akan ada dua usulan provinsi baru yakni Provinsi Kotawaringin yang terdiri dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara dan Provinsi Provinsi Barito Raya yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.

Kehadiran provinsi baru akan meningkatkan tuntutan dan tantangan otonomi bagi daerah untuk dapat memenuhi kewajiban urusan pemerintahan. Daerah-daerah Otonom Baru (DOB) juga harus dapat meningkatkan kinerja daerah termasuk untuk infrastruktur, sarana prasarana dan SDM, maupun menggali sektor-sektor potensial, termasuk sektor perdagangan lintas wilayah. Kekayaan sumber daya alam, komoditas pertanian unggulan, pariwisata dan turunannya, mesti dikelola dengan lebih baik.

3.2.4. Isu Regional Kabupaten Seruyan

1. Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

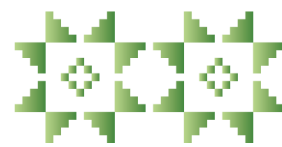
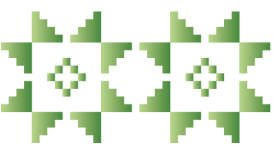
Perencanaan tata ruang di Kabupaten Seruyan harus mempertimbangkan berbagai elemen dalam ruang, termasuk aspek fisik, ekologi, serta aspek sosial dan budaya. Rencana tata ruang ini tidak hanya menyangkut susunan dan pola ruang semata, tetapi juga perlu dirancang untuk mengatasi berbagai isu dan masalah yang terkait dengan elemen-elemen tersebut di Kabupaten Seruyan. Pendekatan ini menjadi fokus utama dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Isu-isu dalam penataan ruang yang dipertimbangkan memiliki nilai strategis dirangkum dalam 10 (sepuluh) poin berikut.





1. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Potensi dan obyek wisata belum dikembangkan secara optimal;
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
4. Potensi pertambangan dan perkebunan yang cukup besar;
5. Kabupaten Seruyan memiliki bentuk memanjang dari utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Pegunungan Schwaner hingga ke selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Bagian utara merupakan kawasan berbukit hingga bergunung. Dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif minim antar kecamatan, sangat nyata perbedaan perkembangan antara bagian selatan dengan bagian utara (sangat terisolir);
6. Terdapatnya kawasan rawan bencana alam, berupa abrasi pantai, tanah longsor dan banjir. Daerah rawan banjir khususnya terdapat di bagian selatan karena merupakan dataran rendah dan sebagian besar terdiri dari daerah rawa, sehingga rawan banjir;
7. Rawan konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan kepentingan menjaga kawasan hutan, seperti Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Lindung (HL);
8. Tinggi tuntutan masyarakat kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten agar secepatnya menyediakan barang-barang publik berupa jalan dan jembatan. Apabila lambat direspon maka kepercayaan terhadap pejabat daerah termasuk anggota legislatif semakin turun;
9. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai tempat usaha tani maupun usaha lainnya, karena tanah-tanah mereka sudah terlajur di manfaatkan oleh perusahaan perkebunan; dan
10. Permasalahan tata batas baik tata batas kawasan hutan maupun tata batas wilayah administrasi (mulai dari desa, kecamatan maupun batas kabupaten).

Berdasarkan 10 isu strategis tersebut, penataan ruang Kabupaten Seruyan secara umum bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan yang Maju dan Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. Secara khusus penataan ruang di Kabupaten Seruyan diarahkan pada 9 (sembilan) poin berikut.

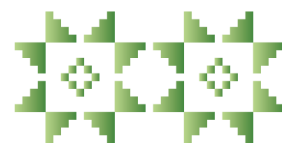
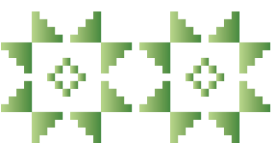




1. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
2. Mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
3. Meningkatkan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya;
4. Penyinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
5. Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
6. Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
7. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
9. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi.

2. Telaah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan hasil penjaringan isu pembangunan di Kabupaten Seruyan dihasilkan daftar isu pembangunan sebanyak 30 isu pembangunan yang diperoleh berdasarkan kajian dokumen terkait dan konsultasi publik. Berikut daftar panjang isu pembangunan Kabupaten Seruyan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.





Tabel 3.2. Daftar Panjang (Long List) Penjaringan Isu Pembangunan di Kabupaten Seruyan

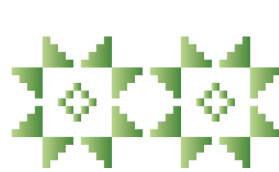
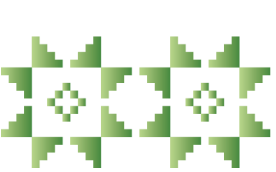
No	Isu Strategis
1	Kebakaran lahan gambut
2	Abrasi laut pengelolaan laut
3	Pendangkalan sungai karena usaha non kehutanan
4	Taman Nasional Tanjung Puting menjadi pendukung pengembangan ekonomi di Kabupaten Seruyan
5	Banjir
6	Kendala memprediksikan terjadinya banjir karena pusat data kurang lengkap seperti data curah hujan, debit air. Hal tersebut dikarenakan belum adanya posko curah hujan sepanjang sungai
7	Alih fungsi lahan, daerah irigasi sudah banyak alih fungsi dari sawah ke lahan perkebunan sawit
8	Kondisi jaringan jalan 22,83% kondisi baik, 17,23% kondisi sedang, 7,42% kondisi rusak ringan, 52,51% kondisi rusak berat
9	Salah satu kendala dalam perbaikan jalan yaitu pada lahan gambut dan medan yang terjal di daerah dataran tinggi
10	Infrastruktur air bersih dan pengelolaan air limbah sudah memadai (1 PDAM, 6 SPAM) dan 1 IPAL belum berfungsi
11	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan drainase
12	Pengelolaan swakelola air bersih masyarakat kurang
13	Promosi berinvestasi belum optimal
14	Belum ada katalog investasi terkait pembangunan apa yang perlu dibangun dengan melibatkan swasta. Baru beberapa sektor yang menginputkan/mengusulkan kebutuhan pembangunan seperti sektor kesehatan yang mengusulkan rumah sakit, apotek, klinik, sektor pertanian seperti pabrik beras. Masih banyak sektor yang belum menginputkan/menyarankan terkait kebutuhan pembangunan yang diperlukan
15	Pengembangan ekonomi lokal
16	Adanya rencana pembangunan pakan ikan dengan memanfaatkan bungkil sawit untuk diolah menjadi pakan ikan yang berada di daerah tengah. Pakan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pakan ikan di daerah hilir. Pengembangan tersebut dapat memicu interaksi antara hulu dan hilir
17	Polemik plasma hutan yaitu antara pemilik usaha perkebunan dan masyarakat setempat
18	Akses ke Pelabuhan Segitung masih rusak sehingga pelabuhan kurang diminati untuk pengedaran barang jenis seperti CPO
19	Penurunan produktivitas tanaman pangan. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain berkurangnya sawah pertanian karena alih fungsi lahan, alat mesin pertanian (ARSINTA) masih belum seimbang/belum merata
20	Potensi terjadinya bencana alam seperti kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dengan adanya aktivitas dari pengelolaan SDA
21	Masih sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang layak



No	Isu Strategis
22	Masih belum terlayannya pengelolaan persampahan dikarenakan jauhnya akses dengan tempat pengelolaan akhir sampah (TPA)
23	Perubahan fungsi hubungan/lahan yang dapat mengakibatkan bencana alam
24	Kesenjangan sosial antara perusahaan dan masyarakat
25	<i>Illegal logging</i>
26	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
27	Pertambangan tanpa izin
28	Isu banjir di Kabupaten sudah menjadi polemik musiman, karena kejadian banjir berulang terjadi pada musim penghujan panjang di lokasi yang sama. Penduduk yang notabenenya adalah penduduk asli, bermukim di bantaran sungai karena pada jaman dulu akses utama hanya melalui sungai dengan perahu. Adapula lokasi tersebut seringkali terletak pada daerah cekungan sehingga menjadi tempat bermuaranya air luapan dari hulu sungai maupun limpasan dari dataran lebih tinggi. Sudah pernah dilakukan sosialisasi dan pengkajian untuk relokasi permukiman warga tetapi terkendala dari segi ketersediaan lahan karena Kabupaten Seruyan didominasi penggunaan lahan hutan (tidak boleh menjadi permukiman) serta maraknya peralihan lahan menjadi perkebunan yang kemudian menjadi kepemilikan swasta. Warga yang terdampak banjir (tahun 2020 dan 2022) mengungsi ke rumah keluarga yang aman dari banjir. Banjir terparah diketahui sampai setinggi atap rumah di Kecamatan Danau Sembuluh dan setinggi 60 cm di Kecamatan Seruyan Hulu dengan rata-rata lama genangan hingga 6-12 hari
29	Karhutla yang terjadi di Kabupaten Seruyan umumnya terjadi pada musim kemarau panjang, yang membuat ladang perkebunan maupun semak belukar menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Adapaun penyebab dari kejadian karhutla ini diantaranya adalah pembakaran yang disengaja oleh pemilik lahan untuk sekedar membersihkan semak yang sudah terlalu tinggi maupun sebagai persiapan untuk pembukaan lahan perkebunan. BPBD sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya dampak dari karhutla kepada masyarakat di tiap kecamatan secara rutin tiap tahun dengan didampingi kejaksaaan. Akan tetapi, masih ada saja masyarakat yang tetap melakukan pembakaran dengan dalih metode tersebut sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Hal ini mungkin dapat dihindari jika lahan yang ada masih dapat dimanfaatkan pada musim kemarau panjang, sehingga tidak perlu dilakukan pembakaran untuk membersihkan rumput semak maupun saat persiapan untuk pembukaan lahan.
30	Diketahui bahwa kekeringan terjadi di Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Raya, dan Kecamatan Batu Ampar pada saat musim kemarau panjang. Untuk alternatif air bersih masyarakat menggunakan sumur bor dan air sungai untuk keperluan sehari-hari saat kekeringan. Masyarakat biasa mendoat bantuan pengisian air tandon dari pos BPBD Kecamatan yang juga bekerja sama dengan pihak perkebunan yang memiliki fasilitas pengolahan air bersih. Perihal bencana kekeringan, BPBD belum dapat melakukan penanggulangan karena belum ada yang melakukan pelaporan/ pendataan secara resmi, sehingga tidak ada data pasti untuk penyusunan program.

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Hasil dari pengelompokan tersebut kemudian mengerucut menjadi 7 (tujuh) isu pembangunan atau dikategorikan sebagai daftar pendek (shortlist). Beberapa isu pembangunan shortlist tersebut diantara lain sebagai berikut.





Tabel 3.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Seruyan

No	Isu Pembangunan	Nilai Strategis
1	Pendangkalan sungai karena usaha non kehutanan	Cukup Strategis
2	Infrastruktur air bersih dan pengelolaan air limbah sudah memadai (1 PDAM, 6 SPAM) dan 1 IPAL belum berfungsi	Strategis
3	Penurunan produktivitas tanaman pangan. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain berkurangnya sawah pertanian karena alih fungsi lahan, alat mesin pertanian (ARSINTA) masih belum seimbang/belum merata	Cukup Strategis
4	Perubahan fungsi hutan/lahan yang dapat mengakibatkan bencana alam	Cukup Strategis
5	Kesenjangan sosial dan ekonomi antara perusahaan dan masyarakat	Cukup Strategis
6	Pertambangan tanpa izin	Kurang Strategis
7	Karhutla yang terjadi di Kabupaten Seruyan umumnya terjadi pada musim kemarau panjang, yang membuat ladang perkebunan maupun semak belukar menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Adapaun penyebab dari kejadian karhutla ini diantaranya adalah pembakaran yang disengaja oleh pemilik lahan untuk sekedar membersihkan semak yang sudah terlalu tinggi maupun sebagai persiapan untuk pembukaan lahan perkebunan. BPBD sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya dampak dari karhutla kepada masyarakat di tiap kecamatan secara rutin tiap tahun dengan didampingi kejaksaaan. Akan tetapi, masih ada saja masyarakat yang tetap melakukan pembakaran dengan dalih metode tersebut sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Hal ini mungkin dapat dihindari jika lahan yang ada masih dapat dimanfaatkan pada musin kemarau panjang, sehingga tidak perlu dilakukan pembakaran untuk membersihkan rumput semak maupun saat persiapan untuk pembukaan lahan.	Cukup Strategis

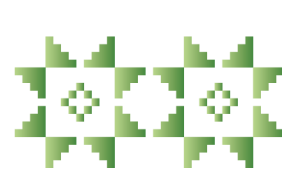
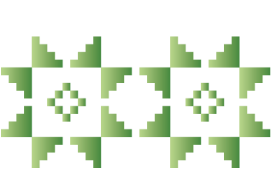
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Seruyan

Isu strategis Kabupaten Seruyan dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan hasil sintesis dari berbagai masalah dan potensi yang bisa menjadi peluang di masa mendatang. Dokumen ini mencakup isu-isu yang relevan dari tingkat internasional hingga level provinsi, termasuk evaluasi hasil pembangunan dari RPJPD sebelumnya serta masalah yang muncul dari berbagai bidang urusan. Tujuannya adalah merumuskan fokus perencanaan pembangunan untuk jangka waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan berbagai dokumen yang relevan.

1. Aksesibilitas

Kualitas akses yang baik sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas ini merupakan faktor kunci dalam membangun wilayah secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, aksesibilitas tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan,





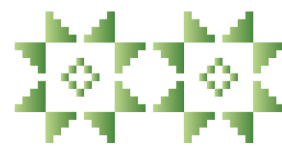
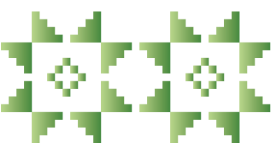
atau transportasi umum, tetapi juga termasuk kemudahan akses terhadap air bersih. Semua ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan penduduk untuk mencapai pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Tanpa aksesibilitas yang memadai dalam infrastruktur, banyak orang dapat terpinggirkan dari peluang ekonomi dan sosial yang ada.

Kabupaten Seruyan memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata namun masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas. Isu aksesibilitas menjadi isu strategis mengingat pencapaian target indeks aksesibilitas yang baru tercapai 36,78% pada tahun 2022. Selain itu, kondisi jalan juga menjadi pertimbangan dari isu ini mengingat prosentase jalan dalam keadaan baik dan desa yang terhubung berturut-turut baru tercapai sebesar 22,6% dan 2,95% pada tahun 2022.

Sarana transportasi yang terbatas dan infrastruktur yang belum merata menjadi faktor utama yang membatasi konektivitas dan mobilitas di wilayah ini. Meningkatkan aksesibilitas dapat menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada serta memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara menyeluruh. Dengan strategi yang tepat dalam peningkatan aksesibilitas, Kabupaten Seruyan dapat membuka peluang yang lebih luas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Infrastruktur layanan publik

Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas yang berkualitas, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan. Melalui desain infrastruktur yang cermat, kita dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik merupakan salah satu hal krusial dalam mendorong perkembangan Kabupaten Seruyan. Wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang mendukung layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang merata, serta infrastruktur dasar yang memadai menjadi perhatian utama. Dengan meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, Kabupaten Seruyan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan





layanan yang diperlukan, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial yang inklusif.

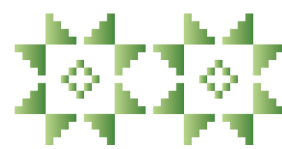
3. Tata kelola sumber daya alam dan lingkungan

Tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang baik adalah fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan Kabupaten Seruyan. Dalam mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kabupaten Seruyan, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, membutuhkan tata kelola yang bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan serta sumber daya alamnya. Melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, upaya perlindungan lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Pentingnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan ini tidak hanya mencakup aspek konservasi, tetapi juga menyangkut pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan membantu Kabupaten Seruyan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, menjaga ekosistem yang vital, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi penduduknya.

Isu ini muncul mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Seruyan selama periode RPJPD sebelumnya belum mencapai target. Dari target IKLH 79,40, Kabupaten Seruyan baru mencapai 68,71 atau 86,53 persennya. IKLH menjadi salah satu indikator yang cukup representatif sebab salah satu isu dan potensi yang dimiliki Kabupaten Seruyan adalah sumber daya lahan yang banyak diokupasi oleh perkebunan sawit. Selain itu, Kabupaten Seruyan memiliki kawasan-kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi yakni Danau Sembuluh dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Putting dan berada dekat dengan Taman Nasional Sebangau. Oleh sebabnya, pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai salah satu elemen tata kelola lingkungan perlu menjadi perhatian.

4. Ketahanan Daerah

Membangun ketahanan daerah yang tangguh di Kabupaten Seruyan sangat penting untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata, tetapi



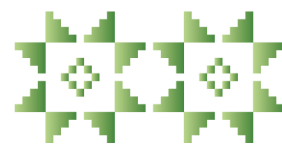
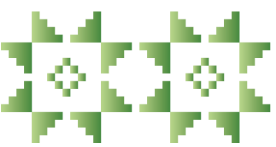


juga rentan terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan faktor luar lainnya. Melalui perlindungan lingkungan, diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur yang kokoh, dan pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Seruyan dapat mengurangi risiko yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan masa depan. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 beberapa indikator yang terkait langsung dengan ketahanan daerah di Kabupaten Seruyan masih perlu dioptimalkan. Indeks Ketahanan Daerah baru mencapai angka 0,4 dengan klasifikasi rendah di mana dari berbagai elemen ketahanan daerah di Kabupaten Seruyan, aspek pengkajian risiko dan perencanaan terpadu menjadi aspek dengan nilai paling rendah. Selain itu dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Kabupaten Seruyan memiliki skor 62,55 dengan predikat agak tahan. Isu ketahanan daerah juga menjadi krusial mengingat tantangan multi dimensi dari berbagai sektor dapat menjadi ancaman meliputi antara lain perubahan iklim, konflik sosial, hingga stabilitas politik regional.

5. Daya saing daerah

Peningkatan daya saing Kabupaten Seruyan menjadi aspek strategis dalam menghadapi dinamika global serta memaksimalkan potensi lokal. Wilayah ini memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata, namun memerlukan upaya strategis untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam era yang terus berkembang, upaya untuk meningkatkan infrastruktur, inovasi teknologi, akses pasar yang lebih luas, serta pengembangan SDM yang berkualitas menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah. Upaya lainnya dapat berupa pengembangan kawasan strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pusat kegiatan. Optimalisasi pusat kegiatan dan pusat pelayanan memiliki urgensi dalam pemerataan layanan dasar dan aktivitas ekonomi antar kawasan. Kawasan strategis Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Seruyan dapat menempatkan dirinya di panggung yang lebih kompetitif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakatnya.



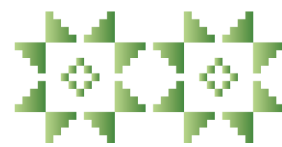
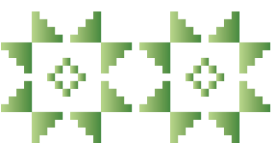


6. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di Kalimantan, telah didorong oleh sektor-sektor perkebunan besar dan pertambangan. Meskipun begitu, masih ada potensi besar dalam industri pariwisata yang belum dioptimalkan. Masalahnya terletak pada kurangnya industri yang dapat mengelola sumber daya alam secara efektif, meskipun ekstraksi sumber daya tersebut terus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Seruyan telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, tantangan muncul terkait pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dan kebutuhan akan industri yang mampu mengelola secara efisien potensi yang ada. Melalui pemahaman dan strategi yang tepat, Kabupaten Seruyan dapat mengembangkan berbagai sektor ekonomi secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan sendiri telah mencapai angka 4.01 pada tahun 2022. Angka tersebut ditopang oleh sektor-sektor primer sebagai sektor yang menyumbang PDRB yang cukup besar. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih dibarengi dengan isu ketimpangan pendapatan di mana indeks gini dari Kabupaten Seruyan mencapai 0,292.

7. Sumber daya manusia

Pentingnya pengembangan manusia semakin ditekankan dalam rencana pembangunan secara keseluruhan, terutama dalam perhatian terhadap peran manusia dalam proses pembangunan. Di Kabupaten Seruyan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama mengingat beberapa tren besar dan dinamika global serta regional yang diharapkan di masa mendatang. Salah satu isu yang muncul adalah bonus demografi pada tahun 2045. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2045 (RPJPN), bonus demografi dipandang sebagai faktor akselerasi pembangunan. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat proses pembangunan. Namun, bonus demografi hanya akan memberikan dampak positif jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber





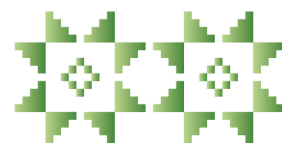
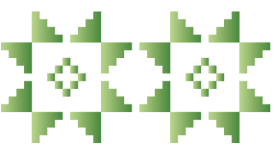
daya manusia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jumlah penduduk juga berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Populasi yang besar menjadi faktor kunci dalam memastikan adanya sumber daya manusia yang berdaya saing dan mendorong aktivitas ekonomi.

Bonus demografi juga membawa tantangan, seperti *middle income trap*. Bonus demografi akan mengubah distribusi usia penduduk, dengan lebih banyak orang usia produktif yang akan menjadi bagian dari kelas menengah dengan pendapatan yang meningkat. Untuk menghindari *middle income trap*, peningkatan signifikan dalam pendapatan diperlukan, dan hal ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sehingga, untuk menghadapi dinamika bonus demografi dan menghindari *middle income trap*, penting bagi Kabupaten Seruyan untuk fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sebagai salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8. Kinerja pemerintahan

Fungsi pemerintah adalah fondasi utama dalam perencanaan serta implementasi pembangunan. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan dan menjalankan rencana pembangunan, pemerintah haruslah dapat diandalkan, transparan, dan dapat dipercaya untuk mengelola berbagai potensi dan tantangan pembangunan yang ada. Dalam menjalankan perannya, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja.

Dalam konteks kinerja pemerintah, dengan kemajuan teknologi yang ada, kehadiran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menjadi modal utama yang memiliki dampak signifikan. Kehadiran TIK secara nyata telah mengubah teknologi yang ada dan secara terus-menerus menghasilkan inovasi baru. Integrasi TIK ke dalam tata kelola pemerintahan memiliki potensi untuk memperkuat fungsi pemerintah dan mempercepat kemampuan pemerintah dalam berinovasi serta menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang pembangunan yang ada. Tidak hanya berkaitan dengan peningkatan teknologi yang digunakan, untuk meningkatkan kinerja pemerintah perlu dilakukan pula peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.





BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

4.1.1. Telaah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Pada tahun 2045, pemerintah Republik Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai **"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"**. Visi nasional tersebut disusun berdasarkan analisis dan kondisi serta tren global yang sudah, tengah, dan akan berlangsung serta digabungkan dengan kondisi serta potensi Indonesia pada masa kini. Selain itu, visi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti kekuatan modal dasar seperti modal manusia, modal budaya, kekayaan alam dan maritim, serta pencapaian pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

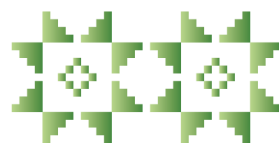
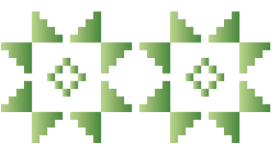
Untuk mencapai visi besar tersebut, pemerintah mencanangkan sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi 5 sasaran utama visi Indonesia yang dijabarkan seperti berikut.

1. Pendapatan per kapita setara negara maju

Sasaran visi ini menggunakan indikator utama pendapatan per kapita dan diharapkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai US\$30.300. Selain itu, sasaran visi ini juga menargetkan Indonesia untuk masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia. Untuk mencapai target tersebut, sektor-sektor yang diharapkan mampu menjadi penggeraknya adalah industri manufaktur dengan target PDB mencapai 28 persen dan sektor kemaritiman dengan PDB sebesar 17.5 persen. Sasaran ini juga hendak mencapai jumlah penduduk berpendapatan menengah mencapai 80 persen.

2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang

Salah satu eksekusi negatif atau luaran yang tak diharapkan (*unintended consequences*) adalah lahirnya ketimpangan. Diharapkan, dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita sebagai buah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan juga dapat ditekan dengan angka kemiskinan menurun di sekitar 0,5 sampai 0,8 persen. Untuk ukuran ketimpangan sendiri, rasio gini yang ditargetkan





adalah 0,29-0,32 dan secara khusus pembangunan di kawasan timur Indonesia mampu menyumbang 28,5 persen PDB.

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Sasaran visi ini terkait dengan kekuatan dan pengaruh Indonesia di kancah geopolitik dan kekuatan diplomasi yang dimilikinya. Selain itu, Indonesia juga ditargetkan untuk semakin menguatkan pengaruh budaya dan peran aktif dalam penyelesaian isu-isu global. Indikator utama yang diharapkan adalah Global Power Index di peringkat 15 besar dunia.

4. Daya saing sumberdaya manusia meningkat

Sumberdaya manusia mendapatkan perhatian tersendiri dalam visi Indonesia 2045 mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi. Untuk menyambut momentum tersebut, Indonesia menargetkan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sikap serta etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan. Untuk mencapai visi tersebut, indikator target yang digunakan adalah Human Capital Index dan ditargetkan mencapai 0,73 pada tahun 2045.

5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Untuk memenuhi visi berkelanjutan, pemerintah Indonesia mencanangkan sasaran visi utama untuk menurunkan emisi GRK dan mencapai *net zero emission*. Untuk mencapainya Indonesia diharapkan meningkatkan proporsi ekonomi hijau. Dalam pelaksanaannya, visi besar dan sasaran visi dieksekusi melalui misi-misi atau agenda pembangunan yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis transformasi yang memperhatikan dua landasan transformasi dan tiga kerangka implementasi transformasi seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Kerangka Implementasi Transformasi RPJPN 2025-2045

Dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045

4.1.2. Telaah Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

Salah satu konsideran dalam perumusan visi Kabupaten Seruyan adalah visi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi arahan pembangunan di daerah tingkat I atau di level provinsi. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dirumuskan visi Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan.



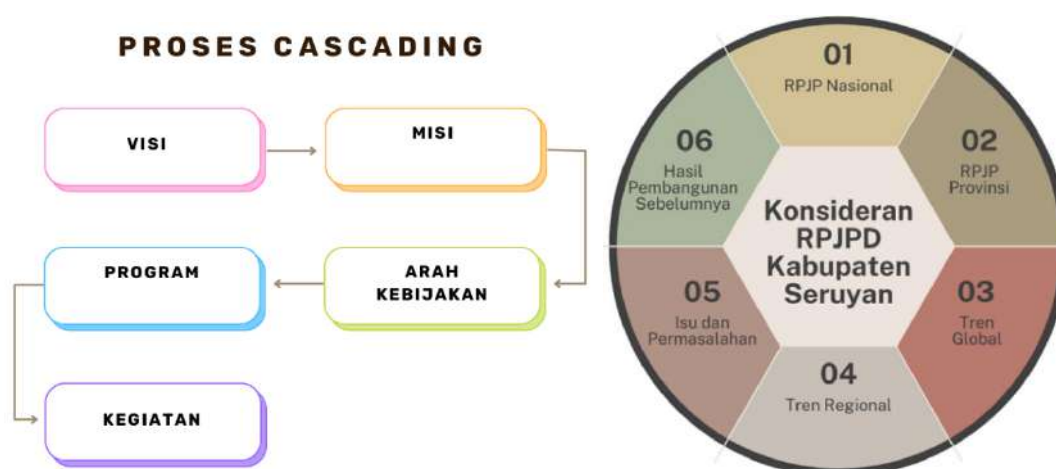
Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan merespon berbagai isu yang terbagi menjadi tiga klaster yakni isu infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan isu sosial-ekonomi-budaya. Dalam pelaksanaannya,

Provinsi Kalimantan Tengah merancang klaster-klaster pertumbuhan ekonomi dari beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.3. Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045

Visi pembangunan, khususnya pada suatu daerah dibutuhkan sebagai suatu arahan umum dan merangkum imajinasi, mimpi, dan cita-cita dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, visi daerah Kabupaten Seruyan menjadi kerangka dan tulang punggung dalam merancang, memilih, dan menentukan berbagai kebijakan hingga eksekusinya di tingkat program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selain juga menjadi dasar pertimbangan penganggaran dan arah kebijakan per lima tahun. Proses penentuan dan pembuatan berbagai program dan perencanaan pembangunan disebut dengan proses *cascading*.

Dalam suatu pembangunan, diperlukan arahan yang merespon isu-isu terkini dalam berbagai level mulai dari level global, level regional, level nasional, hingga level lokal. selain bekerja dalam dimensi keruangan di berbagai skala tersebut, perencanaan pembangunan juga perlu disusun untuk mempertimbangkan aspek-aspek dalam dimensi temporal meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kabupaten Seruyan sebagai suatu wilayah yang terus berkembang dan berbenah perlu mengintegrasikan berbagai macam elemen pembangunan seperti tantangan, potensi, dan permasalahan untuk menyusun suatu perencanaan strategis yang dapat diterapkan. penerapan tersebut juga perlu mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas dari pemerintah daerah yang bersangkutan.



Gambar 4.2. Proses *Cascading* dan Konsideran-Konsideran Visi Kabupaten Seruyan

Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



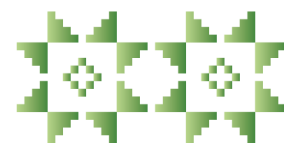
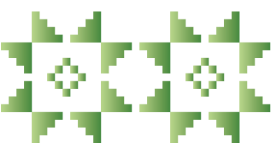
Mengacu kepada berbagai konsideran dalam perumusan visi pembangunan dan memperhatikan berbagai dinamika karakter, dinamika, dan isu strategis yang tertuang di Bab 2 hingga Bab 3 dokumen RPJPD ini, visi pembangunan Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut:

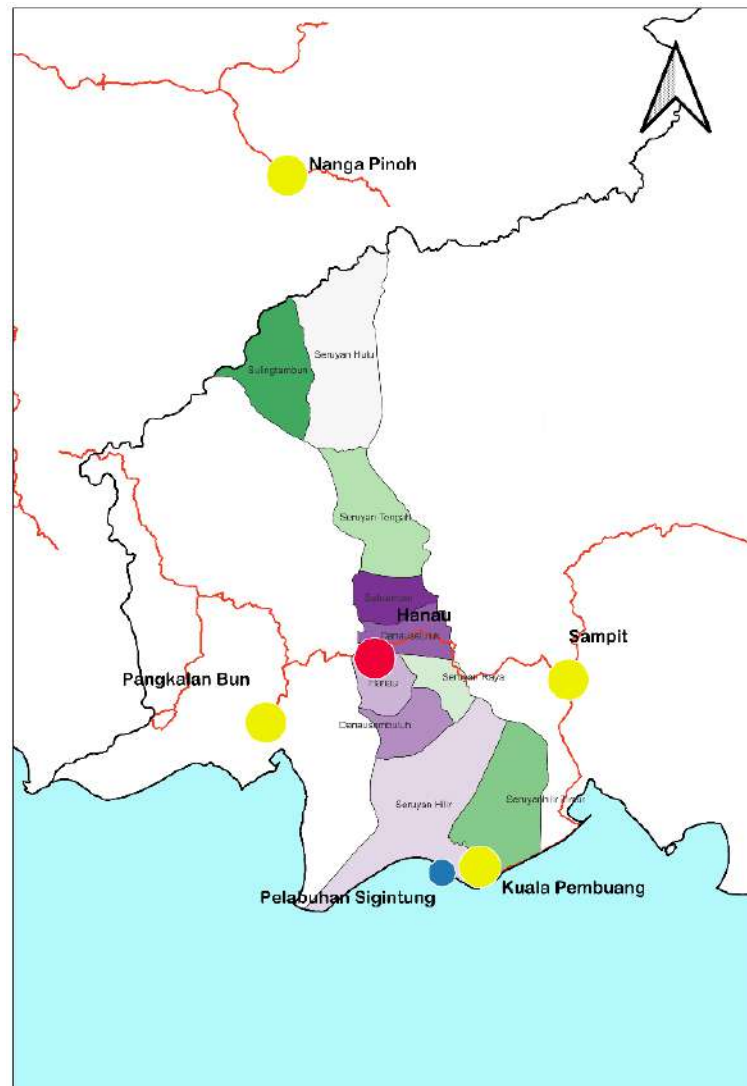
“Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut dirumuskan utamanya memperhatikan isu-isu strategis dan potensi pembangunan yang ada baik di dalam maupun di luar Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Tengah dan secara regional juga berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan bagian selatan. Posisi strategis ini menjadi kunci dalam pembangunan wilayah. Salah satu implikasinya adalah banyaknya kegiatan dan aktivitas yang akan tumbuh di sepanjang akses dan axis Kabupaten Seruyan.

Secara struktur ruang sebagaimana dibahas di Bab II, Kabupaten Seruyan memiliki sumbu memanjang searah utara-selatan dan menjadi salah satu keuntungan strategis yang menghubungkan kawasan dalam Pulau Kalimantan dengan lautan sebagai pintu gerbang masuknya komoditas dan orang. Kabupaten Seruyan sendiri merencanakan hadirnya Pelabuhan Segintung di sisi selatan Kabupaten Seruyan. Sumbu memanjang utara-selatan Kabupaten Seruyan menjadikan kabupaten ini mencapai wilayah perbatasan Kalimantan Barat di mana salah satu pusat kegiatan, Nanga Pinoh sebagai ibukota Kabupaten Melawi dapat dijangkau dan menjadi alternatif interaksi wilayah Kabupaten Melawi selain dengan pusat kegiatan lain di sekitarnya seperti Sintang. Di samping itu, Kabupaten Seruyan dilalui jalan trans-kalimantan yang bersumbu barat-timur dan menjadikan wilayah ini sebagai persilangan antara jalan trans-kalimantan dengan axis kabupaten.

Di antara persilangan tersebut, terdapat beberapa daerah yang, mengacu kepada RTRW Nasional dan Provinsi dijadikan sebagai pusat kegiatan yakni Pangkalan Bun dan Sampit yang dihubungkan oleh jalan trans-kalimantan. Kabupaten Seruyan sendiri juga memiliki salah satu pusat kegiatan dan perekonomian yang terletak di Kecamatan Hanau. Ilustrasi Kabupaten Seruyan sebagai simpul pembangunan wilayah dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.





Gambar 4.3. Ilustrasi Posisi Strategis Kabupaten Seruyan

Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

Berdasarkan posisinya Kabupaten Seruyan memiliki potensi tinggi serta peran strategis di region atau kawasan selatan Kalimantan sisi barat, Kabupaten Seruyan memerlukan arahan dan tema pembangunan yang terdiri atas tema tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Ketiga tema tersebut dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi wilayah serta arahan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dengan demikian, tujuan visi tersebut adalah mewujudkan Kabupaten Seruyan yang maju dan sejahtera.

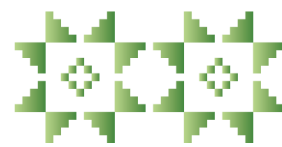
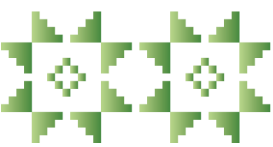
Maju dalam konteks pembangunan berarti menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan secara keseluruhan. Dengan posisi strategis yang dimiliki, kemajuan Kabupaten Seruyan dapat dicapai dengan



perwujudan kemajuan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur transportasi. Dengan terwujudnya infrastruktur transportasi yang memadai di Kabupaten Seruyan, pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Seruyan dapat terhubung satu sama lain, sehingga konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Seruyan dapat terwujud baik secara inter maupun antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas berkaitan dengan arus pergerakan barang dan manusia yang menunjang pembangunan wilayah. Selain infrastruktur wilayah, kemajuan Kabupaten Seruyan dapat tercipta dengan adanya kesinambungan pembangunan daerah. Kesinambungan pembangunan daerah dapat diwujudkan melalui upaya pemerataan serta sinkronisasi pembangunan baik antar sektor maupun antar hierarki wilayah (nasional-provinsi-daerah).

Tangguh merujuk pada ketangguhan pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan secara umum. Tata kelola pemerintah yang tangguh dimaksudkan sebagai sistem dan praktik yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta supremasi hukum. Dengan tata kelola pemerintahan yang tangguh, pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas perlu disiapkan sebagai modal pembangunan agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi.

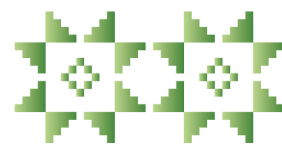
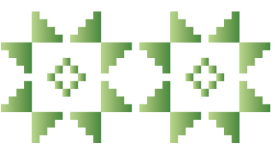
Mandiri merujuk kepada kemampuan Kabupaten Seruyan dalam mengelola berbagai aspek yang dapat menjadikan Kabupaten Seruyan berkembang menjadi wilayah yang maju sehingga Kabupaten Seruyan dapat bersaing dalam kancah regional, nasional, atau bahkan internasional. Kemandirian ini juga merujuk pada kemampuan daerah dalam menghadapi, bertahan, dan pulih dari ancaman dan guncangan sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Selain melalui daya saing dan ketahanan daerah, visi mandiri juga merujuk pada kemampuan Kabupaten Seruyan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemerataan akses sumber daya ekonomi dengan tata kelola yang mumpuni.

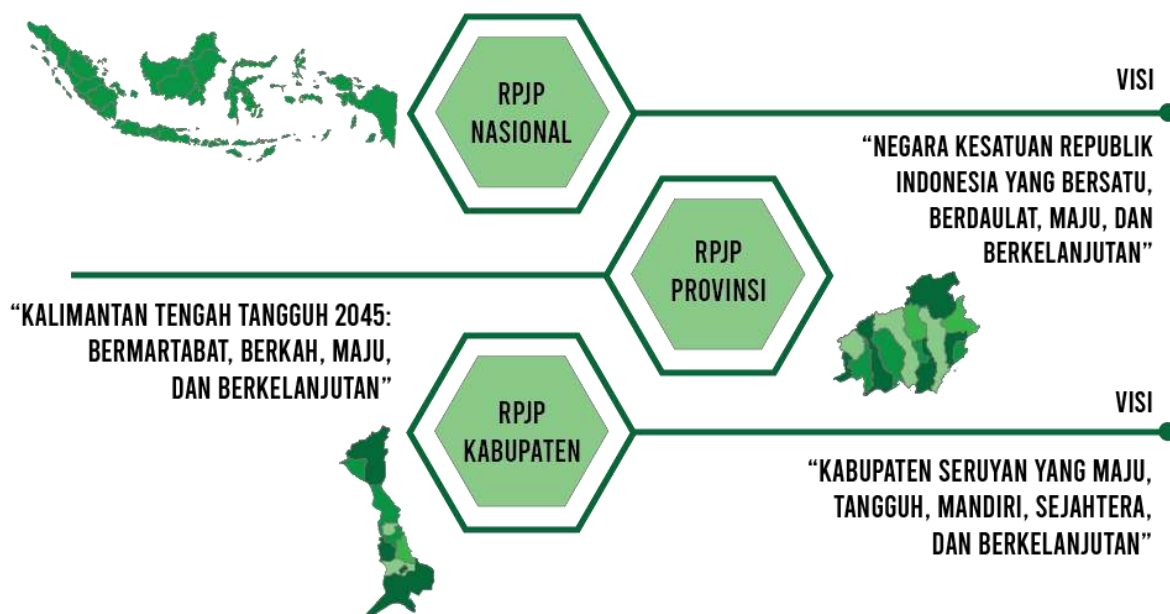




Sejahtera merujuk pada kondisi dimana masyarakat merasa bahagia, sejahtera, dan memiliki akses yang memadai terhadap berbagai kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan layak, pekerjaan yang layak, serta keamanan sosial dan ekonomi. Kabupaten Seruyan yang sejahtera memiliki makna yang lebih mendalam dan mencakup lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi mencakup kesejahteraan yang holistik, baik secara materiil maupun sosial. Dimana kemudian tercipta masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi dan merata, serta pengurangan disparitas sosial dan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berkelanjutan merujuk pada kondisi Kabupaten Seruyan yang mampu mengelola dan melindungi kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Seruyan telah sesuai, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip berkelanjutan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk konservasi sumber daya alam, pengurangan polusi, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, bahkan termasuk juga aspek manusia dan ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Seruyan dapat lestari dan berkelanjutan. Selain terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam, Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan juga merujuk pada kondisi Kabupaten Seruyan yang mampu meneruskan agenda pembangunannya sebagai kesepakatan dan mimpi bersama dari masyarakat dan pemangku kepentingan.





Gambar 4.4. Gambaran Pengintegrasian Visi Daerah ke dalam Visi Provinsi dan Nasional

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2023

4.2. Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan, terdapat 5 Sasaran Visi Daerah Kabupaten Seruyan yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kelima Sasaran Visi Daerah Kabupaten Seruyan dirumuskan untuk melihat dan mengukur ketercapaian Visi Daerah Kabupaten Seruyan. Sasaran Visi Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Sasaran Visi Daerah Kabupaten Seruyan

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline	Target			
		2025	2029	2034	2039	2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	79,59	144,73	251,67	337,22	380
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	31,92	34,61	38,11	39,31	40
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	4,99	5,24	5,5	5,78
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,36	5,06	2,06	1,02	0,3
	Rasio Gini (Indeks)	0,24	0,232	0,172	0,124	0,1
	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,75	6,33	6,91	7,38	7,61
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	3,16	2,46	1,66	1,3
	Indeks Reformasi Birokrasi	69	70,92	79,59	86,53	90



Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline	Target			
		2025	2029	2034	2039	2045
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (%)	79,3	84,21	89,11	92,04	95
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,94	72,79	77,35	80,99	82,81
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,55	80,24	81,1	81,95	82,98

Sumber: Hasil Olah Data Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Tabel 4.2. Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Indikator Sasaran Visi Indonesia 2045	Baseline 2025	Target 2045	Indikator Sasaran Visi Kalimantan Tengah 2045	Baseline 2025	Target 2045	Indikator Sasaran Visi Seruyan 2045	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju			Peningkatan Pendapatan Perkapita			Peningkatan Pendapatan Perkapita		
GNI Per Capita	5,500	30,300	PDRB per Kapita (Rp Juta)	82,71	629,75	PDRB per Kapita (Rp Juta)	79,59	380
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,78	40,58	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5,78
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15,76	26,75	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	31,92	40
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,61	0,58	Tingkat Kemiskinan (%)	6,36	0,3
						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	1,3
Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320	Rasio Gini (Indeks)	0,315	0,249	Rasio Gini (Indeks)	0,24	0,1
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,02	1,47	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,75	7,61
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat			Kepemimpinan Berintegritas			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Rata-Rata Wilayah Monitoring Centre for Prevention (%)	84	95	Indeks Reformasi Birokrasi	69	90
						Nilai Monitoring Centre for Prevention (%)	79,3	95
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat			Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54	0,70	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,94	82,81
Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission			Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission			Penurunan Emisi GRK Menujut Net Zero Emission		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	76,00	100	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,55	82,98



Indikator Sasaran Visi Indonesia 2045	Baseline 2025	Target 2045	Indikator Sasaran Visi Kalimantan Tengah 2045	Baseline 2025	Target 2045	Indikator Sasaran Visi Seruyan 2045	Baseline 2025	Target 2045
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	82,65			

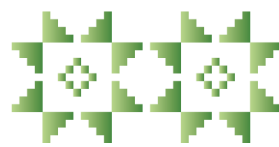
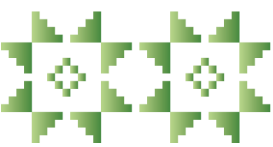
Sumber: Hasil Olah Data Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045

4.3.1. Telaah Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Penyusunan misi daerah untuk mencapai visi harus memperhatikan 8 agenda utama pembangunan yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, embangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Penjabaran delapan misi tersebut dapat dicermati sebagai berikut.

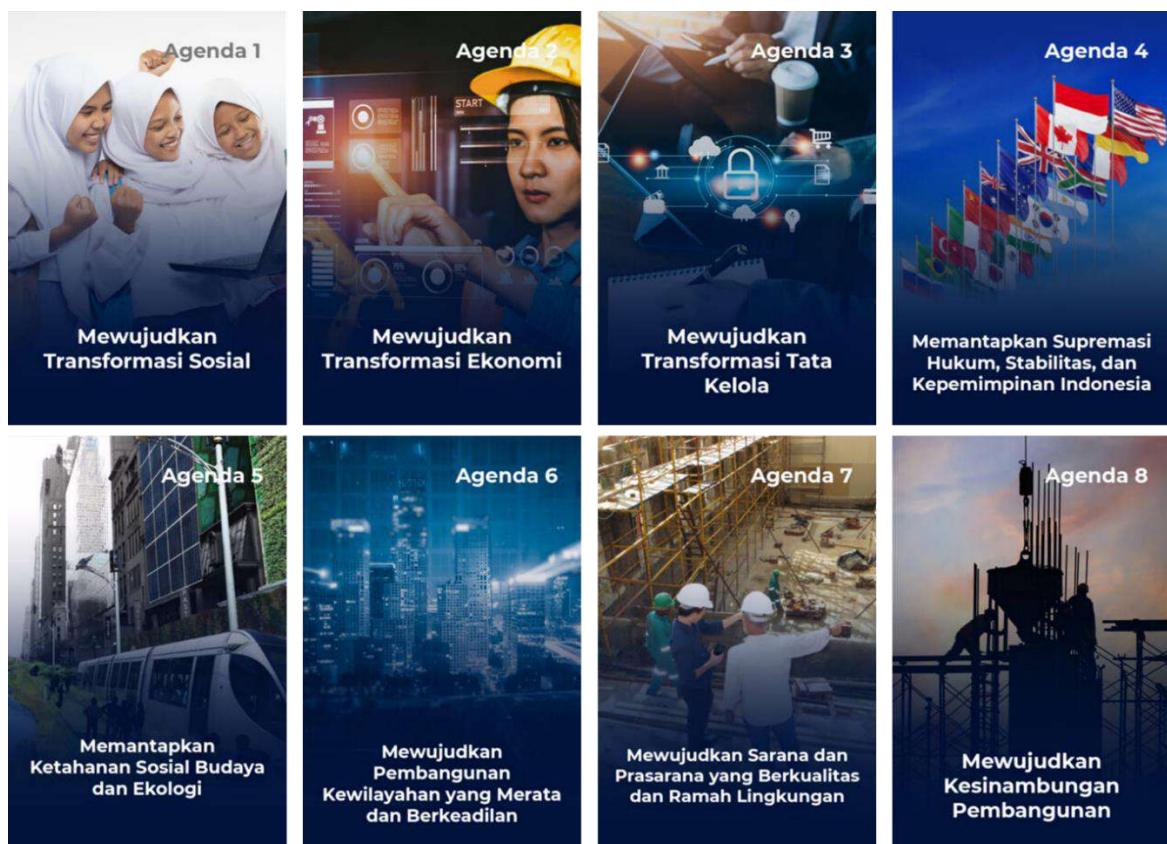
1. Mewujudkan transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi;
2. Transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas dengan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif dan sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, umkm dan koperasi dan penerapan kota untuk mendukung pertumbuhan;
3. Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, tertib, bersih, efektif, ramah, dan cepat;
4. Pemantapan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan stabilisasi ekopol, hukum dan keamanan, serta kekuatan dan pengaruh diplomasi Indonesia di tingkat global;
5. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan meningkatkan ketangguhan multi-dimensi meliputi ketangguhan sosial-budaya, pembangunan karakter dan keseimbangan hubungan timbal-balik antara komponen sosial-budaya dan ekologi serta optimalisasi modal sosial dan modal budaya masyarakat khususnya dalam menghadapi risiko bencana dan iklim dan pelestarian sumberdaya alam;
6. Pembangunan kewilayahan yang diwujudkan untuk peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan dan diperkuat melalui transformasi



supremasi hukum, stabilitas, ketangguhan diplomasi dan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang sesuai dengan konteks dan karakter masing-masing wilayah;

7. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan yang menjadi kunci pengembangan wilayah dan mendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan yang terwujud dalam pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan.

Delapan misi di atas termasuk dalam upaya strategis untuk mencapai visi besar dan sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5. Delapan Agenda Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045

4.3.2. Telaah Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah

Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah disusun untuk meraih visi yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang telah



ditetapkan. Berikut merupakan misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045:

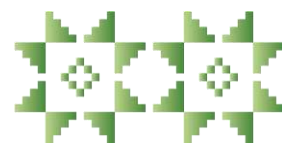
1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan
4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode

4.3.3. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045 perlu diturunkan melalui proses *cascading* untuk sampai kepada kebijakan, program, dan kegiatan pada level *outcome* maupun *output* dalam kurun waktu 20 tahun. Untuk sampai ke tahap tersebut, visi Kabupaten Seruyan 2025-2045 yakni Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan harus dijabarkan secara strategis menjadi fokus visi yang kemudian diarahkan menjadi misi pembangunan daerah 2025-2045. Uraian penjabaran fokus visi menjadi misi dapat dilihat sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah

Konektivitas dan aksesibilitas di dalam suatu wilayah dan antar wilayah berperan penting dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, konektivitas dimaknai dengan hubungan antar kecamatan serta antara Kabupaten Seruyan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Konektivitas intra dan antar wilayah terbangun dengan adanya aksesibilitas jalan yang memadai. Aksesibilitas merupakan kondisi keterjangkauan wilayah melalui keberadaan jalan dalam kondisi mantap.





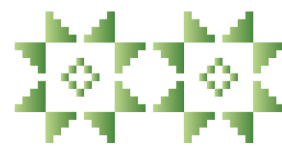
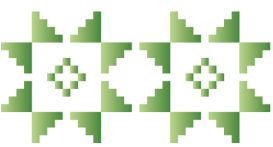
Kabupaten Seruyan memiliki bentuk wilayah yang cenderung memanjang dari selatan ke utara dengan topografi perbukitan di bagian utara dan melandai di bagian selatan. Bagian tengah kabupaten ini dilewati oleh jalan poros selatan Kalimantan, namun kualitas jalan dari tengah ke selatan dan utara masih kurang baik yang memungkinkan terputus saat musim hujan. Kondisi tersebut berdampak pada interaksi kewilayahan di Kabupaten Seruyan belum optimal sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Isu yang berkaitan dengan misi ini adalah infrastruktur penghubung terkait kualitas jalan serta keberadaan bandar udara dan pelabuhan di Ibukota Kabupaten Seruyan.

Misi terkait konektivitas dan aksesibilitas di Kabupaten Seruyan menyoal kualitas jalan dan sarana prasarana transportasi. Fasilitas transportasi dan perniagaan laut perlu diperhatikan dan dimasukkan sarana dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Seruyan 2045. Sarana dan prasarana mobilitas seperti transportasi umum dan tempat pemberhentian juga perlu dipertimbangkan untuk membantu peningkatan interaksi kewilayahan. Perkembangan transportasi umum diharapkan membantu mobilitas di dalam wilayah dan antar wilayah kabupaten sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah dapat mengalami peningkatan.

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merujuk pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, serta ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pembangunan pada setiap urusan didukung oleh infrastruktur yang berkualitas seperti sekolah, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sarana prasarana layanan dasar lainnya. Keberadaan infrastruktur ini dengan kualitas yang baik menjadi salah satu upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu yang berkaitan dengan infrastruktur pelayanan dasar adalah ketersediaan sekolah dan rumah sakit secara merata.

Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar perlu memerhatikan aspek aksesibilitas. Peningkatan jumlah infrastruktur pelayanan dasar dengan distribusi merata diharapkan mampu mengurangi ketimpangan layanan dasar akibat jarak dan sarana prasarana untuk mengakses layanan. Langkah tersebut beriringan dengan optimalisasi penggunaan fasilitas pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik pendidikan maupun kesehatan.





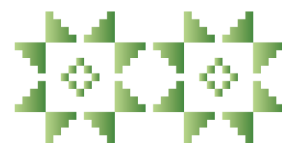
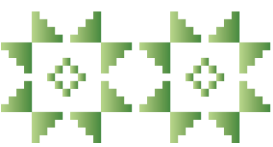
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam proses pembangunan wilayah. Sebab manusia merupakan subjek/pelaku sekaligus objek dalam pembangunan. Sumber daya manusia menjadi isu strategis yang muncul dalam berbagai skala, mulai dari skala internasional hingga skala lokal. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, isu bonus demografi sebagai salah satu isu yang muncul terkait sumber daya manusia. Bonus demografi dapat dipandang sebagai peluang untuk mempercepat proses pembangunan, namun disisi lain dianggap dapat menjadi sebuah permasalahan jika tidak dipersiapkan dengan matang. Bonus demografi akan menjadi akselerator atau memberikan dampak positif dalam proses pembangunan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengendalian kuantitas sumber daya manusia.

Misi pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan serta pengendalian kuantitas/jumlah sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan. Peningkatan tersebut ditekankan pada beberapa aspek utamanya aspek-aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tingkat ekonomi. Upaya tersebut bertujuan untuk menambah kompetensi dan keterampilan masyarakat sekaligus perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sumber daya alam yang beragam dan lingkungan yang lestari dapat menjadi modal tersendiri dalam proses pembangunan dan juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan serta diperhatikan dalam proses tersebut. Tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang baik merupakan pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan Kabupaten Seruyan. Dalam mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Misi ini juga terkait dengan pemanfaatan lahan di Kabupaten Seruyan beserta dinamika yang terjadi pada proses didalamnya. Kabupaten Seruyan kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistem membutuhkan tata kelola yang bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatan lahan yang optimal. Melalui





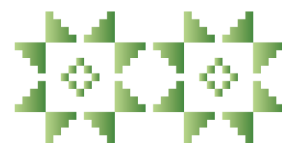
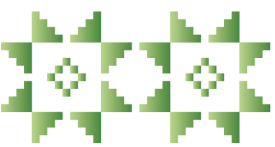
perencanaan yang matang, pengelolaan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, upaya perlindungan lingkungan, sumber daya alam, dan lahan dapat terlaksana dengan baik.

Upaya pelaksanaan tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan memiliki tujuan lain yaitu meminimalisasi konflik kepentingan antara penduduk lokal dengan pihak swasta. Peristiwa konflik kepentingan terkait sumberdaya alam terjadi di Kabupaten Seruyan yang melibatkan perusahaan kelapa sawit dan masyarakat setempat. Konflik terjadi akibat perusahaan belum memenuhi kewajiban memberikan 20 persen kebun plasma kepada masyarakat. Penyebab lainnya adalah perusahaan juga menanam sawit sampai di luar Hak Guna Usaha (HGU) sehingga menimbulkan sengketa lahan. Masyarakat melakukan klaim bahwa lahan tersebut merupakan hutan adat yang digunakan untuk ritual adat. Meskipun demikian, perusahaan menyatakan telah mengantongi izin usaha (IUP).

Misi tata kelola sumber daya alam dan lingkungan menyasar pada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pemanfaatan lahan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan diupayakan bukan hanya dengan cara-cara konservatif. Akan tetapi dilakukan melalui cara-cara kolaboratif antar berbagai elemen utamanya antara Pemerintah Kabupaten Seruyan beserta dengan masyarakat Kabupaten Seruyan.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum

Fungsi dan peran pemerintah merupakan fondasi utama dalam proses perencanaan serta implementasi pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran pembangunan dan menjalankan rencana pembangunan, pemerintah haruslah dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengelola berbagai potensi dan tantangan pembangunan yang ada. Selain memaksimalkan peran pemerintah, memperkuat supremasi hukum dalam proses pembangunan merupakan hal yang penting untuk menjamin bahwa proses pembangunan tersebut telah berjalan dengan tertib dan tidak melanggar aturan yang ada. Supremasi hukum yang kuat juga dapat





mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif yang dapat mendukung kelancaran proses pembangunan wilayah dan ketenteraman bagi masyarakat.

Misi penguatan peran pemerintahan dan supremasi hukum menasar pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Dengan kapasitas ASN yang mumpuni dan kehadiran TIK yang memadai, inovasi-inovasi baru akan dapat muncul dan dapat menjadi potensi dalam pembangunan Kabupaten Seruyan. Penguatan supremasi hukum juga akan mendukung pembangunan Kabupaten Seruyan utamanya dalam menjamin keberlangsungan pembangunan dan ketertiban umum.

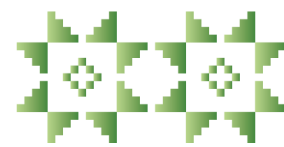
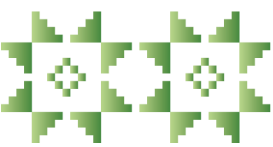
Misi 6 : Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Daerah

Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif yang mampu bersaing dengan daerah yang lain. Dalam meningkatkan daya saing daerah diperlukan upaya-upaya yang bersifat strategis sehingga mampu menciptakan peluang-peluang untuk maju bagi wilayah tersebut terutama dalam bidang ekonomi. Selain daya saing, aspek ketahanan daerah juga perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Ketahanan daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam bertahan menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam daerah tersebut. Risiko yang ada dapat bersifat fisik maupun non fisik seperti risiko bencana, perubahan iklim, konflik sosial, ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya.

Misi peningkatan daya saing dan ketahanan daerah menasar pada optimalisasi potensi-potensi lokal di Kabupaten Seruyan menjadi sektor-sektor unggulan yang mengangkat daya saing daerah Kabupaten Seruyan. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui berbagai aspek seperti perbaikan infrastruktur, perluasan akses terhadap pasar, pengembangan SDM, inovasi teknologi, serta upaya lain yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Dengan daya saing yang meningkat, diharapkan ketahanan daerah lebih mudah untuk ditingkatkan.

Misi 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Seruyan. Dalam beberapa tahun terakhir,





Seruyan telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, tantangan muncul terkait pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dan kebutuhan akan industri yang mampu mengelola secara efisien potensi yang ada. Melalui pemahaman dan strategi yang tepat, Kabupaten Seruyan dapat mengembangkan berbagai sektor ekonomi secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

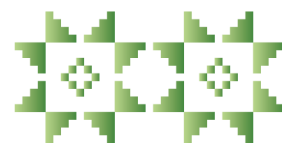
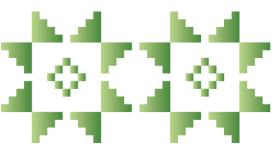
Misi pertumbuhan ekonomi menysasar pada pemaksimalan pemanfaatan potensi lokal untuk pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Misi ini tidak hanya menargetkan pada peningkatan nilai-nilai makroekonomi semata (Produk Domestik Regional Bruto), melainkan juga pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta memastikan bahwa manfaat pertumbuhan yang ada telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu dalam proses pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh pihak yang ada tanpa terkecuali.

Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Kestinambungan dalam pembangunan daerah merupakan sesuatu hal yang penting agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan pembangunan yang dicita-citakan dapat tercapai. Kestinambungan pembangunan daerah melibatkan kebijakan, strategi, dan praktik-praktik yang memungkinkan Kabupaten Seruyan untuk semakin berkembang ke arah yang lebih baik tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satu pihak.

Dalam mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan, partisipasi, inovasi, serta kebijakan dan perencanaan yang terpadu. Dengan mewujudkan dan mengutamakan kestinambungan pembangunan daerah, maka keseimbangan dan keberlanjutan dapat tercipta. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sekarang tidak mengorbankan kebutuhan bagi generasi yang akan datang. Selain itu, dengan kestinambungan pembangunan daerah, maka proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara ringkas, misi pembangunan Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.





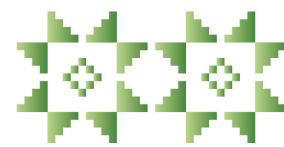
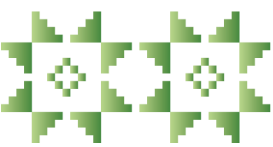
Gambar 4.6. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2023

Misi RPJPD Kabupaten Seruyan harus selaras dan konsisten dengan Misi RPJPN dan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah karena dengan misi yang selaras, Kabupaten Seruyan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan nasional dan provinsi. Ini membantu menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga dampaknya dapat lebih besar dan menyeluruh. Selain itu, keselarasan ini penting agar kebijakan dan program yang dirancang di tingkat kabupaten tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dapat dicermati pada Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3. Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

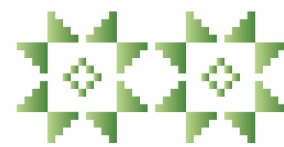
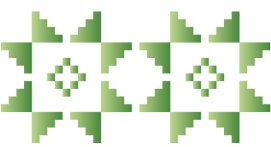
NO	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2025-2045	RPJPD KABUPATEN SERUYAN 2025-2045
	Kelompok Agenda	Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun SDM yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing dan Adaptif	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Global	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
3		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	





NO	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2025-2045	RPJPD KABUPATEN SERUYAN 2025-2045
	Kelompok Agenda	Misi	Misi	Misi
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Daerah
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Melalui Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar yang Ramah Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah Antarperiode	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024





BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, visi-misi diperlukan sebagai gambaran umum dan abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka atau kurun waktu tertentu. Dari visi-misi tersebut, pembangunan kemudian diturunkan dan dijabarkan dalam berbagai instrumen pembangunan lain yang meliputi kebijakan, program, hingga kegiatan yang berada pada level impak dan dampak. Hal tersebut penting untuk menentukan kerja dan kinerja dari pemerintahan daerah maupun berbagai pemangku kepentingan terkait dan juga sebagai dasar dalam penilaian dan evaluasi pembangunan. Turunan pertama dari visi-misi tersebut adalah arah kebijakan yang dibuat dalam bentuk pentahapan pembangunan selama 5 tahun atau yang juga dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain arah kebijakan, pencapaian visi dan misi juga perlu dijabarkan menjadi sasaran-sasaran pokok. Sasaran pokok merujuk kepada rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Dalam penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan.

5.1. Arah Kebijakan

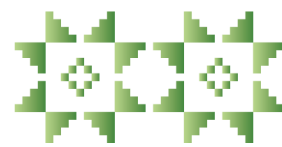
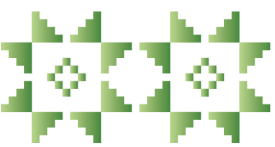
Arah kebijakan di dalam RPJPD mencakup pentahapan pembangunan per lima tahun dan disesuaikan dengan pentahapan pembangunan dari RPJPN yang berorientasi kepada transformasi-transformasi yang diperlukan dalam konteks regional Kabupaten Seruyan. Terdapat 4 pentahapan pembangunan untuk Kabupaten Seruyan dengan tema setiap tahapnya adalah:

2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi

2030-2034: Akselerasi Transformasi Pembangunan

2035-2039: Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Daerah

2040-2045: Perwujudan Seruyan Mantab Sejahtera





ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN SERUYAN 2025-2045



2025-2029: Tahap Penguatan Fondasi Transformasi

Periode atau arah kebijakan pada fase pertama pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2025-2029 diarahkan untuk terfokus pada fase penguatan. Dalam struktur fokus visi dan misi pembangunan, fokus pada tahap ini adalah penguatan fondasi visi yakni peran pemerintah dan supremasi hukum dan pembangunan ekonomi inklusif. Fondasi-fondasi tersebut menjadi modal mendasar untuk pembangunan pada tahap atau fase berikutnya. Arah fokus pada tahap ini adalah konsolidasi dan restrukturisasi aparatus-aparatus pembangunan termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan, institusi dan kelembagaan pembangunan, serta peraturan dan kebijakan terkait.

Dalam kaitannya dengan Misi I mengenai konektivitas dan aksesibilitas wilayah, peningkatan kualitas jalan utamanya jalan-jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan atau PPL perlu menjadi prioritas di mana kewenangan untuk jalan-jalan tersebut masih masuk ke dalam kewenangan kabupaten. Konektivitas terhadap beberapa spot strategis seperti Pelabuhan Segintung juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Konektivitas dan aksesibilitas akan mempengaruhi arus keluar masuk orang dan barang termasuk di dalamnya adalah biaya dan ongkos logistik yang menjadi dasar terkait dengan pengembangan industri dan hilirisasi.



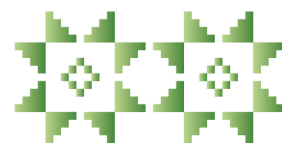
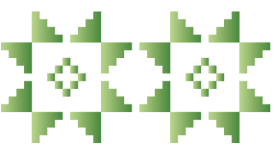
Fokus lain pada tahap pertama adalah pertumbuhan ekonomi inklusif yang dibangun di atas UMKM dan koperasi masyarakat. Pada tahapan ini, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan UMKM serta pemantapan aspek industrinya. Hal tersebut mencakup sertifikasi produk, pengemasan, legalitas usaha, serta akses terhadap permodalan UMKM. Di sisi lain, sektor agroindustri yang ditopang oleh perusahaan besar serta arus investasi yang masuk harus diarahkan ke dalam sektor padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Secara khusus, sektor industri kelapa sawit yang menjadi salah satu industri utama di Kabupaten Seruyan perlu ditingkatkan dengan memperkuat kemitraan yang dibangun antara perusahaan dengan petani kelapa sawit masyarakat. Tujuannya adalah selain untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat menghindari konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

Untuk mendukung hal tersebut, peran pemerintah diperlukan dalam beberapa aspek antara lain adalah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara mudah. Pada tahapan ini untuk menuju ke sana diperlukan beberapa tahapan yang dimulai dari penyiapan ruang *server*, perluasan akses internet dengan menggandeng perusahaan swasta atau BUMN, dan penyusunan arsitektur dan peta jalan untuk menuju *smart regency*.

2030-2034: Tahap Akselerasi Transformasi Pembangunan

Arahan kebijakan pada tahapan berikutnya adalah tahapan akselerasi atau “*big push*” yang berpijak pada fondasi-fondasi dari fokus visi. Perkuatan fondasi pada periode sebelumnya ditindaklanjuti melalui penguatan pilar-pilar sebagai modal-modal dalam mengakselerasi transformasi pembangunan. Di dalam dokumen RPJPN, terdapat tiga transformasi yang menjadi dasar dalam mengakselerasi pembangunan yakni transformasi ekonomi, transformasi sosial-budaya, dan transformasi tata kelola.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Seruyan, setiap transformasi terkait dengan setiap pilar-pilar pembangunan yang menjadi fokus visi Kabupaten Seruyan 2045. Transformasi ekonomi terkait dengan pilar konektivitas dan aksesibilitas wilayah sebagai kelanjutan dari penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahapan ini, pengembangan





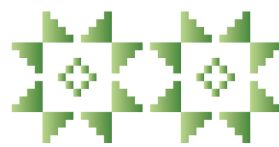
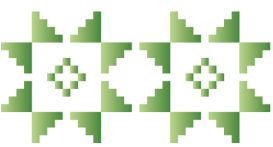
dan penguatan ekonomi dilakukan melalui pembukaan investasi dan hilirisasi yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja terampil dan produk-produk lokal dari yang sudah disiapkan melalui penguatan koperasi dan UMKM pada tahun sebelumnya.

Selain transformasi ekonomi yang didukung oleh aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung arus barang, logistik, dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain, transformasi sosial budaya perlu diakselerasi pada tahapan ini. Pilar yang terkait dengan transformasi sosial budaya adalah pilar infrastruktur dan pelayanan dasar serta pilar pembangunan sumber daya manusia. Pada tahap ini fokus akselerasi adalah menyasar kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan didukung oleh ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas SDM seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan infrastruktur dasar lain seperti pusat pelayanan internet dan administrasi kependudukan lainnya.

Transformasi selanjutnya adalah transformasi tata kelola. Transformasi pada tahapan ini difokuskan menyasar transformasi sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya dan lingkungan sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan mentah untuk proses hilirisasi dan sebaliknya, proses hilirisasi yang ditopang oleh industri tidak menurunkan kualitas lingkungan, menjaga ruang hidup masyarakat, dan menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal dalam menjaga ekosistem. Transformasi tata kelola pemerintahan juga perlu diperhatikan dan merupakan kelanjutan dari penguatan pemerintah dan supremasi hukum. Adanya kepastian investasi termasuk kaitannya dengan pengelolaan dampak lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan iklim investasi diharapkan dapat menjadi salah satu strategi “*big push*” untuk mendorong pembangunan Kabupaten Seruyan pada tahap ini.

2035-2039: Tahap Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Daerah

Fase penguatan dan fase percepatan pada tahap sebelumnya diharapkan mewujudkan kemandirian dari Kabupaten Seruyan. Salah satu sasarannya adalah agar Kabupaten Seruyan mampu mengelola berbagai sumber daya melalui berbagai strategi pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan ketimpangan dan tetap menghargai hak-hak serta ruang hidup masyarakat. Dengan tercapainya





kemandirian tersebut, Kabupaten Seruyan dapat mengembangkan diri dan memiliki peran strategis di wilayah sebagai perwujudan dari simpul pembangunan wilayah.

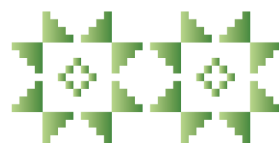
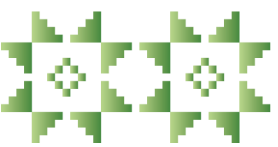
Fase ini ditandai dengan semakin menguatnya sektor basis yang ditopang melalui hilirisasi dan industrialisasi yang dibangun pada fase penguatan dan fase percepatan. Kemandirian Kabupaten Seruyan yang diarahkan ke dalam diarahkan untuk menjadi struktur dari ketahanan daerah yang terdiri dari ketahanan energi, ketahanan air, ketahanan bencana, ketahanan ekologis, dan ketahanan pangan. Meningkatnya ketahanan atau resiliensi dari masyarakat akan menjadi tulang punggung dari proses ekspansi Kabupaten Seruyan di tingkat wilayah atau di tingkat regional.

Sementara, kemandirian yang diarahkan keluar wilayah menjadi fondasi dari daya saing Kabupaten Seruyan untuk dapat memposisikan diri dengan kabupaten-kabupaten tetangga yang ada di sekitarnya. Daya saing didukung dan ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni sebagai luaran dari pembangunan di fase percepatan dan diperkuat melalui tata kelola yang mantap dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kunci dalam mendukung konektivitas dan kehadiran pemerintah.

Fase penguatan daya saing dan ketahanan daerah, dalam kaitannya dengan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimanfaatkan untuk merespon Pulau Kalimantan sebagai *economic super hub* sebagaimana direncanakan di RPJPN. Sebagai *economic super hub*, Pulau Kalimantan harus didukung oleh pusat-pusat aktivitas, kegiatan, dan ekonomi yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kabupaten Seruyan sebagai salah satu simpul harus mampu menempatkan diri melalui daya saing dan ketahanan daerah yang telah terbangun pada fase ini.

2040-2045: Perwujudan Seruyan Mantab Sejahtera

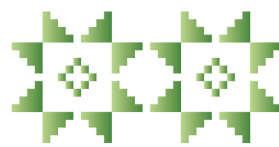
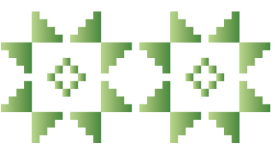
Fase keempat dari arah kebijakan adalah fase perwujudan di mana fase ini merupakan fase finalisasi dari fokus-fokus visi Kabupaten Seruyan hingga tahun 2045. Sebagai tahap akhir, tahap ini dipersiapkan untuk menyiapkan kesinambungan pembangunan dari tahap RPJPD 2025-2045 menuju tahapan pembangunan selanjutnya. Pada fase ini, gambaran Kabupaten Seruyan sebagai wilayah yang maju sudah terbentuk yang didukung dengan konektivitas dan aksesibilitas yang mantap dengan infrastruktur pelayanan publik yang optimal, kehadiran pemerintah dan supremasi hukum yang akuntabel dan reliabel yang juga





didukung oleh pertumbuhan ekonomi inklusif dengan ketimpangan dan kemiskinan dapat ditekan mendekati nol melalui proses pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Selain itu, Kabupaten Seruyan pada tahap ini juga telah berdiri di atas tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang kokoh ditopang dengan ekosistem yang terjaga dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia juga optimal dan Kabupaten Seruyan memiliki peran yang krusial di wilayah dengan ketahanan daerah dan daya saing yang tinggi.





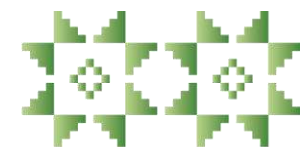
Tabel 5.1. Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029 Penguatan Fondasi Transformasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi Pembangunan	2035-2039 Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Daerah	2040-2045 Perwujudan Seruyan Mantab Sejahtera
Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah	Pembangunan infrastruktur jalan intra wilayah (kabupaten), penghubung antar desa dan kecamatan	Pembangunan infrastruktur jalan inter wilayah dan penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan (pelabuhan dan pusat produksi), dan konektivitas antar wilayah.	Pemantapan sistem konektivitas dan aksesibilitas wilayah (jalan dan simpul-simpul produksi), baik intra maupun inter wilayah	Terwujudnya wilayah yang terkoneksi baik dan merata secara intra dan antar wilayah sebagai penggerak utama pembangunan
	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kantor pelayanan publik yang merata	Mendorong pengembangan infrastruktur pelayanan dasar serta perbaikan kualitas fasilitas pelayanan dasar	Mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan dasar serta tata kelola yang mendorong terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatkan tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta penguatan kualitas kelompok usia produktif (tenaga kerja)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia berbasis penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan	Pemantapan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi	Mewujudkan sumberdaya manusia dan tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi dan mudah terserap pada banyak lapangan kerja, baik di dalam maupun di luar wilayah
	Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penguatan sistem kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan serta rekonsiliasi sumber daya lahan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian penggunaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta penyelesaian segala bentuk konflik lahan	Perlindungan kawasan konservasi, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta pemanfaatan lahan	Mewujudkan tata kelola sumber daya alam, lingkungan, sumber daya lahan, serta penanganan bencana yang mumpuni dan berkelanjutan



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029 Penguatan Fondasi Transformasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi Pembangunan	2035-2039 Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Daerah	2040-2045 Perwujudan Seruyan Mantab Sejahtera
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah bersih (<i>good governance</i>) dan penegakan hukum	Mendorong penguatan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara yang didukung sistem cerdas berbasis elektronik (SPBE)	Mengoptimalkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata serta sinergi dengan kelembagaan lokal (tradisi dan hukum adat)	Mewujudkan implementasi pemerintahan daerah yang kuat dan berintegritas dengan keberanian menegakkan supremasi hukum untuk perlindungan masyarakat
	Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Daerah	Meningkatkan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sumberdaya manusia yang tangguh	Mendorong perbaikan iklim berusaha untuk meningkatkan daya saing wilayah	Mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat dari fluktuasi ekonomi global	Terwujudnya daya saing dan ketahanan daerah dalam menghadapi guncangan dan bencana
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatkan upaya penguatan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan UMKM, melalui peningkatan akses modal, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan	Mendorong peningkatan tata kelola dan peran sumber daya lokal dan pelaku ekonomi rakyat dengan perusahaan (korporasi), khususnya di bidang perkebunan sawit.	Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi produk ekonomi lokal, yang mampu membuka akses dan kesempatan kerja masyarakat	Terwujudnya ekonomi rakyat dan UMKM yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah serta perekonomian yang inklusif bagi seluruh masyarakat
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kestinambungan pembangunan daerah antar waktu dan antar daerah, khususnya Seruyan Utara, Tengah dan Selatan	Mengembangkan kestinambungan pembangunan daerah antar <i>stakeholder</i> (pelaku pembangunan) melalui kolaborasi dan kerjasama	Mendorong akselerasi integrasi pembangunan daerah untuk kestinambungan dan keberlanjutan	Terwujudnya kestinambungan pembangunan daerah, menjaga dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024





Proses pentahapan arah kebijakan 5 tahunan mempedomani arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2045. Langkah tersebut bertujuan untuk menjamin keselarasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten terhadap arah kebijakan nasional dan provinsi. Tabel 5.2. menyajikan detail keselarasan pentahapan implementasi RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5.2. Pentahapan Implementasi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Tahap I 2025 – 2029	Tahap II 2030 – 2034	Tahap III 2035 - 2039	Tahap IV 2040 – 2045
Nasional	Perkuatan Fondasi Tranfromasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan Fondasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Transformasi	Perwujudan Kalteng Tangguh
Kabupaten Seruyan	Pengutan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Derah	Perwujudan Seruyan Mantab Sejahtera

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

5.2. Sasaran Pokok

Visi misi dan arahan kebijakan perlu diimplementasikan dan diarahkan kepada hal-hal yang menjadi sasaran dari pembangunan jangka panjang daerah. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merujuk kepada gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada *level impact* dan bersifat progresif. Berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan ditetapkanlah sasaran-sasaran utama yang akan dicapai pada 20 tahun mendatang.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah menjadi landasan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi sesuai dengan dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Seruyan. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang telah diselarsakan dengan Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut.



Tabel 5.3. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045		Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	KT1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	SM1. Kesehatan Untuk Semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		KT2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		SM2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		SM3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	SM4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		KT5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		SM5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
	IE6. Transformasi Digital		KT6. Transformasi Digital		SM6. Tranfromasi Digital
	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		SM7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		SM8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	Reformasi Tata Kelola	SM9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	KT10. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial		SM10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro		KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		SM11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Bedaya Gentar Kawasan		KT12. Birokrasi Ideal		SM12. Birokrasi Ideal
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	SM13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		KT14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		SM14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional		SM15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional
	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		KT16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		SM16. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
	IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		KT17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		SM17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024



5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Dalam mewujudkan visi misi dan arah pembangunan daerah, maka dirumuskanlah arah kebijakan transformasi. Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi yang spesifik untuk mencapai arah pembangunan daerah dan sasaran pokok. Perumusan arah kebijakan transformasi daerah Kabupaten Seruyan diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Seruyan

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;	V	V		
	Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor;	V	V		
	Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan aformasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;	V	V	V	V
	Penyediaan layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan khususnya ke daerah afirmasi seperti layanan telemedicine untuk penduduk di daerah perbatasan;	V	V		
	Pengembangan pelayanan kesehatan modern;	V	V	V	V
	Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat secara merata;	V	V		
	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;	V	V		
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi;	V	V	V	V
	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah;	V	V	V	V
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidikan yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;	V	V	V	V
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta ketertarikan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment dan pembentukan Center of Excellence di IKN;	V	V		



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penyediaan afiriasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;	V	V	V	V
	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif;	V	V	V	V
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;	V	V	V	V
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran;	V	V	V	V
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial;	V	V	V	V
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas;	V	V	V	V
	Pembangunan dan pengembangan Kabupaten Seruyan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	V	V	V	V
Transformasi Ekonomi	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani;	V	V	V	V
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan;	V	V	V	V
	Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting;	V	V	V	V
	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work;	V	V	V	
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;		V	V	V
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha;	V	V	V	
	Peningkatan produktivitas BUMD;	V	V	V	V



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Pengembangan industri hijau rendah karbon dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi;			V	V
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;	V	V	V	
	Peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran);		V	V	
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan digitalisasi bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	V	V	V	V
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional;	V	V	V	V
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja;			V	V
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan;	V	V	V	V
	Sinergitas peningkatan ekonomi konoditas di area Kawasan Hutan dan Non Kawasan sekitar melalui Integrated Area Development (IAD)	V	V	V	V
Reformasi Tata Kelola	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;	V	V	V	V
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;	V	V	V	V
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;	V	V	V	V
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;	V	V	V	V
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian;	V	V		
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial;	V	V	V	V
	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan;	V	V	V	V
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;	V	V	V	V
	Penguatan pengendalian inflasi daerah;	V	V	V	V
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi	V	V	V	V



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional;				
	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;	V	V	V	V
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;	V	V	V	V
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;	V	V	V	V
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Kalimantan;	V	V	V	V
	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi;	V	V	V	V
	Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda;	V	V	V	V
	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya;		V	V	V
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	V	V	V	V
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;	V	V	V	V
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;	V	V	V	V
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;	V	V	V	V
	Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	V	V	V	V
	Peningkatan rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan, khususnya tambang serta penghambatan laju deforestasi;	V	V	V	V
	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan;	V	V	V	V
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;	V	V	V	V
	Pengembangan diversifikasi pangan;	V	V	V	V
	Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis;		V	V	V
	Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;	V	V		
	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;	V	V	V	V
	Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan;	V	V	V	V



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;	V	V	V	V
	Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;	V	V	V	V
	Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan;	V	V	V	V
	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana;	V	V	V	V
	Pembuatan Basisdata keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten	V	V	V	V
	Penetapan area bernilai konservasi tinggi	V	V	V	V
	Integrasi pengelolaan kawasan hutan dan non kawasan hutan melalui Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial.	V	V	V	V
Implementasi Transformasi	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah;	V	V	V	V
	Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah;	V	V	V	V
	Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah;	V	V	V	V
	Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi;	V	V	V	V
	Pengembangan transportasi umum perkotaan;	V	V	V	V
	Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;	V	V	V	V
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;	V	V	V	V
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal;	V	V	V	V
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum;	V	V	V	V
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah;	V	V	V	
	Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air;	V	V	V	
	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana;	V	V	V	V
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang);	V	V	V	



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;	V	V	V	
	Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;	V	V	V	V
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;	V	V	V	V
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan;	V	V	V	V
	Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi;	V	V	V	
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;	V	V	V	V
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;	V	V	V	V
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;	V	V	V	V
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;	V	V	V	V
	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;	V	V	V	V
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance;	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan;	V	V	V	V
	Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis;	V	V	V	V
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;	V	V	V	V

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah Kabupaten Seruyan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Seruyan berjumlah 45 yang telah diselaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

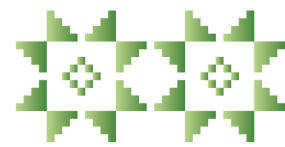
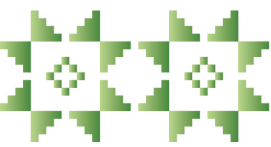


Tabel 5.5. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Seruyan

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan			Keterangan
			Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	SM1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,8	79	DINKES
		2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	165	16	DINKES
			Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	20,6	5	DINKES
		3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%) (<i>Treatment Coverage</i>)	65,7	95	DINKES
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	80,15	98	DINKES
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,5	99,5	DINKES
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	SM2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	75,7	100	DISDIK
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)	73,56	100	DISDIK
			Presentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)	37,62	100	DISDIK
			Presentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	60,52	100	DISDIK
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,27	93	DISDIK
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,35	11,94 - 11,99	DISDIK
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	14,43	DISDIK
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,23	13,1	DISDIK
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	30,65	75	DISDIK

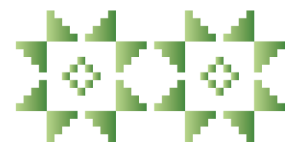
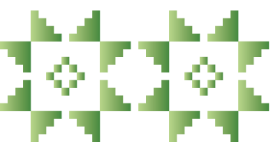


Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan			Keterangan
			Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
			yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
Terciptanya Perlindungan Sosial yang Adaptif	SM3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,36	0,3	DINSOS
		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,97	94,06	DISNAKERTRANS
		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	46,99	80	DISNAKERTRANS
Terciptanya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	SM4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	31,92	40	DISKOPERINDAG
		12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,18	3	DISPORAPARBUD
		13	Indeks Daya Saing Daerah	2,96	4,7	BAPPEDALITBANG
		14	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	11,68	17,55	DISKOPERINDAG
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,7	8	DISKOPERINDAG
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,54	8	DISKOPERINDAG
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,89	5,22	BKAD
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	1,3	DISNAKERTRANS
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	52	90	DISNAKERTRANS
		16	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan (%)	45,22	66	DISNAKERTRANS
		17	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,92	4,61	BAPPEDALITBANG
Terwujudnya Ekonomi Hijau dan Biru	SM5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18	Nilai Tukar Petani (NTP)	100	100	DKPP
			Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	1,89	3	DISKAN
Terwujudnya Transformasi Digital	SM6. Transformasi Digital	19	Persentase Rumah Tangga Terakses Internet	87	99	DISKOMINFO
Terciptanya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	SM7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rp)	3.634.451	14.048.750	DISNAKERTRANS
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,84	35	DPMPSTP
		22	Ekspor Barang dan Jasa (%)	16,95	51,53	DISKOPERINDAG
Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	SM8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	51,18	100	DPRKPP
			Persentase Desa Mandiri (%)	21,64	50	DPMD
		24	Indeks Reformasi Hukum	70	90	KESBANGPOL





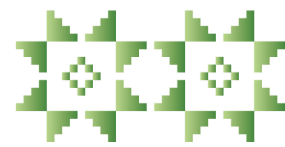
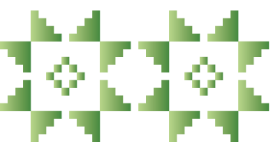
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan			Keterangan
			Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
Terciptanya Regulasi dan Tata Kelola yang Beintegritas dan Adaptif	SM9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	5	DISKOMINFO
		26	Indeks Pelayanan Publik	2,5	5	SETDA
		27	Survei Penilaian Integritas	70	92	INSPEKTORAT
Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	SM10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	80	KESBANGPOL
		29	Angka Kriminalitas	5,02	3	KESBANGPOL
		30	Indeks Demokrasi	Sedang	Tinggi	KESBANGPOL
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	SM11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,8	1,1	BAPENDA
		32	Tingkat Inflasi (%)	2,4	1,6	SETDA
		33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,19	62,9	BKAD
			Total Kredit/PDRB (%)	21,8	60,6	BKAD
		34	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank (%)	87,74	98,36	BKAD
Terciptanya Birokrasi yang Ideal	SM12. Birokrasi Ideal	35	Indeks Reformasi Birokrasi	69	90	SETDA
		36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71	92	SETDA
			Indeks Maturitas SPIP	3,16	4,2	INSPEKTORAT
Terwujudnya Keagamaan yang Bermaslahat dan Berkebudayaan Maju	SM13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Muatan Lokal (%)	70,00	90,00	DISDIK
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	88,5	KESBANGPOL
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	SM14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	70	91	DP3APPKB
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,49	0,23	DP3APPKB
Terciptanya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	SM15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	41	Indeks Kualitas Lahan	79,31	80.71	DLH
		42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79.55	82.98	DLH
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13,89	50	DPRKPP / PUPR
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,92	80	DLH
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	37,76	100	DLH
Terwujudnya Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	SM16. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	43	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment) (%)	11,67	0,29	DKPP

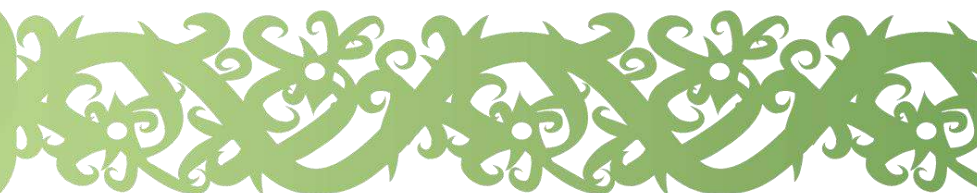




Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan			Keterangan
			Indikator	Baseline 2025	Target 2045	
			Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,52	3,73	DPUPR
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,34	100	DPUPR
Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	SM17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	136,28	102,16	BPBD
		45	Indeks Kualitas Udara	79.9	83.9	DLH
			Indeks Kualitas Air	79,32	83,32	DLH

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

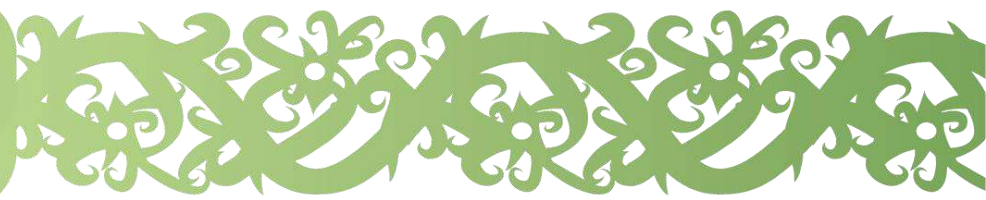




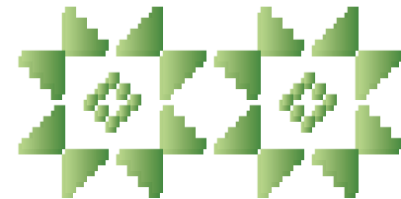
Tabel 5.6. Periodisasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Seruyan

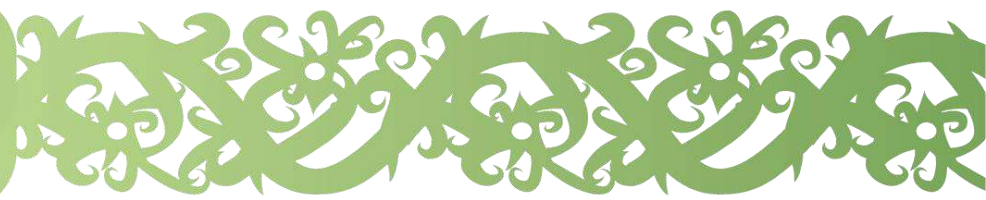
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,8	73,01	77,22	78,72	79	
2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup	165	112	72	22	16	
	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang <i>menderita pendek (stunting)</i> JAB(5) P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang <i>menderita sangat pendek (stunting)</i> JAB(5) SP <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP	20,6	16,3	12,3	11,3	5	



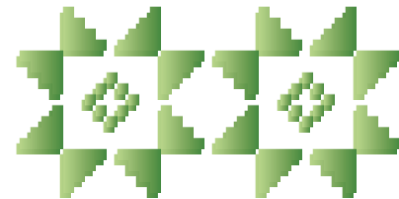


No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%) (<i>Treatment Coverage</i>)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu	65,7	77	90	95	95*	
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.	80,15	88,55	97,75	98	98*	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Persentase Cakupan = $\frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$ Peserta JKN	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	$\% \text{satdik min SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Satdik SKM}}{n}$ Keterangan: Satdik Min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca n = Jumlah satuan pendidikan	75,7	82,4	94,05	100	100	
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi (%)	$\% \text{satdik min SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Satdik SKM}}{n}$ Keterangan: Satdik Min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi n = Jumlah satuan pendidikan	73,56	80,44	92,78	98,67	100	
	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi (%)	$\% \text{peserta didik min SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Peserta Didik SKM}}{n}$ Keterangan: Peserta didik Min.SKM = Peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi n = Jumlah peserta didik	37,62	53,88	76,23	90,44	100	





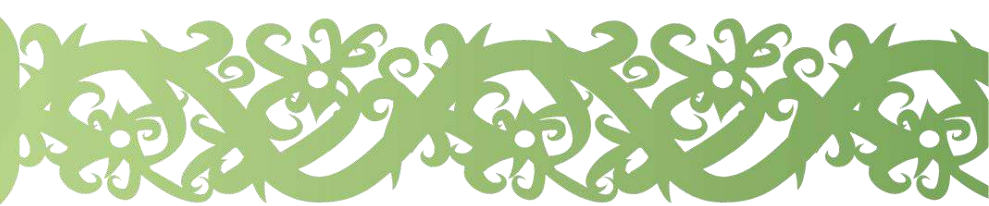
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
	Presentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	$\% \text{peserta didik min SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Peserta Didik SKM}}{n}$ Keterangan: Peserta didik Min.SKM = Peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca n = Jumlah peserta didik	60,52	69,82	79,68	90,13	100	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Rumus Perhitungan IPLM: $\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Keterangan: UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat. AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan. UPLM 1= Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM 2= Ketercukupan Koleksi UPLM 3= Ketercukupan Tenaga Perpustakaan UPLM 4= Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5= Perpustakaan ber-SNP UPLM 6= Ketertiban Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan UPLM 7= Anggota Perpustakaan	74,27	80,97	85,2	90,2	93	
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i	8,35	9,35	11	11,5	11,94 - 11,99	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	12,44	12,73	13,88	14,1	14,43	



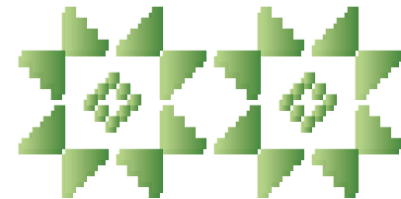


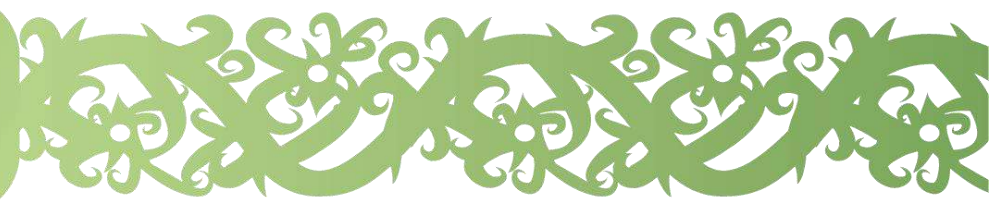
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

Tahun 2025-2045

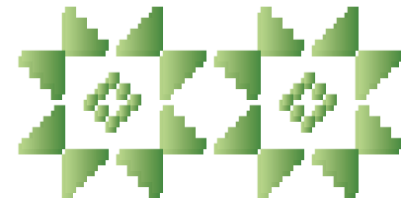


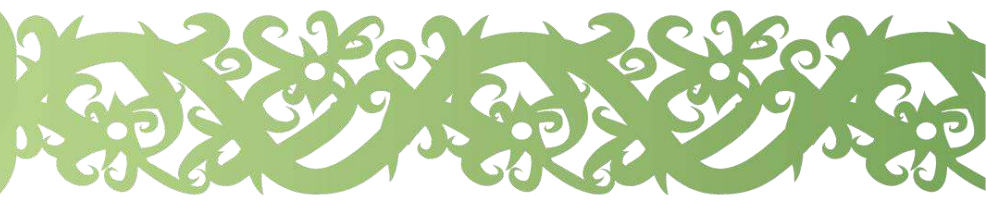
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	$\frac{\text{Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi di Provinsi X}} \times 100\%$	11,23	11,73	12,63	12,95	13,1	
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun T di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} \times 100\%$	30,65	45,35	62,35	67,95	75	
8	Tingkat Kemiskinan (%)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan, y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	6,36	5,06	2,06	1,02	0,3	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	$\% \text{ Cakupan peserta} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Penduduk bekerja Kabupaten}} \times 100\%$ Jamsos Naker	43,97	60,67	79,67	89,9	94,06	
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	$\% PD_{\text{formal}} = \frac{\sum PD_{\text{formal}}}{\sum AKPD} \times 100\%$ Keterangan: PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal $AKPD$: Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas	46,99	57,99	74,88	78,09	80	
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	$\frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}} \times 100\%$ Nilai PDRB Provinsi	31,92	34,61	38,11	39,31	40	



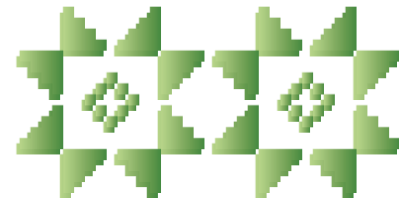


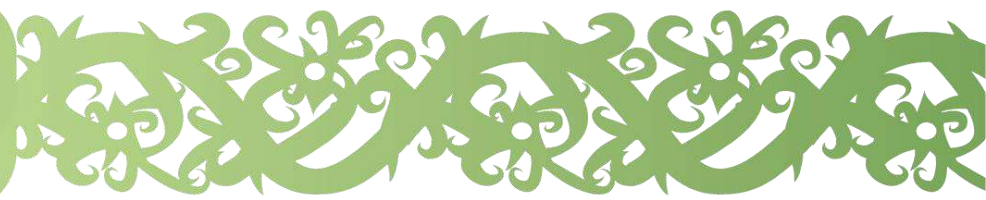
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target																							
			2025	2029	2034	2039	2045																				
12	Rasio PDRB Penyediaan Akonomodasi Makan dan Minum (%)	$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ akmamin}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten} \times 100\%$	1,18	1,81	2,5	2,9	3																				
13	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri dari 4 komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. IDSD <table><tr><th>Komponen</th><td>Lingkungan Pendukung</td><td>Sumber Daya Manusia</td><td>Pasar</td><td>Ekosistem Inovasi</td></tr><tr><th>Pilar</th><td> - Infrastruktur - Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro </td><td> - Kesehatan - Keterampilan </td><td> - Pasar Produk - Pasar Tenaga Kerja - Sistem Keuangan - Ukuran Pasar </td><td> - Dinamisme Bisnis - Kapabilitas Inovasi </td></tr><tr><th>Dimensi</th><td> - Infrastruktur: Keamanan, Model Sosial, Check and Balance, Transparansi, Hak atas Kepemilikan, Inovasi Masa Depan Pendorong - Lingkungan: Infrastruktur, Transportasi Jalan Darat, Jalur Rantai Ayo, Ulas, (au), Infrastruktur (Bikin Berjalan Ayo) - Akses TI: Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro: Stabilitas Ekonomi Makro </td><td> - Kesehatan: Kesehatan - Keterampilan: Tenaga Kerja Skill, Tenaga Kerja Masa Depan </td><td> - Pasar Produk: Perdagangan Domestik - Pasar Tenaga Kerja: Produktivitas, Vertikalitas dan Inovasi - Sistem Keuangan: Kestabilan, Profitabilitas - Ukuran Pasar: Ukuran Pasar </td><td> - Dinamisme Bisnis: Penyertaan Administratif - Kapabilitas Inovasi: Konektivitas dan Kolaborasi, Riset, Komersialisasi </td></tr><tr><th>Indikator</th><td>34 indikator</td><td>8 indikator</td><td>12 indikator</td><td>10 indikator</td></tr></table> Sumber: BIRN (2013), diadopsi dari WEF (2019), "Global Competitiveness Index"	Komponen	Lingkungan Pendukung	Sumber Daya Manusia	Pasar	Ekosistem Inovasi	Pilar	- Infrastruktur - Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro	- Kesehatan - Keterampilan	- Pasar Produk - Pasar Tenaga Kerja - Sistem Keuangan - Ukuran Pasar	- Dinamisme Bisnis - Kapabilitas Inovasi	Dimensi	- Infrastruktur: Keamanan, Model Sosial, Check and Balance, Transparansi, Hak atas Kepemilikan, Inovasi Masa Depan Pendorong - Lingkungan: Infrastruktur, Transportasi Jalan Darat, Jalur Rantai Ayo, Ulas, (au), Infrastruktur (Bikin Berjalan Ayo) - Akses TI: Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro: Stabilitas Ekonomi Makro	- Kesehatan: Kesehatan - Keterampilan: Tenaga Kerja Skill, Tenaga Kerja Masa Depan	- Pasar Produk: Perdagangan Domestik - Pasar Tenaga Kerja: Produktivitas, Vertikalitas dan Inovasi - Sistem Keuangan: Kestabilan, Profitabilitas - Ukuran Pasar: Ukuran Pasar	- Dinamisme Bisnis: Penyertaan Administratif - Kapabilitas Inovasi: Konektivitas dan Kolaborasi, Riset, Komersialisasi	Indikator	34 indikator	8 indikator	12 indikator	10 indikator	2,96	3,29	4,39	4,5	4,7
Komponen	Lingkungan Pendukung	Sumber Daya Manusia	Pasar	Ekosistem Inovasi																							
Pilar	- Infrastruktur - Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro	- Kesehatan - Keterampilan	- Pasar Produk - Pasar Tenaga Kerja - Sistem Keuangan - Ukuran Pasar	- Dinamisme Bisnis - Kapabilitas Inovasi																							
Dimensi	- Infrastruktur: Keamanan, Model Sosial, Check and Balance, Transparansi, Hak atas Kepemilikan, Inovasi Masa Depan Pendorong - Lingkungan: Infrastruktur, Transportasi Jalan Darat, Jalur Rantai Ayo, Ulas, (au), Infrastruktur (Bikin Berjalan Ayo) - Akses TI: Akses TI - Stabilitas Ekonomi Makro: Stabilitas Ekonomi Makro	- Kesehatan: Kesehatan - Keterampilan: Tenaga Kerja Skill, Tenaga Kerja Masa Depan	- Pasar Produk: Perdagangan Domestik - Pasar Tenaga Kerja: Produktivitas, Vertikalitas dan Inovasi - Sistem Keuangan: Kestabilan, Profitabilitas - Ukuran Pasar: Ukuran Pasar	- Dinamisme Bisnis: Penyertaan Administratif - Kapabilitas Inovasi: Konektivitas dan Kolaborasi, Riset, Komersialisasi																							
Indikator	34 indikator	8 indikator	12 indikator	10 indikator																							
14	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Unit\ UKM\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} \times 100\%$	11,68	13,58	16,08	16,51	17,55																				



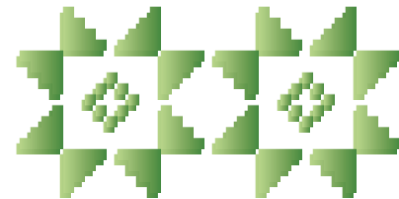


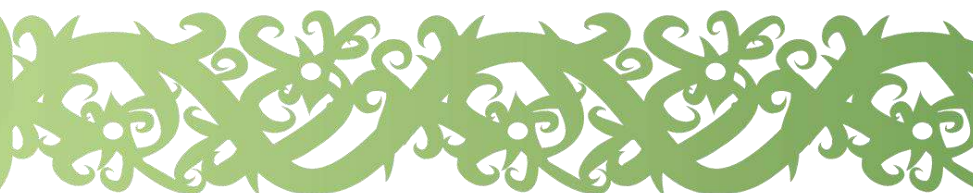
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri} \times 100\%$	2,7	3,8	6	7	8	
	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ Daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ Daerah} \times 100\%$	2,54	4,14	6,14	6,21	8	
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	$Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$	1,89	3,09	4,69	4,99	5,22	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	3,5	3,16	2,46	1,66	1,3	
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Definisi operasional masih dalam penyusunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	52	60	72	81	90	
16	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan (%)	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)	45,22	50,02	58,02	63,02	66	
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan pilar ke-12 dari Indeks Daya Saing Daerah. Indikator yang menyusun Indeks Kapabilitas Inovasi adalah Keanekaragaman Tenaga Kerja, Pengembangan Klaster (hanya pada level provinsi), Publikasi Ilmiah, Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), Belanja Riset, Idneks Keunggulan Lembaga Riset, dan Aplikasi Merk Dagang.	2,92	3,42	4,22	4,42	4,61	
18	Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{Indeks\ yang\ diterima\ petani\ (It)}{Indeks\ yang\ dibayar\ petani\ (Ib)} \times 100$	100	100	100	100	100	





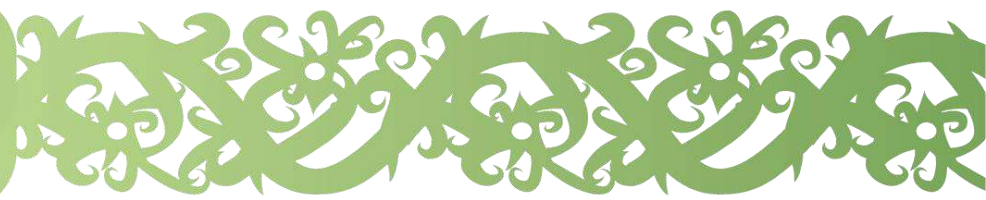
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	$Kontribusi\ PDRB\ sub\ sektor\ Perikanan = \frac{PDRB\ Sub\ Sektor\ Perikanan}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten} \times 100\%$	1,89	2,16	2,55	2,79	3	
19	Persentase Rumah Tangga Terakses Internet	$\%Rutang\ Terakses\ Internet = \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Terakses\ Internet}{Total\ Jumlah\ Rumah\ Tangga} \times 100\%$	87	93	98	99	99	
20	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rp)	$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (Penyesuaian\ Nilai\ UM \times UM_{(t)})$ Keterangan: UM_(t+1) : Upah Minimum yang akan ditetapkan. UM_(t) : Upah Minimum tahun berjalan. Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α. $Penyesuaian\ Nilai\ UM = Inflasi + (PE \times \alpha)$ Keterangan: Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α. Inflasi : Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).	3.634.451	4.415.022	5.591.447	7.079.787	14.048.750	



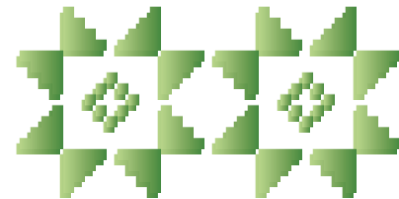


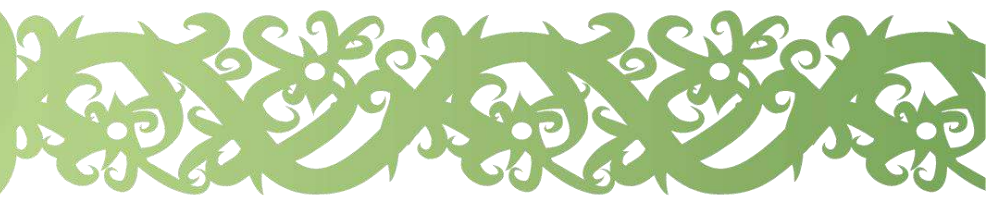
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target			
			2025	2029	2034	2039	2045
		PE : Pertumbuhan ekonomi yang dihitung sebagai berikut: a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya; b. bagi kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya. a : Wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).					



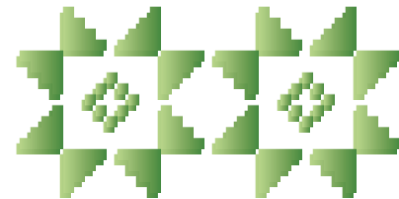


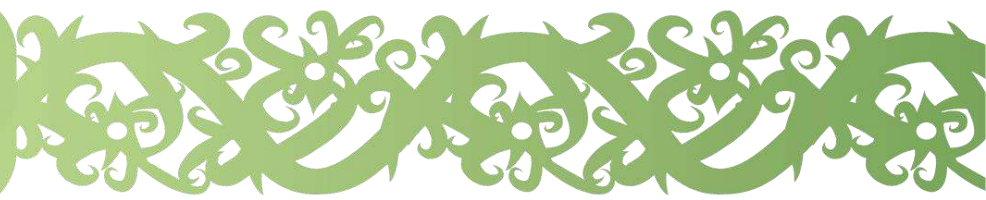
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	38,84	37,74	36,24	35,54	35	
22	Ekspor Barang dan Jasa (%)	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	16,95	18,45	21,45	22,25	51,53	
23	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT} \times 100}$ • PHLTb: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTb: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga	51,18	68,31	89,68	94,18	100	



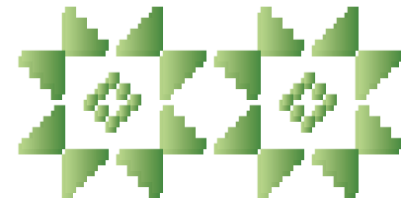


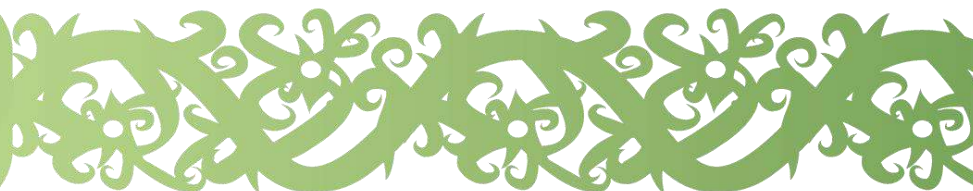
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		1. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB (proksi) = \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRT \times 100}$ • PHLTb (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTb (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.						
	Persentase Desa Mandiri (%)	Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[5]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi	21,64	25	30	45	50	
24	Indeks Reformasi Hukum	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: - Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. - Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. - Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. - Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%.	70	75,5	83	88	90	





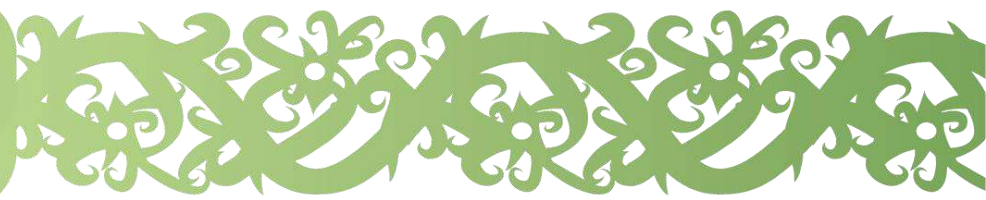
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	2,51	2,81	3,91	4,41	5	
26	Indeks Pelayanan Publik	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $Nilai\ per\ indikator: (\frac{nilai\ F01 + Nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}) \times bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan Indeks $Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$	2,5	3,51	4,01	4,51	5	
27	Survei Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan dengan menilai 4 aspek utama yaitu Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Anggaran.	70	74,2	81,3	93,4	92	
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	$Persentase\ Capaian\ Pelaksanaan\ Aksi\ HAM = \frac{Jumlah\ Pelaksanaan\ Aksi\ HAM}{Jumlah\ Rencana\ Aksi\ HAM} \times 100\%$	60	65	70	75	80	
29	Angka Kriminalitas	$Angka\ Kriminalitas = \frac{Jumlah\ Tindak\ Kriminal\ dalam\ 1\ Tahun}{Jumlah\ Pendidik} \times 10.000$	5,02	4,5	4	3,5	3	
30	Indeks Demokrasi	Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain.	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	



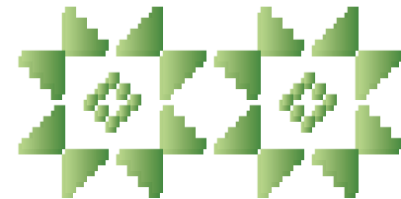


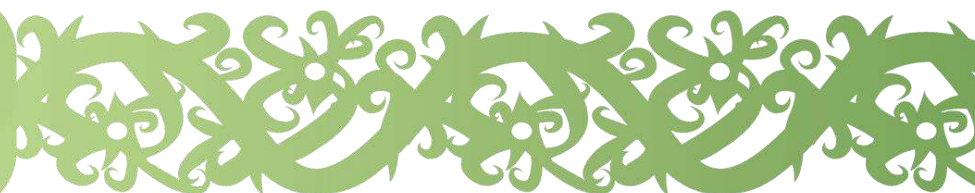
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses <i>web scrapping</i> dari berbagai portal online dan revidi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjangring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikatorindikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers.						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan: RPDRB_t: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun <i>t</i>	0,8	0,85	0,9	0,95	1,1	
32	Tingkat Inflasi (%)	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.	2,4	2,2	2	1,8	1,6	





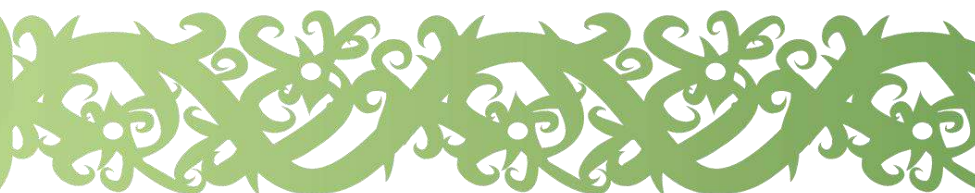
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target			
			2025	2029	2034	2039	2045
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	$\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB}(\%)}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$ Keterangan: Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)	23,19	36,42	53,55	59,44	62,9
	Total Kredit/PDRB (%)	$\frac{\text{Total Kredit per Provinsi/PDRB}(\%)}{\text{PDRB}} \times 100$ Keterangan: Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)	21,8	33,23	49,55	55,03	60,6
34	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank (%)	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank $= \frac{\text{Jumlah Individu Memiliki Rekening di Bank}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	87,74	91,3	94,86	97,42	98,36
35	Indeks Refomasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi bersumber dari 5 penilaian komponen hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK), Nilai Kapabilitas Organisasi, Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi), Nilai Opini BPK, serta Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.	69	70,92	79,59	86,53	90
36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).	71	76	84	89	92
	Indeks Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan penyelenggaraan SPIP ditentukan oleh tingkat maturitas masing-masing unsur SPIP. Tingkat maturitas unsur SPIP lebih rinci ditentukan oleh fokus maturitas yaitu subunsur yang terkandung pada masing-masing unsur SPIP dan seluruhnya berjumlah 25 buah subunsur SPIP. Masing-masing subunsur mempunyai 5 parameter atau indikator maturitas sehingga terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara operasional dilakukan dengan mengukur indikator atau parameter yang paling tepat menggambarkan tingkat maturitas SPIP tersebut.	3,16	3,36	3,71	3,92	4,2





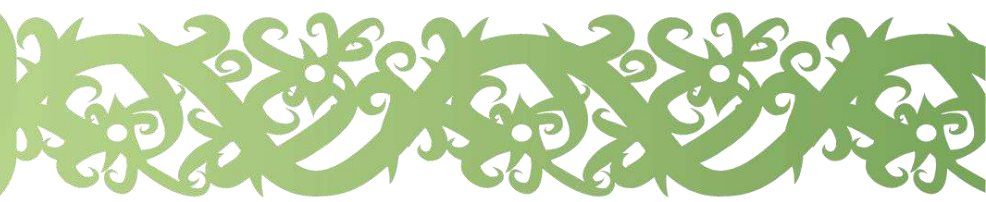
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
37	Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Muatan Lokal (%)	Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Muatan Lokal $= \frac{Jumlah\ Satuan\ Sekolah\ yang\ Menyelenggarakan\ Muatan\ Lokal}{Jumlah\ Satuan\ Sekolah} \times 100\%$	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks\ D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke- j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks\ D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: D_j = Dimensi ke- j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke- j n_j = Jumlah indikator dimensi ke- j	80,4	82,18	86,56	88,26	88,5	
39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan.	70	74,3	81,5	84,5	91	



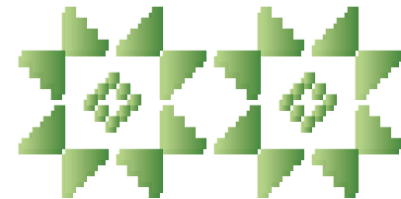


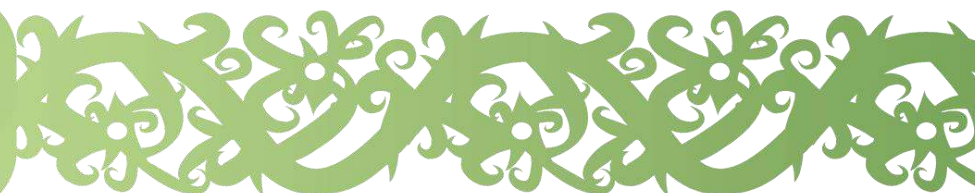
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\ 20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_l}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\ 20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_l}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik	0,49	0,41	0,33	0,25	0,23	





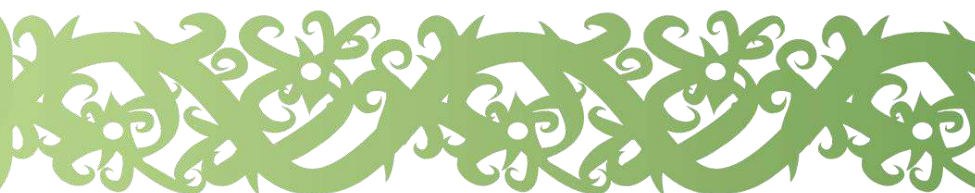
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G _p = Indeks Perempuan G _l = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHDK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR _p = Persentase perempuan di legislatif PR _l = Persentase laki-laki di legislatif SE _p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE _l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAK _p = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK _l = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM(G _p , G _l) = Agregasi Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G _m = Agregasi Indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender						
41	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut	79,31	79,59	79,94	80,29	80.71	
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,3400 \times IKA) + (0,4280 \times IKU) + (0,1040 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,099 \times IKAL)$ IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKEG : Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	79.55	80,24	81,1	81,95	82.98	





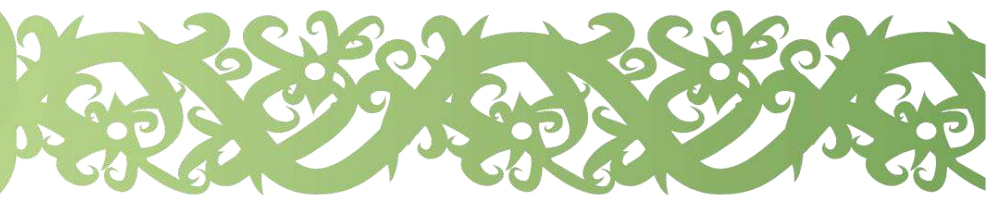
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		IKAL : Indeks Kualitas Air Laut						
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya	13,89	25,12	39,64	47,18	50	



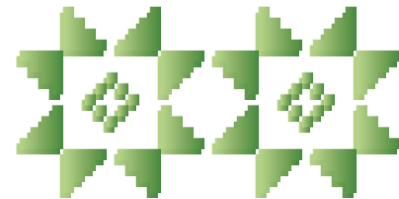


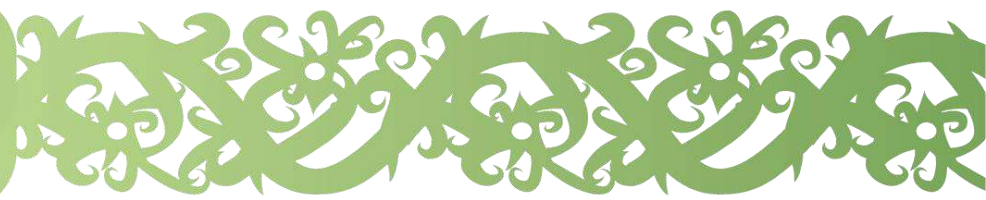
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)	24,92	44,26	68,73	74,6	80	



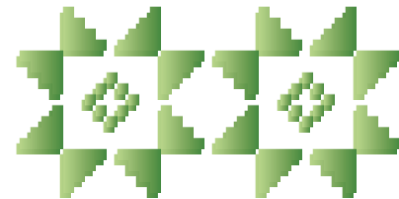


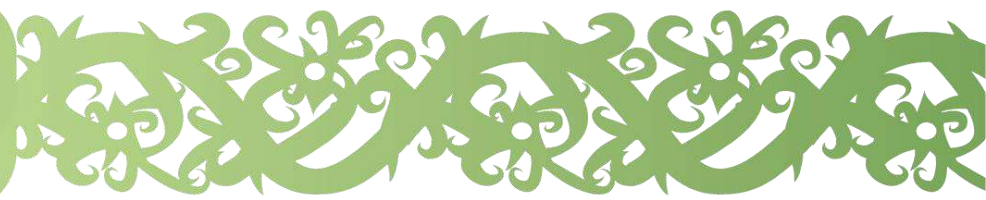
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)						
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	$PRTL = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	37,76	57,65	81,1	93,97	100	



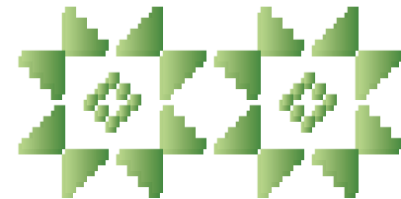


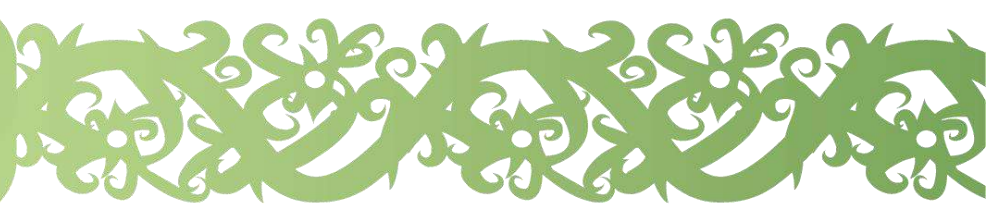
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
		JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya						
43	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevelence of Undernourishment</i>) (%)	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam sutau populasi tertentu.	11,67	9,87	6,17	4,5	0,29	
	Kapasitas Air Baku (m³/detik)	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumbet air lainnya.	1,52	2,05	3,15	3,42	3,73	
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP : Presentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.	35,34	54,55	81,42	96,88	100	
44	Indeks Risiko Bencana	$IRB = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	136,28	115,47	110,85	106,42	102,16	





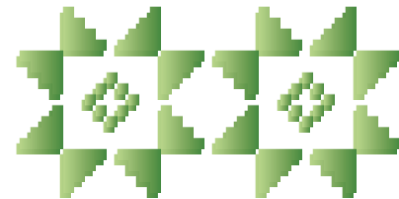
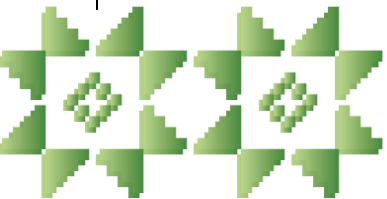
No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target				
			2025	2029	2034	2039	2045	
45	Indeks Kualitas Udara	1. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran; 2. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota; 3. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota; 4. melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;	79.9	80,7	81,7	82,7	83.9	

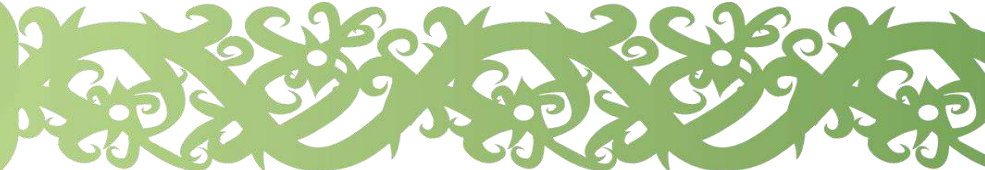




No/ Kode	Indikator	Definisi Operasional	Baseline	Target			
			2025	2029	2034	2039	2045
		5. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka - Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi - Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka - Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kab/kota - Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kab/kota					
	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemar (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij}, di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (C_i/L_{ij})_M adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} dan (C_i/L_{ij})_R adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut: - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika PI_j ≤ 1,0 - Tercemar ringan jika 1,0 < PI_j ≤ 5,0 - Tercemar sedang jika 5,0 < PI_j ≤ 10,0 - Tercemar berat jika PI_j > 10,0 Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sementara bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.	79,32	80,12	81,12	82,12	83,32

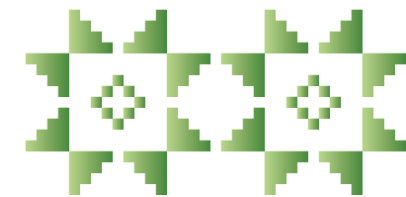
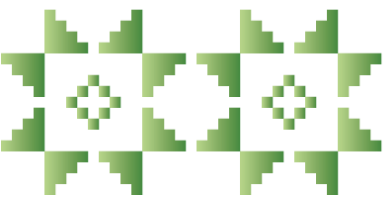
Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024





Tabel 5.7. Penyeragaman 45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Seruyan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025-2045

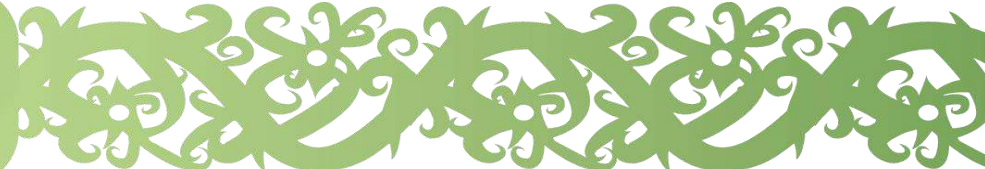
Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan		
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target	
			2025	2045				2025	2045				2025	2045
IE1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,4	80	KT1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	79,09	SM1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,8	79
	2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	115	16		2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	190	16		2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	165	16
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	13,5	5			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	20,6	5,5			Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	20,6	5
	3	Insiden Stunting (Per 100.000 Penduduk)	274	76		3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	66	95		3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%) (<i>Treatment Coverage</i>)	65,7	95
							Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	87,37	98			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	80,15	98
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,5	99,5	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,5	99,5			
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran			KT2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	14,29	64,29	SM2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	75,7	100
		a. Rata-Rata Nilai Pisa					Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	7,14	64,29			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)	73,56	100



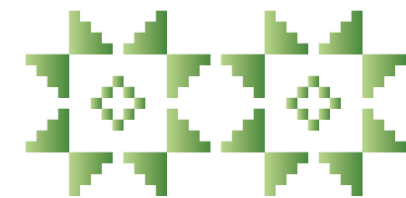
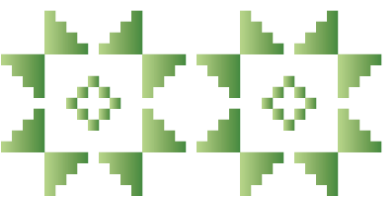


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

Tahun 2025-2045



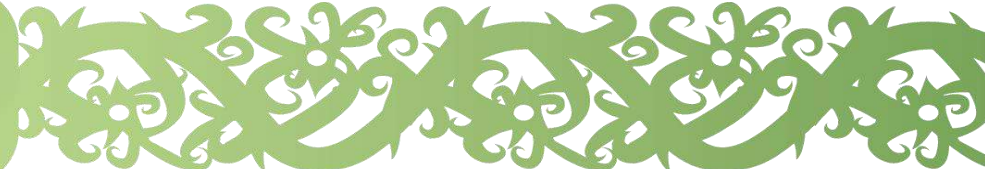
Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan		
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target	
			2025	2045				2025	2045				2025	2045
		a-i Membaca	396	485			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	39,69	69,61			Presentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)	37,62	100
		a-ii Matematika	404	490			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi (%)	27,22	59,62			Presentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	60,52	100
		a-iii Sains	416	487			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,27	93			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,27	93
		b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,46	12			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,41	11,95			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,35	11,94 - 11,99
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,37	14,81			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,01	14,4			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	14,43
	6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,23	13,1		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,23	13,1
	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,87	75	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,82	85	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	30,65	75		
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,61	0,58	SM3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,36	0,3
	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	43,97	94,06		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,97	94,06
	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	60		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	40	80		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	46,99	80
IE4. Iptek, Inovasi, dan	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	KT4. Iptek, Inovasi, dan	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,76	27	SM4. Iptek, Inovasi, dan	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	31,92	40



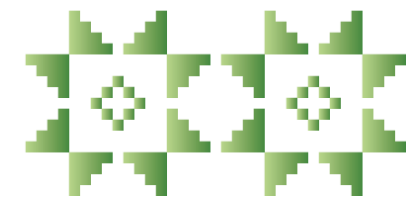
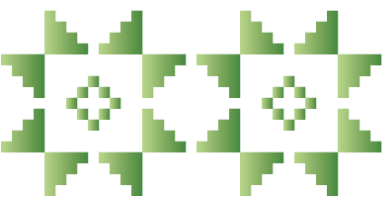


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

Tahun 2025-2045



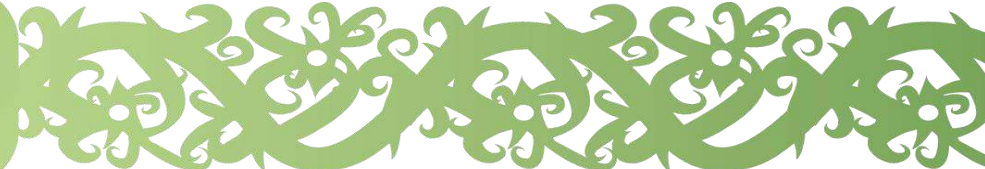
Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan																										
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target																									
			2025	2045				2025	2045				2025	2045																								
Produktivitas Ekonomi	12	Pegembangan Pariwisata			Produktivitas Ekonomi	12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,94	3,29	Produktivitas Ekonomi	12	Rasio PDRB Penyediaan Akonomodasi Makan dan Minum (%)	1,18	3																								
		a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	5,47	13,68																													
		b. Devisa Pariwisata (Milira USD)	18	100																																		
	13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,9	11		13					Indeks Daya Saing Daerah	3,13	4,7	13	Indeks Daya Saing Daerah	2,96	4,7																					
	14	Produktovitas UMKM, Koperasi, BUMN	1,3 (2019)	5			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	15,19	18,98									Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	11,68	17,55																		
																					Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	2,9 (Agustus 2022)	8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,9	4,1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	2,7	8									
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)					1,1 (2021)	10	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	8,71	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,54				8																	
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)																												Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,62	3,61	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,89	5,22
		Return on Asset (ROA) BUMN (%)																																				
	15	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	52		90	15	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	52		90	15	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan (%)	45,22	66																							
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)														55,4	70	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,03	66	16	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan (%)	45,22	66													
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK				17	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,59	4,61		17	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,92	4,61																								
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%) PDB)	0,28 (2020)	2,2 - 2,3																																		
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)	75 (2020)	30 Besar																																		
	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				KT5. Penerapan	18	Indeks Ekonomi Hijau Daerah		80,88	93,3	KT5. Penerapan	18	Nilai Tukar Petani (NTP)	100	100																					
a. Indeks Ekonomi Hijau			70.8	90.65		1.89				3																												



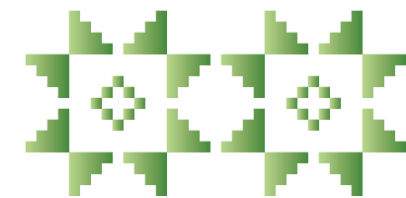
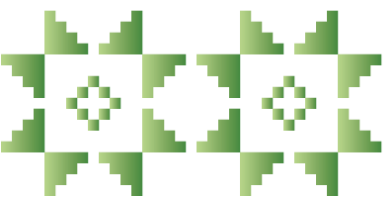


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

Tahun 2025-2045



Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan				
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target			
			2025	2045				2025	2045				2025	2045		
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	Ekonomi Hijau dan Biru		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	17	78,62	Ekonomi Hijau dan Biru		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan				
IE6. Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	51	20 Besar	KT6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	7,5	SM6. Tranfromasi Digital	19	Persentase Rumah Tangga Terakses Internet	87	99		
							Indeks Literasi Digital	3,7	4,6							
IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik (% PDB)	16,9 (2019)	8	KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,28	3,35	SM7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rp)	3.634.451	14.048.750		
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	27,2		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,5	39,33		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,84	35		
	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26	40		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	45,6	51,33		22	Ekspor Barang dan Jasa (%)	16,95	51,53		
IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,53	100	SM8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	51,18	100		
		a. Proporsi Kontribusi PDRb Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%)	44,58	48,92												
		b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64	100			Persentase Desa Mandiri (%)	1,61	13,41			Persentase Desa Mandiri (%)	21,64	50		
		c. Persentase Desa Mandiri (%)														
IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100	SM9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70	90		
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik	2,34	5		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik	2,9	5		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	5		
	26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5		26	Indeks Pelayanan Publik	2,5	5		26	Indeks Pelayanan Publik	2,5	5		
	27	Anti Korupsi				27	Indeks Integritas Nasional	69,54	83,77		27	Survei Penilaian Integritas	70	92		
		Indeks Integritas Nasional	71,94 (2022)	96,98												
		Indeks Persepsi Korupsi	34	60												
IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan	28	Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84	KT10. Hukum Berkeadilan, Keamanan	28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	80	SM10. Hukum Berkeadilan, Keamanan	28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	80		





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

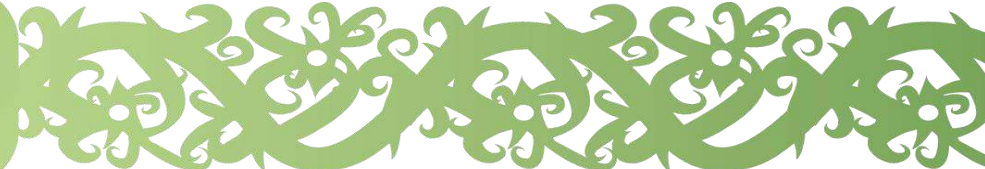
Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan		
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target	
			2025	2045				2025	2045				2025	2045
Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,59	86,97	Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	29	Angka Kriminalitas	5,02	3
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60 - 80)	Tinggi (>80)		30	Indeks Demokrasi Indonesia	70	85		30	Indeks Demokrasi	Sedang	Tinggi
IE11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDB (%)	10,0 - 12,0	18,0 - 20,0	KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,62	1,1	SM11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,8	1,1
	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1		32	Tingkat Inflasi (%)	3,7	3,1		32	Tingkat Inflasi (%)	2,4	1,6
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,19	62,9		33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,19	62,9
		a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200			Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	1,56					
		b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60			Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	5.388.734,85	48.213.830,84					
		c. Aset Asuransi/PDb (%)	9,1	20										
		d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120										
		e. Total Kredit/PDB	37,8	80 - 90										
	34	Inklusi Keuangan (%)	91	98		34	Inklusi Keuangan (%)	87,74	98,36		34	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank (%)	87,74	98,36
IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4 (2023)	75,0 - 80,0	KT12. Birokrasi Ideal	35	Indeks Reformasi Birokrasi	65	91	SM12. Birokrasi Ideal	35	Indeks Refomasi Birokrasi	69	90
	36	Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2023)	45		36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71	92		36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71	92
							Nilai Maturitas SPIP	3,16	4,2			Indeks Maturitas SPIP	3,16	4,2
IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,13	71,75	SM13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Muatan Lokal (%)	70,00	90,00
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,1		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	87,52		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	88,5
IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	KT14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,05	70,77	SM14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	70	91
	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,516	0,266		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,49	0,23



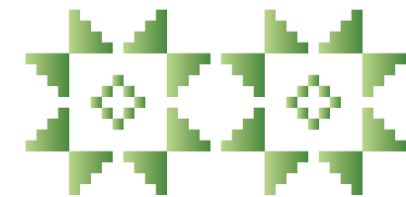
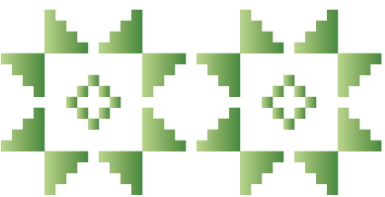
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERUYAN

Tahun 2025-2045



Arah Pembangunan (IE)	No	IUP RPJP Nasional			Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPD Prov. Kalimantan Tengah			Arah Pembangunan (SM)	No	IUP RPJPD Kab. Seruyan		
		Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target	
			2025	2045				2025	2045				2025	2045
IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,25 (2020)	0,7	KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,667	SM15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	41	Indeks Kualitas Lahan	79.31	80.71
	42	Kualitas Lingkungan Hidup				42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	82,65		42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79.55	82.98
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42	76,12			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,16	50			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13,89	50
		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7	85			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,92	80
		c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	38	100			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	37,76	100
IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			KT16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	718	2.225	SM16. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	43	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevelence of Undernourishment</i>) (%)	11,67	0,29
		i. Ketahanan Energi					Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	183	110					
		ii. Prevelensi Ketidakcukupan Pangan	6,2	2,1			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	8,5	2,64					
		iii. Ketahanan Air					Kapasitas Air Baku (m³/detik)	1,52	3,73					
		Kapasitas Tampung Air (m³/kapita)	63,45	200			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,34	100			Kapasitas Air Baku (m³/detik)	1,52	3,73
		Akses Rumah Tagga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100								Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,34	100
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB			0,14	0,11	KT17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			44	Indeks Risiko Bencana	94,85
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				45	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	27,61	64,32		45	Indeks Kualitas Udara	79,90	83,90	
	a. Kumulatif		28,12	51,51		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	47,87	100			Indeks Kualitas Air	79,32	83,32	
	b. Tahunan		32,65	80,98										

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024





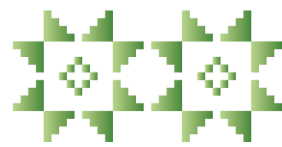
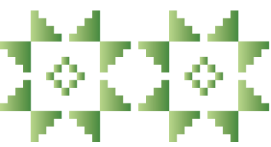
BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan program dalam RPJPD Kabupaten Seruyan, maka dijabarkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Kabupaten Seruyan.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan muatan RPJPD Kabupaten Seruyan menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dan terlaksana. Kaidah pelaksanaan melingkupi penyusunan dokumen rencana turunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksud dalam kaidah pelaksanaan ini termuat sebagai berikut:

1. Setelah pengesahan dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan dan penerbitan Peraturan Daerah, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam bentuk RPJMD dan perencanaan pembangunan jangka pendek tahunan dalam bentuk RKPD. Proses penyusunan dan substansi dalam dokumen-dokumen tersebut harus mengacu dan mempertimbangkan target dan arahan yang tercantum dalam RPJPD.
2. Muatan RPJPD Kabupaten Seruyan juga harus menjadi acuan dan pertimbangan bagi penyusunan dokumen sektoral yang dilakukan oleh perangkat daerah dan sektor-sektor yang menjadi kewenangannya.
3. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam RTRW Kabupaten Seruyan beserta dokumen rencana turunannya demi keselarasan perwujudan ruang di masyarakat.



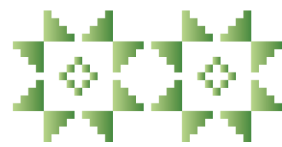
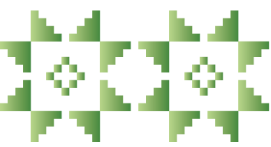


4. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala setiap tahunnya untuk melihat progres pencapaian target di masing-masing tahun.
5. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahunan untuk mengetahui pencapaian target pembangunan serta peninjauan akan kebutuhan perbaikan pada dokumen RPJPD. Evaluasi dan peninjauan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko pembangunan daerah, provinsi, dan nasional sebagai upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan.
6. Pelaksanaan seluruh kebijakan yang termuat dalam RPJPD harus dilaksanakan dengan pelibatan multi-pihak yang mencakup pemerintah daerah, instansi pemerintah provinsi dan pusat, akademisi, pelaku usaha, media masa, organisasi kemasyarakatan serta elemen masyarakat di Kabupaten Seruyan.

6.2. Kaidah Pembiayaan Pembangunan

Sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian target dan implementasi arahan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Seruyan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Seruyan harus berasal dari sumber yang baik, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lainnya yang sah.
2. Kaidah pembiayaan pembangunan yang lebih terperinci harus disertakan dalam substansi RPJMD yang merupakan pejabaran 5 (lima) tahunan dari dokumen RPJPD ini.
3. Sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah demi mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Seruyan.
4. Sumber pembiayaan pembangunan lain, baik dari APBN maupun sumber dana lainnya yang sah diwujudkan melalui inovasi kerjasama antar instansi vertikal maupun horizontal. Hal ini merupakan perwujudan dari keterlibatan

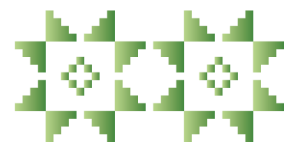
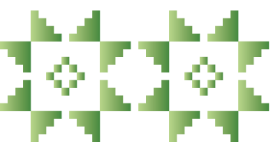


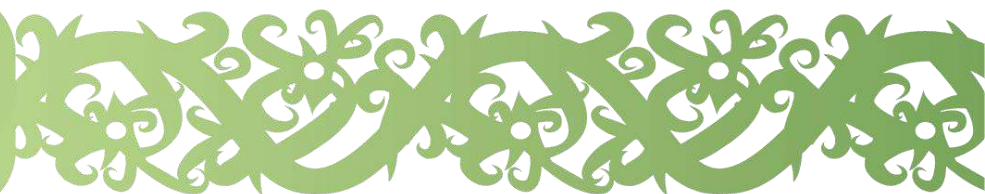


multi-pihak dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Seruyan.

6.3. Skema Pemantauan, Peninjauan Kembali, dan Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045

Skema pemantauan, peninjauan kembali, dan evaluasi menjadi hal penting untuk mencapai proses pembangunan yang adil, beretika, dan demokratis. Pemantauan adalah cara untuk mengidentifikasi apakah pembangunan sudah sesuai dengan arah kebijakan; peninjauan kembali adalah cara untuk menata kembali proses pembangunan ketika terjadi *force majeure* pada periode berjalan; dan evaluasi adalah cara untuk menilai keberhasilan proses pembangunan seperti yang telah direncanakan. Ketiga proses tersebut juga bertujuan untuk memastikan perumusan RPJPD telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Tujuan lainnya adalah menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah dipedomani dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD kabupaten. Tabel 6.1. menyajikan detail ketiga proses tersebut.





Tabel 6.1. Skema Pelaksanaan Pemantauan, Peninjauan Kembali, dan Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045

No	Jenis	Waktu						Target	Pelaksanaan		
		2025	2029	2034	2035	2040	2045		Forum Pelaksanaan	Pelaksana	Luaran
1	Pemantauan	V	V	V	V	V	V	Penyelarasan perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dengan RPJPD provinsi dan RTRW kabupaten serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya; sasaran pokok dan arahan kebijakan RPJPD dipedomani dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD kabupaten.	Forum Pemantauan Lintas OPD	Internal Pemerintah Daerah Antar-OPD	Laporan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
									Forum Pengendalian Pembangunan Daerah	Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	
2	Peninjauan Kembali (jika diperlukan)		V	V	V	V		Review terhadap dokumen RPJPD dapat dilakukan jika terjadi kondisi <i>force majeure</i> yang tidak bisa terhindarkan pada periode berjalan untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.	Forum Mitigasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Internal Pemerintah Daerah Antar-OPD serta Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	Laporan peninjauan dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan di dalam dokumen RPJPD atas <i>force majeure</i> yang terjadi
3	Evaluasi		V	V	V	V	V	Evaluasi dilakukan untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sebelum proses perencanaan RPJPD periode selanjutnya dilaksanakan.	Forum Evaluasi Lintas OPD	Internal Pemerintah Daerah Antar-OPD	Laporan evaluasi atas proses dan capaian pembangunan mengacu pada RPJPD
									Forum Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemangku kepentingan daerah dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, media, dan pihak terkait	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

